
SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 22, No. 1, Maret 2020

Editor	: Asep Sumaryana
Editor Bagian	: Suwandi Sumartias Sulaeman Rahman Nidar Agus Nero Sofyan Munadjat Rd. Ahmad Buchari Yoga Bestari Anissa Lestari Kadiyono Nia Kurniati Asep Agus Handaka Suryana Ella Lesmanawaty Wargadinata Linda Sunarti
Manajer Jurnal	: Usep Sahrudin U. Santosa Kusumah
Sekretariat	: Trisatya Yono Yugiono Lala Adilla Nur Dodih Firmansyah

Alamat Penerbit / Redaksi:

Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran
Graha Kandaga (Perpustakaan) Jatinangor Lt. 4
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor
Telepon/Fax (022) 842 88806 ext. 3806 dan E-mail: sosiohumaniora@yahoo.co.id
website: <http://sosiohumaniora.unpad.ac.id/user>

(Terbit 3 Kali dalam Satu Tahun: Maret, Juli dan Nopember)

PERINGKAT AKREDITASI SINTA 2

**Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3/E/KPT/2019**

Terindeks di:



DAFTAR ISI

SOSIOHUMANIORA

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora

Journal of Social Sciences and Humanities

Volume 22, No. 1, Maret 2020

The Effect of Mindset Personal on Behavior of Internet Entrepreneurship Students of Universitas Putra Indonesia YPTK Padang (Muharika Dewi, Erna Susanti, Rina Susanti, Zefri Yenni, dan Eliza) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.25625	1 - 7
Coffee and Identity: Consume Coffee, Build Identity, Maintain Variety on Palintang Community West Java (Rahman Latif Alfian, Budiawati Supangkat Iskandar, dan Johan Iskandar) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24424	8 - 16
Quality of Work Life, Organizational Commitment and Turnover Intention in Account Officer of Micro Finance Company (Adinna Astrianti, Mukhamad Najib, dan Bagus Sartono) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.23121	17 - 25
Peran Kearifan Lokal Kuma dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Perempuan Dayak Banyadu (Benedhikta Kiky Vuspitasari, dan Angelus Ewid) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24078	26 - 35
Grice's Cooperative Principles Violation in the Communication of Children With Autism (Dian Wahyunianto, Djatmika, dan Dwi Purnanto) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24378	36 - 45
Komunikasi Internal dalam Membangun Kohesivitas Kelompok Pegiat Wisata di Kabupaten Pangandaran (Iriana Bakti, Suwandi Sumartias, Trie Damayanti, dan Aat Ruchiat Nugraha) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.21144	46 - 54
Model of Gawai Dayak Based-Social Capital in the Border of Sajingan Besar of West Kalimantan (Herlan and Elyta) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.26042	55 - 63
Penentuan Wilayah-Wilayah Sentra Pengembangan Ternak Kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Achmad Firman dan Obed Haba Nono) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.23250	64 - 71
Open Museum as a Tool for Culture Sustainability: Prambanan Temple Study Case (Munadjat Wardoyo dan Rilla Oktoviani Zef) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.23786	72 - 78
Model Pembelajaran Kewirausahaan Kreatif melalui Praktek Usaha dalam Menumbuhkan Kreatifitas dan Inovatif Mahasiswa (Nining Harnani, Dodi Tisna Amijaya, dan Luthfi Setiadiwibawa) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24510	79 - 87
Happiness and Working Hours in Indonesia (Bayu Kharisma, Sutyastie Soemitro Remi, Ferry Hadiyanto, dan Ghefiran Abdurrahimdzan) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24248	88 - 95
Kebijakan Keamanan Pangan Indonesia: Analisis Kebijakan Impor Sapi dan daging Sapi dari Australia Periode 2013-2017 (Abdal, dan Ismail) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.23975	96 - 104
Kata Majemuk pada Jargon Sneakers Berbahasa Inggris dalam Komunitas Sneakerhead IST (Indonesia Sneakers Team) Bandung (Syifa Wasilatul Fauziyah, Sugeng Riyanto, dan Agus Nero Sofyan) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.22768	105 - 113
Diskursus Perizinan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus Kabupaten Kutai Kartanegara (Faris Rahmadian, Arya Hadi Dharmawan, dan Rilus A. Kinseng) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.21792	114 - 124
The Analysis of Socio-Economic Characteristic Impacts on Child Educationin Rural Households (Herdiyanti, dan M. Faisal Akbar) DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i1.24064	125 - 132

PENGANTAR REDAKSI

Dalam Volume 22 Nomor 1 Maret 2020 ini terdapat 15 artikel. Kendati tidak bersentuhan dengan covid-19 yang tengah menyerang, namun dapat dirasakan manfaatnya untuk dapat dijadikan panduan atau bahan renungan bersama. Dikatakan tidak bersentuhan dengan covid-19 mengingat rentetan seleksi yang panjang sehingga telah tersedia artikel tersebut ketika negeri dan dunia ini dilanda pandemic. Boleh jadi tulisan Muharika, dkk membedah Aspek Psikologis Yang Berkaitan Dengan Enterpreneurship Siswa. Demikian halnya Rahman dkk mencoba membedah Perkopian yang menunjukkan identitas tertentu yang patut dicermati dengan baik pula.

Urusan keuangan dan akuntansi (Adinna, dkk) juga menjadi bacaan yang patut dikritisi ketepatannya. Demikian halnya Kearifan *Local Kuma* (Benedhikta, dkk) juga disuguhkan untuk diserap esensinya ditengah gemerlap modernisasi. Mendampingi tulisan tersebut ada juga prinsip *Grice's Cooperative* dalam komunikasi (Dian, dkk) menjadi tulisan lain yang menetengahkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut. Masih seputar komunikasi yang dituliskan Iriana, dkk walaupun beda konteks namun tetap menarik untuk disimak hasil risetnya.

Sejumlah tulisan lainnya, seperti tentang Model Gawai di Dayak (Herlan, dkk) Penentuan Wilayah Pengembangan Ternak (Ahmad, dkk) *Open Museum* (Munadjat, dkk), Model Pembelajaran Kewirausahaan (Nining, dkk), Kebijakan Keamanan Pangan (Abdal, dkk) juga menjadi bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan bahan kritikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Ditambah dengan *Happines and Working Hours* (Bayu, dkk) semoga dapat menambah kebahagiaan pembaca ditengah pandemic yang belum kunjung berakhir.

Tiga tulisan lainnya berkenaan dengan kebahasaan “Jargon *Sneakers*” karya Syifa, dkk juga bisa menemani pembaca kerja di rumah. Disamping itu, Diskursus Perizinan (Faris, dkk) serta *The Analysis of Sosio-economic* (Herdiyanti, dkk) dapat menjadi bacaan berharga. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca dalam artikel yang terbit pada edisi kali ini.

Selamat mengkritisi artikel yang ada, tetap di rumah dan tetap berdoa untuk keselamatan bersama, serta semoga pandemic segera berlalu. Aamiin YRA

Hormat kami,

Dewan Redaktur

THE EFFECT OF MINDSET PERSONAL ON BEHAVIOR OF INTERNET ENTREPRENEURSHIP STUDENTS OF UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG

Muharika Dewi¹, Erna Susanti², Rina Susanti³, Zefri Yenni⁴, dan Eliza⁵

¹Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan,

^{2,3}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer

⁴Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang - Sumatera Barat, Indonesia, Telp (0751) 776666

E-mail: mkea2010@gmail.com

ABSTRACT. The importance of understanding mindsets to direct behavior in internet-based entrepreneurship is the effort in bringing entrepreneurial learning processes close to changes in entrepreneurial behavior. This study aims to determine the grouping of students' mind sets in two growth and fixed categories, knowing the description of mind set content and internet entrepreneurial behavior in students, knowing the differences in internet entrepreneurial behavior based on student mindsets, knowing the correlation between mind set and internet entrepreneurial behavior, then know the contribution of mindset to internet entrepreneurial behavior. This research method with a quantitative approach, using a likert scale questionnaire instrument, the sample is students registered at UPI YPTK Padang in 2018/2019 academic year totaling 148 people, sampling from the population is done by purposive sampling technique, data analysis with percentage techniques in describing data, independent test sample t test for different tests, pearson correlation product moment analysis for testing the relationship of variables and the square of r for testing the contribution. The results of the analysis state that 45% of students with a fixed mind set and 55% with a growth mind set, students with a growth mind set have better internet entrepreneurial behavior with an average of 86.82%. Hypothesis testing states that there are differences in student internet entrepreneurial behavior based on personal mindsets, there is a fairly strong correlation between mind set with internet entrepreneurial behavior, with a contribution of 20.4%. It is proven that students with growth mindsets have higher behavior in internet entrepreneurial activities, therefore to increase the ability and interest of students in entrepreneurship must start from the approach to the correct mindset about entrepreneurship.

Key words: Mindset Growth; Fixed Mindset; Entrepreneur Technology; Entrepreneur Behavior

PENGARUH MINDSET PERSONAL TERHADAP PERILAKU WIRAUUSAHA INTERNET MAHASISWA UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA 'YPTK' PADANG

ABSTRAK. Pentingnya memahami *mindset* untuk mengarahkan perilaku dalam wirausaha berbasis internet adalah upaya dalam mendekatkan proses pembelajaran wirausaha pada perubahan perilaku wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokan *mindset* mahasiswa pada dua kategori *growth* dan *fixed*, mengetahui deskripsi konten mind set dan perilaku wirausaha internet dalam diri mahasisiwa, mengetahui perbedaan perilaku wirausaha internet berdasarkan mind set mahasiswa, mengetahui korelasi antara *mindset* dan perilaku wirausaha internet, kemudian mengetahui kontribusi *mindset* terhadap perilaku wirausaha internet. Metode penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan instrumen angket berskala likert, sampel adalah mahasiswa terdaftar pada UPI YPTK Padang tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 148 orang, penarikan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, analisis data dengan teknik persentase dalam mendeskripsikan data, uji independent sample t-test untuk uji beda, analisis *pearson correlation product moment* untuk pengujian hubungan variabel dan kuadrat R (R^2) untuk pengujian kontribusi. Hasil analisis menyatakan bahwa 45% mahasiswa dengan *mindset fixed* dan 55% dengan *growth mindset*, mahasiswa dengan *growth mindset* memiliki perilaku wirausaha internet yang lebih baik dengan rerata 86,82%. Pengujian hipotesis menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku wirausaha internet mahasiswa berdasarkan *mindset* personalnya, terdapat korelasi yang cukup kuat antara *mindset* dengan perilaku wirausaha internet, dengan kontribusi sebesar 20,4%. Terbukti bahwa mahasiswa dengan *growth mindset* memiliki perilaku bertindak dalam aktivitas wirausaha internet yang lebih tinggi, karena itu untuk meningkatkan kemampuan dan minat mahasiswa dalam berwirausaha harus dimulai dari pendekatan terhadap *mindset* yang benar mengenai wirausaha.

Kata kunci: Pengaturan Pertumbuhan Pikiran; Pikiran Tetap; Teknologi Wirausaha; Perilaku Wirausaha

INTRODUCTION

Entrepreneurship is closely related to the formation of one's character. Planting a mindset of success in doing business is the main thing that actually must be done before providing approaches in entrepreneurial learning. The impression that entrepreneurship learning is to win a business opportunity and then become a pedagogue is a wrong thinking pattern that has been owned by students

in Indonesia. As a result, it is difficult for educators in the entrepreneurship field to give meaning to the importance of entrepreneurship itself. This is not optimal achievement of the objectives of entrepreneurial learning in shaping entrepreneurial behavior for students.

Mindset is beliefs that affect an attacking attitude, a set of beliefs or a way of thinking that determines a person's behavior and outlook, attitude and future. The mental attitude determines the response and meaning

of the situation (Benny Lo, 2014). Mindset affects the individual's condition to carry out an activity which is then also influenced by one's cognition in carrying out that activity (Gollwitzer, 1990). Entrepreneurial mindset can be divided into deliberative in impartial elaborative actions and more open and implemented (Mathisen & Arnulf, 2013; McMullen & Kier, 2016). The deliberative mindset is impartial and open minded. Thus Mindset is a Belief (Trust) or a group of beliefs or ways of thinking that affect the behavior and attitudes of a person who will determine the level of success of his life.

Mindset is a belief that is in a person to make efforts or something that is permanent and cannot be changed (Chrisantiana & Sembiring, 2017). Self-confidence will make someone continue to learn and try to improve their abilities (Dweck, 2006). Therefore, to be able to form the ability in entrepreneurship, it is important to instill confidence in the right mindset about entrepreneurship.

Mindset is a determining factor for the existence of behavior and actions in carrying out entrepreneurial activities, especially in the 4.0 industrial revolution. The mindset of self-employment in forming a trust that is a driving force is student entrepreneurial activity, having a mind set influences student behavior in entrepreneurship. Carol Dweck, who is famous for the growth mindset theory in 2015, states that mind set is how someone lives their abilities, this is the key to motivation and achievement. The main meaning of this study is that if a student's mindset is changed, achievement will be improved. If related to the study of entrepreneurship, ideally if the student mindset about entrepreneurship is a growth mindset with the theory that basic quality is something that can be developed through business, it will form an entrepreneurial achievement in students. However, if beliefs settle passively and resign themselves to failure will have an impact on the low achievement achieved in entrepreneurship.

The problem of unemployment is a trend that weakens economic development in many countries. It also impedes personal and family welfare, entrepreneurial career development is a solution that is considered practical in overcoming the problem of unemployment. Entrepreneurship studies in recent decades have been the focus of research in most countries (Hindle & Moroz, 2010; Schildt, 2012; Welter & Lasch, 2008). In many findings stated that entrepreneurship has a role in alleviating poverty, increasing income and economic growth, job creation (Romer, 1994). The main characteristic of an entrepreneur's excellence is his innovation, creativity in a product or service so that he is able to have an advantage that has more value. Creative thinking patterns that can be formed through habituation in life will have an impact on one's creative actions (McGrath & MacMillan, 2000).

But how can an entrepreneurial career develop if the mindset develops in an entrepreneurial career not formed within students. For that reason, to find out whether entrepreneurial activity can be influenced by the mindset within students, a research is needed to determine the influence of personal mindset on internet technology-based entrepreneurial activities, to know the relationship and contribution of mindset to internet entrepreneurial behavior shown by UPI YPTK Padang students.

METHODS

The method used in this research is the quantitative method is one of the efforts of scientific inquiry (scientific inquiry) based on the philosophy of logical positivism (logical positivism) which operates with strict rules about logic, truth, laws, and predictions (Watson, in Danim 2002). The focus of quantitative research is identified as a work process that takes place in a concise, limited and sort out problem into a part that can be measured or expressed in numbers. The quantitative approach emphasizes the existence of variables as research objects and these variables must be defined in the form of the operationalization of each variable. Reliability and validity are absolute requirements that must be met in using this approach because these two elements will determine the quality of research results and the ability to replicate and generalize the use of similar research models. Furthermore, quantitative research requires a hypothesis and testing which will then determine the next steps, such as determining the analysis techniques and statistical formulas that will be used. Also, this approach gives more meaning in relation to interpretation of statistical figures rather than linguistic and cultural meanings. The steps of quantitative research are the operationalization of the scientific method by taking into account scientific elements. Quantitative research as a scientific activity begins with a problem, refers to theories, suggests hypotheses, collects data, analyzes data, and makes conclusions. Quantitative research begins with a problem that can be extracted from empirical and theoretical sources, as a preliminary research activity. In order for problems to be found properly they need empirical facts and are accompanied by mastery of the theory obtained from studying various relevant literature. Research is carried out systematically, empirically, and critically about phenomena guided by theories and hypotheses. Research activities begin by identifying problems or issues that are important, actual and interesting. And, the most important is the benefits generated when the problem is examined. Problems can be explored from various empirical or theoretical sources as preliminary research activities (pre-research). In order

for problems to be found properly empirical facts need to be accompanied by mastery of the theory obtained through the study of various relevant literature. In the next stage, research sees the goal as a problem. Problems that have been found are formulated in a problem statement. In general the formulation of quantitative research problems is arranged in the form of questions. The formulation of the problem is the determination of the factors or aspects related to the scope of the study study.

In practice the factors and aspects related to the study of problems are numerous and complex. Therefore it is necessary to limit only the dominant factors or aspects. Research divides the problem into sub-problems that can be managed in the sense that it is feasible and affordable to study. Each sub-problem is searched for possible specific answers in the form of an appropriate hypothesis. In this case a literature study is needed, namely the activity to study the theories that underlie research. In this activity empirical matters were also examined from previous studies. The research temporarily holds the hypothesis or questions until all data is collected and interpreted. In the next stage, the research is directed to look for data based on the formulation of the problem and the hypothesis stated earlier. In this case a research design is needed which contains the stages of research, research methods, data collection techniques, data sources (populations and samples), and the reasons why using these methods. Before data collection activities are carried out, instrument preparation and testing techniques must be determined which will be used for data collection. The data obtained were then analyzed using statistical techniques. The results of data analysis are findings that have not been given meaning. The meaning of the results of data analysis is done through interpretations that lead to efforts to overcome problems or answer research questions. In this stage the hypothesis is accepted or rejected. Interpretation is made by looking at the relationship between one finding and another. The conclusion is a generalization of the results of interpretation. The conclusions obtained are then created the implications and recommendations as well as suggestions for the utilization of research results. Furthermore, this research was conducted to student representatives from six faculties at Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Samples were taken based on purposive sampling techniques from the population of active college students in the 2018/2019 school year with a sample requirement of 148 students. The instrument used was a Likert scale questionnaire. Pretest measuring a student's mind set is done to group students into a growth mindset or fixed mindset. Then do the comparison of internet entrepreneurial behavior activities carried out by students using independent sample t-test for unpaired samples, then a correlation between mindset and internet

entrepreneurial behavior using pearson correlation product moment.

The mindset content content that becomes the valuer variable is 1) Confidence regarding intelligence, talent, and character, 2) Belief in challenges, difficulties and failures, 3) Beliefs about the impact of effort on self-development, 4) Confidence in criticism and input received from others, (Dweck, 2006). Meanwhile, the content of internet entrepreneurial behavior assessment is 1) Strong passion in the products it sells, 2) Understanding the desires of others (Empathy), 3) Ability to convince others with Communication, 4) Honesty, 5) Innovative, 6) Visionary, 7) Focus (Muharika & Mulyani, 2019).

RESULTS AND DISCUSSION

1. Student Classification based on Mindset

Based on the results of data analysis obtained from the Likert scale questionnaire with 20 questions to determine the grouping of students in two categories, namely Growth Mindset (score 100-51) and Fixed Mindset (score 50-0), it can be seen that there are 67 people (45%) students who have growth mindset categories and 79 people (55%) students have fixed mindset categories. Entrepreneurial mindset is the ability to feel, act and mobilize quickly, even in conditions of high uncertainty (Naumann, 2017). Entrepreneurs are always on the lookout for new opportunities, realize the scarce resources they have and can be utilized to benefit, adapt to developments by utilizing existing internal and external networks (Mc. Grath & Mac.Millan, 2000). The set of entrepreneurial sets is ways of thinking with competitive advantage in uncertainty situations, entrepreneurial mindset is the result of meta-cognitive awareness that forms "the ability to adapt thinking processes to changing contexts and task demands" (Ireland et al., (2001). Shepherd et al., (2010) states that the entrepreneurial mindset is the ability to quickly feel, act, and mobilize in response to decisions made under uncertainty to exploit opportunities Baron (2014) emphasizes the uniqueness created by entrepreneurs by the way they "think, reason, make decisions, plan, and set goals, formed by pe experience, knowledge, heuristics and networks. Mindset in students tends to be in the form of growth mindset with excellence in the formation of basic qualities in a person through the efforts made.

2. Student Mindset based on Growth Mindset and Fixed Mindset Variable Content Variables

After grouping students according to mindset, a statistical analysis is then performed to determine the percentage of mind set content values in each group of students. The results can be seen in the following Table 1:

Table 1. Student Content Mindset

Content	Fixed Mindset	Growth Mindset	Total
Confidence regarding intelligence, talent, and character.	42%	85%	65%
Confidence in challenges, difficulties and failures.	4%	63%	53%
Confidence regarding the impact of business on personal development.	43%	84%	65%
Confidence in criticism and input received from others.	35%	74%	58%

Sumber: Data Olahan SPSS V.26

Based on Table 1, it can be explained that the group of students with a fixed mindset has a positive mindset content of success with a percentage below 50%, while the mind set content that is formed on students growth mind set groups has a percentage value above 50%. In the total number of all students, the lowest total mindset content in the beliefs of challenges, difficulties and failures is at the percentage of 53%.

Students with high Intelligence Quotion (IQ) often do not have high achievement, and conversely some students who have low IQ often have high achievement (Hochanadel and Finamore, 2015). Dweck (2013) states that mindset is a belief, and he mentions two types of mindset, namely Growth Mindset and Fixed Mindset. Growth Mindset is the belief that one's basic qualities, like intelligence, are things that can be changed through certain efforts Duckworth and Dweck (Duckworth, 2016) conducted joint research to understand more deeply why some students managed to survive to achieve academic achievement, while others were unable to survive. Through research conducted by Duckworth and Dweck how one's fixed belief about failure is a permanent thing that can hamper academic success, Duckworth concludes that having a growth mindset can develop grit. (Dweck, 1999, 2007, 2010; Duckworth, 2007 in Hochanadel and Finamore, 2015). Carol Dweck began her research on mindset in the field of education to find that if students believe their abilities can change, then they will feel control over their achievements becoming greater and they will focus more on studying a material.

3. Student Internet Entrepreneurial Behavior

The results of statistical analysis to find out the percentage of internet entrepreneurial behavior values carried out by students in the group of students with growth mindset and fixed mindset group can be seen in Table 1 below;

Table 2. Student Entrepreneurial Internet Behavior based on Mindset

Konten	Fixed Mindset	Growth Mindset
Passion	79%	87%
Empathy	66%	87%
The ability to convince others through communication	57%	72%
Honesty	79%	85%
Inovation	78%	78%
Visionary	62%	88%
Focus	73%	81%
Rerata	70%	83%

Sumber: Data Olahan

The mean value shown in Table 2 above states that the group of students with fixed mind sets has 70% entrepreneurial behavior while the group of students with growth mindset has a higher average internet entrepreneurial behavior that is 83%. World economic development in the 21st century which is very dynamic requires the existence of creative young people as business people and movers through the use of technology.

Krisianto (2014) states that "the internet is a form of interactive communication and information media. The form of the internet is a network of computers connected throughout the world. The internet is used to send information between computers and other similar devices throughout the world, so that one can access and exchange information quickly ". An internet entrepreneur is someone who involves the great power of the internet to start and develop his business, both with the sale of physical goods or innovative modern services, a successful internet entrepreneur pays attention to several start-ups that involve a mixture of technological developments and traditional ways of doing business (Taylor, 2017). Gerald (2007) revealed that an internet entrepreneur is someone who has a large or small company that explores new business opportunities through the internet network, they make business decisions, create new businesses and employ others through business operations with the help of the internet. Lung (2016) states that internet entrepreneurs are a new generation of entrepreneurs who make efforts to become successful entrepreneurs by establishing an internet-based business. Stevens (2010) states that internet entrepreneurs are those who compete on the internet, by increasing the intensity of time to be able to be "hypercompetitive" in the face of changing nature of the fast-paced environment of doing business. Millman, W. (2009) states that internet entrepreneurs are those who are familiar with the internet technology culture in an effort to develop their business. Matlay (2004) notes that internet entrepreneurship refers to the act of establishing a new company especially in the internet economy. Kollmann

(2006) states that internet entrepreneurship consists of a new arrangement of companies with innovative business ideas in the internet economy in the 21st Century that is happening right now.

Internet entrepreneurship means the process of establishing a new company with innovative business in the information technology sector. Bennani (2014) suggested that internet entrepreneurs are entrepreneurs who invest in IT-based projects. (Bennani, 2014). Whereas Pourhossein and Omran (2014) state that Internet entrepreneurship is defined as ideas which basically use the Internet to strategically and competitively achieve vision, business goals, and objectives. Entrepreneurs or entrepreneurs use the World Wide Web (WWW) to interact and complete virtual transactions, both with other businesses and consumers / customers. An increasingly rapid development by entering the industrial era 4.0 or later the era of society 5.0, where, if society 4.0 allows us to access also share information on the internet. Society 5.0 is an era where all technology is part of humanity itself. The internet is not just to share information but to live life. Therefore personally must continue to explore their potential, so that they can face challenges in the future and compete healthily in all fields, especially in creating self-creativity and becoming a figure of innovation in accordance with the times.

4. Comparison of Student Internet Entrepreneurial Behavior based on Mindset

Students who have been grouped into two groups namely fixed mindset and growth mindset compared to their internet entrepreneurial behavior using the independent sample t-test formula with a significance level of 0.050. The results of the analysis can be seen in Table 3, as follows:

Table 3. Summary of Results Independent Sample t-test

Kelompok	Mean	SD	t-test	t-table	Sig.
Fixed Mindset N = 69	73.71	13.240	7.349	1.655	0.000
Growth Mindset N = 79	86,82	8.166	Hyphotesis Accepted		

Sumber: Data Olahan SPSS V.26

Based on the results of the analysis conducted to determine whether there are differences in internet entrepreneurial behavior in students with a fixed mindset and students with growth mindset, the price of t-count > t-table with df = 146 (7,349 > 1,655) means that there are differences in average results which means that between the two groups of students and the growth mindset group has a higher average score. Mc.Mullen and Kier (2016)

state that entrepreneurial mind is the ability to identify and take advantage of opportunities without regard to the resources that are currently under their control. Entrepreneurial mindset changes the status of individuals into entrepreneurs. Therefore an individual becomes an entrepreneur thanks to the state of his mind that allows him to analyze the world and the opportunities and possibilities it offers (Reed and Stoltz, 2011).

5. Correlation between Mindset and Internet Entrepreneurial Behavior

The next test is testing to find out whether there is a relationship between student mindset with internet entrepreneurial behavior which is done using the pearson correlation product moment formula. The results of the analysis that have been carried out can be seen in the following Table 4:

Table 4. Summary of Correlation Analysis Results

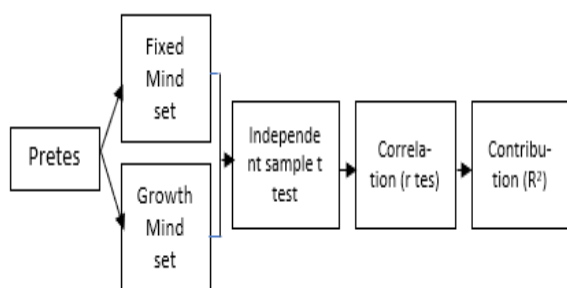
N	r-test	interval r	Sig.
148	0.452	0.400 – 0.599	0.000

Sumber: Data Olahan SPSS V.26

The results of the analysis using the Pearson correlation product moment formula that has been obtained obtained a r count of 0.452, this score is in the range of scores of 0.400 - 0.599 with the interpretation that the student mindset has a positive and meaningful relationship with internet entrepreneurial behavior conducted by the University of Putra Indonesia students “ YPTK “Padang and accepted at the 95% significance level. This means having a very strong connection that mindset greatly influences student internet entrepreneurship behavior.

Based on the results of correlation analysis that has been done it is known that the correlation is at r-count 0.452, this score has a contribution price of 20.4% which means that the mindset influences student internet entrepreneurial behavior by 20.4% which means that 79.6% is influenced by other factors. Entrepreneurial mind set is an entrepreneurial mindset about analyzing the world, its opportunities and possibilities, as well as understanding how an individual can contribute to the development and progress of the economic and social system and ultimately the conversion of ideas into action to achieve goals. Davis et al., (2016) states that entrepreneurial mind sets are a constellation of motives, skills, and thought processes that distinguish entrepreneurs from non-entrepreneurs. All definitions presented by various authors emphasize that the entrepreneurial mindset is closely related to thoughts, views and beliefs.

The research procedures carried out in this study can be illustrated in the following picture 1:



Picture 1. Mindset Framework

Sumber: Data Olahan SPSS V:26

The Thinking Flow Framework above illustrates that the pretest consists of a fixed mindset and growth mindset which is tested by independent sample t-test followed by correlation (r-test) and contribution (R²). This means a separate test between the personal mindset of the internet entrepreneurial behavior of students especially the Putra Indonesia University “YPTK” Padang. Likewise, the correlation (the relationship between personal mindset on entrepreneurial behavior is very strong which is shown from the processed data that has been done. Furthermore, the two variables contribute to each other which is well shown from the results obtained by 20.4%.

CONCLUSION

The research conducted concluded that from 148 students who were sampled from the student population of Putra Indonesia University “YPTK” Padang based on the results of the personal mind set test, it was found that there were 69 students with fixed mindset and 79 students with growth mindset. After being grouped by students, then testing the mindset content states that the fixed mindset group has positive content that is lower than the growth mindset group. Hypothesis testing results to find out whether there are differences in internet entrepreneurial behavior in the two groups of students with different mind sets stated that the different test hypotheses were accepted at a significance level of 95% and the group with growth mind set had an average internet entrepreneurial behavior higher than the group of students with fixed mindset. Correlation testing is to test whether there is a relationship between mindset and internet entrepreneurial behavior with a score of r which is in the range of positive correlation interpretation which is quite strong between the two variables, while the percentage of mindset contribution to internet entrepreneurial behavior shown by students is 20.4% and the rest is influenced by other factors not examined. The results of this study prove that the theory put forward by Dweck (2006) one’s mindset will affect attitudes, talents and intelligence and character, growth mindset (growth) mindset is important in determining the progress and development of one’s potential. It is proven that students with growth mind sets have the behavior to

act in higher internet entrepreneurial activities. This student has positive behavior in developing basic quality beliefs in himself that can be developed through effort. The results of the study recommend that to increase the ability and interest of students in entrepreneurship must start from the approach to the right mindset about entrepreneurship. Mindset is beliefs that can affect a person’s behavior, including entrepreneurial activities.

REFERENCES

- Baron, R.A. (2014). Cognitive foundations of Entrepreneurship. In *Essentials of Entrepreneurship. Evidence and Practice* (1st ed., pp. 3-58). Cheltenham: Edward Elgar
- Benny, L. (2014). *Who Wants To Be an Entrepreneurs Pegawai Juga Bisa Jadi Pengusaha*. Jakarta: PT. ELex Media Komputindo. Kompas Gramedia.
- Chrisantiana, T.G. & Sembiring, T. (2017). Pengaruh Growth dan Fixed Mindset terhadap Grit pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung. *Jurnal Humanitas*, 1 (2), 354-362,
- Danim, S. (2002), *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Davis, H., Hall, A. & Mayer, I.S. (2016). Developing a new measure of entrepreneurial mindset: reliability, validity, and implications for practitioners. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 68, (1), 21-48.
- Duckworth, A. (2007). Grit: Perseverance and Passion for Long-Term Goals. *Journal Of Personality & Social Psychology*. Volume 92, (6), 1087-1095.
- Duckworth, A. (2016). *Grit: The Power of Passion and Perseverance*. Scribner.
- Dweck, C.S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success* 1st edition. New York: The Random House Publishing Group.
- Dweck, C.S. (2015). Revisits the ‘Growth Mindset’. Education Week Friedenberg, Lisa. (1955). *Psychological Testing: Design, Analysis, and Use*. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Gerald, V.P. & F.Pfaff, J (2007). Internet Entrepreneurship and Economic Growth. *Journal of International Technology and Information Management*. 16, (3), Article 3, 34-44.
- Gollwitzer, P.M., Heckhausen, H. & Steller, B. (1990). Deliberative and Implemental Mind-Sets: Cognitive Tuning Toward Congruous Thoughts and Information. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59, (6), 1119-1127.

- Hindle, K. & Moroz, P. (2010). Indigenous entrepreneurship as a research field: developing a definitional framework from the emerging canon. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 6, (4), 357-385.
- Hochanadel, & Finamore. (2015). Fixed And Growth Mindset In Education And How Grit Helps Students Persist In The Face Of Adversity. *Journal of International Education Research-First Quarter*. 11 (1), 871-885.
- Ireland, R.D., Hitt, M.A., & Sirmon, D.G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. *Journal of Management*, 29, (6), 963-989.
- Kollmann, T. (2006). What is entrepreneurship? Fundamentals of company founding in the net economy. *International Journal of Technology Management*, 33, (4), 322-340.
- Krisianto, A. (2014). Internet untuk Pemula: Panduan Menggunakan Internet secara Produktif. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Lung, T.L. & Liang, S.K. (2016). Road To Initial Public Offerings (Ipo): A Case Of Internet Entrepreneur In Taiwan. *International Journal Of Science Research And Technology*. 2, (3), 9-14.
- Mathisen, J.E., & Arnulf, J.K. (2013). Competing mindsets in entrepreneurship: The cost of doubt. *International Journal of Management Education*, 11, (3), 132-141.
- Matlay H. & Martin, L.M. (2009), Collaborative and competitive strategies in virtual teams of e-entrepreneurs: a pan- European perspective, *Australasian Journal of Information Systems*. 16, (1), 99-115
- McMullen, J.S., & Kier, A.S. (2016). Trapped by the entrepreneurial mindset: Opportunity seeking and escalation of commitment in the Mount Everest disaster. *Journal of Business Venturing*, 31, (6), 663-686.
- McMullen, J.S. & Kier, A.S. (2016). Trapped by the entrepreneurial mindset: Opportunity seeking and escalation of commitment in the Mount Everest disaster. *Journal of Business Venturing*, 31, (6), 663-686.
- Millman, W.C. Wong, Z.L. & Matlay, H. (2009). Educating students for e-entrepreneurship in the UK, the USA and China. *Industry and Higher Education*, 23, (3), 243-252.
- Muharika D, & Mulyati, SR. (2019). Wirausaha Internet. Padang: CV. Muharika Rumah Ilmiah.
- Naumann, C. (2017). Entrepreneurial Mindset: A Synthetic Literature Review. *Entrepreneurial Business and Economic Review*, 5, (3), 149-172
- Pourhossein, M & Omran, S.K.. (2014). The Role of E-Entrepreneurship In The Net Economy of Developed And Developing Countries. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 3 (11a), 451-662.
- Reed, J. & Stoltz, P. G. (2011). Put your mindset to work. London: Penguin UK.
- Romer, P.M. (1994). The origins of endogenous growth. *Journal of Economic Perspectives*, 8, (1), 3-22.
- Schildt, H. (2012). The Field of Entrepreneurship: A Bibliometric Assessment. *Journal Administrative Science Quarterl*. 3, (3), 429-451.
- Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P.C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. *Journal of Business Venturing*, 25, (2), 217-229.
- Stevens, N. (2010). Online Trust & Internet Entrepreneurs: A Kantian Approach. Scholarly Commons Wharton Research Scholars Wharton School.
- Taylor, T. (2017). 10 Tips for the Beginning Internet Entrepreneur. <http://www.htmlgoodies.com/html5/slideshows/10-tips-for-the-beginning-internet-entrepreneur.html#fbid=YGdmTOoEeAU> (diakses pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Desember 2019 Jam 20.51 WIB)
- Welter, F. & Lasch, F. (2008). Entrepreneurship research in Europe: Taking stock and looking forward. *Journal Entrepreneurship Theory and Practice*, 32, (2), 241-248.

COFFEE AND IDENTITY: Consume Coffee, Build Identity, Maintain Variety on Palintang Community West Java

Rahman Latif Alfian,¹ Budiawati Supangkat Iskandar,² dan Johan Iskandar³

¹Freelance Researcher, Alumnus of Postgraduate of Anthropology, Faculty of Social and Political Science, Padjadjaran University.

²Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Science, Padjadjaran University. ,

³Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences and Postgraduate of Environmental Study (PSMIL & DIL) and Institute of Ecology (PPSDAL), Padjadjaran University.

E-mail: rahmanlatif927@gmail.com

ABSTRACT. This article discusses the Palintang coffee and its social, cultural and ecological impacts on the people of the Palintang Hamlet. Palintang hamlet is located in directly adjacent to the forest under the management of the State Forestry Corporation (*Perhutani*). Last fifteen years, the government began to intensify the cultivation of coffee plant in the Palintang hamlet. Palintang hamlet is located approximately 1,400 above sea level. As a result, coffee of Arabica plant (*Coffea arabica L*) grows well in the area. The purpose of this article is to elucidate at the impact of coffee on the social identity of the Palintang community. The method used in this study was ethnographic approach which aims to reveal meaning from the point of view which of cultural stakeholders. Some field research techniques, namely observation, deep interviews, and participant observation were applied in this study. The results of this study showed that the coffee cultivation in Palintang hamlet has been an important impact not only an economic, but also social and ecological aspects of the Palintang community. The community always highlight the distinctive characteristics of the Palintang coffee, even some people claim that Palintang coffee has a characteristic that no other coffee has. This process then makes coffee as one of the markers for the community of Palintang, because through coffee of the community members are known to other community groups. The distinctive characteristic of Palintang coffee also adds to the repertoire of varieties of archipelago coffee, especially those related to the character of coffee.

Key words: Identity construction; diversity; coffee; local knowledge; Palintang community

KOPI DAN IDENTITAS: Mengonsumsi Kopi, Membangun Identitas, Menjaga Ragam Pada Masyarakat Palintang, Jawa Barat

ABSTRAK. Artikel ini membahas mengenai kopi Palintang beserta dampak sosial, budaya, serta ekologisnya bagi masyarakat Kampung Palintang, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang. Kampung Palintang berbatasan langsung dengan hutan yang sekarang di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Lima belas tahun ke belakang, pemerintah mulai menggiatkan penanaman kopi di kampung Palintang. Kampung Palintang berada di ketinggian ± 1400 mdpl, membuat tanaman kopi jenis arabika tumbuh dengan baik di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kopi terhadap identitas sosial warga Palintang dan bagaimana dampak bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mengungkap makna dari sudut pemangku kebudayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman kopi di Kampung Palintang tidak hanya memberikan dampak secara ekonomi, tetapi juga memberi pengaruh pada aspek sosial dan ekologis bagi warga Palintang. Pada awalnya kopi hanya diproyeksikan sebagai komoditas yang meningkatkan perekonomian warga, meskipun demikian dalam perjalanannya terutama dalam pemasaran, warga secara sadar maupun tidak membentuk citra kopi Palintang. Warga selalu menonjolkan ciri khas kopi Palintang, bahkan beberapa warga mendaku bahwa kopi Palintang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki kopi lain. Proses ini kemudian menjadikan kopi sebagai salah satu penanda bagi warga Palintang, karena melalui kopi warga masyarakat dikenal kelompok masyarakat lain. Ciri khas kopi Palintang yang ditonjolkan juga menambah khasanah ragam kopi nusantara terutama yang berkaitan dengan karakter kopi.

Kata kunci: Konstruksi Identitas; Keanekaragaman; Kopi; Pengetahuan Lokal; Palintang.

INTRODUCTION

Coffee, a commodity that has a great influence on human life since it was first discovered (cf. Cotton, 1996). In fact, it was mentioned that in the course of human civilization only produced three important non-alcoholic drinks, namely tea leaf extract, cocoa bean extract, and coffee bean extract (Ukers, 2012). Coffee itself is the second most valuable commodity in the world after petroleum (Tucker, 2011). Growing coffee plants is increasing every year and tends to be increased, according to Tucker (2011), which is inseparable from the

ever-increasing coffee consumption marked by consumer culture, increased appreciation for high-quality coffee, and people's willingness to visit cafes or coffee shops to relax, doing assignments, socializing, or just tasting coffee. In Indonesia itself, coffee consumption habits and the meaning of coffee shops are shifting. The meaning of the coffee shop is shifting where coffee shops are not only a place to enjoy coffee but also a means of meeting, a place to work, as well as a means to get social status, and entertainment facilities (Anrinal, 2018).

The question that then arises is why coffee has survived and is so widely popular, not only where it has

grown, but also in a distant place? The first answer is caffeine which is the content of coffee beans. Caffeine itself has a significant function as a stimulant for the body and has an instant effect in providing the energy, awareness and adrenaline needed by humans. According to Parker and Austin (2011) caffeine is the most commonly used drug in the world because it causes a direct reaction to the body, and most of it is taken in the form of coffee. The second reason coffee is an important part of human life is the socio-cultural and economic factors that surround it. Its great influence on the human body in carrying out daily activities makes coffee plants from planting to becoming a drink cannot be released with the local knowledge of the people who cultivate it. Different environments with different understandings make every society have their own knowledge in cultivating coffee plants to become a drink. Tucker (2011) argues that coffee is a material substance, but growing coffee, drinking coffee, is a culture in which symbolic and social meanings are contained. Similarly, Parker and Austin (2011) also argued where they stressed that there is a great culture in every practice related to coffee because when talking about coffee it cannot be separated from other integrated practices such as association of conversation and brotherhood, political chatter, and others so.

Discussing culture, culture itself can be defined as everything that humans think, have, and do as members of society (Ferraro, 2010). Through culture, consuming coffee can confirm the identity of a group of people, affirm values, and affirm social ties (Tucker, 2011). Tucker further explained that the culture surrounding coffee (coffee culture) can unite actions, beliefs, and special knowledge to distinguish members (groups) from non-members. Coffee is a marker for the community holds it because in the cultural era, as we can now and very likely to see a world characterized by certain signs, a sign that can form the identity of groups or sub-groups that make them different from others (Kahn, 2016).

Understanding the identity and role that drives people to behave in a protective manner not only has “provocative” implications for research, but also has important practical implications (Clayton and Opotow, 2003). In addition, the discussion on identity also needs to get more attention from academics because identity is needed to drive people’s lives today which is marked by modernization, globalization, and nationalism (Retnowati, 2009). At the local level, Clayton and Opotow (2003) revealed that behavior related to the environment such as the environment, protection of nature, requires strong community identity related to identity at the private level, and collected a number of values that will be used controversially. no. Identity itself is always a dialectic between agreed and different (Jenkins, 2008). In this regard,

Stuart Hall (1990) explains that there are two ways to look at cultural identity, namely first through classification such as historical similarities, cultural similarities, and others. And the second through differences such as the significance that distinguishes one group from another. Referring to previous opinions, each community has a special significance seen in the wider community group to identify the identity of the community.

Some research on coffee that has been done previously discusses the history of coffee in the archipelago. For example, research on Coffee Production in Priangan in the 19th Century (Muhsin, 2017) which explained some of the characteristics of coffee in Priangan, the selling price of coffee in Priangan in the 19th century, and its impact on coffee farmers at that time. Research from Lasmiyati (2015) also discusses about Coffee in the Priangan XVIII-XIX Century, the study tells the journey of coffee planting and various policies made by the colonial government in growing coffee in West Java. In another social aspect, coffee research in West Java in particular also discusses the economic benefits gained by coffee farmers. For example, research on the Analysis of Java Preanger Coffee Farmer Business Income in the Margamulya Farmer Group Margamulya Village, Pengalengan District, Bandung (Audry and Djuwendah, 2018). Research from Widiyanto (2017) on the Activities and Time Out of Farmers in the Social Forestry Program in Ciamis, West Java also explains the advantages and advantages of coffee farmers when compared to cardamom farmers and papaya farmers.

Regarding the previous research, this paper is to elucidate the impact of coffee on the social identity of the Palintang community which is based on case study in Palintang Hamlet of Cipanjalu Village, Bandung West Java.

METHOD

Method used in this study was qualitative. This study focuses on the practice of a community member behavior which ethnographically would be displayed in the discourse of coffee construction into a social identity for the people of Palintang. Ethnography was used in this research which is based on the core of ethnography is an effort to pay attention to the meaning of the actions of events that are observed in the community groups (Spradley, 2007). The Palintang is presented as a locus where the process of identity construction is carried out by community of Palintang. Of course in its formation the Palintang identity does not become a monolithic locus, there is interaction with the locus outside the Palintang area. Palintang hamlet became the location of the study because since fourteen years ago, community members, initiated by Perhutani, began growing coffee in the forests

around Palintang hamlet. Coffee planting since then and continued to be added to the subsequent planting, more or less had an impact on the community. The first impact seen is economic impact, while the other impact is social influence. Gradually for fourteen years, coffee became a part of the life of the Palintang community. Coffee also has its own meaning in daily life. The Palintang community began to work in the coffee plantation sector, from gardens to post-harvest work. Previously, almost 90% of the people of Palintang worked as vegetable growers. At present the percentage starts to decrease as they move into coffee farmers. The community also began to process coffee up to the ready to use stage and some began to build simple coffee shops. These developments and changes have made Palintang Village interesting to study more deeply.

In this study the reading of the concept of culture is understood as being flexible, negotiable, fought for, relative, and subject to change (King and Wilder, 2012: 318). Culture that was formed was then seen as a differential culture that grew out of the continuous interaction between people, groups and the environment that constantly changes (Abdullah, 2015: 5). Furthermore, identity is understood as a cultural concept described earlier. Identity itself is formed by social processes, once acquired its form, identity is then maintained, modified, or even reshaped by social relations (Berger and Luckmann, 2013: 235). In other words, identity is not a fact that has been achieved, but is a “production” that is never finished, always in the process and always in representation (Hall in Rutherford, 1990: 222).

Through a description of the concept of culture and identity in the previous paragraph, some techniques, including observation, participation and participant observation, and deep interview were applied in this study. Regarding observation, researchers observed the environmental conditions of Palintang ecosystems, including the settlement, coffee garden, and forest. In addition, the researchers observed various activities of informants, including management of coffee farming consists of seed selection, land preparation, maintaining coffee tree, harvesting, coffee processing after harvesting, and marketing of coffee beans. The participant observations were undertaken by both observations and involving of the researchers with some activities of the management of the coffee farming system of Palintang (cf. Bernard, 1994).

Data collection was also carried out by depth interviews with informants. The deep interview was chosen because to collect historical data on Palintang coffee over times from last time to the present time, which in the past few years have been echoed as a marker of both the socio-economic and cultural aspects of community and biophysical aspects of Palintang community. The deep interviews were aimed for informants who consider

they knew in depth the data needed in this study. In this study, deep interviews were undertaken to several informal leaders (*sesepuh*), heads of coffee farmer groups (*ketua kelompok petani kopi*), male and female coffee farmers, coffee traders in Palintang, and village officials (*perangkat desa*). This interview aimed to complete and check research data obtained during the deep interviews. The interview model was often used by researchers when they were in a coffee shop, when they met with Palintang people who also enjoy coffee. This interview was also often used by researchers when observing coffee gardens, and when observing residence of the Palintang Village.

Analysis data involved cross-checking, summarizing and synthesizing from different sources, including observation, participant observation, and deep interview to build up a narrative account (cf. Newing et al. 2011; Iskandar 2018). Moreover, it made the narrative with focused on descriptive and analytical. Thus, the data analysis consists of four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The process was carried out repeatedly to get a certain pattern in the community studied. In conducting data analysis the flow was not always sequential because these steps are something intertwined at the time before, during, and after collecting data in a parallel form, to build general insights called analysis. Whereas in the data verification process, researchers used triangulation. Where the researcher compared the observational data with the data obtained at the interview. The researcher also compared interview data from one informant to the other informants.

Study site

This research was conducted in Palintang hamlet, Cipanjalu village, Cilengkrang sub-district, Bandung district, West Java (Figure 1).

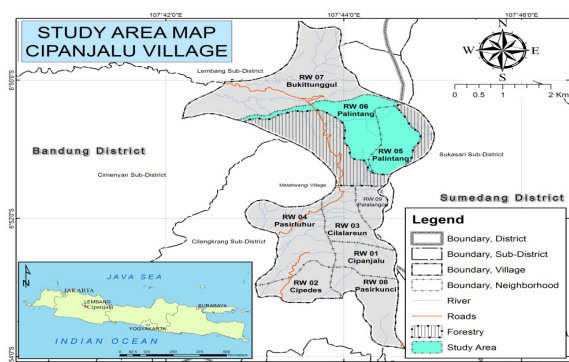


Figure 1. Study area of Palintang hamlet, Cipanjalu village, Cilengkrang sub-district, Bandung district, West Java

Source: Iskandar et al (2017)

Geographically Palintang is located approximately latitude 107°43'30"-107°44'00" North and longitude

6°45'15"-6°51'30" East. Palintang hamlet is situated about 8 km to the north of Ujung Berung, and is positioned approximately between 800 and 1,400 m above sea level. This hamlet is surrounded by pine forest (*Pinus merkusii*) and quinine (*Cinchona calisaya*) plantation. Administratively, Palintang hamlet to the north and to east is bordered to the forest of State Forestry Corporation (*Perhutani*), to the south is bordered by Ciporeat village, and to west is bordered by Bukit Unggul hamlet (Gunung Kasur).

In 2018 the estimated population of Palintang was 632 households. The majority of people of Palintang hamlet have main livelihood as farmer and labor farmer. Main agroecosystem types of Palintang are recorded the homegarden, garden, vegetable garden and farming coffee (*Coffea arabica* L) trees that is mixed with pine trees of the *Perhutani* forest by applying of *tumpang sari* system (Iskandar et al 2017). Banana trees have been commonly planted in the homegarden, garden, and more recently both banana and coffee trees have been introduced in the *Perhutani* forest to minimize the vegetable garden in the forest, to avoid soil erosion, to improve soil fertility, and to provide good income for the local people of Palintang hamlet. Banana trees (*Musa paradisiaca*) have been predominantly interplanted with other annual as well as perennial trees, including coffee, alvocado (*Persea americana*), mango (*Mangifera indica*), pine, and suren (*Toona sureni*).

RESULTS AND DISCUSSION

Palintang people and faming coffee

Cultivation of coffee in Java, especially for world marketing purposes, had been started since the early 18th century by Dutch Colonial (Bremen, 2014). One of the coffee planting areas formed by the Dutch colonial government was Priangan (West Java at the present time) (Geertz 1963; Lasmianti, 2015; Putra and Ferry, 2015; Farokhah, 2017; Zakaria, 2017). This ecological history was explained at least by one informant of the elders (*sesepuh*) in the Palintang. Palintang residents believe that coffee in their area has existed since the Dutch colonial times. Nevertheless, planting coffee was not the main livelihood of residents in the Palintang since that time. One of informants explained that coffee in Palintang had already been exist there but the majority of residents were mostly brought by the Dutch colonial government to plant quinine and only a few people were ordered to grow coffee. After the Dutch colonial times, however, residents themselves have mostly chosen as vegetable farmers.

Ecologically, Palintang is situated in mountainous area, located in the high land approximately 1,400 m above and average annual rainfall is 2,120 mm (<https://en.climate->

[data.org/asia/Indonesia/central.Java/bandung-607890/](https://en.climate-data.org/asia/Indonesia/central.Java/bandung-607890/). Since the Palintang is located in the high land, this area suitable for farming Arabica coffee (*Coffea arabica* L). As many documented that Arabica coffee well in region between 1,000 and 2,000 above sea level and high rainfall (Kurniawan, nd; Hulupi and Martini, 2013; Nugroho et al. 2016; Iskandar et al. 2018).

The reason the ecological appropriate of Palintang for planting coffee was to raise idea of *Perhutani* to introduce coffee in this area. Before the 2000s the majority of Palintang residents had not planted coffee. This was because the price of the coffee market at that time according to informants was less promising, so that residents were not interested in planting it. Even so, some residents have started growing coffee since the late 1990s, some residents realized that Palintang was suitable for coffee cultivation. In addition, residents who planted coffee since then know the story of the past coffee planting carried out by the predecessors of Palintang residents. These residents became actors who are now as respected old men (*disepuhkan*) and considered as senior and expert in the cultivation of coffee in the Palintang.

Some reasons for the actors are interested in farming coffee, such as they have past knowledge of coffee planting in Palintang and also the awareness that forest land of *Perhutani* in Palintang is increasingly being eroded into forested land that can be restored by intercropping with coffee plant. Empirically, it has been found in Palintang, forest land around the Palintang village at that time was used by residents as vegetable farming. Although forest wood trees, such as pine, has been still planted (because there are indeed regulation for planting pine trees), the land that has been used to plant vegetables is increasingly showing its ecological negative effects. Several of the informants told us that growing vegetables in Palintang made land more "damaged", some locations occurring soil erosion and landslides even though the impact was not too large. In addition, massive vegetable planting makes the soil's capacity to absorb water less. Soil is not able to penetrate water into the deep soil because of the decreasing number of trees in the forest. Among these environmental reasons were one of the reasons that several actors in Palintang began to intensify coffee cultivation under the direction of *Perhutani*.

Coffee cultivation in the *Perhutani* pine forest in Palintang began to be actively socialized in 2004. The government represented by *Perhutani* provided a socialization program for the Community Based Forest Management (CBFM or *PHBM*=*Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*) in which the program invited the community to jointly manage the forest. The follow-up of this program is the planting of perennial plants in the *Perhutani* forest area. *Perhutani* provides knowledge

about the planting program of perennial plants, such as coffee (*Coffea arabica*), avocado (*Persea americana*) and jackfruit (*Artocarpus heterophyllus*) to replace vegetable planting that has been carried out by the Palintang community. One of the residents who became a coffee planting actor in Palintang explained that at that time not only was given knowledge about planting coffee, but also socialized the distribution of yield from coffee and the selling price of coffee. Increasingly promising coffee prices have made residents slowly start farming coffee (Iskandar et al 2018).

In Palintang itself coffee is predominantly harvested once a year from April to July. After the harvest period the coffee plants will flower again, bear fruit, and be harvested again the following year. Palintang residents plant coffee in stages, starting from 500 trees and each harvest has the advantage or capital of farmers by adding coffee trees planted. At present time the Palintang residents have an average of 1,000-2,000 coffee trees on agroforestry system. The planting of coffee by the residents themselves also depends on the area of land they cultivate. In one harvest, 1,000 coffee trees during the productive period will produce approximately 4 tons of coffee beans. Meanwhile, for the price of coffee beans in the form of cherries, in 2019 around Rp. 9,000.00-Rp. 10.000,00. This price will be different when it has undergone processing which includes stripping, washing, and drying. Informants, coffee farmers in Palintang argued, one of the obstacles in planting coffee is the capital that must be spent to start growing coffee. Some coffee farmers say that more capital is needed to grow coffee compared to growing vegetables. However, if the coffee has grown well, the cost is less than the vegetable. This is one reason residents gradually plant coffee in the *Perhutani* forest. In addition, easy maintenance and long life of coffee plants with long productive periods are also the reason for residents to plant coffee in the Palintang.

Palintang coffee: Livelihoods and Life

Coffee cultivation in Palintang had been started since the Dutch colonial period as one of the plants that must be planted. It was like being stopped, but the coffee was planted again by residents starting in the 2000s. Coffee cultivation has been increasing because of support from the government through *Perhutani*'s Community Based Forest Management Program (PHBM= *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*) (Iskandar et.al. 2018). *Perhutani* has an important role in planting coffee in Palintang, prohibiting vegetable planting in the forest, to socializing, as well as teaching coffee making *Perhutani*'s role cannot be ignored. Gradually the forests around the Palintang village are overgrown with coffee plants which are increasingly growing in size. In the use of forests by

communities under the management of *Perhutani*, both of them benefit from a profit sharing system. *Perhutani* as administrator gets 30% of the harvest, while farmers get 70% of the harvest.

Coffee farming in Palintang itself has caused changes to the residents of Palintang. Gradually now the changes began to appear in the daily lives of the Palintang people. Previously, most of the Palintang residents worked as vegetable farmers, now their livelihoods are added as coffee farmers. Vegetables have not been completely abandoned by the community, although there are calls for a ban on growing vegetables in the forest (Figure 2a and Figure 2 b). Of course to leave vegetable farming completely requires a long time, residents reasoned that planting vegetables has been done since its predecessor so that the activity is difficult to abandon the residents of Palintang now.



Figure 2. a. Pine forest plot is being planted by vegetables, and b Pine forest is grown by Arabica coffee trees

Many people of Palintang have interested in involving in planting coffee trees in the *Perhutani* forest because economic benefits. It cannot be denied that something new will be accepted if it is considered able to provide economic benefits and not make drastic changes for a community (Aryadi, 2012: 144). One of the informants, resident of Palintang planted coffee as mentioned earlier because the price of coffee tends to be higher and more stable than the price of vegetables. Initially coffee was not taken into account because the selling prices were cheap and there were no real examples of Palintang residents who were successful in managing farming coffee garden. Coffee cultivation itself requires a struggle that is not easy because the new coffee trees can be harvested after 3-4 years after planting. During the initial planting in Palintang, residents still planted vegetables in the forest area as an effort to meet their economic needs. Vegetable plants are planted around new coffee plants planted in

the forest area. Vegetable crops planted include potatoes, cabbage and tomatoes. Vegetable planting stops when the coffee trees have grown, this is because the coffee trees cover the sun to the ground which makes vegetable crops cannot properly grow.

In addition, some struggles have involved by Palintang coffee farmers in finding networks to sell coffee. One of the informants, a senior coffee farmer of Palintang, pseudonym called as Pak Aep Palintang (58 years), mentioned that in the early coffee planting period in Palintang, confused where to sell his coffee production. Pak Aep was later on assisted by *Perhutani* to sell the harvested coffee. From this coffee sales process, Pak Aep began to build relationships with other regional coffee middlemen (*bandar* or *pengepul*), such as Sumatra. Gradually the management of coffee by Pak Aep is growing. He began to grow coffee in a small amount of forest but now has thousands of coffee trees. Initially the seeds planted were seeds that grew wild in the forest, and now he is made of a nursery these coffee seedlings to be planted by other residents. The success of this coffee management makes people interested in planting coffee. Pak. Aep is now recognized as one of the coffee middlemen (*pengepul*) Palintang hamlet, besides that, he is also the chairman of one of the coffee farmers' association in Palintang.

In Palintang, coffee farmers are members of farmer associations where each group consists of 10-20 members (coffee farmers). Each group of coffee farmers association has a leader who usually becomes a middleman or collector of coffee beans that have been harvested. The sale of coffee beans from farmers to the urban in the form of wet coffee beans or residents call them as 'cherry'. Moreover, after the coffee beans have been held by *pengepul*, the beans have been proceeded (washing, stripping and drying), most of the middlemen (*pengepul*) in Palintang sell coffee beans to a larger middlemen in the city in the form of "gabah" (the form of seeds that have been peeled and dried). The price of coffee beans in the form of "gabah" ranges from Rp. 26,000.00 - Rp. 30,000.00. This price will be more expensive if other processing is carried out, such as called as "natural" processing (coffee beans are dried without washing and peeling) or called as "honey" processing (coffee beans are dried in the sun after being peeled without washing). But for these two processing are rarely demanded in large quantities.

Because the management of coffee has been improving, the coffee commodity more develop to be a main commodity in Palintang hamlet. The sale of coffee beans from Palintang has increasingly increased not only in the local market (in West Java) but also in the national market. One of the coffee collectors in Palintang (Pak Jajang, 46 years) explained that the demand for coffee on the market has been increasing every year. For example

two years ago, each time he sold coffee in the form of grain (*gabah*) to collectors larger than 5 tons to 10 tons, whereas last year he received requests from collectors as much as double the amount previously deposited. Increased coffee appreciation among coffee connoisseurs or coffee lover (*pencinta kopi*) and the community at large makes each coffee-producing region trying to show the distinctive characteristic of coffee beans from the region. The government of West Java Province itself encourages coffee production as an effort to introduce West Java specialty coffee to the wider community, besides that step is also an effort to improve West Java's economy (quoted from *repubika.com*, 2016). Similarly, in Palintang, coffee collectors and farmer group leaders are well aware that Palintang coffee must be promoted to other regions widely to have more bargaining value. Several leaders of farmer association began to learn how to process coffee to become beans that had been 'roasted' and coffee granulated. One of farmer associations has been assisted by a group of campus community tries to process coffee to granulated and sell it in packaged form. The chairman of the farmer association said that selling ready-made coffee (coffee granulated) and brewed coffee was their attempt to introduce the distinctiveness of Palintang coffee to the wider community (Figure 3).



Figure 3. Coffee product processed and sachet coffee are being traded by a women in small shop (warung) of Palintang hamlet

The development of the processing of coffee products by the people makes coffee in Palintang, which is run by the community of coffee lovers. Coffee is treated by the public like daily drinks. In contrast to the Sundanese community, generally in other areas that are used to consuming fresh tea, most Palintang residents, especially men, have a habit of drinking coffee (*ngaleueut kopi* or *minum kopi*) in the morning and/or in the afternoon (cf. Igarashi, 1985). Similarly when presenting guests from outside the area, the persons who received guests presented coffee drinks and always mentioned that "this is typical Palintang coffee". In addition, Palintang coffee farmers often tell the history of the Palintang coffee, the character of the coffee plant, and distinctive taste character of the Palintang coffee.

Occasionally some coffee farmers from Palintang also participated in coffee exhibitions organized by

the government of West Java and the Palintang coffee competition that is the character of the taste of the Palintang coffee beans. From the exhibitions and competitions that were followed, Palintang coffee farmers knew that the character of the Palintang coffee flavor tended to be “fruity” which was fresh bitter acid and had a fruit aroma such as jackfruit and banana. This special taste of coffee according to coffee farmers in Palintang is influenced by coffee plantations which are also planted with other plants such as jackfruit, banana and avocado in the agroforestry of *Perhutani* forest.

The activity took part in the exhibition and the competition was held to introduce and get recognition from the groups themselves and groups from outside the Palintang hamlet. The actions taken by the resident of Palintang as described by Barth (1988), that identity basically has a relational nature, in which identity is created, maintained, and transformed through interaction and the relationship between them is defined as “we” (their own group) with people others are defined as “they” (other groups). The introduction of the characteristics of coffee plants and the taste of coffee according to one resident is to introduce to the general public that coffee Palintang has a different character than coffee from other regions.

Accordingly, along with changes in times, coffee have been inspiring and a media for the Palintang community in protecting the *Perhutani* forest by managing the coffee agroforestry. Indeed since coffee have been providing good income for the community of Palintang. Coffee has been symbol of prosperity that means economic prosperity. The process of identifying coffee symbols has been undertaken by gradual process of means, including coffee drinking habits, success stories, experiences, labeling, coffee as an important commodity as an economic plant has economic value and identity (cf. Yenrizal et al. 2018). The story built from coffee such as the history of coffee cultivation in Palintang has been an important role in maintaining a local variety of coffee when compared to other coffee varieties in West Java in general. It has mentioned by many scholars, such as Brush (1992) and Prober et al. (2011) that socio-economic and cultural aspects has generated collection actions to conserve varieties of crops across culture in the world.

CONCLUSION

Based on ecological history, in contrast to the general Sundanese community, which has a basic livelihood of cultivating rice in the fields, the Palintang community is not involved in rice cultivation in the we-rice field (sawah), because there is no “sawah” area in the area. Since considering the Palintang community has intensive interactions over time with the environment, in the form

of the *Perhutani* forest area, in the form of highland mountainous areas, with cold temperatures, and fertile soil, Palintang community have involved in vegetable cultivation. They plant vegetables in “tumpang sari” on the *Perhutani* forest. Tumpang sari may be defined as reforestation under which farmers are permitted to agricultural crops between the rows of the forest plant species; their payment for restoring the plot is the usufruct right to that land intercropped species. Palintang residents have deep local knowledge in cultivating annual crops, including vegetables, because in the past they have been involved in “tumpang sari” programs on land since the Dutch colonial government, the Forestry Service (Dinas Kehutanan) or *Perhutani* post-independence.

Cultivation of vegetable in the forest area of *Perhutani* even though it has high economic benefits, but has some negative impacts on the environment, such as the emergence of agricultural erosion, and pollution of pesticide poisons, Consequently, in the early 2000s, the government through *Perhutani* promoted coffee cultivation, with agroforestry system in *Perhutani* forest. The aim is to improve the forest environment and provide economic benefits for the people of Palintang. Given that the Palintang region is suitable for planting Arabica coffee (*Cofea arabica*), and can provide economic benefits to the Palintang community.

Therefore, the effort to develop coffee cultivation undertaken by Palintang residents, especially coffee farmers, made the socio-economic conditions of the Palintang community change. Coffee which was initially underestimated is now one of the sources of livelihood for the community of Palintang. The increasing coffee cultivation and coffee farmers in Palintang make coffee increasingly imbued as the self-reliance of the people of Palintang. With the coffee being consumed, coffee is a marker for Palintang residents. In addition, as a commodity used for “fence” in forest conservation and types of coffee. In other words, coffee can be a commodity producing money and a family source of income, and can be a distinctive identity in the Palintang community, through social processes in society, such as drinking habits, stories of success, experience, labeling, and yields. Indeed, by adoption of the Palintang community in the forestry forest in *Perhutani*, the important impact not only economic, but the social and ecological aspects of the Palintang community.

ACKNOWLEDGMENT

This research was funded by the Academic Leadership Grant (ALG) Program of Prof. Johan Iskandar. So, we are grateful to the Rector of Padjadjaran University for funding and supporting this research. We are also grateful to the formal village leaders, the formal hamlet leaders,

and the informants for allowing research, and assisting and providing various information during our research in Palintang.

REFERENCES

- Abdullah, I. (2015). *Construction and Reproduction of Culture*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anrical. (2018). *Coffee Shops and Public Spaces (Study of Shifting the Space for Expression of Free Time to the Space of Popular Cultural Entities)* Unpublished Thesis of Universitas Negeri Makassar.
- Aryadi, M. (2012). *Community Forest: Phenomenology of Community Cultural Adaptation*. Malang: UMM Press.
- Audrey, R.J. & Djuwendah, E. (2018). *Analisis Pendatan Usaha Tani Kopi Java Preanger Pada Kelompok Tani Margamulya Desa Margamulya, Kecamatan Pengalengan Bandung*. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*. 6, (1), 31-38.
- Barker, C. (2004). *The Sage Dictionary of Cultural Studies*. Sage Publications.
- Barker, C. (2013). *Cultural Studies, Theory and Practice*. Translated by Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barth, F. (1988). *Ethnic Groups and the Limits of the Social Order of Cultural Differences*. Translated by Susilo, N.L and Parsudi Suparlan. Jakarta: UI Press.
- Bernard, H.R. (1994). *Research Method in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Berger, P.L. & T. Luckmann. (2013). *Social Interpretation of Reality: Minutes on the Sociology of Knowledge*. 10th print. Translated by Basari, H.. Jakarta: LP3ES.
- Brush, S.B. (1992). Ethnoecology, Biodiversity, and Modernization in Andean Potato Agriculture. *J. Ethnobiol*, 12, (2), 161-185.
- Clayton, S. & Opotow, S. (2003). *Identity and the Natural Environment The Psychological Significance of Nature*. Cambridge: The MIT Press.
- Cotton, C.M. (1996). *Ethnobotany: Principles and Applications*. London: Sage Publications.
- Ferraro, G. & Adreatta, S. (2010). *Cultural Anthropology: An Applied Perspective, 8th edition*. USA: Wadsworth.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California.
- Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In Rutherford, J (ed), *Identity Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.
- Hulupi, R., & Martini, E. (2013). *Guideline for Cultivation and Maintenance of Coffee Plant in Mixed-graden*. Bogor: World Agroforestry Center (ICEAF).
- Igarashi, T. (1985). Some Notes on Subsistence in A Sundanese Village. In S.Suzuki,
- Soemarwoto, O. & Igarashi, T. (eds), (1988). *Human Ecological Survey in Rural West Java in 1978 to 1982*. Tokyo: Nissan Science Foundation, Pp.9-77.
- Iskandar, J. (2018). *Ethnobiology, Ethnoecology and Sustainable Development*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Iskandar, B.S, Iskandar, J., Wibawa, H.A. & Partasasmita, R. (2017). Farmers and tumpang sari: Case study in Palintang Hamlet, Cipanjalu Village, Bandung, Indonesia. *Biodiversitas*, 18, (3): 1135-1149.
- Iskandar, B.S., Iskandar, J. & Partasasmita, R. (2018). Planting Coffee and Take Care of Forest: A Case Study on Coffee Plantation in the Forest Carried Among People of Palintang, High Land Bandung, West Java, Indonesia. *Biodiversitas* 19, (6). 2183-2195.
- Jenkins, R. (2008). *Rethinking Ethnicity Second Edition*. Sage Publications.
- Kahn, J.S. (2016). *Culture, Multiculture, Postculture: Cultural Diversity and Global Capitalism Imperialism*. Yogyakarta: INDeS [Indonesian].
- King, V.T. & William, W.D. 2012. *Modern Anthropology in Southeast Asia An Introduction*. Translated by Kadir, H.A. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Kurniawan, A.S.P. (2017). *Coffee catalogue*. Jakarta: Yayasan Belantara.
- Lasmia, (2015). Priangans Coffee in XVIII-XIX Century. *Patanjala*, 7, (2), 217-232
- Muhsin, M. (2017). Produksi Kopi di Priangan pada Abad ke-19. *Jurnal Paramita: Historical Studies Journal*, 27, (2), 182-194.
- Newing, H., Eagle, C., Puri, R. & Watson, C.W. (2011). *Conducting Research in Conservation: A Social Science Perspective*. London and New York: Routledge.
- Nugroho, D.P., Basunanda, P., & Suryadi, M.W. (2016). Physical Bean Quality Arabica (*Coffea arabica*) at high and medium altitude. *Pelita perkebunan* 3, (3)

- Putra, S. & Ferry, Y. (2015). Performance of Java Preanger Arabica Coffee in West Java. *Sisrinov*, 3, (3), 113-126
- Parker, S.F. & Michael, A.W. (ed). (2011). *Coffee Philosophy for Everyone: Grounds for Debate*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Prober, S.M., O'Connor, M.H. & Walsh, F.J. (2011). Australian Aboriginal Peoples' Seasonal Knowledge: A Potential Basis for Share Understanding in Environmental Management. *Ecology and Society*, 16, (2), 12
- Retnowati. (2009). *Kethoprak as Identity (A Study of Arum Budoyo's Kethoprak Group in Juwana, Pati, Central Java)* Disertation. Depok: Universitas Indonesia.
- Rutherford, J. (1990). *Identity Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.
- Tucker, C.M. 2011. *Coffee Culture: Local Experiences, Global Connection*. New York: Routledge.
- Ukers, W.H. (2012). *All About Coffee: A History of Coffee From The Classic Tribute To The World's Most Beloved Beverage*. Massachusetts: Adams Media.
- Widiyanto, A. (2017). Aktivitas dan Curahan Waktu Petani Dalam Program Perhutanan Sosial Di Ciamis Jawa Barat. *Jurnal Hutan Tropis*. 5, (1), 48-55.
- Yenrizal., Iskandar, J., Rahmat, A. & Bazari, A. (2018). *Ethnoecology Communication of Semende People Interpret Nature*. Yogyakarta: Phoenix Publisher.
- Zakaria, M.M. (2009). Coffee Priangan in the Nineteenth Century. *Historia: International Journal of Historical Education*, X (2):131-150.
- Republika. (2016). *Aher Dorong Peningkatan Produksi Kopi Jabar*. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/18/of8kvh365-aher-dorong-peningkatan-produksi-kopi-jabar>

QUALITY OF WORK LIFE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND TURNOVER INTENTION IN ACCOUNT OFFICER OF MICRO FINANCE COMPANY

Adinna Astrianti¹, Mukhamad Najib², dan Bagus Sartono³

¹Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Pajajaran, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor

²Departemen Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat 16680

³Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor, Jl. Meranti Wing 22 Level 4, Bogor, Jawa Barat 16680

E-mail: adinnastrianti@gmail.com

ABSTRACT. *The purpose of this study is to analyze the effect of quality of work life (QWL) on turnover intention through organizational commitment of account officers in micro-finance company. This research was conducted using the survey method. Data were collected using questionnaires from 115 account officers at a micro-finance company in West Java. Data were analyzed using descriptive statistics and SEM-PLS. The results of this study indicate that QWL has a significant and positive effect on organizational commitment and organizational commitment has a significant and negative effect on turnover intention. It can be concluded that by increasing the implementation of QWL will increase the organizational commitment of employees to remain in the company so that it decreases the intention of employees to move or leave the company.*

Key words: *account officer; organizational commitment; QWL; turnover intention*

KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI DAN *TURNOVER INTENTION* PADA ACCOUNT OFFICER PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MIKRO

ABSTRAK. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh *quality of work life* (QWL) terhadap intensi *turnover* melalui komitmen organisasi pada *account officer* pada perusahaan pembiayaan mikro. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner dari 115 *account officer* pada salah satu perusahaan pembiayaan mikro di Jawa Barat. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa QWL memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap komitmen organisasi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap niat *turnover*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan penerapan QWL akan meningkatkan komitmen organisasi untuk tetap berada di perusahaan sehingga menurunkan niat karyawan untuk berpindah atau keluar dari perusahaan.

Kata kunci: *Account Officer; Intensi Turnover; komitmen; QWL*

INTRODUCTION

Human Resource is an important asset in an organization or company. Each company has different vision and mission, that one of which must be supported by Human Resource (SDM). The success of vision and mission achievement of a company needs support from quality and competent Human Resource.

Turnover is one of the serious problems that must be faced by company. *Turnover intention* is a behavior attitude of someone to pull themselves from organization, meanwhile *turnover* illustrates an actual action in releasing self from an organization (Aydogdu and Asikgil 2011). Zhang *et al.* (2015) said that company cannot be operated well if their employees who are competent have intelligence, skill, or higher motivation, resigned voluntarily. The loss of employees that happen in a company can affect the running business. *Turnover* can cause negative effect to company, where company lost experienced employees and company must recruit new employees and need to train those new employees which makes company spend more fund and time. Company must conduct evaluation to why employees decide to leave or move so that company can prevent the occurrence of *turnover* in other employees

and can retain the presence of employees. The presence of employees can be maintained by making organizational commitment from employee to make employees give loyalty to the company. Commitment can encourage employees to conduct job amazingly, where they are not only thinking about their own success but also thinking about the success of company they are working at.

Organizational commitment shows that company that oriented to future tends to show bigger commitment towards their career and organization, so that the possibility of those employees to leave their present job is smaller (Park dan Jung 2015). Conversely, according to Saeed *et al.* (2014) shows that there is no significant relationship between organizational commitment towards *turnover intention*. According to him, based on current economical condition, every people want the best so that if someone has better opportunity and work condition needed, then organizational commitment will no longer useful in reducing their intention to move.

Next, according to Akar (2018), commitment is affected by employee perception towards quality of work life where they work, low work life quality can make employees experience fatigue and can prevent them to develop organizational commitment. This shows that,

maintaining the presence of employees can be conducted not only by building an organizational commitment to the organization, the intention of *turnover* can be reduced by conducting evaluation towards employees through evaluation of *quality of work life* (QWL). Jabeen *et al.* (2018) shows that QWL has direct influence in reducing *turnover intention* in employees. Next Surienty *et al.* (2014) mentioned three components which influence *turnover intention* in employee, one of which is by paying attention to balance of life and work. Cascio (2006) defines QWL as employees perception concerning physical or mental prosperity condition of employees when working. Working employees not only see their payment side only but they also need convenience in working and its environmental situation, the opportunities of self-development, balance between life and work, appreciation and social relation in their job. Farid *et al.* (2015) also explains that QWL has a very significant relationship towards organizational commitment, so that high QWL will increase organizational commitment to stay in a company.

The study case used in this research is companies which run in micro financing field, where this company has served several regions such as West Java, East Java, Central Java and Banten. During 2016 until 2018, this company experiences quite high *turnover* especially in *account officer* (AO) level and based on Figure 1, the largest percentage of *account officer* conduct resignation in office of West Java Region amounted 43.5% per year.

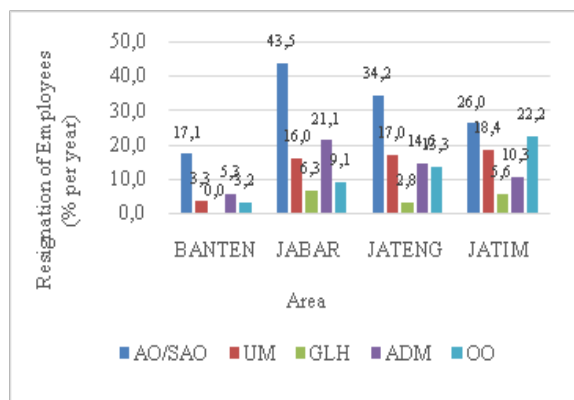


Figure 1. Percentage of Resignations in Each Position and Area in 2016-2018

(Sources: Company data, 2019)

Account officer is spearhead of financial or financing company, where the center of activity is in this position. *Account officer* in this company has tasks which socializing capital offering for business loans to housewife as debtor target, evaluate debtor candidate, withdraw the loan capital, conduct debtor business guidance and conduct deposit withdrawal everyday. *Turnover* problem that happen in this *account officer* requires company management to conduct evaluation to find put the proper

strategy to be implemented in maintaining the presence of *account officer* especially competent *account officer*. This company has maximum *turnover* value of average 4% per month but in position of *account officer* for this West Java region in the last three years, the *turnover* that happen is 6.8% in 2016, 6.1% in 2017 and 6.4% in 2018. The *turnover* value exceeds the maximum value predetermined by company. According to Indonesian Banks survey by Banking Professional Certification Institute 2018, it is mentioned that *voluntary turnover rate* is relatively high in level of 5-15% percent, then *turnover* that happen in this company can be said as high.

Every *account officer* in this company has debtor who becomes their responsibility since the beginning before loans until repayment. If *account officer* changed so often, it can cause ineffectiveness and can influence the performance of other *account officer*, because other *account officer* must replace position of other *account officer* who resigned so that it adds workload. Based on problem description and theory that has been, to maintain the presence of *account officer* in this company and reduce the intermion of *turnover* that happen in *account officer* level, then employees who have high commitment are needed. This commitment can be made through fulfillment of QWL. The good fulfillment of QWL is expected can maintain and retent the employees this time also do not have intention to move. So that this research aims to analyze the influence of QWL towards organizational commitment and analyze the influence of QWL towards *turnover intention* through organizational commitment.

METHOD

The research location is region office in West Java. The sample of this research is all population of *account officer* employees in region office of West Java amounted 115 respondents. The data collection method is by conducting direct interview towards respondents using questionnaire. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data was collected directly by respondents through questionnaire and secondary data was obtained from company, books and other literature. This research uses descriptive analysis and *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) analysis.

This research consists of three construct variables which are QWL, organizational commitment and *turnover intention*. The exogeneous variable in this research is work life quality, endogeneous variable in this research are organizational commitment and *turnover intention*. The explanation about these each variable is as follows:

1. *Quality of Work Life* (QWL)

According to Surienty *et al.* (2014) quality of work

life (QWL) illustrates how far the relation of individual and their perception about life in its relation with environmental condition. Sajjad and Abbasi (2014) also defines QWL as employee reaction towards their job, especially towards their personal consequences on fulfilling their need and mental health. Farid *et al.* (2015) and Parvar *et al.* (2013) used eight aspects proposed by Walton about QWL. Indicator in QWL variable is adopted from eight aspects used by Walton (1973) which are (1) adequate and fair compensations, (2) safe and healthy working condition, (3) opportunity to use and develop human capacities, (4) opportunity to growth and security, (5) social integration in work organization, (6) constitutionalism in the work organisation, (7) work and total life space, and (8) social relevance of work life.

2. Organizational Commitment

Organizational commitment is considered as one of the important purposes of each organization to maintain the presence and the continuity of an organization (Hanaysha 2016). Organizational commitment is defined as desire of employees to remain member of an organization (Colquitt *et al.* 2013). Organizational commitment affects whether an employee still becomes member of organization (maintained) or leave to reach other job (*turnover*). Indicator in organizational commitment variable uses three types of commitment mentioned by Kreitner and Kinicki (2010) and Colquitt *et al.* (2013) which are (1) affective commitment, (2) continuance commitment, and (3) normative commitment.

3. Turnover Intention

According to Robbins and Judge (2013) *turnover* is level of employee resignation permanently, both voluntary or involuntary. *Turnover intention* is defined as conscious or intentional desire to leave organization (Tett dan Meyer 1993). Avanzi *et al.* (2014) explains *turnover intention* as runaway employee from unsatisfying work condition that can be worse because of bad work environment. This *turnover* can be seen as failure in relationship between employees and organization. Indicator in turnover intention variable adopts three cognition of *turnover* mentioned by Sager *et al.* (1998) and Saeed *et al.* (2014) which are (1) think to stop, (2) intension to seek, and (3) intention to stop.

Based on literature above, can be seen that Figure 2 shows SEM model from this research, and can be concluded that hypothesis of this research consists of:

- H1: QWL has positive influence to organizational commitment.
H2: Organizational commitment has negative influences to *turnover intention*.

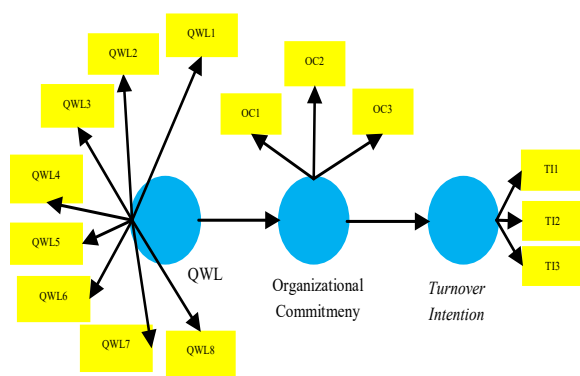


Figure 2. SEM Model

(Sources: Personal documentation, 2019)

Details =

- QWL1 : adequate and fair compensations
QWL2 : safe and healthy working condition
QWL3 : opportunity to use and develop human capacities
QWL4 : opportunity to growth and security
QWL5 : social integration in work organization
QWL6 : constitutionalism in the work organisation
QWL7 : work and total life space
QWL8 : social relevance of work life
OC1 : affective commitment
OC2 : continuance commitment
OC3 : normative commitment
TI1 : think to stop
TI2 : intension to seek
TI3 : intention to stop

RESULT AND DISCUSSION

Respondent Characteristic

Respondent characteristic is illustration of respondent's identity in research location. Based on research result, there is respondent characteristic that be concluded. Respondent characteristic in this research includes gender, age, marital status, last education and work experience. Table 1 shows respondent characteristics. Respondent consists of 115 respondents, with different employee status amounted 76 respondents with permanent employee status and 39 respondents with temporary employee status. All respondents are women, because this micro finance company for *account officer* position employs women labor, in addition, the target of debtor in this micro finance company is women or housewife, so that the approach is easier if *account officer* of this company are women.

The youngest respondent age in this research is 18 years old, while the oldest respondent is 30 years old. In this research, respondents are categorized to 18-20 years old, 21-25 years old and 26-30 years old. Most of the respondent age is in range 18-20 years old amounted 69 people or 60%. The total respondents in age 21-25 years

old amounted 40 people or 34.8% and the total of fewest respondent in age 26-30 years old amounted six people or 5.2%. This because the company requires *account officer* to have minimal High School for the last education and the average is High School graduate in those range of age. According to company management, employees with younger age will have better physical ability compared to older employees. *Account officer* position has field job where strong physical ability is needed, therefore, company recruited employees with young age requirement.

Respondents in this company generally do not have family expense yet. Marital status is divided into two which are married and single. Most respondents are single amounted 89 people or 77.4. In addition, education is a capital for someone in working, because, by having education, someone can be said to have knowledge and skill. Last education of respondents only has two categories which are SMA/SMK and bachelor. Most of the respondents have last education in SMA/SMK level which amounted 113 people or 98.3%, while last education in bachelor level is only two people or 1.7%. This because this micro finance company requires *account officer* position with last education level minimum SMA/SMK.

Work experience in this research consists of work period after graduate from school (SMA/SMK/Bachelor), work period in current company, work experience in other company and work period in other company. Work experience can be linked by having skill capital, high confidence and better understanding to *jobdesk*. Based on the result of research, how long working time after graduate from school (SHS/VHS/College) most are 1-2 year amounted 39 people or 33.9%. Next, how long employees work after graduate from school, there is category of less than six months which is 34 people or 29.6%, the total is not different from respondent in category 1-2 years. This because most of the respondents have education level of SHS/VHS where they have not graduated from school so long so that how long they work after graduated is dominated by category 1-2 years and less than six months. Next, respondents who have more than three years work experience after graduate from school are six people or 5.2%.

How long the work period in general related to level of loyalty and commitment owned by an employee. In category 1-2 years, has the largest number of respondents which are 46 people or 40%. Next, the second category with the largest number which is less than six months amounted 39 people or 33.9%. This shows that 39 respondents still in stage of observation or temporary employee where there are still many employees who have just get experience as *account officer* in this micro finance company.

Table 1. Respondent Characteristic

No	Karakteristik		Jml	%
1	Age	18-20 years old	69	60.0
		21-25 years old	40	34.8
		26-30 years old	6	5.2
2	Marital Status	Married	26	22.6
		Single	89	77.4
3	Last Education	SMA/SMK	113	98.3
		Bachelor	2	1.7
4	Work experience time after graduated from school	< 6 months	34	29.6
		> 6 months	23	20.0
		1-2 months	39	33.9
		2-3 months	13	11.3
		> 3 months	6	5.2
5	Work experience time in current company	< 6 months	39	33.9
		> 6 months	17	14.8
		1-2 months	46	40.0
		2-3 months	13	11.3
6	Have been worked in other companies	0 times	60	52.2
		1-2 times	45	39.1
		3-5 times	10	8.7
7	Work experience time in other company	0 years	60	52.2
		< 1 years	32	27.8
		1-2 years	18	15.7
		2-3 years	2	1.7
		> 3 years	3	2.6

(Sourced: Processed primary data, 2019)

Next, respondents who have work experience in this company in category 2-3 years are 13 people or 11.3%.

60 respondents or 52.2% do not have experience of working in other companies. This can become the reason why there are many *account officers* who resigned from this micro finance company, because working becomes *account officer* is their first experience and it becomes milestone, next the desire of them to move to other places to get other new experiences and develop themselves. Respondents who have work experience 1-2 times in other companies are 45 people or 39.1% and respondents who have work experience 3-5 times in other companies are 10 people or 8.7%.

Work experience in other company, can be seen how long they work in those other companies. Respondents who do not have work experience then have experience of working in other companies when 0 year amounted 60 people or 52.2%. Respondents who have work experience time less than a year in other companies are 32 people or 27.8%. Respondents who have work experience of 1-2 year in other companies are 18 people or 15.6%. Respondents who have work experience time 2-3 year in other company are 2 people or 1.74% and more than three years experience are three people or 2.6%.

Respondent's Perception

Based on perception result of an *account officer* in this micro finance company, there are some that they consider as less fulfilled the criteria of work life quality. One of which is concerning working hour which is not compatible, burdensome workload, fatigue during working, time between life and work is not balance, and dislike to their superiors. If relate to intention of *turnover*, quality of life and working is not yet fulfilled, have higher intention of *turnover*. This problem becomes very important to be considered by company and it needs evaluation and improvement to make quality of work life more fulfilled.

Result of Analysis on *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS)

In this research, testing is conducted to find out the influence of exogeneous latent variable (quality of work life/ QWL) towards edogeneous latent variable (organizational commitment and *turnover intention*) and processed using SmartPLS 2.0. The testing model is divided into two, which are *outer model* (measurement model) and *inner model* (structural model). *Outer model* is conducted to analyze the relationship of indicator *first order* construct. While *inner model* to analyze the relationship of *second order* construct. This is the result of each test:

1. Analysis of Measurement Model (*Outer Model*)

Outer model is model which specify the relation of latent variable with its indicators. Evaluation of *outer model* is conducted towards *first order* reflected by its indicators. In analysis of measurement model, outer model test is conducted, where in this test, *convergent validity*, *discriminant validity* and *composite reliability* tests are conducted (Ghozali dan Latan 2015).

Convergent validity test can be concluded as valid by seeing the value of *loading factor*. Menurut Haryono (2017), *loading factor* value is said to be valid if ≥ 0.7 . But for development of model or new indicator, *loading factor* value still can be accepted if the value between 0.5-0.6. If there is indicator which have smaller *loading factor* value than 0.6 then *dropping* process is conducted. *Dropping* is an elimination process of *loading factor* value in a research model so that proper *loading factor* value which is compatible with criteria can be obtained. In this research, *dropping* is conducted once, next, after *dropping* process is conducted, all *loading factor* has > 0.6 so that the indicator used is valid and can measure each variable. The next evaluation is to test *discriminant validity* and *composite reliability* by seeing the value of *Composite Reliability* (CR) and *Average Variance Extracted* (AVE). According to Haryono (2017), the limit value of CR ≥ 0.7 can be accepted and value of ≥ 0.8 is

very satisfying. AVE value illustrates the magnitude of manifest variable variety that can be owned by latent construct. The bigger the variety of manifest variable obtained by latent construct, the bigger the representation of manifest variable towards its latent construct. AVE value minimum 0.5 shows the good measure of *convergent validity*. AVE and CR values are presented in Table 2.

Table 2. AVE Value and CR Value in Each Variable

Laten	AVE	CR
Kualitas Kehidupan Kerja/QWL		
QWL1	0.5063	0.8358
QWL2	0.5551	0.8321
QWL3	0.6193	0.8896
QWL4	0.5985	0.8163
QWL5	0.6799	0.8643
QWL6	0.6676	0.8576
QWL7	0.7294	0.8894
QWL8	0.6553	0.9044
QWL	0.5033	0.9416
Komitmen organisasi		
OC1	0.7627	0.9059
OC2	0.6973	0.9018
OC3	0.7865	0.9170
Organizational Commitment	0.6369	0.9457
Turnover Intention		
TI1	0.8954	0.9448
TI2	0.9075	0.9515
TI3	0.8692	0.9522
Turnover Intention	0.7982	0.9651

(Sourced: Processed primary data, 2019)

Based on result of test conducted, AVE value on each construct > 0.5 . This shows that construct can be said as valid and good. CR value in each construct ≥ 0.7 , then it can be concluded that indicators used which in the variable already have sufficient good reliability or already able to measure the construct.

2. Analysis of Structural and Hypothesis Model (*Inner Model*)

In this analysis, *inner model* test is conducted. Analysis of *inner model* aims to see the latent construct relationship in model so that it needs to conduct two tests. The first test is conducted by seeing the *R-square* value which is *goodness-fit model* test. The second test is conducted to see the significance of *path coefficients*. Values of R square in endogeneous latent variable are 0,75; 0,50 and 0,25, each represents substantial, mediym and weak accuracy level (Hair *et al.* 2011). Value of *R-square* can be seen in Table 3.

Tabel 3. R-square Value

Variabel Laten	R-square
Komitmen organisasi	0.5548
Turnover Intention	0.3864

(Sourced: Processed primary data, 2019)

Based on Table 3, R-square value of organizational commitment is 55.48% which shows that *quality of work life* (QWL) variable is able to explain the variety of organizational commitment amounted 55.48% and the rest 44.52% is explained by other variables outside the model. R-square value of *turnover intention* is 38.64% which shows that organizational commitment variable able to explain variety of *turnover intention* for 38.64% and the rest 61.36% is explained by other variables outside the model. It can be concluded that organizational commitment has medium accuracy and *turnover intention* variable has weak accuracy.

The next stage of this research is testing to find out the *path coefficient* significance which shows the relation or influence between latent variable construct (*second order*). This test is called hypothesis test. *Bootstrapping* technique is conducted to answer hypothesis proposed in this research. *Bootstrapping* technique is re-calculation technique of data sample randomly to obtain T-statistic value and original sampel by conducting *path coefficients* test. The result of *path coefficients* test using *bootstrapping* technique in this research can be seen in Table 4.

Based on Table 4, it can be concluded for hypothesis test in this research, which is as follows:

- H₁: QWL has direct relation towards organizational commitment which is Positive. The result of T test in PLS output shows t-count value (2.7129) > T-table (1.96) means hypothesis accepted. This shows that the implementation of QWL in that company has significant and positive influence towards organizational commitment. The higher the QWL in company will improve the commitment of *account officer* to stay working in company. This research is in line with research conducted by Farid *et al.* (2015) which explain that QWL has significant relation towards organizational commitment in lecturer of Malaysian public research university. In addition, Parvar *et al.* (2013) shows that QWL affects the organizational commitment of employees to OICO company. According to him, by improving the quality of work life will improve the organizational commitment and employees can conduct more effective work.
- H₂: Organizational commitment has direct relationship towards *Turnover Intention* which is Negative. The result of T Test in PLS output shows t-count

value (4.5745) > T-table (1.96) means hypothesis is accepted. This shows that organizational commitment in *account officer* of micro finance company has significant and positive influence towards *turnover intention*. The higher commitment they have then the intention to move or to go another job is decreased. This research is in line with research conducted by Nazarudin (2016), Rahmawati (2013) and Andini (2006) which mentioned that organizational commitment has significant and negative influence towards *turnover intention*.

Table 4. Result of path coefficients test using bootstrapping technique

Path	Original Sample	Standard Error	T Statistics
QWL -> Organizational Commitment	0.3864	0.1424	2.7129*
Organizational Commitment -> Turnover Intension	-0.5902	0.1290	4.5745*

(Sourced: Processed primary data, 2019)

(Description: *have effect in real level 5% with t-table value = 1.96)

In QWL variable, variable which most support the QWL based in result of PLS analysis is there is opportunities to develop capacity and talent for *account officer* in this company. The statement which most support that variable is conceningcompany in implementing wor performance in each *account officer* routinely. The performance assessment is a process conducted by each company to evaluate or asses the work achievement conducted by the employees. The purpose of this work assessment is as feedback in improving employee achievement and can be used to support in decision taking to conduct adjustment of compensation also promotion. Performance assessment is also important to trigger employee to improve their performances. Performance assessment in this micro finance company is routinely conducted once a month. Performance assessment through *key performance indicator* (KPI) by seeing the total of debtor guded by each *account officer*, the total of loan withdrawal and total of debtor in arrears. But, there are some things that must be considered by company to improve condition of good work life. This is about the work hour that is not suitable with the applied requirement, about payment given by company, where according to most of the payment respondents given cannot completely fulfilling, they life need. The next statement is about job and task of each emplotee that make them fatigue, there is no time tolerance when employees are sick so that when they cannot enter, then from that, respondents argue that there is tiresome when working in micro finance company. This also happen because their jobs have target every

month. In addition, statement about the division of balance work time and rest time (*work life balance*) during work in this micorfinance company, most of the respondent asses it deficient, this also support their reasons to state that work hour which is applied is not in accordance with. And the last statement about social relation with work superior which considered as less satisfying, is about dislike with their superior and considered that the superios is less fair with their subordinates. Based on research result through questionnaire, the answer of respondent who complaints thatb those five things are considered as low, also stated want to stop or have intention to move to get better job. This shows that those five things really affect the intention of *turnover account officer* in that micro finance company.

Next, in organizational commitment variable, based on result of frequency distribution is in high category, but there are some affective commitment, contibuanace commitment and normative commitment in medium category. Those statements concerning pleasure and happy feeling of finishing the rest of career on company, alternative opportunity of other company to move, feeling indebted to the company for what is given by the company and various benefits derived from the company so that they feel unworthy and feel guilty if leaving the company at this time. Those three statements do not influence their commitments. Employees who do not concern the fund needed or other lost and fear of there is no alternatife of other companies. Some respondents stated that they feel sire of leave their job this time because they will get better job compared to current job.

Next, in organizational commitment variable, based on result of PLS analysis, shows that organizational commitment always has significant and negative influence towards *turnover intention*. This shows that if organizational commitment is high towards company, it can reduce their *turnover* intention. Statement which mostly affects the organizational commitment is continuance commitment, where respondent stated there is difficulties for respondents to leave the current company, because there is not company which is comparable that can provide convenience. Payment, and other bettwe advantages. As said by respondents from research result through direct interview, they still have not got better job and they feel that this company can provide things they need such as convenience, better colleagues, and job which does not have *shift* schedule.

In *turnover intention* variable, statemet of having intention to move to other job in intention indicator to stop have the biggest influence towards *turnover intention* variable compared to others. This shows tat if there is better opportunity then they will choose to move to other workplaces. Most of the *account officer* is in productive age and in age group of Y Generation (birth period

of 1982-2000) and graduated of High School, so that according to them, there are still many opportunities that can be obtained. In addition, there is big opportunities for respondent who have opportunities to themselves to get better job, so that respondent is mostly doubt in making statement of *turnover intention*.

In addition, if related to age category, high *turnover* is because their age is mostly in category of Y Generation group so that there are still feeling to looking for more. Y Generation in work world has different characteristic with previous generation. According to Gursoy *et al* (2013) Y Generation is a generation that less have respect towards their job and they have low relation in job or company. Y Generation easy to leave their job and looking for other new job which is compatible with their idealism (Oktariani *et al*. 2017).

CONCLUSION

Based on research result, in general, it can be concluded that quality of work life/QWL has significant and positive relationship towards organizational commitment. When work life is fulfilled and higher, it can improve the organizational commitment. Indicator which most influencing in quality of work life is opportunity to develop capacity and talent, which in statement about company implement performance assessment or work result achieved in each employee routinely. Next, organizational commitment has significant and negative influence towards *turnover intention*. It means, when organizational commitment towards company is high, it can reduce intention of *turnover*. The most influencing indicator to organizational commitment is continuance commitment, which is statement about respondent difficulties to leave this company is because there is no company which is comparable that can provide better convenience and other advantages. This shows that when QWL is fulfilled well, then it will influence the improvement of organizational commitment to stay in the company so that reduce the intention and desire of *account officer* to resign from the company. Several things that must be considered by company and need evaluation by company are considering work hour, workload, *work life balance* and evaluation of superiors towards their relation with their subordinates or *account officer*.

REFERENCES

- Andini, R. 2006. Analisis Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja, Komitmen organisasi terhadap *Turnover Intention* (Studi Kasus Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang) [tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.

- Akar, H. (2018). The Relationships between Quality of Work Life, School Alienation, Burnout, Affective Commitment and Organizational Citizenship: A Study on Teachers. *European Journal of Educational Research*, 7, (2), 169-180.
- Avanzi, L., Fraccaroli, F., Sarchielli, G., Ullrich, J. & Dick, R. (2014). Staying or Leaving. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 63, (3), 272-289. doi : 10.1108 / IJPPM-02-2013-0028.
- Aydogdu, S. & Asikgil, B. (2011). An Emperical Study of The Relationship Among Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention. *International Review of Management and Marketing*, 1, (3), 43-53.
- Cascio, W.F. (2006). *Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits*. 7th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Colquitt, J.A., Lepine, J.A. & Wesson, M.J. (2013). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Farid, H., Izadi, Z., Ismail, I.A. & Alipour, F. (2015). Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitmen among Lecturers in a Malaysian Public Research University. *The Social Science Journal*, 52, 54-61. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.soscij.2014.09.003>
- Ghozali, I & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0, Edisi 2*. Universitas Diponego.
- Gursoy, D., Chi, C.G. & Karadag, E. (2013). Generational Differences in Work Values and Attitudes among Frontline and Service Contact Employees. *International Journal of Hospitality Management*, 32, (1), 40-48.
- Hair, J.F., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19, (2), 139–151. doi : <http://dx.doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Hanaysha, J. (2016). Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork and Employee Training on Organizational Commitment. *Social and Behavioral Sciences*. 229, 298-306. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.07.139
- Haryono, S. (2017). Metode SEM untuk Penelitian Manajemen : AMOS, LISREL & PLS. Jakarta : Luxima.
- Jabeen, F., Friesen, H., & Ghoudi, K. (2018). Quality of Work Life of Emirati Women and Its Influence on Job Satisfaction an Turnover Intention. *Journal of Organizational Change Management*, 31, (2), 352-370. doi: 10.1108/jocm-01-2017-0016
- Kreitner, R. & Kinicki, A. (2010). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. (2018). Menyiapkan Kompetensi Bankir di Era Disrupsi Teknologi Finansial. Seminar Nasional Vokasi Perbankan. Yogyakarta, Indonesia.
- Nazarudin, D. (2016). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen organisasi terhadap intensi *Turnover* pegawai PD Pasar Tohaga Bogor. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Oktariani, D., Hubeis, A.V.S. & Sukanda, D. (2017). Kepuasan Kerja Generasi X dan Generasi Y terhadap Komitmen Kerja di Bank Mandiri Palembang. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 3, (1), 12-22.
- Park, I. & Jung, H. (2015). Relatinship Among Fututre Time Perspective, Career and Organizational Commitment, Occupational Self-Efficacy and Turnover Intention. *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 43, (9), 1547-1561. doi :<http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2015.43.9.1547>
- Parvar, M.R.F., Allameh, S.M. & Ansari, R. (2013). Effect of Quality of Work Life on Organizational Commitment by SEM (Case Study: OICO Company). *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*, 3, (10), 135-144.
- Rahmawati, MF. (2013). Analisis *Turnover Intentions* Karyawan KDS Cantonese Restoran Malang. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Robbins & Judge. (2008). Perilaku Organisasi. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Saeed, I., Waseem, M., Sikander, S. & Rizwan, M. (2014). The Relationship of Turnover Intention with Job Satisfaction, Job Performance, Leader Member Exchange, Emotional Intelligence and Organizational Commitment. *International Journal of Learning & Development*, 4, (2), 242-256. doi: 10.5296/ijld.v4i2.6100
- Sajjad, N.K. & Abbasi, B. (2014). *Studying the Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment*. Research Journal of Recent Sciences, 3, (2), 92-99.
- Sager, J.K., Griffeth, R.W. & Hom, P.W. (1998). A Comparison of Structural Models Representing

- Turnover Cognitions. *Journal of Vocational Behavior*, 53, (2), 254-273.
- Surienty, L., Ramayah, T., Lo, M.C. & Tarmizi, A.N. (2014). Quality of Work Life and Turnover Intention: A Partial Least Square (PLS) Approach. *Social Indicators Research*, 119, (1), 405-420. Doi: 10.1007/s11205-013-0486-5
- Tett, R.P. & Meyer, J.P. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings. *Personnel Psychology*, 46, (2), 259-293.
- Walton, R.E. (1973). Quality of Working Life: What Is It? *Sloan Management Review*, 15, (1), 11-21.
- Zhang, J.C., Ling, W.Q., Zhang, Z.Y. & Xie, J. (2015). Organizational Commitment, Work Engagement, Person-Supervisor Fit, and Turnover Intention: A Total Effect Moderation Model. *Social Behavior and Personality*, 43, (10), 1657-1666. <http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2015.43.10.1657e>

PERAN KEARIFAN LOKAL *KUMA* DALAM Mendukung EKONOMI KELUARGA PEREMPUAN DAYAK *BANYADU*

Benedhikta Kikky Vuspitasari, dan Angelus Ewid

STIM Shanti Bhuana Jalan Bukit Karmel No.1 Bengkayang 79211, Kalimantan Barat

E-mail : kikky@shantibhuana.ac.id, ewid@shantibhuana.ac.id

ABSTRAK. Rendahnya penghasilan ekonomi keluarga menyebabkan perempuan di Dusun Simpang Tiga melakukan kegiatan *Kuma* dengan upah berupa beras dan uang, keterbatasan lahan yang dimiliki serta rendahnya penghasilan suami merupakan faktor utama. Tujuan dari penelitian ini ingin menemukan dan merumuskan bagaimana meningkatkan peran kearifan lokal *kuma* dalam mendukung ekonomi keluarga bagi perempuan dayak Banyadu, kemudian faktor faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran kearifan lokal *kuma* dalam mendukung ekonomi keluarga bagi perempuan dayak Banyadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi dengan metode pengumpulan data, melalui observasi dan wawancara mendalam, pemilihan sampel menggunakan *metode purposeful sampling* sebanyak enam orang. dari hasil penelitian ditemukan bagaimana meningkatkan peran kearifan lokal *kuma* dalam mendukung ekonomi keluarga bagi perempuan dayak Banyadu yaitu melalui pelatihan berbasis pemberdayaan dimana kegiatan tersebut terdiri dari 7 tahap tahap diantaranya tahap menyadarkan masyarakat yang terdiri dari Koordinasi, analisis situasi dan menggali potensi diri dan potensi desa. Tahap peningkatan kemampuan masyarakat melalui persiapan pelatihan, pelatihan dasar. Tahap penerapan yang terdiri dari, menentukan jenis usaha berdasarkan potensi, memulai usaha serta tahap mendapatkan pelatihan berkesinambungan yang tujuannya untuk memberikan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan permasalahan yang mereka alami dilapangan. Dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut diperlukan narasumber yang memiliki keahlian dibidangnya agar materi yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi perempuan di dusun Simpang Tiga. Dukungan dari pemerintah terutama pemerintah desa khususnya desa Untang dusun Simpang Tiga baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dusun Simpang Tiga, harapannya semakin banyak yang ikut berpartisipasi semakin banyak masyarakat menerima manfaatnya serta merasakan dampaknya dan menerapkannya dalam kehidupannya.

Kata kunci: Kearifan lokal; Ekonomi; Perempuan; Dayak; *Banyadu*

THE ROLE LOCAL WISDOM OF *KUMA* IN SUPPORTING THE FAMILY ECONOMY FOR THE DAYAK WOMEN OF *BANYADU*

ABSTRACT. The low family economic income causes women in Simpang Tiga sub-village to do *Kuma* activities with wages in the form of rice and money; limited land ownership and low income from the husband are the main factors. The purpose of this study is to find and formulate how to increase the role of *Kuma's* local wisdom in supporting family economics for *Banyadu* Dayak women, then what factors support and hinder the role of *Kuma* local wisdom in supporting family economy for Dayak *Banyadu* women. This study uses a phenomenological qualitative research approach with data collection methods, through observation and in-depth interviews, sample selection using a *purposeful sampling* method of six people. From the results of the study it was found how to increase the role of *Kuma's* local wisdom in supporting family economics for *Banyadu* Dayak women through empowerment-based training in which the activity consisted of 7 stages including the community awareness stage consisting of coordination, situation analysis and exploring the potential and potential of the village. The stage of community capacity building through training preparation, basic training. The implementation phase consists of, determining the type of business based on potential, starting a business and the stage of obtaining ongoing training whose aim is to provide ongoing training in accordance with the problems they experience in the field. In carrying out the training activities, resource persons with expertise in their fields are needed so that the material provided is right on target and useful for women in the Simpang Tiga hamlet. Support from the government, especially the village government, especially the Untang village, Simpang Tiga sub-village, both the district government, village government and the community of Simpang Tiga sub-village, hopes that more people will participate and the more the community will receive the benefits and feel the impact and apply them in their lives.

Key words: Local Wisdom; Economy; Women; Dayak, *Banyadu*

PENDAHULUAN

Sejak dahulu nenek moyang kita telah mengajarkan banyak kearifan lokal, semua itu melat dalam susunan kehidupan bermasyarakat kita diantaranya dalam hidup bersosial, berbudaya hingga dalam lingkungan bermasyarakat, melalui kearifan lokal yang teruang dalam nilai-nilai tradisional yang terus digunakan dan diterapkan oleh kebanyakan masyarakat lokal. Isi dari kearifan lokal tersebut membahas mengenai sekumpulan aturan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nilai-nilai etika

yang memberikan pandangan dalam bertingkah laku dan bagaimana hidup bersosial dalam masyarakat semua itu selaras dengan perkembangan zaman.

Kearifan lokal ada karena adanya konflik yang terjadi didalam masyarakat yang menjadi sarana dalam memecahkan konflik tersebut, dimana dalam penyelesaian konflik disesuaikan dengan konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat. konflik ini sering kali terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, aspek sosial terkadang sering kali menjadi permasalahan yang umumnya terjadi di kehidupan saat ini bahkan sering kali menjadi konflik yang

sulit diselesaikan jika masyarakat terlalu mementingkan kepentingannya sendiri oleh karena itu kearifan lokal muncul sebagai solusi dalam memecahkan konflik tersebut dan menjadi pengetahuan baru bagi masyarakat hingga menjadi milik bersama.

Masyarakat lokal sangat mengenal kearifan lokal dengan baik karena disanalah kearifan lokal berkembang dan muncul pertama kali, munculnya kebiasaan dimulai saat mereka harus bekerja diluar rumah dan memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Membuka lahan untuk berladang dan menanam padi disawah salah satu contohnya, ini merupakan salah satu contoh bagaimana kebiasaan tersebut muncul dan menjadi tradisi sehingga muncullah kearifan lokal. Kearifan lokal ada karena adanya kebiasaan yang menghasilkan suatu tindakan yang menciptakan suatu sikap dalam menghadapi peristiwa tersebut kemudian menyebabkan terjadinya suatu ekspresi yang bermacam-macam salah satunya adalah tradisi adat istiadat, karya seni sampai cara berfikir manusia sehingga membentuk suatu kearifan lokal (Azizah, 2017:68), karena masyarakat sudah lama mengenal kearifan lokal tersebut sehingga mereka secara turun temurun menggunakan kebiasaan-kebiasaan untuk menghasilkan sesuatu dalam memenuhi kehidupannya namun semua itu tergantung dari masyarakat lokal itu sendiri karena semua tergantung dari bagaimana mereka bersikap dan bertindak laku. Namun di zaman modern saat ini kearifan lokal dapat dipercaya memberikan dampak yang baik bagi kesatuan hidup bermasyarakat, dengan bersatunya semua unsur yang ada dimasyarakat akan sangat mudah masyarakat dalam menyuarakan inspirasi, ide bahkan gagasan yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan didalam kehidupannya salah satunya adalah bagaimana permasalahan ekonomi mereka dapat diatasi, menjalin kehidupan bertetangga yang baik hingga menjaga kekompakan dalam bekerja, semua itu tercipta karena adanya adanya ikatan saling membutuhkan di lingkungan masyarakat semua ini tertuang dalam (Sopa, 2018:525)

Kearifan lokal menjadi sebuah tanda bagaimana masyarakat dalam menjalani kehidupannya dan mendapatkan pengalaman hidup dan semua itu diterapkan dalam keseharian mereka dan menjadi satu pandangan hidup bermasyarakat dalam bertindak dan mengambil keputusan. (Pattinama, 2009:1) menegaskan bahwa munculnya kearifan lokal dapat membantu masyarakat lokal mengatasi permasalahannya melalui potensi yang ada di masyarakat dan dapat dikembangkan, melalui potensi tersebut harapannya masyarakat dapat berkembang, ekonomi meningkat, masyarakat sejahtera dan kemiskinan yang ada dimasyarakat dapat diturunkan jumlahnya, semua itu dapat terjadi karena didalam kehidupan masyarakat lokal nilai kehidupan tradisional

dapat membentuk kehidupan yang setara antara manusia dan alam, namun semua itu terjadi tidak terlepas dari gaya hidup dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kearifan lokal akan lebih terasa didalam kehidupan masyarakat ketika mereka mengalami musibah (Utama, 2013:1) Seperti yang terjadi di Aceh kearifan lokal sangat terasa ketika bencana alam tsunami pada tahun 2004, yaitu kearifan lokal Smong untuk mengurangi resiko bencana. Selain itu (Sungkharat, 2010:302) menyatakan kegiatan penerapan peningkatan kearifan lokal dapat dilakukan melalui pelatihan yang disampaikan kepada masyarakat, semua itu disesuaikan dengan lingkungan masyarakat setempat dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat sehingga mereka akan mudah menerima dan menerapkannya. (Kamonthip, 2007:2) bahwa dalam mengembangkan kehidupan masyarakat melalui kearifan lokal sangat penting karena di dalam kehidupan masyarakat biasanya mereka akan membentuk suatu kelompok besar maupun kelompok kecil yang akan membentuk suatu komunitas sehingga melalui kelompok tersebut mereka akan banyak berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga tercipta kehidupan yang berkelanjutan dengan cara seperti itu akan memberikan pengaruh yang baik bagi kelangsungan hidup mereka, semua itu sangat bermanfaat dimana masyarakat yang terlibat adalah masyarakat yang ingin meningkatkan ekonominya.

Namun untuk mewujudkan itu semua pemerintah desa semestinya ikut mendukung dan berpartisipasi. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal mempunyai pengaruh yang besar untuk menangkal permasalahan sosial dan budaya yang ada di masyarakat ditengah munculnya teknologi yang masuk dalam kehidupan masyarakat, hingga cukup membuat kita prihatin karena semakin banyak masyarakat mulai melupakan arti penting dari nilai-nilai yang dihasilkan oleh kearifan lokal. Nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal membawa kita mengetahui dan mengajarkan kita bagaimana berperilaku, bersikap dan saling menghargai (Neni Rahmawati, 2012:17)

Melihat perkembangan zaman yang semakin maju serta dampak yang ditimbulkan. Perlu media atau sarana yang diberikan melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan di sekolah dan di rumah melalui pendidikan formal maupun informal sehingga kearifan lokal ini dapat terus dilestarikan dan hingga generasi muda mengetahui bahwa kearifan lokal adalah warisan dari leluhur kita yang harusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kearifan lokal tersebar diseluruh wilayah yang ada di Indonesia salah satunya yang ada di Kalimantan Barat, terletak di kabupaten Landak.

Kearifan lokal Kuma merupakan salah satu kebiasaan atau tradisi yang dimiliki oleh dayak Banyadu dalam berladang dan bersawah. Tradisi ini sering kali dijalankan

oleh masyarakat lokal yang berdiam di Dusun Simpang Tiga, tradisi Kuma bagi masyarakat Dusun Simpang tiga dilakuka terus menerus oleh masyarakat yang memiliki sawah dan ladang, kegiatan ini biasanya melibatkan kaum perempuan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan mereka.

Kata *Kuma* merupakan berasal dari bahsa yang sering kali mereka gunakan yaitu Nguma (Silvi, Agustine Lumangkun, 2017:1032). Tradisi kuma yang sudah mereka terapkan merupakan kearifan lokal yang sudah ada dari dahulu dan hingga saat ini masih dilakukan Oleh para wanita dayak Banyadu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam kesehariannya para wanita yang terbiasa dengan pekerjaan disawah dan diladang akan memanfaatkan Kuma sebagai penunjang dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari pekerjaan Kuma mereka akan mendapatkan upah. semua disebabkan tidak ada sumber penghasilan lain di dusun tersebut, kebutuhan yang sangat banyak sehingga mereka juga terlibat dalam memenuhi kebutuhan tersebut, (Elizabeth, 2008:63) menyatakan bahwa para wanita petani yang kesehariannya melakukan pekerjaan pertanian akan terlibat aktif mencari sumber penghasilan lain, semakin banyak pekerjaan yang akan mereka lakukan semakin banyak pula tenaga dan energi yang mereka curahkan untuk pekerjaan tersebut. Semakin rendah tingkat ekonomi keluarga wanita petani tersebut maka akan semakin banyak aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan untuk menghasilkan uang guna menunjang ekonomi keluarga (Frida Nur Rizkia, 2017:408) menyatakan bahwa wanita yang mempunyai keinginan membantu suami dalam meningkatkan perekonomian keluarga sering kali melakukan pekerjaan berkebun, berdagang sampai menjadi buruh pabrik semua itu dilakukan demi keberlangsungan hidup keluarga. (Khusnul Khotimah, 2009:166) menyatakan hampir mayoritas yang bekerja sebagai buruh tani adalah wanita dan faktor penyebabnya adalah pendidikan dan kemiskinan.

Untuk itu dapat disimpulkan wanita petani mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Selain wanita petani mencari penghasilan dalam membantu suami, mereka juga harus mengurus rumah tangga mulai dari masak dan mengurus anak, peran ganda yang mereka jalani menunjukkan bahwa wanita petani adalah wanita yang hebat namun perlu adanya perhatian dari pemerintah maupun pemerintah desa yang diberikan untuk kelangsungan hidup wanita petani sehingga mereka tidak bergantung pada kegiatan Kuma sebagai sumber penghasilan keluarga, hal ini didukung dari hasil penelitian (S. Boakye-Achampong dkk. 2012:38-39) menyatakan bahwa kemampuan wanita petani dalam mengolah hasil pertanian masih tergolong sangat rendah untuk itu pemerintah semestinya mendukung melalui

kegiatan diluar pertanian yaitu pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan, tujuannya adalah meningkatkan penghasilan mereka terutama rumah tangga sehingga sumber penghasil mereka tidak hanya satu namun dapat menemukan sumber penghasilan lain.

Hasil penelitian dari (Bambang dkk, 2013) model community development merupakan salah satu model yang cocok diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas wanita petani, implementasinya adalah pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka, pelatihan yang diberikan bersifat informal seperti yang disampaikan oleh Surakman dalam (Suharto, 2016: 335-336) bahwa konsep pendidikan yang dijalankan dilingkungan masyarakat adalah 1. Mereka yang mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan; 2. Mereka yang peka akan pendidikan; 3. Sadar akan manfaat pendidikan, karena melalui pendidikan mereka mampu bersaing; 4. Sadar bahwa mereka yang mendukung pembiayaan dan pengadaan sarana pendidikan. Artinya pendidikan yang dijalani oleh masyarakat adalah hasil dari kesadaran mereka diantaranya penyediaan sarana pendidikan serta pembiayaan, melalui pendidikan yang mereka jalani semua itu dapat memajukan kehidupan mereka dan menghapus mereka dari ketertinggalan.

Saat mereka tau bahwa pendidikan sangat penting maka mudah menerapkan pelatihan-pelatihan yang diberikan dan sadar bahwa pelatihan tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Pelatihan-pelatihan yang diberikan hendaknya memasyarakatkan mereka untuk lebih aktif diantaranya pelatihan berbasis masyarakat dimana dalam kegiatan ini para perempuan diajak berkumpul bersama untuk menggali kemampuan mereka, seperti yang diketahui bahwa pemberdayaan menurut (Diah, 2019:154-155) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu termasuk masyarakat yang mengalami kemiskinan, ada tiga tahap proses pemberdayaan yang dilakuka yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Tahap yang pertama yaitu tahap penyadaran dimana tahap ini masyarakat diberi ilmu atau pengetahuan tentang suatu hal yang membuka pikiran mereka sehingga mereka menjadi tau atau bahkan masyarakat yang tidak peduli menjadi tertarik sehingga melalui pengetahuan yang mereka dapatkan semakin menguatkan mereka untuk lebih terpacu melakukan kegiatan usaha atau kegiatan yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Tahap kedua yaitu pengkapasitasan, pada tahap ini masyarakat diminta untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka melalui kegiatan pelatihan yang diberikan tujuannya dengan pelatihan, mereka mendapatkan pengetahuan dan segera menerapkannya, contohnya para perempuan dapat mengetahui cara mengolah, para perempuan dapat

mengetahui cara mengemas suatu produk, para perempuan mengetahui cara memasarkan, para perempuan mengetahui bagaimana cara manajemen usaha serta para perempuan mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan usaha yang dimilikinya, melalui kegiatan pelatihan yang dilakukan hal-hal seperti ini tentunya tidak semua mereka peroleh di bangku sekolah dasar dan tentunya setelah mengetahui kegiatan pelatihan mereka menjadi tahu.

Tahap selanjutnya tahap pendayaan, yang dilakukan oleh para perempuan selanjutnya adalah mereka membuka usaha secara mandiri dan menerapkannya dengan baik dilingkungan tempat tinggal mereka, melalui penerapan yang baik tentunya akan menjadi contoh bagi perempuan-perempuan yang lainnya untuk lebih dapat giat lagi untuk mengelola usaha dengan baik sehingga usaha tersebut dapat berjalan dan bersaing sesuai dengan perkembangan zaman.

Kearifan lokal dimiliki oleh setiap daerah tentunya memiliki keunikan tersendiri dan dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Penghasilan ekonomi keluarga menyebabkan perempuan di Dusun Simpang Tiga melakukan kegiatan *Kuma* dengan upah sebesar Rp. 50.000 dan beras, keterbatasan lahan yang dimiliki serta rendahnya penghasilan suami merupakan faktor utama. Tujuan dari penelitian ini ingin menemukan dan merumuskan bagaimana meningkatkan peran kearifan lokal *kuma* dalam mendukung ekonomi keluarga bagi perempuan dayak Banyadu, kemudian faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran kearifan lokal *kuma* dalam mendukung ekonomi keluarga bagi perempuan dayak Banyadu. penelitian ini ingin memberikan gambaran bagaimana konsep kearifan lokal dapat digunakan dan diterapkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di dusun Simpang Tiga. Dengan konsep hasil penelitian tersebut harapannya desa dapat menerapkan konsep tersebut.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif fenomenologi, menurut (Slameto, 2015:71) penelitian kualitatif adalah “sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang dicermati dengan hasil yang diperoleh berupa tindakan atau kata-kata, sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul bukan dari hipotesis-hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif”. Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang mempelajari bagaimana suatu kejadian yang dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan seperti bagaimana fenomenologi tersebut bernilai atau dapat diterima secara estetis, kesimpulannya bahwa penelitian kualitatif fenomenologi

adalah penelitian yang hasilnya dapat dijadikan teori berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh narasumber.

Fokus penelitian ini adalah kegiatan *Kuma* yang dilakukan oleh para wanita tani dayak Banyadu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sumber data dari kegiatan penelitian ini adalah para wanita tani yang berasal dari dusun Simpang Tiga Kabupaten Landak Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan *purposeful sampling* dengan narasumber sebanyak 6 orang dengan cara wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi serta menjawab masalah yang ada pada penelitian ini.

Teknik Analisis Data Analisis penelitian fenomenologi menurut Creswell dan Moustakas dalam (Siti Kholifah, 2018:17) adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut : 1. Mendeskripsikan secara lengkap peristiwa yang telah dialami narasumber melalui penulisan transkrip hasil wawancara; 2. Tahap horizontal, melalui hasil wawancara berupa transkrip peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang sesuai dengan topik; 3. Tahap *clouser of meaning* : (pengelompokan makna) selanjutnya peneliti membuat klasifikasi dari pernyataan-pernyataan yang penting ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta dapat menyisihkan pendapat yang tumpang tindih dimana dalam tahap ini deskripsi struktural dimana semua hal yang terjadi pada informan ditulis sesuai dengan konteks fenomena itu terjadi; 4. Tahap deskripsi esensi : dimana peneliti membangun deskripsi secara menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman informan. Peneliti melaporkan hasil penelitian, dimana hasil laporan memberikan pemahaman kepada pembaca sehingga pembaca dapat mengerti akan hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal *kuma* membantu ekonomi keluarga

Tradisi *kuma* yang sudah diterapkan turun temurun oleh Dayak *Banyadu* merupakan kearifan lokal yang sudah ada dari dahulu dan hingga saat ini masih dilakukan oleh para wanita prtani dayak *Banyadu* dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam kesehariannya para wanita yang terbiasa dengan pekerjaan disawah dan diladang akan memanfaatkan *kuma* sebagai penunjang dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari pekerjaan *Kuma* mereka akan mendapatkan upah. semua disebabkan tidak ada sumber penghasilan lain di dusun tersebut, kebutuhan yang sangat banyak sehingga mereka juga terlibat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. kegiatan *kuma* dilakukan oleh para wanita tani biasanya berhubungan dengan kegata pertanian yaitu merumput, menanam, menebas, memanen padi yang ada di ladang.

Kegiatan *kuma* digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur mereka seperti yang diutarakan oleh narasumber LN menggunakan bahasa setempat

.... kai kuma biasa kan magaji Rp. 50.000,- sakali kuma dakoh biasa yak mari binyak, sia gik dongkayu...

(Yang artinya kami digaji sebesar Rp.50.000/ hari, uang digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti minyak goreng, garam dan sayur).

Ditengah kesulitan ekonomi yang mereka rasakan kegiatan *Kuma* menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan ekonomi keluarga, manfaat lain yang dirasakan oleh narasumber LIN adalah mereka bisa menggunakan hasil kegiatan *Kuma* untuk membayar listrik dan bekal jajan untuk anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah.

....uang dari kuma dakoh yak jajan anak gik mayar listrik...

(uang dari hasil Kuma untuk jajan anak dan bayaran listrik)

Penghasilan keluarga yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana penghasilan suami juga tidak menentu dan tidak ada sumber penghasilan lain bagi para wanita sehingga mereka harus ikut bekerja, seperti yang dikemukakan oleh (Frida Nur Rizkia, 2017:408) bahwa wanita yang bekerja sebagai petani, berdagang atau buruh pabrik mempunyai tujuan yaitu membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kurangnya penghasilan suami sehingga istri juga harus kreatif mencari penghasilan tambahan guna kelangsungan memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti yang disampaikan narasumber SJ

..... banun ko ndu tantu penghasilan ne, kalau kuma adu uga yak keperluan da ka raminlah kadang kan minis utuk nabung uga

(.....penghasilan suami saya tidak menentu, dari hasil kuma di pakai untuk keperluan di rumah terkadang disimpan untuk ditabung.....)

Pekerjaan di ladang dan disawah merupakan pekerjaan sudah biasa dilakukan oleh mereka, karena mereka sudah terlibat sejak kecil oleh orang tua, diajarkan cara menanam, merumput, memanen semua kegiatan tersebut benar-benar dijalankan secara tradisional, tingkat pendidikan dan rendahnya kreativitas yang mereka miliki menjadikan mereka terbiasa dengan keadaan saat ini, seperti yang disampaikan oleh (Khusnul Khotimah, 2009:163) menyatakan hampir mayoritas yang bekerja sebagai buruh tani adalah wanita dan faktor penyebabnya adalah pendidikan dan kemiskinan.

....Ikin hanya sakolah sampe kalas 4 SD ta, nak ngalanjut sakolah meh ndu ba uang. Dakoyu ngate sakolah meh dama ndu mampu mayar uang sakolah,

daripada moko ka ramin baik mungkut. Pamungkut da pertama kin kaatn ka Pontianak jad babysitter so mungkut pamungkut da ka dapur uga. Kadang gaji e meh kan ngirim ka dama uga....

(.....saya hanya sekolah sampai di kelas 4 SD, untuk melanjutkan sekolah orang tua tidak punya biaya sehingga saya memilih untuk bekerja, tujuan pertama saya bekerja di Pontianak dan pekerjaan saya sebagai babysitter merangkap asisiten rumah tangga, gaji yang saya peroleh saya gunakan untuk keperluan pribadi dan dikirim untuk orang tua....).

Keadaan ekonomi orang tua membuat mereka tidak melanjutkan pendidikan. Walaupun keinginan mereka untuk melanjutkan sekolah ada, pilihan yang mereka lakukan bekerja dengan kemampuan dan pengalaman yang minim diusia yang masih dini membuat mereka harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga. memanfaatkan pengetahuan yang diberikan orang tua yang sudah mengajarkan mereka untuk bekerja di sawah, mereka sudah terbiasa merumput, menebas, memanen karena itu hingga dewasa mereka sudah terbiasa melakukannya. Tidak punya pilihan karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki, hanya pengalaman yang mereka punya dari orang tua sebagai modal untuk tetap bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Lahan pekerjaan yang minim perusahaan-perusahaan tidak ada hanya lahan yang bisa digarap untuk sawah jika tidak ada lahan mereka memilih bekerja di sawah milik tetangga bekerja mengharapakan upah seperti yang terjadi dengan narasumber LN :

.....ndu ba pamungkut lain ka diah meh, nak nguma ndu ba tana. Perusahaan-perusahaan pun nyandu ka daerah adup diah nyandu ba pamungkut lain meh kuma ta

(.....tidak ada pekerjaan lain di sisni, mau berladang tidak ada lahan. Perusahaan-perusahaan juga tidak ada di tempat kita, tidak ada pekerjaan lain kecuali Kuma...)

Sumber penghasilan yang minim, serta lapangan pekerjaan yang minim, menyebabkan mereka mengandalkan *Kuma*. Di dusun Simpang Tiga mempunyai banyak potensi alam yang belum dimaksimalkan oleh masyarakat setempat, keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam mengolah sesuatu yang tidak mereka miliki seperti yang di sampaikan narasumber LIN:

.....ka adup diah sangat potensi adu jagong, angale, pade tapi bah ndu pane ngolah e

(.....potensi di Simpang Tiga banyak seperti jagong, ubi dan padi tapi tidak tau mengolahnya....)

Secara geografis dusun Simpang Tiga memiliki wilayah pegunungan yang terdiri dari hutan dan lembah,

dari hutan yang mereka miliki menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang banyak manfaatnya, tidak semua tanaman dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya, contohnya mereka memanfaatkan tanaman yang terdapat di hutan tersebut untuk mencari tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran yang dapat dikonsumsi oleh keluarga dan dimanfaatkan dijual kembali, tanaman-tanaman tersebut adalah tanaman lokal yang biasa mereka manfaatkan untuk dimasak. Di hutan terdapat bambu dan rotan namun rotan saat ini sudah mulai jarang ditemui di hutan sekitar mereka, potensi lainnya di sekitar dusun Simpang Tiga mayoritas memanfaatkan lahan untuk persawahan namun untuk hasil belum maksimal. Masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Perhatian oleh pemerintah dibidang pertanian juga masih belum maksimal dijalankan belum ada kelompok-kelompok petani yang berhasil dalam mengelola hasil pertanian, karena melalui kelompok-kelompok tani tersebut mereka bisa membentuk gabungan kelompok tani atau biasa disebut dengan Gapoktan seperti yang disampaikan oleh Narasumber LIN

*.....dakoyu adu kelompok tani tapi meh ndu gik bajalan mathi diah...
(.....dahulu kelompok tani ada dan sempat ada beberapa waktu namun saat ini sudah tidak aktif lagi....)*

Kurangnya pengetahuan dalam mengelola potensi alam yang dimiliki menjadi salah satu kendala bagi masyarakat disekitar untuk dapat beralih ke sumber penghasilan lain kecuali mengolah sawah, masyarakat belum banyak memanfaatkan lahan-lahan yang kosong tersebut untuk hal lain seperti berkebun sayur, dengan berkebun sayur mereka tidak akan mengambil sayuran di hutan, karena sayuran di hutan tidak akan selamanya ada, suatu saat pasti akan punah jika masyarakat tidak beralih menanam sayuran sendiri, masyarakat juga terbiasa dengan sayuran yang dibawa oleh para penjual sayur yang berasal dari daerah setempat namun mereka berbelanja ke Singkawang untuk mendapat stok sayuran yang mereka jual ke masyarakat sekitar, hal ini sebenarnya peluang bagi masyarakat di Simpang Tiga untuk membuat kebun sayuran tentunya dapat menghasilkan sumber ekonomi baru bagi keluarga, namun inisiatif ini belum ada hingga saat ini. Semua itu berkaitan dengan pengetahuan mereka dalam melihat peluang serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu diperlukan sarana yang dapat bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan ilmu baru yang dapat mereka manfaatkan untuk mengembangkan diri, membuka wawasan mereka untuk dapat melihat peluang yang ada di sekitar mereka melalui pelatihan seperti yang di ungkapkan oleh narasumber SJ:

*.....ikin itu bah ikut pelatihan kalau adu wah umas kerajinan tangan ...
(.....saya mau saja ikut pelatihan seperti pelatihan kerajinan tangan.....)*

Kerinduan mereka untuk mendapatkan pengetahuan baru melalui pelatihan sangat diharapkan oleh para narasumber yang kami temui, keinginan ini juga di sampaikan oleh narasumber lainnya seperti yang disampaikan narasumber MJ

*.....Ndu pernah kin ikut pelatihan kalau adu meh itulah supaya kaatn pengalaman
(.....Saya tidak pernah ikut pelatihan kalau ada saya akan megikutinya agar dapat pengalaman baru...)*

Keinginan untuk mendapat pengetahuan baru, sepertinya sudah ada dalam benak mereka, hanya mereka tidak tau bagaimana cara mengungkapkannya kepada pihak yang dituju khususnya bagi pemerintah setempat, keinginan untuk mengubah pemikiran mereka sehingga mereka punya pemikiran baru dan bisa dikembangkan seperti yang dikemukakan oleh narasumber LIN:

*.....Kalau adu pelatihan untuk kai kin bersyukur sekali supaya adu pengetahuan baru da kan kai kaatn kiah banget potensi tapi ndu pane ngolah e.....
(.....Kalau ada pelatihan saya bersyukur sekali supaya kami dapat pengetahuan baru karena disini banyak potensi tapi tidak tau mengolahnya)*

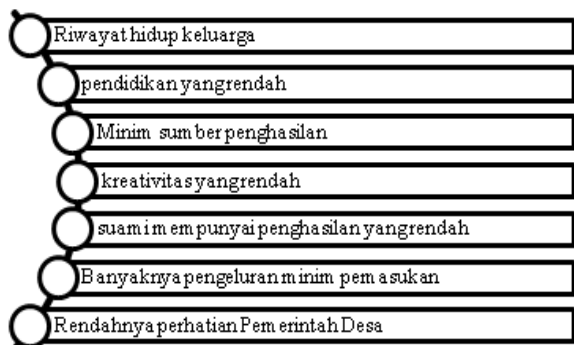
Saat itu keinginan pelatihan ini sempat di utarakan dan ditanyakan apakah selama ini pemerintah desa pernah atau tidak melakukan kegiatan pelatihan guna memberikan ilmu baru ke pada masyarakat sebagai pesertanya. Seperti yang disampaikan salah satu staf desa

*.....dakoyu tahun 2016 pernah adu pelatihan, cara mencangkok bataknng gatah tapi meh peserta ninik trus susah manso narasumber...
(...Pada tahun 2016 silam pernah diadakan pelatihan yaitu cara mencangkok pohon karet namun yang menjadi peserta sangat sedikit selain itu kesulitan dalam mencari narasumber menjadi kendala bagi kami....)*

Hal serupa diutarakan oleh kepala desa bahwa dahulu pernah ada dilakukan pelatihan, jika memang ada kegiatan pelatihan desa akan mendukung namun untuk kegiatan tersebut tidak bisa dianggarkan dalam waktu dekat karena pada tahun ini pemerintah desa melalui anggaran dana Desa juga terfokus pada bidang pembangunan hal ini disampaikan oleh Kepala Desa :

....Pada tahun ini anggaran untuk peningkatan kapasitas hanya untuk kader kesehata saja mungkin tahun 2020 bisa dianggarkan untuk kegiatan tersebut....

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama penelitian diatas ditemukan apa yang menjadi latar belakang perempuan dayak Banyadu menjalankan kegiatan Kuma diantaranya:



Gambar. 1 Latar belakang perempuan dayak Banyadu melakuka Kuma.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan kegiatan *kuma* dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari semua itu didukung dari beberapa faktor salah satu rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Manfaat *kuma* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi ekonomi dan sisi sosial. Dari sisi ekonomi dapat membantu para wanita dayak *Banyadu* mendapatkan penghasilan tambahan, dapat membantu suami, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat menabung, dapat memenuhi kebutuhan anak diantaranya uang saku atau uang jajan, menabung.

Dari segi sosial kegiatan kearifan lokal kuma mempunyai manfaat diantaranya menjaga hubungan baik dengan tetangga, mengurangi jumlah pengangguran antar perempuan, meningkatkan kerjasama, menghidupkan semangat gotong royong yang pada umumnya sudah hampir hilang dan tentunya akan punah jika tidak dilestarikan. Adapun manfaat kegiatan kuma dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Manfaat kegiatan kearifan lokal Kuma melakukan Kuma.

Cara meningkatkan peran kearifan lokal Kuma

Cara meningkatkan kegiatan *kuma* diperlukan suatu konsep kegiatan peningkatan kapasitas bagi para perempuan di dusun Simpang Tiga melalui pelatihan, pelatihan sebagai sarana belajar untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat.

Kegiatan ini tentunya bermanfaat untuk meningkatkan peran kearifan lokal *Kuma* melalui pelatihan berbasis pemberdayaan, melalui pemberdayaan sumber daya manusia akan terbentuk sehingga terbentuk pulalah manajemen sumber daya manusia semua itu melalui pendidikan yang melibatkan guru dan murid sebagai sumber daya manusia (Kantirina Rachaju, 2019:20)

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pelatihan yang diberikan merupakan bagian pendidikan yang dilakukan bersifat informal berupa pelatihan yang melibatkan masyarakat dan dapat memberikan dukungan kepada mereka untuk mendapatkan pengetahuan (Bambang Suswanto, 2013:311). Tentunya pendapat tersebut sejalan dengan apa yang ingin penulis sampaikan bahwa pendidikan informal berupa pelatihan merupakan sarana yang wajib didapatkan oleh masyarakat yang lemah. Kegiatan pelatihan yang cocok dan sesuai agar peltihan tersebut tepat sasaran. (Suharto 2016;333-334) menyatakan pelatihan berbasis pemberdayaan merupakan sarana yang sangat tepat mengingat keadaan masyarakat yang tinggal di daerah Dusun tersebut, latar belakang masyarakat serta tradisi yang mereka jalani selama ini, seperti yang disampikan wrihatnolo dan Nugroho dalam (Diah, 2019:154-155) bahwa dalam melakukan kegiatan pelatihan berbasis pemberdayaan ada 3 tahap yang perlu diketahui dimana proses itu terdiri dari penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Dalam penelitian ini tahap penyadaran masyarakat diberi pengetahuan tentang kemampuan yang dimiliki serta potensi-potensi yang ada dilingkungan mereka dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang sangat berguna dan memiliki nilai ekonomi. Penerapannya yang harus dilakukan ditahap penyadaran adalah sebagai berikut ditahap pertama dan kedua dimana tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut:

1. Tahap menyadarkan masyarakat. Dimana tahap awal yang harus dilakukan adalah tahap koordinasi mengumpulkan masyarakat terutama kaum perempuan yang ada di dusun tersebut tidak lupa mengajak serta kepala Desa beserta perangkat desa, diajak duduk bersama untuk membahas rencana kegiatan pelatihan,
2. Peningkatan kemampuan masyarakat. Pada tahap ini terdiri dari analisis situasi dan menemukan solusi serta menggali potensi-potensi yang ada di desa kemudian bekerjasama mengembangkan potensi yang akan dijadikan usaha. Selanjutnya rencana kegiatan pelatihan yang sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan untuk menunjang kegiatan usaha para perempuan di Dusun tersebut dan menjalankan pelatihan dasar. Dalam tahap ini para perempuan-perempuan tersebut di beri pengetahuan melalui minat dan kemampuan mereka, diantaranya kemampuan manajemen suatu usaha, kemampuan dalam mengelola keuangan, kemampuan dalam memimpin serta kemampuan dalam memasarkan

produk yang mereka hasilkan selanjutnya kemampuan dalam menginovasi suatu prodak sehingga prodak tersebut dapat bertahan dan mampu bersaing.

Persiapan pelatihan persiapan pelatihan perlu dilakukan diawal guna mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menyangkut dimana akan dilakukan, lamanya kegiatan, biaya yang digunakan dan jenis pelatihan, waktu serta keterlibatan narasumber-narasumber yang berkopensi dibidangnya sehingga pelatihan tersebut tepat sasaran.

Kegiatan pelatihan ini diawali dengan pelatihan dasar, pelatihan ini bertujuan untuk mengenalkan potensi yang mereka pilih dan yang akan dijadikan usaha guna mengembangkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Dalam tahap ini perempuan-perempuan diajarkan bagaimana mereka harus memiliki kemampuan dalam manajemen usaha, mengelola keuangan, memimpin, memasarkan dan menginovasikan sehingga dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

3. Penerapan

Dimana dalam tahap penerapan perempuan-perempuan tersebut diberi kesempatan dalam meningkatkan kapasitas mereka melalui usaha apa yang mereka akan lakukan serta melalui pilihan tersebut masyarakat akan mendapatkan pelatihan dalam menentukan jenis usaha hendaknya memperhatikan minat dan kemampuan yang dimiliki masing perempuan yang mengikuti kegiatan tersebut wajib menentukan jenis usaha berdasarkan potensi yang dimiliki desa dan tentunya mempertimbangkan kemampuan diri sendiri. Para perempuan dibentuk dalam kelompok kecil untuk memudahkan masyarakat untuk saling bekerjasama, usaha yang diambil berdasarkan potensi yang dimiliki. Perempuan memulai usaha bersama-sama dengan kelompok atau secara individu. disini semakin terlihat peran kearifan lokal Kuma dimanfaatkan dimana dalam mengembangkan usaha tersebut membutuhkan tenaga dalam mengerjakan usaha yang digelar tentunya perempuan-perempuan yang menjalankan kegiatan Kuma mendapat kesempatan untuk belajar agar perempuan yang ada di dusun tersebut bisa mendapatkan sumber penghasilan lain melalui suatu usaha yang dimiliki masyarakat tersebut.

4. Pelatihan Berkesinambungan

Pelatihan berkesinambungan bertujuan memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk memecahkan kesulitan dalam mengembangkan usaha tersebut tentunya pelatihan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan mereka. Dalam memulai usaha pasti terdapat hal-hal yang terjadi dan semua berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi tentunya dalam menghadapi masalah diperlukan solusi untuk dapat mendapatkan jalan keluarnya.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perempuan-perempuan disini harus mendapatkan pendampingan berupa pelatihan berkesinambungan yang tujuannya untuk memberikan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan permasalahan yang mereka alami dilapangan, misalnya dalam menjalankan kegiatan usaha mereka ternyata masih lemah dalam cara pemasaran, maka yang dilakukan adalah pemberian pelatihan berupa cara bagaimana cara memasarkan produk agar mendapat tempat dimasyarakat, atau dalam menjalankan usaha tersebut masyarakat masih belum maksimal dalam mengelola keuangan diperlukan pelatihan serta pendampingan secara intensif sehingga perempuan-perempuan tersebut dapat mandiri, di bidang lainnya misalnya mereka dalam pengemasan produk belum dapat memberikan kemasan yang baik, maka diperlukan pelatihan khusus untuk dapat mendampingi para perempuan dalam memilih kemasan yang menarik dan serta mempunyai nilai ekonomis dihadapan konsumen. Kegiatan pelatihan tersebut tentunya haruslah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan mendapat dukungan dari pemerintah desa agar .

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan konsep yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi perempuan dayak Banyadu di dusun Simpang Tiga adalah: dalam tahap 1 dan 2 Menyadarkan masyarakat yang terdiri dari Koordinasi, analisis situasi dan menggali potensi diri dan desa. Tahap 3 dan 4 peningkatan kemampuan masyarakat melalui persiapan pelatihan, pelatihan dasar. Tahap 5 dan 6 penerapan yang terdiri dari, menentukan jenis usaha berdasarkan potensi, memulai usaha serta tahap 7 mendapatkan pelatihan berkesinambungan yang tujuannya untuk memberikan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan permasalahan yang mereka alami dilapangan adapun gambaran konsep peningkatan ekonomi perempuan dayak Banyadu adalah sebagai berikut melalui adalah:



Gambar 3. Konsep peningkatan ekonomi perempuan dayak Banyadu melalui kearifan lokal Kuma.

SIMPULAN

Kegiatan kearifan lokal Kuma di Dusun Simpang Tiga sangat bermanfaat bagi perempuan yang ada di dusun tersebut, diperlukan dukungan bagi pemerintah desa untuk dapat mendukung kegiatan tersebut melalui pelatihan, pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam Rumah tangga, dengan meningkatnya ekonomi rumah tangga maka tingkat kesejahteraan dapat terlihat dari segi pendidikan dan kesehatan rumah tangga tersebut.

Pelatihan tersebut juga hendaknya sesuai dengan keadaan masyarakat setempat diantaranya melalui pelatihan berbasis pemberdayaan dimana kegiatan tersebut terdiri dari tahap 1 dan 2 Menyadarkan masyarakat yang terdiri dari Koordinasi, analisis situasi dan menggali potensi diri dan potensi desa. Tahap 3 dan 4 peningkatan kemampuan masyarakat melalui persiapan pelatihan, pelatihan dasar. Tahap 5 dan 6 penerapan yang terdiri dari, menentukan jenis usaha berdasarkan potensi, memulai usaha serta tahap 7 mendapatkan pelatihan berkesinambungan yang tujuannya untuk memberikan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan permasalahan yang mereka alami di lapangan. Semua tahap yang dilakukan tentunya perlu mendapatkan evaluasi dari evaluasi tersebut akan muncul permasalahan sehingga diperlukan solusi.

Namun dalam melakukan kegiatan pelatihan tersebut diperlukan narasumber-narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya agar materi yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi para perempuan di dusun Simpang Tiga. Narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya misalnya untuk kegiatan pemasaran, semua berkaitan dengan brand, harga, kualitas produk, tempat, narasumber yang benar-benar pernah mengalami dan sudah mendapatkan tentunya sudah mempunyai pengalaman di bidang bisnis.

Selanjutnya adalah dukungan dari pemerintah terutama pemerintah desa dusun Simpang Tiga karena dalam menjalankan kegiatan tidak lepas dari kerjasama baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa, warga masyarakat sendiri, semakin banyak yang ikut berpartisipasi tentunya berdampak pada pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat terkoordinasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, S.N. (2017). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta), 17, 63–78.

Bambang, S., Handoko, W. & Sabiq, A. (2013). model community development sebagai strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal. *Jurnal Review Politik*, 03, (02), 298–312.

Diah, M.P. (2019). Peranan Kreativitas dan Inovasi dalam Peningkatan Produktivitas UMKM Pengolah Mangga Podang (Studi Pada Kelompok Tani Wanita “Budidaya” Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5, (2), 152–156.

Elizabeth, R. (2008). Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan. *Journal Iptek Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian - Republik Indonesia*, 3, (1), 59–68.

Frida, N.R. (2017). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2wkss Di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman. *Jurnal Social Studies Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta*, 6, (4), 406–418.

Kamonthip, K. (2007). Local Wisdom, Environmental Protection And Community Development: The Clam Farmers In Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand. *MANUSYA: Journal of Humanities*, 10, (1), 1–10.

Kantirina, R. (2019). Effectiveness of regional autonomy in building empowerment of human resources in rural communities. *Sosiohumaniora*, 21, (1), 17–21. <http://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.11974>

Khusnul, K. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Yinyang : Jurnal Studi Islam, Gender and Anak, STAIN Purwokerto*, 4, 1.

Neni, R.P.N. (2012). The Value of Education in Paddy Cultivation of Kanayatn Dayak in West. *Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Pontianak*, 15–25.

Pattinama, M. J. (2009). Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku Dan Surade-Jawa Barat). *Makara, Sosial Humaniora*, 13, (1), 1–12.

Boakye-Achampong, S., Mensah, J.O., Aidoo, R.K. O.-A. (2012). The Role of Rural Women in the Attainment of Household Food Security in Ghana: A Case Study of Women- Farmers in Ejura-Sekyeredomasi District. *International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology*, 12, (1), 29–38.

- Silvi, & Lumangkun, A.E.W. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Kegiatan Ladang Berpindah Di Dusun Laek Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Hutan Lestari*, 5, (4), 1027–1034.
- Siti, K. & Suyadnya, I.W. (2018) Metodologi penelitian kualitatif berbagi pengalaman dari lapangan , PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Sopa, M. (2018). Local Wisdom in the Cultural Symbol of Indonesian Traditional House, 524–531. <http://doi.org/10.18502/kss.v3i4.1962>
- Suharto, T. (2016). Konsep dasar pendidikan berbasis masyarakat. *ResearchGate*, (December 2005), 3.
- Sungkharat, U. (2010). Local Wisdom : The Development Of Community Culture And Production Processes In Thailand. *International Business and Economics Research Journal*, 9, (11), 115–120.
- Utama, D.K.M.B. (2013). Kearifan Lokal dan Lingkungan. PT.Gading Inti Prima dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

GRICE'S COOPERATIVE PRINCIPLES VIOLATION IN THE COMMUNICATION OF CHILDREN WITH AUTISM

Dian Wahyunianto¹, Djatmika,² dan Dwi Purnanto³

¹Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir.Sutami No. 36 A, Surakarta, 57126

^{2,3}Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir.Sutami No. 36 A, Surakarta, 57126

E-mail: ¹ianhenshin01@gmail.com; ²djatkika@staff.uns.ac.id; ³dwi.purnanto@yahoo.com

ABSTRACT. *The involvement of children with autism in social interaction is mostly at a lower level. It is due to the language obstacles faced by children with autism that become the reason why children with autism tend to violate the cooperative principles in communication. This study aims to demonstrate how children with autism violate Grice's cooperative principles maxims and what causes it. The Grice's cooperative principles maxims are the focus of this observation and 5 children with autism were the subjects of this study. The research was done in SLBN Surakarta which is the school for exceptional children in Surakarta. By utilizing the observational approach, the data were collected using recording and transcribing technique. Leech's heuristic pragmatic analysis method was used to analyze the data. The results showed that 67.65% of utterances spoken by the children with autism violated 1 maxim, 20.59% utterances violated 2 maxims and 3 maxims violation was found in 2.94% utterances. 4 maxims violation was also found indicating that there are 8.82% utterances of the children with autism failed to fulfill cooperative principles. Language and social development problems are considered responsible for the violations well as their disability to stay focus are considered the cause of maxim of relevance become the most violated maxim in this study.*

Key words: autism; Grice's cooperative principles; conversational maxim violation

PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA GRICE DALAM KOMUNIKASI ANAK AUTIS

ABSTRAK. Keterlibatan anak autisme dalam interaksi sosial sebagian besar berada di tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala kebahasaan yang dihadapi oleh anak autis yang menjadi alasan mengapa anak autis cenderung melanggar prinsip kerja sama dalam komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana anak autisme melanggar prinsip-prinsip kerja sama Grice dan apa yang menyebabkannya. Prinsip-prinsip kerja sama Grice menjadi fokus dari penelitian ini dan 5 anak autis menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di SLBN Surakarta. Dengan menggunakan metode simak, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik rekam dan catat. Metode analisis pragmatis heuristik Leech digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,65% tuturan oleh anak autis melanggar 1 maksim, 20,59% tuturan melanggar 2 maksim serta pelanggaran 3 maksim ditemukan pada 2,94% tuturan. Pelanggaran 4 maksim juga ditemukan dan menunjukkan bahwa ada 8,82% tuturan anak autis gagal memenuhi prinsip kerja sama. Gangguan perkembangan bahasa dan sosial dianggap bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran. Ketidakmampuan mereka untuk tetap fokus juga dianggap sebagai penyebab maksim relevansi menjadi maksim yang paling banyak dilanggar dalam penelitian ini.

Kata kunci: autisme; prinsip kerja sama Grice; pelanggaran maksim

INTRODUCTION

Autism is a developmental disorder which also affects the language development in the individual with autism. Peeters (2004:15) also mentioned that autism is a developmental disorder, understanding or pervasive disorder and not a mental disorder. Almost all of the autism cases originated from either birth or infancy and affect the developing brain that leaves them unable to form a normal social relationships and develop normal communication (Frith, 2008; Baron-Cohen and Bolton, 1993). As also set out in DSM-IV and previous studies, children with autism are associated with several criteria such as difficulties in social interaction, verbal and non-verbal communication impairments and repetitive actions, all present from early childhood (Baron-Cohen, 2008; Hill & Frith, 2003; American Psychiatric Association, 2000).

Severe deficits in language are the most noticeable problem found in children with autism (Loveland, 1988;

Paul, et.al., 2008). Several language problems faced by children with autism have been listed by Baron-Cohen and Bolton (1993:47) namely, preverbal communication, non-verbal communication, abnormalities in speech, echolalia, metaphorical language, neologisms, pronoun reversal, and problems with language system itself. Sastry and Aguirre (2012:206) strengthen this view by stating that most of the individual with autism have difficulties in using language effectively, particularly in social interaction. To date, numerous researchers that have studied the language of children with autism mostly only focused on language acquisition problems and speaking ability (Sari, 2013; Dewi, 2014; Ezmar and Ramli, 2014) although, what it really needs to be revealed nowadays is the report on how children with autism involve in the conversation or their pragmatic competence.

The involvement of children with autism in social interaction is somehow unpredictable and mostly at a lower level (Jones & Schwartz, 2009; Larkin, Hobson,

Hobson, & Tolmie, 2017). Nevertheless, the low involvement of children with autism in social conversation can be found out using the maxim violation of cooperative principles (Grice, 1989). As stated by Huang (2007) that the cooperative principles aim to ensure if utterance in the conversation provides adequate information and it is conducted in truthful, relevant, and appropriate manner.

However, Robiah et.al. (2016) and Rahman (2017) found out that children with autism have problems in giving responses to speech acts conducted by the teachers in the classroom context. In his findings, Rahman (2017) stated that children with heavy autism tend to respond the teachers' speech act using non-verbal response, meanwhile, Robiah et.al. (2016) concluded that the more verbal ability children with autism have, the more various responses they made for the directive speech act performed by the teachers. Besides, a study by Whyte and Nelson (2015) also attempted to explain the development of pragmatic and non-literal language in children with autism. Nevertheless, the conversation skill of the children with autism remains unclear since most of the previous studies only revealed the understanding or receptive aspects.

Referring to the inadequacy of the study that focused on the conversational ability, this paper attempts to analyze how children with autism communicate using the Grice's cooperative principles. This paper will utilize Grice's theory that first time introduced in the article "Logic and Conversation" published in 1975 which proposing ideas in obtaining appropriate conversational exchange by paying attention to 4 maxims of cooperative principles. Borrowing the terms previously used by Kant, Grice named his 4 maxims, (1) Quantity, (2) Quality, (3) Relation, and (4) Manner (Grice, 1989).

Due to the language obstacles faced by children with autism as stated in the previous works, it can be hypothesized that children with autism tend to violate the cooperative principles in communication. Hence, this paper specifically focuses on the violation of cooperative principles done by the children with autism. The results of this study aim to demonstrate how children with autism violate each maxim and what causes it.

METHOD

The design of this study is qualitative research which utilizing the descriptive methods. It is because the objective of subjective research is to depict social phenomena in a natural characteristic manner. It is believed that the qualitative method offers an effective way of picturing what happens in the field. The benefit of the use of the qualitative approach in this study is its flexibility

in its implementation. Besides, several previous pieces of research on cooperative principles (Devi & Qomaruddin, 2017; Lazulfa & Pamolango, 2017; Zebua, Rukmini & Saleh, 2017; and Raharja & Rosyidha, 2019) also utilized qualitative design.

Data in this study are utterances spoken by 5 children with autism. The data were taken in SLBN Surakarta which is a school for exceptional children. In SLBN Surakarta, there are specific classes for children with autism that also come in different levels of education. 5 students who are the subjects of this study are consisting of 2 students from the elementary school level and 3 students from the middle school level. In addition, the subjects were verbal autistic children that have been diagnosed based on DSM-IV criteria (American Psychiatric Association, 1994) and internal school assessment in the placement test. The data were taken in March 2018 and taken in the format of the video (audio-visual).

As stated above, the data were in the form of audio-visual or video format. It implies that the data collection was using the SBLC method proposed by Sudaryanto (1993:134). SBLC is *Simak Bebas Libat Cakap* or Free Conversational Participatory Observation. The technique used is recording and transcribing. Therefore, right after the video was taken, it was then transcribed to convert the audio-visual data into text so that it can be analyzed linguistically.

In analyzing the data, Leech's heuristic pragmatic analysis (1993:63) is used to analyze the utterances spoken by the children with autism that violate cooperative principles. The data are classified based on 4 maxims of cooperative principles by Grice, afterward. Finally, data are presented formally by using a table as well as informally by using words and sentences to simplify the analysis and conclusion drawing process as well as to make it easy to understand.

RESULT AND DISCUSSION

Cooperative Principles Violation by Children with Autism

The analysis showed that children with autism tend to violate at least one maxim in their every utterance. The violation of each maxim is based on the sub-maxim explained by Grice (1989:26) that clarified what is considered cooperative utterance and what is not. Based on those ground rules set by Grice, each utterance spoken by the children with autism was then analyzed. Surprisingly, the results demonstrate that not only 1 single maxim is violated in one utterance, but some utterances contained multiple maxims violations. Table 1 presents the data calculation based on the violation form.

Table 1. Cooperative Principles Maxims Violations

Violation Form	Total	Percentage
1 Maxim Violation	23	67.65%
2 Maxims Violation	7	20.59%
3 Maxims Violation	1	2.94%
4 Maxims Violation	3	8.82%
Total	34	100%

Cooperative Principles 1 Maxim Violation by Children with Autism

As shown in table 1, 1 maxim violation stands on the highest number of frequencies. It implies that in communication, children with autism are likely to make minor violations in their utterances. In table 2, it shows that maxim of relevance becomes the most violated maxim in 1 maxim violation done by children with autism. Maxim of relevance was violated in 52.17% utterances of 1 maxim violation utterances. In the second place, maxim of quality as a single violation appeared in 26.09% utterances. The least violated maxims are maxim of quantity in 13.04% utterances and subsequently, 8.70% utterances violated maxim of manner.

Table 2. Cooperative Principles 1 Maxim Violations

Maxim	Total	Percentage
Maxim of Quantity	3	13.04%
Maxim of Quality	6	26.09%
Maxim of Relevance	12	52.17%
Maxim of Manner	2	8.70%
Total	23	100%

Table 2 has shown that maxim of quantity was violated in 13.04% utterances of 1 maxim violation by children with autism. Below is the data example of maxim of quantity violation,

(a)

- Teacher *Kalendernya tidak ada, dimana ya? Siapa yang mengambil?*
Pelajarannya apa hari senin?
(The calendar is gone, where is it? Who did take the calendar? Well, what are the lessons on Monday?)
- G *Matematika*
(Mathematic)

In (a), the dialog happened in the morning before the lesson begin. The teacher was about to write down the date on the board but then found out that the calendar in the classroom was gone. Thus, the teacher was asking where the calendar to the students where there were 3 students in the class. In addition, the teacher also asked about the lesson they had every Monday. Turns out, only one student responded it and he even only answered one question of the 3 questions total. Ultimately, he only answered that one question with an incomplete answer.

It is considered violating maxim of quantity because the teacher was asking 3 questions in a row while, the student only answered 1 question. The teacher expected to get “enough” information from the students including where the calendar is and who took it whereas, the only question being answered was not answered adequately as well. The expected answer would be more than 1 lesson since the teacher was asking about the schedule.

The context explained above shows that the students, the child with autism, could not provide a sufficient quantity of information expected by the teacher. As Grice (1989:26) pointed out, maxim of quantity is consisting of 2 sub-maxims which are 1) make your contribution as informative as is required, and 2) do not make your contribution more informative than is required. The lack of information given by the children with autism is due to their lack of attention to the teacher as their social conversation partner. It is in line with the explanation by Baron-Cohen and Bolton (1993:41) that extracted Kanner’s description into a list stated that children with autism are having lack attention to people. The small number of utterances that violated maxim of quantity is in line with the finding of the study done by Lam and Yeung (2012) which reported that autistic children had adequate verbal output. However, such a previous study was done only by measuring the pragmatic ability of the children with autism using the Pragmatic Rating Scale and did not specifically study the cooperative principles among the children with autism. Moreover, what is also important in the conversation is maxim of quality which is described in the paragraph below.

About 26.09% of utterances spoken by the children with autism in the conversation with the teacher violated the maxim of quality. It can be seen in table 2. It indicates that children with autism provided information that is believed to be untrue. As stated by Grice (1989:27), what makes the utterance is considered cooperative is when it follows the 2 sub-maxims of maxim of quantity namely, 1) do not say what you believe to be false, and 2) do not say that is you have lack of adequate evidence. The following is the data example of maxim of quality in 1 maxim violation.

(b)

- Teacher *Siapa yang ngasih sehat?*
(Who does give us the health?)
- L *Saya*
(I do)

Dialog (b) took place after the teacher took the attendance list and found out that few students were not coming due to health problems. After asking the students to pray for those who were absent to be blessed with health, the teacher asked the rest of the students who gave

them health and prosperity. Only one student responded to it by saying “*I do*”. Based on this answer, it showed that the student was uncooperative by violating the maxim of quality. What the teacher expected to be the answer was “God” which everyone would agree on it. However, the student was providing information that what he believed to be untrue.

The spontaneous answer that violated the maxim of quality happened due to what is believed to be repetitive behavior and echolalia (Baron-Cohen and Bolton, 1993: 50) of the children with autism. The student responsively said “*I do*” (or “*I am*”, when in Bahasa Indonesia it can be expressed simply by saying “*saya*”) since that is the template answer for the question “*who*”. This is in line with one of the diagnoses in DSM-IV which is a stereotyped and repetitive use of language or idiosyncratic language that was found in the student (American Psychiatric Association, 1994:75).

As mentioned in the introduction of this paper, Autism Spectrum Disorder, or simply autism, is such a developmental disorder. Baron-Cohen and Bolton (1993: 1) asserted that autism is a condition that leaves the children with autism unable to develop normal communication. Thus, the response showed in (b) is proof that there was a disturbance in children with autism’s language development. As Pan and Snow (1999:233) in Dardjowidjojo (2003:266) mentioned that children in the age of 1;8 only responded around 33% to what their parents asked. However, it still can be found in an individual who is not well-developed in their language aspect, in this case, children with autism.

In 1 maxim violation of children with autism, table 2 shows that maxim of relevance has the highest score among other 1 maxim violations. 52.17% utterances of children with autism were found violating maxim of relevance. It shows similar results with the case study on 6 years-old kid done by Shinta (2010) indicating that maxim of relevance appeared to be the highest in the utterance. For the better understanding of how the children with autism violate maxim of relevance, below is the data example of maxim of relevance violation in the utterance of children with autism,

(c)

- | | |
|-----------|---|
| - Teacher | <i>Biar hafal. Biar mengerti.</i>
(To remember. To understand) |
| - G | <i>Lama ngga ada upacara ya, bu?</i>
(Long time without ceremony,
right ma’am?) |

The context of the dialog (c) is the conversation between the student and the teacher in the class. It occurred when the teacher told the students that the lesson they would have that day was a repetition of what they

had in the previous week. The teacher assured the student that it was important to repeat what they had learned to make them remember better and to make them understand better. Nonetheless, one student was offering one question about the absence of morning ceremony for several weeks that they used to have every Monday.

The utterance is considered violating maxim of relevance due to the irrelevant response made by the student. As stated by Grice (1989:27) that the sub-maxim under the maxim of relevance is just 1 which is “be relevant”. The irrelevant response done by the student was the inability of the student to stay focus on one topic being talked and give an appropriate comment on it. It is relevant to what stated by Jones and Schwartz (2009) that children with autism tend to engage in fewer comments in the particular interaction. Commenting means that the participant of the conversation response to what another participant in the conversation.

However, there another possibility of what inside this student’s mind while responding that way. It is the student who did that on purpose to refuse to study since it happened before the lesson began. Thus, this case can be categorized as opting-out the maxim of relevance. Opting out maxim is when the speaker is unwilling to cooperate in the way the maxim requires (Grice, 1989:30). Such uncooperative behavior of the children with autism was also found highly in several studies on communication and uncooperative behavior in dental or oral check-up setting (Marshall et.al., 2007; and Stein et.al., 2014).

As shown in table 2, the 1 maxim violation of maxim of manner appeared to be the least among others. It only occurred in 8.70% utterances spoken by the children with autism. In contrast, there are many language problems that children with autism face (Baron-Cohen and Bolton, 1993:47) which is likely to lead them in violating maxim of manner as the sub-maxim of it consisting of more categories than other maxim. The sub-maxims under the maxim of manner that are proposed by Grice (1993:27) are 1) avoid obscurity of expression, 2) avoid ambiguity, 3) be brief, and 4) be orderly. The following is the data example of 1 maxim violation of maxim of manner,

(d)

- | | |
|-----------|--|
| - Teacher | <i>Iya . R? Kita mau belajar apa?</i>
(Alright, R? What are we going to learn (today)?) |
| - R | <i>Ma...te...ma...ti...ka</i>
(Math...e...ma...tic) |

The conversation in (d) occurred when the teacher asked one particular student to bring his focus back. The question asked by the teacher was just a simple question asking what they would learn. The expected answer would be “*matematika*” and, luckily, the student successfully

gave the correct answer. However, the way the student answer the question was the main problem. Instead of saying it with a normal manner, the student spelled each syllable of the word. It is violating the sub-maxim which is “be brief” in the maxim of manner.

This result indicates that children with autism violate maxim of manner mostly due to their speech ability condition. In this case, the student was having difficulties in saying something quickly and smoothly for particular words that are considered “tongue twister” since the word “*matematika*” consisting bilabial and dental, and glottal consonants. Therefore, he needed to pronounce it carefully by spelling each syllable. Besides, it is a common case that individual with autism speaks with unusual syllable spelling stress (Grossman, et.al, 2010; Paul, et.al., 2008; Shriberg, et.al., 2001; and Shriberg, et.al., 2011).

The following section moves on to describe 2 maxims violation in the communication of children with autism.

Cooperative Principles 2 Maxims Violation by Children with Autism

Regarding table 2, it has exposed that 2 maxims violation became the second-highest phenomenon that occurred in the conversational cooperative principles of children with autism. It is reported that 20.59% of the utterances of the children with autism had violated 2 maxims combined. However, there are only 4 combinations emerged in this case. These combinations are 1) maxim of quantity-maxim of relevance, 2) maxim of quantity-maxim of manner, 3) maxim of quality-maxim of relevance, and 4) maxim of quality-maxim of manner. Table 3 shows the frequency of 2 maxims combination violation appeared in the utterances produced by the children with autism,

Table 3. Cooperative Principles 2 Maxims Violations

Maxim Combination	Total	Percentage
Quantity-Relevance	1	14.29%
Quantity-Manner	2	28.57%
Quality-Relevance	2	28.57%
Quality-Manner	2	28.57%
Total	7	100%

In table 3, it can be seen that there is a unique phenomenon that shows no 2 maxims combination dominate in this research finding. 3 maxim combinations have the same number of occurrences in the conversational data. The combination of quantity-manner, quality-relevance, and quality-manner appeared in 28.57% utterances of the children with autism. However, only the combination of maxim of quantity and maxim of relevance that was appeared to be the lowest number. Only 14.29%

or 1 utterance violated maxim of quantity and relevance. The only data that violated maxim of quantity and maxim of relevance combined appeared in this research is shown in the dialog (e) below,

(e)

- Teacher ... Belajar dulu yang bagus, nanti dapat piala ya. Kemarin F habis lomba comic strip di Semarang. Tangannya dilipat ya. Belum mendapatkan juara. Harus lebih rajin lagi.
(... Study well first to get a trophy. Last time you joined comic strip competition in Semarang. Fold your arms. You haven't won that time. Need to work harder.)
- F Yeee... lagi.
(yeay.. again).

This dialog took place when one of the students was out of focus and started doing stereotyped or repetitive behavior which is scribbling in the book. To bring the student's focus back, the teacher talked to the student directly and asked him to start studying. Several motivations were given to the students for instance, having a trophy when the student is studying well. The teacher also brought back the student's memory about the last comic strip competition that he joined which ended up failing to win. Seeing the student kept scribbling again, the teacher reminded him to fold his arm to stop him from scribbling. Surprisingly, the response of the student was quite interesting. Instead of saying yes indicating that he agreed on the teacher's speech, he responded with interjection “yeay”. Following the interjection, the student said “again” out of nowhere without a clear indication which part of the teacher's utterance he responded.

The explanation about the context above proves that the utterances spoken by the student were violating the maxim of quantity and maxim of relevance. As stated by Grice (1989:26) that in conforming maxim of quantity the information given must not less than what is required. However, the “*lagi*” or “*again*” uttered by the student was not giving adequate information needed by the teacher as a listener. In addition, it is also unclear and irrelevant in which information the student was trying to respond with such utterance. It seems that the student was imitating the teacher that also said “...*lagi*” in her utterances. This imitation is unsolicited and can be considered as echolalia (Baron-Cohen and Bolton, 1993: 50).

The other categories shown in table 3 are the combination of maxim of quantity-maxim of manner, maxim of quality-maxim of relevance, as well as maxim of quantity-maxim of manner that shows exactly in identical percentage which is 28.57%. Each category will

be explained below and it will be started with the category of 2 maxims violation combination between maxim of quantity and maxim of manner that is presented in dialog (f)

- Teacher *Ulangi. Sekarang G. Lambangnya seperti ini. Berapa ini?*
(Repeat. Now is G's turn. Here's the number. What number is it?)
- G *Seratu...*
(hundr...).

Dialog (f) happened in the middle of the lesson when the teacher was asking the students one by one to read the number written on the board. When the teacher asked one particular student, the incomplete answer was all she got. A certain student said "*seratu...*" which is an unfinished word of "*seratus*" that means "hundred". This is completely considered violating the maxim of quantity as well as maxim of manner due to the way the student uttering his answer.

Maxim of quantity was violated in this utterance proven by the unfinished word uttered by the student. As stated by Grice (1989:26) that to fulfill maxim of quantity, the speaker must contribute as informative as it is required. Unfortunately, the student was failing in fulfilling the maxim of quantity due to the absent of /s/ sound at the end of the word that indicates a phonological error in his speech. It is in line with the findings of previous research that showed the individual with autism faced some error in speech sound production (Shriberg, et.al., 2001). This error or inability of the student to pronounce the word correctly is undoubtedly violating the maxim of manner which requires the speaker to avoid obscurity in their contribution (Grice, 1989:27).

Besides violating maxim of quantity in combination with maxim of relevance and maxim of manner that has been explained in the previous paragraphs, the utterances produced by the children with autism in this study also violated 2 maxims combined between maxim of quality and maxim of relevance. The following dialog is showing how those maxims were violated simultaneously.

(g)

- Teacher *Batik. Kalo Jumat bajunya?*
(Batik. On Friday, what is your uniform?)
- L *Orange jus*
(Orange Juice).

What happened in the dialog (g) was the teacher asking on what is the uniform the students wear every Friday. Such a question came up in line with the topic of that day's lesson which studying name of clothes. In response to the question asked by the teacher, one particular student shout spontaneously by saying "orange juice" as his best

answer to that uniform question. Based on the context and the analysis, thus, this data is considered violating maxim of quality and maxim of relevance simultaneously.

The answer "orange juice" as of Friday's uniform undeniably violating the maxim of quality. As a matter of fact, the national school uniform in Indonesia on Friday is Scout Uniform or well-known as *Pramuka* in Indonesia. This fact supports that the maxim of quality violation made by the student was based on the color of the uniform that the student mistook it as orange. It is in line with what Grice (1989:26) had proposed in the sub-maxim of maxim of quality that the speaker is expected to not say something which they lack adequate evidence. It, later, followed by the word "juice" failed to fulfill the utterance's relevance. Such a phenomenon was also reported on a previous study (Rubin and Lennon, 2004) that stated that children with autism faced difficulties in maintaining a conversation by giving suitable comments for the topic given.

The last 2 maxims combination that appeared to be violated by the children with autism is the combination of the maxim of quality and the maxim of manner. The conversation in (h) below is the data found in this study that is used as an example to give a comprehensive explanation about the context and why it is considered violating the cooperative principles.

(h)

- Teacher : *Lihat. Angka berapa ini?*
(Look. What number is this?)
- F *Satu... Dua... Seratus...*
(One... Two... A Hundred...).

What is shown in (h) happened when the teacher once again asked the students to mention what number the teacher pointed on the board. This was aiming at improving students' ability to read number and to improve their speaking ability. In asking that question, the teacher was pointing the students one by one. The appointed student, unfortunately, was unable to answer the question correctly. The way he answered it was also confusing by making pauses in each word.

The student's answer, regarding Grice's point of view on communication exchange (1989:26), is considered violating maxim of quality. It is due to what the student expressed through his utterance did not reflect reality. The number written on the board was "105", but the student answering it with "one...two...a hundred". The first word appeared could be tolerated since there was "one" in "105", yet he made mistake by proceeding it with the word "two" where it was nowhere to find. However, he revised his answer by saying "a hundred" although that was not the precise answer either. This case occurred since children with autism have difficulties in staying focus and paying attention. As reported in the pilot study by Mattard-

Labrecque, et.al. (2013), children with autism tend to have poor sensory processing. This is including poor visual sensory processing causing the student unable to pay attention to the board.

Another maxim being violated in that utterance spoken by the children with autism is maxim of manner. This violation happened as the way the student failed to fulfill the sub-maxim of maxim of manner which is "be brief" (Grice, 1989:27). The student's contribution to the dialog was indeed consisting of pauses that take longer duration in such a short answer. This is another proof that children with autism have problems related to language use (Baron-Cohen and Bolton, 1993:47).

Another finding of this study is the violation of multiple maxims in one utterance, namely 3 and 4 maxims violations. The following section presents the multiple maxim violations in the communication of children with autism.

Cooperative Principles Multiple Maxims Violation by Children with Autism

Moving on to the multiple maxims violation, it is reported that 3 maxims violations only found in this study in 1 utterance or 2.94% of total data as presented in table 1. It also represents that 3 maxims violation only have 1 combination of Grice's conversational maxim to be violated, maxim of quantity, maxim of quality, and maxim of manner. Dialog (i) below is presenting the data to give a clearer picture of how these maxims violated.

(i)

- Teacher : *Seratus lima.*
(a hundred and five)
- F : *Se... ratus lima. Seratus... dua SMAN*
(A... Hundred and five. A Hundred...
Two S M A N (high school)).

The conversation between the teacher and the student in dialog (i) happened when the teacher was asking the student to follow her word. The utterance of the teacher containing command as it was expressed using a declarative sentence. Therefore, what was expected from the student is imitating what the teacher said. Successfully, the student was able to imitate it even though, subsequently, it was followed by additional yet unimportant information that did not exist on the board. When expressing the phrase "seratus lima" (a hundred five), the student used a pause between the first syllable making it longer.

The student's utterance failed at fulfilling 3 maxims since it has too much information provided which was not based on the fact written on the board and contained long pause that affects the obscurity of his utterance. The information given ended up being wasted since it was not needed by the teacher. Grice (1989:26) already mentioned

that in order to fulfill cooperativeness in conversation, the speaker must not contribute more than is required. It was going to be cooperative if the student stopped speaking after answering with "seratus lima" because that is the quantified required answer.

The existence of the additional information given by the student, unfortunately, makes it violating the maxim of quality as well as maxim of manner. The following phrase "seratus... dua S M A N" was an abrupt contribution which was not anticipated by the teacher. Such information given by the student was completely unavailable on the board as what the student expected to do was reading what was written on the board by following the instruction from the teacher. Thus, it is considered violating the sub-maxim of maxim of quality proposed by Grice (1989:27) that is avoiding saying something which the speaker lack of sufficient evidence. Besides, the way the student answered it by giving pauses after the word "seratus" was violating criteria also provided by Grice (1989:27) stated that the utterance or contribution must be brief to fulfill the maxim of manner.

Multiple maxims violations appeared in this study is not only 3 maxims combination violation, but all maxims violated in one utterance also appeared in the finding. In another word, this kind of violation is extremely violating the cooperative principles as a whole making it completely uncooperative. Yet, the number of data found in this study is not high, only 8.82% or 3 utterances found to be violating all four conversational maxims as can be seen in table 1. For the better understanding of how the children with autism violated all conversational maxims, the dialog (j) below is the data example,

(j)

- Teacher : *Keluarkan buku matematika dulu, yoo.*
R ambil buku matematika sama alat
menulis. F, ambil buku matematika
dan alat tulis
(Take out your mathematic book.
R, take your mathematic book and
your stationery out. F, take out your
mathematic book and stationary)
- F : *Dududududududu*

It can be seen from the dialog (j) provided above, the teacher was asking the students to take out their book and their stationary. It is inferable that this dialog happened before the lesson began on that day. With such simple command from the teacher, it was expected that the student simply took out their book and stationary with or without saying "yes". However, F, was, suddenly, saying some meaningless word repeatedly without responding to the teacher's command to take out his book and stationary.

Sussman and Sklar's (1969) study on social awareness attempted to prove that children with autism

having ability complying commands given by the workers. It was, surprisingly, showing that persuasive commands tended to be obeyed by the children with autism rather than harsh commands. However, the opposite happened in this study when the student, the child with autism, failed at fulfilling the tasks given by the teacher. This failure was tragically followed by the meaningless speech spoken by the student.

In (j), it can be seen that the teacher was giving persuasive commands to the students, while what the student did was responding with an unclear speech by saying “*dududududu*”. Indeed, Baron-Cohen and Bolton (1993:47) mentioned that children with autism face many language challenges including speech abnormalities and echolalia. With such a response, it was automatically violating all conversational maxims since there was nothing can be inferred from that utterance. The utterance was completely unable to fulfill adequate information needed, has nothing to do with the reality, was irrelevant, and was totally obscure.

Multiple maxims violation is summarized in table 4 below,

Table 4. Cooperative Principles Multiple Maxims Violations

Multiple Maxim Category	Total	Percentage
3 Maxims (Quantity-Quality-Manner)	1	25%
4 Maxims (Quantity-Quality-Relevance-Manner)	3	75%
Total	4	100%

Frequency of Cooperative Principles Maxims Violation in Communication by Children with Autism

In the previous sections, it is already clear that there are several violations identified by how many maxims violated in one utterance. In this section, it focuses on the frequency of the conversational maxims by Grice (1989) that appeared the most, or in other words, violated the most in this study regardless it is 1 maxim violation or combined with other maxims. The calculation of the data is simplified in figure 1 below,

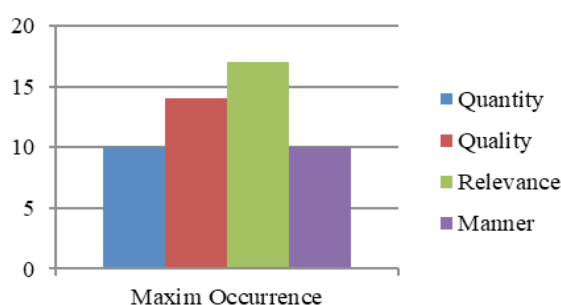


Figure 1. Cooperative Principles Maxim Violation Occurrence Frequency

The charts shown in figure 1 show the frequency of conversational maxims violations that occurred in this study. It can be seen that the maxim of relevance is the highest among other maxims. The maxim of relevance was violated for more than 15 utterances. This tendency is in line with the study done by Shinta (2010) proven that a six-year-old kid tended to violate maxim of manner. The result of her study is comparable with this study since the children with autism are having developmental disorders especially in the pragmatic development they are at the lower level even than normal 2-years olds (Peeters, 2004:15; Loveland, 1988) and considered as late-bloomer. Another reason why maxim of relevance is the most dominant maxim appeared to be violated by the children with autism is because children with autism have difficulties in giving suitable comments in social interaction as well as command compliance with appropriate respond (Jones and Schwartz, 2009; Rubin and Lennon, 2004; Sussman and Sklar, 1969).

Following the maxim of relevance, maxim of quality was found to be the second most violated maxim in the observation done by the researcher. The lack of awareness, poor attention sensory processing, as well as the existence of repetitive behavior (Mattard-Labrecque, et.al., 2013; Baron-Cohen and Bolton, 1993:50) are believed to be responsible of maxim of quality violation. Thus, with such a condition, it is inarguably possible for children with autism to keep violating the maxim of quality.

Maxim of quantity and maxim of manner, as stated in figure 1, were shown to be the same frequency. This phenomenon has proved that even when the children keep violating maxim of relevance, they still are able to provide adequate information needed in the conversation exchange (Lam and Yeung, 2012). However, the speech ability of children with autism tends to have numerous errors due to their language structural problems (Shriberg, et.al., 2001; Baron-Cohen and Bolton, 1993:47; Noterdaeme, et.al, 2010).

CONCLUSION

As hypothesized at the beginning of this paper, the children with autism tend to violate cooperative principles conversational maxim. It was proven by the findings showing that at least one maxim was violated in their communication. Language and social development are considered responsible for the violation of conversational maxim in their utterances. Their disability to stay focus on something is also the cause of the most violated maxim; maxim of relevance. However, the phenomenon that happened at most is the violation of 1 maxim in a single utterance. Thus, it is recommended for the parents and the teachers of the children with autism to give more stimuli

by giving persuasive commands and keeping them to stay focus as well as pay more attention. What is needed to be done in the future are observing how the children with autism utilize the Grice's cooperative principles in another environment such as at home or their communication between autistic individual fellow as well as the use of speech acts to convey what is inside their mind. It also needs to do another research with adult individual with autism to see whether there are different results.

ACKNOWLEDGEMENT

The greatest gratitude is given to the teachers and headmaster of SLBN Surakarta who allowed the researchers to observe the students; the children with autism; in the school environment.

REFERENCES

- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) (4th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Press.
- Baron-Cohen, S & Bolton, P. (1993). Autism: The Facts. New York: Oxford University Press.
- Baron-Cohen, S. (2008). *The Facts: Autism and Asperger Syndrome* (1st ed.). New York: Oxford University Press.
- Dardjowidjojo, S. (2003). Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [Indonesian]
- Devi, L.N. & Qomaruddin, M. (2017). Prinsip Kerja Sama dalam Bahasa Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia.com. *Haluan Sastra Budaya*, 1, (1), 86-96. Doi: <https://doi.org/10.20961/hsb.v1i1.5204/> [Indonesian]
- Dewi, D.M.C. (2014). Identifikasi Kemampuan Berbahasa Anak Autis di Sekolah Inklusif SD Negeri Giwangan, Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta : Unpublished Thesis [Indonesian]
- Ezmar dan Ramli. 2014. Bahasa Anak Autis pada SLB Cinta Mandiri Lhoksumawe. *Jurnal Metamorfosa*, 2, (2), 1-18. [Indonesian]
- Frith, U. (2008). *Autism : Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press
- Grice, H.P. (1989). *Studies in the Way of Words*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Grossman, R.B., Bemis, R.H., Skwerer, D.P. & Flushberg, H.T. (2010). Lexical and Affective Prosody in Children with High-Functioning Autism. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 53, 778-793. Doi: 10.1044/1092-4388(2009/08-0127)
- Hill, E.L. & Frith, U. (2003). Understanding autism: Insights from mind and brain. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 358, (1430), 281-289. <https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1209>
- Huang, Y. (2007). *Pragmatics*. New York: Oxford University Press.
- Jones, C.D. & Schwartz, I.S. (2009). When Asking Questions is Not Enough: An Observational Study of Social Communication Differences in High Functioning Children with Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 39, 432-443. Doi: <https://doi.org/10.1007/s10803-008-0642-y/>
- Lam, G.L. & Yeung, S.S.S. (2012). Towards a convergent account of pragmatic language deficits in children with high-functioning autism: Depicting the phenotype using the Pragmatic Rating Scale. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 6, 792-797. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2011.08.004/>
- Larkin, F., Hobson, J.A., Hobson, R.P., & Tolmie, A. (2017). Collaborative competence in dialogue: Pragmatic language impairment as a window onto the psychopathology of autism. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 43-44 (September), 27-39. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2017.09.004>
- Lazulfa, F.I. & Pamolango, V.A. (2017). A Study of Cooperative Principles in Conversation of Tenants at Kampoeng Inggris Pare, Kediri. *Parafrase*, 17, (1), 81-87. doi: <https://doi.org/10.30996/parafrase.v17i1.1363/> [Indonesian]
- Leech, G. (1993). *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Loveland, K.A., Landry, S.H., Hughes, S.O., Hall, S.K. & McEvoy, R.E. (1988). Speech Acts and the Pragmatic Deficits of Autism. *Journal of Speech and Hearing Research*, 31, (4), 593-604. doi: 10.1044/jshr.3104.593/
- Marshal, J., Sheller, B., Williams, B.J., Mancl, L. & Cowan, C. (2007) Cooperation Predictors for Dental Patients with Autism. *Pediatric Dentistry*, 9, (5), 369-376. Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18027770/>
- Mattard-Labrecque, C., Amor, L.B. & Couture, M.M. (2013) Children with Autism and Attention Difficulties: A Pilot Study of the Association between Sensory, Motor, and Adaptive Behaviors.

- Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 22, (2), 139-146. Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3647630/>
- Noterdaeme, M., Wriedt, E., & Höhne, C. (2010). Asperger's Syndrome and High-Functioning Autism: Language, Motor and Cognitive Profiles. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 19, 475-481. doi: <https://10.1007/s00787-009-0057-0/>
- Paul, R., Bianchi, N., Augustyn, A., Klin, A. & Volkmar, F.R. (2008). Production of Syllable Stress in Speakers with Autism Spectrum Disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 2008, (2), 110-124. doi: 10.1016/j.rasd.2007.04.001
- Peeters, T. (2012). Panduan Autisme Terlengkap. Jakarta: Dian Rakyat Press. [Indonesian]
- Raharja, A.U.S & Rosyidha, A. (2019). Maxim of Cooperative Principle Violation by Dodit Mulyanto in Stand-up Comedy Indonesia Season 4. *Journal of Pragmatic Research*, 1, (1), 43-61. doi: <http://dx.doi.org/10.1836/jopr.v1i1.62-77/> [Indonesian]
- Robiah, S., Ibrahim, A.S. & Rofi'udin, A. (2016). Respon Tutar Siswa Autis terhadap Tutar Direktif Guru dalam Interaksi Pembelajaran di Kelas. *Bahasa dan Seni*, 44, (2), 111-124. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um015v44i22016p111/> [Indonesian]
- Rubin, E. & Lennon, L. (2004). Challenges in Social Communication in Asperger Syndrome and High-Functioning Autism. *Topic in Language Disorders*, 24, (4), 271-285. doi: 10.1097/00011363-200410000-00005
- Sari, H.C. (2013). Pengaruh Dongeng terhadap Kemampuan Bicara Anak Autis Disertai Gangguan Bahasa di SDLB Shanti Kosala, Nganjuk. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 1 (1). [Indonesian]
- Sastry, A. & Aguirre, B. (2014). Parenting Anak dengan Autisme: Solusi, Strategi, dan Saran Praktis untuk Membantu Keluarga Anda. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [Indonesian]
- Shinta, Q. (2010). Pemerolehan Pragmatik dalam Bahasa Anak Studi Kasus Prinsip Kerja Sama – Maksim Grice pada Anak Usia Enam (6) Tahun. *Dinamika Bahasa Dan Budaya*, 4(2), 66-83. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fbib1/article/view/423/> [Indonesian]
- Shriberg, L.D., Paul, R., McSweeney, J.L., Klin, A., Volkmar, F. R. & Cohen, D.J. (2001). Speech and Prosody Characteristics of Adolescents and Adults with High Functioning Autism and Asperger Syndrome. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 44, 1097-1115. doi: <https://1092-4388/01/4405-1097/>
- Shriberg, L.D., Paul, R., Black, L.M., & van Santen, J.P. (2011). The Hypothesis of Apraxia of Speech in Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41, 405-426. doi: <https://10.1007/s10803-010-1117-5/>
- Stein, L.I., Lane, C.J., Williams, M.E., Dawson, M.E., Polido, J.C. & Cermak, S.A. (2014). Physiological and Behavioral Stress and Anxiety in Children with Autism Spectrum Disorders during Routine Oral Care. *BioMed Research International*, 2014, 1-10. Doi: <http://dx.doi.org/10.1155/2014/694876/>
- Sudaryanto. (1993). Metoda dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Duta Wacana University Press. [Indonesian]
- Sussman, S. & Sklar, J.L. (1969). The Social Awareness of Autistic Children. *American Journal of Orthopsychiatry*, 39 (5), 798-806. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1939-0025.1969.tb00662.x>
- Whyte, E.M. & Nelson, K.E. (2015). Trajectories of Pragmatic and Nonliteral Language Development in Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Communication Disorders*, 54, 2-14. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcomdis.2015.01.001/>
- Zebua, E., Rukmini, D. & Saleh, M. (2017). The Violation and Flouting of Cooperative Principles in the Ellen Degeneres Talk Show. *Language Circle: Journal of Language and Literature*, 12, (1), 103-113. doi: <https://doi.org/10.15294/lc.v12i1.11474>

KOMUNIKASI INTERNAL DALAM MEMBANGUN KOHESIVITAS KELOMPOK PEGIAT WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN

Iriana Bakti, Suwandi Sumartias, Trie Damayanti, dan Aat Ruchiat Nugraha

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

E-mail: iriana.bakti@unpad.ac.id

ABSTRAK. Perkembangan komunikasi internal dalam suatu organisasi menjadi sangat penting terutama dalam membangun kerjasama kelompok. Salah satu komunitas yang fokus mengembangkan aspek pariwisata di Pangandaran yaitu Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar). Komunitas ini memiliki potensi yang cukup besara dalam melakukan koordinasi dan kerjasama untuk mewujudkan visi Pangandaran sebagai destinasi wisata dunia karena memiliki latarbelakang profesi anggotanya yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aktivitas komunikasi internal kompepar dalam mengembangkan objek wisata berbasis alam dan kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan sifat data kuantitatif berdasarkan pada teknik pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada responden secara acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas komunikasi internal dalam bentuk pertemuan rutin diantara anggota kompepar cukup tinggi untuk berbagi informasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menjalin relasi, dan membangun kesadaran bagi para pengelola pelaku usaha pariwisata agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataaan di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan aspek kohesivitas di kalangan anggota kompepar di Kabupaten Pangandaran dapat dikategorikan tinggi dalam membangun kesamaan pandangan, meningkatkan wawasan, membagi tugas, dan melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan kelompok.

Kata kunci: komunikasi internal; kohesivitas; kompepar; pembagian tugas; kerjasama

INTERNAL COMMUNICATION IN DEVELOPING THE COHESIVITY OF TOURISM GROUP IN KABUPATEN PANGANDARAN

ABSTRACT. The development of internal communication within an organization becomes very important especially in building group collaboration. One community that focuses on developing aspects of tourism in Pangandaran is the Tourism Driving Group (Kompepar). This community has considerable potential in coordinating and collaborating to realize the vision. Pangandaran as a world tourist destination because it has a different member professional background. This study aims to explain the internal communication activities of the Kompepar in developing nature-based tourism objects and local wisdom in Kabupaten Pangandaran. The method used in this study is descriptive with the nature of quantitative data based on data collection techniques through observation and questionnaires distributed to respondents randomly simple. The results showed that the intensity of internal communication in the form of regular meetings among kompepar members was high enough to share information in an effort to increase knowledge, establish relationships, and build awareness for managers of tourism businesses to actively participate in tourism activities in Kabupaten Pangandaran. While the aspect of cohesiveness among kompepar members in Kabupaten Pangandaran can be categorized high in building common ground, increasing insight, dividing tasks, and collaborating to achieve group goals.

Key words: internal communication; cohesivitas; competitiveness; competitiveness; division of tasks; cooperation

PENDAHULUAN

Komunikasi dalam kegiatan pariwisata sangat penting karena dengan komunikasi dapat membangun pengetahuan, perasaan, keinginan, dan keikutsertaan orang untuk mengunjungi objek wisata di suatu daerah. Atau dengan kata lain, komunikasi dapat dijadikan alat untuk mempromosikan destinasi wisata. Kabupaten Pangandaran salah satu daerah wisata yang telah memanfaatkan komunikasi untuk mempromosikan objek wisatanya. Aktivitas komunikasi begitu marak dalam mempromosikan objek wisata, baik komunikasi dengan menggunakan media sosial, media massa, maupun komunikasi langsung tatap muka di antara para pihak yang terlibat di dalamnya.

Salah satu pihak yang terlibat dalam aktivitas komunikasi kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran

adalah para penggiat wisata yang tergabung ke dalam Kelompok Pegiat Pariwisata (kompepar). Mereka merupakan salah satu pemangku kepentingan yang menjadi garda terdepan dalam menjalankan aktivitasnya mempromosikan destinasi wisata. Mereka juga berasal dari berbagai komponen, seperti pemandu wisata, pengusaha hotel dan restoran, perjalanan wisata, penggiat budaya, dan anggota masyarakat lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keberadaan kompepar tersebut sangat penting bagi pemerintah, karena sebagai salah satu unsur masyarakat pariwisata yang memiliki komitmen untuk mencapai tujuan, dan cita-cita membantu pemerintah untuk memajukan program kepariwisataan di wilayah kerjanya. Komitmen kompepar khususnya di Kabupaten Pangandaran bisa terbentuk karena di antara anggota-anggotanya memiliki tujuan dan cita-cita yang sama untuk membangun kepariwisataan di wilayah tersebut.

Kesamaan tujuan dan cita-cita di antara anggota kompepar tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari suatu interaksi yang intensif. Dalam interaksi tersebut, faktor komunikasi memiliki peran yang sangat fundamental, karena melalui komunikasi di antara mereka terjadi proses saling berbagi informasi untuk membangun kesamaan makna, menetapkan tujuan kelompok, dan mengambil keputusan tentang masalah kepariwisataan.

Komunikasi internal yang terjadi di dalam kompepar menjadi sangat penting, karena dapat mempersatukan para anggotanya yang berasal dari berbagai elemen pegiat pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dengan komunikasi internal, anggota kompepar satu sama lain saling melakukan pertukaran informasi sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam rangka membangun kesepahaman dan kerja sama, dan mempererat hubungan yang harmonis di antara para anggotanya.

Dinamika komunikasi internal kompepar di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari intensitas dan situasi komunikasinya. Kenggotaan Kompepar yang berasal/wakil dari pegiat wisata yang heterogen tersebut memerlukan intensitas komunikasi yang tinggi dengan situasi komunikasi yang kondusif. Dengan heterogenitas anggota Kompepar tersebut dimungkinkan masing-masing anggota membawa kepentingannya sesuai dengan tupoksi mereka di perusahaan/organisasi/komunitasnya yang menjadi induknya.

Heterogenitas individu-individu yang tergabung dalam Kompepar tersebut membawa nilai-nilai yang telah terbentuk selama dirinya berada di lingkungan organisasi sebelumnya, sehingga dalam dirinya telah terbentuk sistem internal yang berpengaruh terhadap caranya berkomunikasi dengan individu lain yang berasal dari organisasi yang berbeda. Menurut (Mulyana, 2013), yang termasuk ke dalam sistem internal tersebut meliputi *frame of reference*, *field of experience*, *cognitive structure*, *thinking patterns*, *state internal*, dan *attitude*. Durkheim (dalam Ritzer, George, 2009), “heterogenitas dapat menciptakan pembagian kerja, dan pembagian kerja bisa menciptakan solidaritas”.

Oleh karena itu, dengan komunikasi internal kepentingan para anggotanya diharapkan dapat terakomodasi, perbedaan pendapat dapat dieliminasi, konflik dapat dihindari, dan tujuan kelompok dapat tercapai, sehingga mereka memiliki “*sense of belonging*” terhadap kompepar tersebut. Untuk itu, komunikasi yang cepat dan efektif sangat diperlukan (Dwi & Putra, 2008). Sementara itu, menurut Tubbs dan Moss (dalam Rakhmat, 2018), komunikasi dikatakan efektif apabila menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang baik, dan tindakan.

Komunikasi internal sendiri menurut Lawrence D. Brennan (dalam Effendy, 2011) sebagai pertukaran

gagasan (secara horizontal dan vertikal) di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi guna terwujudnya tujuan perusahaan. Adapun tujuan dari komunikasi itu sendiri menurut Pace, Peterson, dan Burnett (dalam Effendy, 2011: 32) adalah untuk memastikan komunikasi memahami makna dari pesan yang diterima (*to secure understanding*), terus memelihara dan membina penerimaan tersebut (*to establish acceptance*), dan memotivasi komunikasi untuk melakukan suatu kegiatan (*to motive action*). Sedangkan menurut Cutlip (dalam Theaker, 2001), tujuan dari komunikasi internal yaitu untuk identifikasi, membangun dan menjaga hubungan timbal balik antara organisasi dan karyawan, dimana kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh karyawannya.

Berkaitan dengan pengembangan wisata berbasis alam dan budaya di Kabupaten Pangandaran ini, diperlukan kohesivitas kelompok penggerak wisata di daerah (kompepar) tersebut. Sebagaimana hal ini menurut Collins dan Raven (Rakhmat, 2018) menyatakan bahwa kohesivitas kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok, mencegahnya meninggalkan kelompok. Pada kelompok kohesif para anggotanya terikat kuat dengan kelompoknya, maka mereka menjadi mudah melakukan konformitas. Makin kohesif sebuah kelompok, makin mudah anggota-anggotanya untuk tunduk pada norma kelompok (Rakhmat, 2018). Kohesif adalah batas hingga di mana anggota-anggota suatu kelompok bersedia untuk bekerjasama. Kelompok menjadi kohesif tugas-tugas mereka dan anggota-anggotanya merasa dimampukan untuk melakukan tugas-tugas tambahan (West, Richard, 2008). Sebagai batas, kohesif dapat memisahkan peran masing-masing anggotanya, dan ketaatannya pada kelompok yang dapat mengarahkan mereka pada kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Kohesivitas kelompok terjadinya juga pada kompepar di Kabupaten Pangandaran. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas komunikasi internal dan kerja sama berjalan dengan kondusif. Kompepar menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran, di mana dalam hal ini masyarakat diberdayakan sedemikian rupa agar mereka paham dan berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata tersebut. Pola kemitraan yang terbangun antara pemerintah dengan masyarakat cenderung mengarah kepada pemberdayaan masyarakat lokal (Ami Suwandi Putra, 2013). Salah satu elemen penting untuk menjadi anggota kompepar adalah pegiat wisata, mereka perlu diberdayakan agar mereka memahami potensi wisata dan berpartisipasi dalam pengembangannya di wilayah tersebut.

Kompepar merupakan tempat para anggotanya berinteraksi, komunikasi menjadi landasan utama untuk

bertukar informasi untuk membangun kesepahaman dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun sektor pariwisata berbasis kearifan lokal. Untuk itu, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan aktivitas komunikasi internal dalam Kompepar, dan kohesivitas kelompok yang terbangun dalam kompepar di Kabupaten Pangandaran.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang menurut (Rakhmat, 2008) studi penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi di bidang tertentu secara fakta dan cermat. Fakta atau karakteristik yang dilukiskan dalam penelitian ini terdiri dari variabel komunikasi internal, yang meliputi intensitas komunikasi internal, aktivitas komunikasi langsung dan tidak langsung, intensitas perbedaan pendapat, dan intensitas pertukaran informasi yang dilakukan oleh anggota kompepar. Variabel lainnya yang diambil dalam penelitian ini adalah kohesivitas kompepar yang meliputi kesamaan pandangan, tempat/wadah belajar, peningkatan wawasan, pembagian tugas, dan kerja sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam pengembangan pariwisata secara intensif dilakukan oleh anggota Kompepar di Kabupaten Pangandaran, dimana komunikasi internal menjadi salah satu aktivitas yang rutin terjadi. Komunikasi internal yang terjadi pada kelompok tersebut dapat dilihat dari intensitas, proses, dan situasinya, yang pada akhirnya berkaitan dengan kecermatan kelompok (kohesivitas) dalam Kompepar tersebut. Hasil penelitian tentang komunikasi internal dan kohesivitas yang terjadi dalam Kompepar tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Intensitas Komunikasi Internal

Intensitas Komunikasi Internal	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	-	-
Jarang Sekali	-	-
Kadang-kadang	7	23,33%
Sering	18	60,00%
Sangat Sering	5	16,67%
Total	30	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan kuesioner yang dibagikan kepada sampel sebesar 30 orang dengan menggunakan acak sederhana. Teknik

analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan menganalisis data hasil penelitian yang telah tersaji di dalam tabel 1.

Tabel 1. menunjukkan bahwa, seluruh responden melakukan aktivitas komunikasi internal dalam Kompepar. Mayoritas responden menyatakan sering melakukan komunikasi internal dalam Kompepar, yaitu 60,00%, sedangkan yang sangat sering 16,67%, dan yang kadang-kadang 23,33%.

Data di atas mengindikasikan bahwa Kompepar merupakan suatu kelompok yang menjadikan komunikasi sebagai dasar untuk melaksanakan aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Keanggotaan Kompepar sangat heterogen karena mereka berasal/wakil dari organisasi yang terlibat dalam dunia kepariwisataan, sehingga dengan keheterogenannya, para anggota membutuhkan komunikasi untuk mengimplementasikan kepentingannya masing-masing, dan menghindari krisis komunikasi dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, ketika krisis komunikasi yang menimbulkan kurang harmonisnya hubungan yang melanda mereka, keputusan harus segera diambil, dilaksanakan dan dibicarakan kepada anggota kelompok, sehingga hubungan baik di antara anggota kelompok tersebut bisa dipertahankan, dan kebijakan tentang masalah kepariwisataan dapat dikomunikasikan (Dwi & Putra, 2008). Oleh karena itu, intensitas komunikasi internal yang terjadi dalam kompepar di Kabupaten Pangandaran tergolong tinggi.

Komunikasi internal di dalam Kompepar di atas berkaitan dengan fungsi komunikasi itu sendiri, yaitu fungsi sosial, dan pengambilan keputusan. Fungsi sosial bisa dilihat pada saat para anggotanya yang berasal berbagai elemen tersebut melakukan tukar-menukar informasi untuk meningkatkan pengetahuan, menjalin relasi dan membangun kesadaran pengelola usaha pariwisata untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, membangun komunikasi dapat mengakibatkan terpenuhinya kebutuhan emosional, intelektual, dan hubungan yang harmonis dengan orang lain dalam suatu kelompok (Mudjiono, 2012).

Fungsi pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam Kompepar dengan memutuskan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu di bidang pariwisata yang disesuaikan dengan kepentingan perusahaan/organisasi yang diwakilinya. Dengan demikian, komunikasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengambilan keputusan (Lestari, 2015). Berjalannya fungsi komunikasi secara sosial, dan pengambilan keputusan mengembangkan pariwisata yang terjadi pada kompepar di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa komunikasi tersebut berlangsung efektif. Hal ini disebabkan bahwa komunikasi internal memberikan kontribusi informasi yang dibutuhkan,

sehingga dapat menimbulkan kepuasan kerja (Neonisa, 2011)

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Intensitas Komunikasi Langsung

Intensitas Komunikasi Langsung	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	-	-
Jarang Sekali	-	-
Kadang-kadang	6	20,00%
Sering	21	70,00%
Sangat Sering	3	10,00%
Total	30	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Tabel 2. menunjukkan bahwa seluruh responden melakukan aktivitas komunikasi langsung. Mayoritas dari mereka menyatakan sering melakukan komunikasi langsung dalam Kompepar, yaitu 70,00%, sangat sering 10,00%, dan kadang-kadang 20,00%.

Komunikasi langsung yang terjadi pada Kompepar di Kabupaten Pangandaran, umumnya terjadi ketika mereka berada dalam berbagai pertemuan kelompok, atau ketika mereka berada di luar situasi kelompok, seperti ketika sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai perusahaan/organisasi yang diwakilinya. Komunikasi pada situasi kelompok ini sangat memungkinkan pesertanya melakukan aktivitas komunikasi antarpersona.

Komunikasi langsung yang terjadi pada Kompepar lebih pada upaya yang dilakukan oleh anggota kelompok itu dalam mengirim dan menerima informasi langsung di antara kedua belah pihak, baik *person to person*, maupun *person to group*, tanpa perantara orang lain. Mereka yang berkomunikasi berharap melakukan tindakan sama sesuai dengan tujuan, harapan atau isi pesan yang disampaikan (Ahmad, 2014). Komunikasi langsung ini memungkinkan kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tentang masalah yang berkaitan dengan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.

Para anggota Kompepar di Kabupaten Pangandaran melakukan komunikasi langsung tanpa perantara menunjukkan hubungan interpersonal di antara mereka telah terbangun dengan baik. Hal ini bisa terjadi, karena komunikasi langsung dilakukan secara terbuka, bisa langsung ditanggapi, sehingga mempermudah terbangunnya kesepakatan. Sikap terbuka ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun efektivitas komunikasi interpersonal (Rakhmat, 2018). Para anggota yang tergabung dalam Kompepar tersebut satu sama lain saling membutuhkan informasi faktual untuk memperjelas segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan kepariwisataan.

Sikap terbuka untuk menerima itulah mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal ini menurut

Bormann (dalam Rakhmat, 2018), anggota kelompok akan bertanya tentang informasi yang mereka butuhkan, karena takut kelihatan bodoh, dan kehilangan muka. Oleh karena itu, komunikasi langsung ini menjadi penting bagi mereka untuk dimanfaatkan untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.

Namun demikian, ada juga anggota Kompepar yang kadang-kadang melakukan komunikasi tidak langsung dengan memanfaatkan perantara orang lain untuk dimintai bantuannya ketika bertanya atau menyampaikan pesan kepada pihak yang dituju.

Individu-individu yang tergabung dalam Kompepar berasal dari atau perwakilan dari organisasi/perusahaan yang bergerak dalam kegiatan kepariwisataan, seperti hotel, restoran, perjalanan wisata, pemandu wisata, dan sebagainya yang tentu saja kendala psikologis bisa menjadi masalah bagi sebagian dari mereka, seperti status di tempat kerja asalnya yang tidak semuanya berada pada tataran manajemen, keterbatasan pengetahuan, dan kualitas interaksi yang dialami oleh sebagian dari mereka, terutama pada saat berkomunikasi dengan individu lain dalam kelompok tersebut. Interaksi ini menjadi hambatan yang merintangi individu pada saat melakukan komunikasi, sehingga dapat berakibat buruk dan merugikan bagi yang bersangkutan (Harivarnan, 2018). Hambatan komunikasi ini berpengaruh pada efektivitas komunikasi yang dilakukan individu tersebut.

Individu yang melakukan komunikasi tidak langsung, hanya sebagian kecil saja, sehingga interaksi yang terjadi pada Kompepar tidak menjadi persoalan yang krusial, dan kualitas hubungan di antara individu di Kompepar Kabupaten Pangandaran masih terjaga dengan baik. Komunikasi yang efektif dapat membangun hubungan baik, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan dapat mengatasi konflik (Hijrah, 2017). Oleh karena itu, interaksi dalam kelompok ini begitu terjaga, karena para anggotanya menyadari bahwa interaksi dapat menambah wawasan, dan membangun kerja sama dalam bidang kepariwisataan.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Intensitas Perbedaan Pendapat

Intensitas Perbedaan Pendapat	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	16	53,33%
Jarang Sekali	11	36,67%
Kadang-kadang	3	10,00%
Sering	-	-
Sangat Sering	-	-
Total	30	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Tabel 3. Menunjukkan bahwa responden yang tergabung dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran mayoritas, yaitu 53,33% tidak pernah berbeda pendapat tentang persoalan kepariwisataan dengan orang lain dalam kelompok tersebut. Responden yang jarang sekali berbeda pendapat berjumlah 36,67%, dan yang kadang-kadang berbeda pendapat ada 10,00%.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam suatu kelompok merupakan hal yang wajar, karena setiap individu yang tergabung dalam kelompok tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga kepentingannya pun bisa berbeda pula. Demikian halnya juga yang terjadi dalam Kompepar di Kabupaten pangandaran. Walaupun intensitas perbedaan pendapat tersebut kecil, tetap menunjukkan adanya demokrasi yang mengarah kepada kesepakatan bersama tentang persoalan pariwisata. Perbedaan pendapat di antara individu menjadi landasan dalam musyawarah untuk mengambil keputusan (Wijayanta, 2007).

Minimnya perbedaan pendapat di antara individu-individu yang tergabung dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran ini dilandasi oleh kepercayaan di antara mereka. Kepercayaan tersebut merupakan faktor sosio-psikologis yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang eksistensi kompepar sebagai suatu organisasi yang dapat memfasilitasi kepentingan para anggotanya yang berasal dari organisasi/kelompok yang berbeda dalam memperlancar usaha pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Kepercayaan ini memberikan gambaran kepada inividu-individu dalam mempersesi realitas, mengambil keputusan, dan menentukan sikapnya (Rakhmat, 2018). Oleh karena itu, gambaran realitas Kompepar yang terbentuk dalam diri individu-individu tersebut menjadi bahan bagi dirinya untuk mengambil keputusan dan membangun sikapnya terhadap kelompok tersebut, termasuk di antaranya mengambil keputusan dn sikap untuk tidak berbeda pendapat.

Biasanya perbedaan pendapat pada kompepar lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis bukan pada masalah kebijakan kelompok. Pembuatan kebijakan di bidang kepariwisataan disusun oleh Instansi terkait, sedangkan pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh Kompepar. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada perbedaan pendapat, walaupun instensitasnya sangat kecil. Hal ini bisa terjadi, karena Kompepar di Kabupaten Pangandaran ini sangat heterogen, sehingga potensi perbedaan pendapat tidak bisa dihindari. Setiap individu yang tergabung dalam kelompok tersebut mewakili kepentingan masing-masing, sehingga kepentingan ini membawa ke dalam situasi perbedaan pendapat/interpretasi, tujuan, dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan interpretasi, preferensi, dan tujuan dari tiap individu yang ada dalam kelompok mencerminkan kehidupan tentang demokrasi (Sukri, 2016). Oleh karena itu, Kompepar di Kabupaten

Pangandaran sangat menghargai perbedaan pendapat, sehingga konflik bisa dihindari seminimal mungkin.

Tidak adanya perbedaan pendapat di antara anggota Kompepar disebabkan mereka sering bertukar pikiran mengenai pengembangan pariwisata, dan dalam di antara mereka saling mengakomodir kepentingan masing-masing.

Pertukaran informasi merupakan aktivitas yang rutin terjadi dalam sebuah kelompok/organisasi dengan tujuan untuk mencapai kesepahaman/kesamaan makna dari pesan yang dipertukarkan. Demikian halnya yang terjadi dalam Kompepar, di Kabupaten Pangandaran ini semua individu pernah bahkan sering bertukar informasi dengan individu lainnya. Semakin tinggi intensitas ber-interaksi di antara satu individu dengan individu lain, maka informasi yang dipertukarkan semakin banyak pula (Hertanto & Safitri, 2016). Pertukaran informasi tersebut pada akhirnya akan menambah pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi mereka yang tergabung dalam Kompepar tentang persoalan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.

Aktivitas komunikasi berupa pertukaran informasi dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam kelompok tersebut itu bersifat dinamis. Semua orang terlibat di dalam pertukaran informasi, sehingga mereka merupakan sumber informasi untuk saling mempengaruhi, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pengetahuan, penilaian, dan perilakunya. Kecenderungan individu melakukan komunikasi didasarkan pada kepercayaan, kedekatan, kebutuhan, dan pengalaman sumber informasi (Hertanto & Safitri, 2016). Oleh karena itu, Dinamika komunikasi yang terjadi dalam Kompepar menjadikan kelompok tersebut solid.

Proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh individu-individu yang tergabung ke dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa mereka itu memiliki sikap terbuka terhadap informasi yang disampaikan orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain, keterbukaan dan kepercayaan akan terbentuk, sehingga kerjasama yang sinergi dengan orang lain dapat terbangun (Handayani, 2011).

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Kesamaan Pandangan

Kesamaan Pandangan	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	13	43,33%
Setuju	16	53,33%
Tidak Tahu	1	3,34%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Total	30	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Tabel 4 menunjukkan semua responden menyatakan bahwa dirinya merasakan dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran terdapat kesamaan pandangan. Mayoritas dari mereka menyatakan setuju ada kesamaan pandangan, yaitu 53,33%, yang menyatakan sangat setuju adanya kesamaan pandangan berjumlah 43,33%, dan yang menyatakan tidak tahu ada 3,34%.

Sebagai makhluk sosial, individu-individu selalu menjalin hubungan di antara mereka yang didasarkan ke pada kepentingan yang sama, di mana kesamaan tersebut pada akhirnya dapat mempererat dan meningkatkan kualitas dari hubungan tersebut. Demikian halnya yang terjadi pada individu-individu yang tergabung dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran, di antara mereka memiliki kesamaan pandangan terhadap tujuan kelompoknya, yaitu membangun sektor wisata berbasis kearifan lokal dengan mendayagunakan masyarakat lokal. Kesamaan pandangan ini bisa terjadi, karena masing-masing individu mempunyai pendapat yang sama (Badri, 2018). Kesamaan pandangan memberi kenyamanan dalam berinteraksi kepada para anggota Kompepar di Kabupaten Pangandaran, karena mereka diikat oleh kepentingan yang sama dalam Kompepar yaitu mewujudkan pembangunan kepariwisataan, walaupun mereka berasal organisasi/kelompok yang berbeda yang tentunya mempunyai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, menurut Janis (dalam West, Richard, 2008) kelompok dapat memberikan tekanan yang besar kepada anggotanya untuk menaati standar kelompok. Adapun standar Kompepar di Kabupaten Pangandaran antara lain adalah meningkatkan partisipasi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan wisatawan dalam hal obyek dan daya tarik wisata.

Kesamaan pandangan para anggota Kompepar di Pangandaran tentang tujuan membangun sektor wisata berbasis kearifan lokal didasarkan pada realitas bahwa di Kabupaten Pangandaran potensi wisata budaya sangat banyak, baik berupa kesenian, maupun praktik-praktik ritual warisan nenek moyang yang sampai saat ini masih dilaksanakan, sehingga realitas tersebut menjadi bekal pengetahuan bagi para anggota Kompepar untuk membangun pandangan yang sama dan saling berempati dalam mewujudkan tujuan kelompok tersebut. Oleh karena itu, dalam membangun kesepahaman bersama, maka diperlukan empati dengan saling menepatkan kerangka pikir di antara individu-individu yang terlibat di dalamnya (Amal Taufik, 2013). Menempatkan kerangka pikir ini dikarenakan, mereka berasal dari organisasi/kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, di antara individu-individu tersebut berusaha mensinergikan sistem internal yang ada dalam dirinya, seperti *frame of reference*, *field of experience*, dan sebagainya agar kesamaan pandangan tetap terjaga.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pernyataan Kompepar sebagai Wadah

Kompepar Sebagai Wadah	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	12	40%
Setuju	17	56,67%
Tidak Tahu	1	3,33%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Total	30	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Tabel 5 menunjukkan semua responden menyatakan bahwa Kompepar merupakan wadah untuk mencapai tujuan kelompok, di mana mayoritas dari mereka yang menyatakan setuju ada 56,57%, responden yang menyatakan sangat setuju ada 40%, dan responden yang menyatakan tidak tahu ada 3,33%.

Pada kenyataannya Kompepar di Pangandaran merupakan suatu wadah untuk mencapai tujuan kelompok, yaitu membangun sektor wisata berbasis kearifan lokal dengan mendayagunakan masyarakat lokal. Sebagai sebuah wadah, Kompepar menampung berbagai individu yang berasal dari perusahaan/organisasi, komunitas, anggota masyarakat lokal, dan sebagainya, yang memiliki kepedulian terhadap kepariwisataan di Pangandaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kompepar harus memanfaatkan segala sumber daya potensial untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen kelompok harus memberi ruang pada pengembangan sumberdaya manusia, mensinergikan antara pariwisata dan sosial budaya masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan memperjelas pengorganisasian komunitas masyarakat (Ami Suwandi Putra, 2013). Hal yang sama menyatakan bahwa, kelompok menjadi wadah untuk memanfaatkan berbagai sumber daya secara bersama-sama, dan wadah untuk mengembangkan potensi dan spesialisasi yang dimiliki individu (Saefrudin, 2017). Dengan demikian, Kompepar menjadi sebuah wadah untuk membangun produktivitas di bidang kepariwisataan yang dapat membantu pemerintah Kabupaten Pangandaran meningkatkan perekonomiannya dari sektor wisata.

Pemanfaatan dan pemberdayaan sumberdaya kelompok, khususnya individu-individu yang berasal dari berbagai perwakilan tersebut disesuaikan dengan kompetensi dan tupoksi dari tempatnya dia berasal, sehingga mereka yang terlibat dalam aktivitas Kompepar merupakan mitra kerja dalam mencapai tujuan kelompok. Namun demikian, untuk membangun kemitraan yang baik, koordinasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik pula (Rahajeng and Manaf, 2015). Oleh karena itu, sebagai sebuah wadah, Kompepar di Kabupaten Pangandaran berusaha

mengakomodir berbagai kepentingan para anggotanya, menjalin komunikasi yang baik, dan melakukan koordinasi kerja untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai sebuah wadah, Kompepar membantu para anggotanya untuk meningkatkan wawasan. Selain itu Kompepar merupakan sebuah kelompok formal, dimana para anggotanya memiliki harapan, dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah intelektual. Pengalaman intelektual ini berkaitan dengan masalah keterbatasan pengetahuan dirinya, sehingga memerlukan bantuan dan bimbingan dari orang lain yang ada dalam kelompok tersebut. Proses bantuan dan bimbingan tersebut dapat membangun dan bahkan meningkatkan wawasan tentang masalah kepariwisataan. Kelompok memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan dan apresiasi tentang produk wisata sebagai sebuah pengalaman (Nafila, 2013). Ini semua merupakan fasilitas kelompok yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Kompepar juga merupakan sebuah wadah di mana setiap individu dapat bertukar informasi untuk membangun kesamaan makna tentang pariwisata. Berbagai informasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dapat dengan mudah dikomunikasikan, baik secara informal maupun formal. Komunikasi informal dilakukan untuk membuka akses, melakukan pendekatan, dan memberi penjelasan. Komunikasi formal dilakukan untuk mempertegas tujuan kegiatan (Arofah, 2013). Komunikasi informal dan formal ini merupakan sarana yang dapat membantu mereka untuk membangun dan meningkatkan wawasan tentang kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Kompepar merupakan *ingroup* sekunder yang individu-individu yang terlibat di dalamnya berinteraksi dan berkomunikasi untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan wawasan tentang dunia kepariwisataan. Peningkatan wawasan tersebut menjadi modal bagi mereka untuk meningkatkan/memperlancar kualitas kerjanya di bidang pariwisata. Peningkatan kualitas kerja ini menurut Allport (dalam Rakhmat, 2018) disebut sebagai fasilitas sosial, di mana pekerjaan menjadi mudah karena ada pengaruh dari kelompok.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pembagian Tugas

Pembagian Tugas	Frekuensi	Persentase
Sangat Setuju	8	26,67%
Setuju	20	66,67%
Tidak Tahu	2	6,66%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
Total	30	100%

Tabel 6 menunjukkan semua responden menyatakan bahwa dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran terdapat pembagian tugas. Responden yang menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut berjumlah 66,67%, responden yang menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut ada 26,67%, sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu ada 6,66%.

Kompepar merupakan kelompok yang terdiri dari sejumlah orang berperan dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu membangun sektor wisata berbasis kearifan lokal dengan mendayagunakan masyarakat lokal. Dalam melaksanakan perannya tersebut, mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing yang disesuaikan dengan bidang kerja organisasi yg diwakilinya. Tupoksi tersebut merupakan implementasi dari pembagian tugas kelompok. Pembagian kerja ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi kerja anggota (Widia Prastyanti, 2017). Hal ini bisa terjadi pada anggota Kompepar, karena setiap individu bisa fokus bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih.

Pembagian tugas dalam Kompepar ini tentunya memerlukan kompetensi berkomunikasi, kemampuan dalam menyimak, menyusun perencanaan, mengambil keputusan, dan cara menyelesaikan masalah kepariwisataan sesuai dengan tupoksi perusahaan/organisasi asal mereka. Semua kompetensi tersebut dapat berimplikasi terhadap efektivitas kerja anggota Kompepar. Dengan demikian, pembagian tugas yang baik berhubungan dengan efektifitas kerja yang baik pula (Murti, 2015). Oleh karena itu, pengakuan terhadap kemampuan anggota Kompepar dalam melaksanakan tugas menjadi hal yang penting dalam membangun kelompok yang kohesif untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Kelompok menjadi kohesif, karena anggota-anggotanya merasa dimampukan untuk melakukan tugas-tugas, sehingga dirinya menjadi antusias dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut (West, Richard, 2008).

Pembagian tugas dalam Kompepar membantu anggotanya untuk mengembangkan diri, dan melatih fokus dalam melaksanakan tugasnya. Dengan pembagian kerja, setiap individu yang berasal dari berbagai organisasi/kelompok pegiat wisata (heterogen), tergabung dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran menjadi terintegrasi, sehingga dapat bertambah ketrampilannya dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Pembagian kerja ini menurut Durkheim (dalam Ritzer, George, 2009) mampu menciptakan sebuah integrasi dalam heterogenitas yang didasarkan pada solidaritas.

Tabel 6. Menunjukkan pernyataan bahwa dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran terdapat kerja sama. Responden yang menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut berjumlah 53,33%, responden yang

menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut ada 43,33%, sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu ada 3,34%.

Kerja sama merupakan tindakan yang dilakukan individu-individu yang tergabung dalam Kompepar. Melalui kerja sama ini mereka berusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan melaksanakan tugas yang sesuai dengan bidangnya dalam rangka mencapai tujuan membangun dunia kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran. Ketersediaan anggota-anggota kelompok untuk bekerjasama menunjukkan kelompok tersebut kohesif (West, Richard, 2008). Kerja sama yang dilakukan di antara anggota Kompepar adalah untuk mensinergikan pelayanan wisata, seperti anggota Kompepar yang berasal dari perusahaan perjalanan wisata bekerja sama dengan anggota yang berasal dari perusahaan hotel dan restoran, bekerja sama pula dengan pemandu wisata, dan sebagainya, sehingga pengunjung dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

Kerja sama di antara anggota Kompepar tersebut bisa berjalan dengan baik, karena di antara mereka memiliki perasaan dihargai, diterima, dan selanjutnya saling membantu untuk memajukan dunia pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Perasaan diterima di dalam komunitas tersebut dapat membangun kohesivitas kelompok yang kuat (Adriana et al., 2016). Kerja sama yang terbangun dalam Kompepar ini selanjutnya dapat membantu pemerintah dalam menciptakan iklim usaha wisata yang sehat.

Terbangunnya kerja sama dalam Kompepar di Kabupaten Pangandaran dalam mencapai tujuan membangun pariwisata meunjukkan bahwa dalam kelompok tersebut telah terbangun komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi unsur yang sangat penting dalam kelompok untuk membangun relasi antara anggotanya untuk membangun kerjasama dalam rangka mencapai tujuan (Setiawati, Ammy Novita, 2018). Dengan demikian, kerja sama yang disertai dengan tanggung jawab individu-individu dalam Kompepar ini dapat menghasilkan produktivitas, sehingga kerja sama kelompok menjadi efektif.

SIMPULAN

Kompepar di Kabupaten Pangandaran merupakan kelompok yang anggota-anggotanya berasal dari berbagai organisasi/kelompok pegiat wisata yang terikat oleh tujuan yang sama, yaitu membangun sektor wisata berbasis kearifan lokal dengan mendayagunakan masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka aktif berkomunikasi secara internal, baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai kesepakatan bersama dengan meminimalisir perbedaan pendapat tentang persoalan pariwisata.

Pertukaran informasi yang dilakukan anggota kompepar di Kabupaten Pangandaran tersebut menunjukan dinamika komunikasi, semua orang terlibat di dalam pertukaran informasi, sehingga mereka merupakan sumber informasi untuk saling mempengaruhi, sehingga berimplikasi terhadap pengetahuan, penilaian, dan perilakunya. Terjadinya dinamika komunikasi internal dalam kelompok ini dilandasi oleh kepercayaan, kedekatan, kebutuhan, dan pengalaman sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, dinamika komunikasi yang terjadi dalam Kompepar menjadikan kelompok tersebut kohesif.

Kompepar di Kabupaten Pangandaran merupakan kelompok yang kohesif, karena merupakan suatu wadah yang para anggotanya memiliki kesamaan pandangan, dapat meningkat wawasannya, sehingga mampu pariwisata yang didasarkan pada pembagian tugas dan kerja sama di antara mereka. Pembagian tugas ini mampu menciptakan sebuah integrasi dalam heterogenitas yang didasarkan pada solidaritas di antara mereka yang berasal dari berbagai organisasi/kelompok pegiat wisata yang bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke Pimpinan Rektorat beserta Jajarannya atas telah terselesaikannya penelitian skema Riset Kompetensi Dosen Unggulan dengan pembiayaan Hibah Internal Universitas Padjadjaran 2017-2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, G., Pandjaitan, N. K., Dharmawan, H., Sains, D., Masyarakat, P., Manusia, F. E., & Bogor, I. P. (2016). *Kohesivitas Komunitas Nelayan dalam menghadapi Perubahan Iklim di Pesisir Jawa Barat (Studi Kasus: di Pedesaan Jawa Barat)*. (Adger 2006).
- Ahmad, O.N. (2014). Komunikasi Sebagai Proses Interaksi. *AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2, (2), 17–34.
- Amal, T. (2013). Perilaku Ritual Warok Ponorogo Dalam Perspektif Teori. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3, (2), 113–121.
- Ami, S.P. (2013). Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5, (3), 189–200.
- Arofah, K. (2013). komunikasi Kelompok Dan eksternalisasi Pengetahuan Tacit Dalam

- Pengambilan Keputusan Organisasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11, (1), 30–34.
- Badri, M.H. (2018). *Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat Dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Di Yogyakarta*.
- Dwi, K., & Putra, C. (2008). Strategi Public Relations Pariwisata Bali. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5, (1), 41–66.
- Effendy, O.U. (2011). *Ilmu Komunikasi. Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- George, R.. (2009). *Teori Sosiologi (Kedua)*. Yogyakarta.
- Handayani, T. (2011). Membangun Komunikasi Efektif Untuk Meningkatkan Kualitas Dalam Proses Belajar Mengajar. *Ta'Dib, XVI*, (02), 274–302.
- Harivarman, D. (2018). Hambatan Komunikasi Internal di Organisasi Pemerintahan. *Jurnal ASPIKOM*, 3, (3), 508. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.171>
- Hertanto, D. & Safitri, R. (2016). Analisis Struktur Jaringan Komunikasi dan Peran Aktor Dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kentang (Petani Kentang Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang) Structure Analysis of Communication Network and The Role Players Technology Application in. *Jurnal Habitat*, 27, (2), 55–65. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.2.7>
- Hijrah. (2017). Hambatan Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian Virginity Dalam Pergaulan Sehari-Hari Di Kota Palu Hijrah. *Jurnal Online Kineik*, 4, (2), 45–56.
- Lestari, S.P. (2015). Keputusan Memilih Jasa Layanan Kesehatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Islam Lumajang). *JURNAL INTERAKSI*, 4, (2), 139–147.
- Mudjiono, Y. (2012). Komunikasi sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2, (1), 100–110.
- Mulyana, D. (2013). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murti, E. (2015). Pengaruh pembagian kerja terhadap efektifitas organisasi publik di desa karangrejo kecamatan kendal kabupaten ngawi. *Jurnal Sosial*, 16, (1), 76–91.
- Nafila, O. (2013). Peran Komunitas Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Situs Megalitikum Gunung Padang. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 24, (1), 80. <https://doi.org/10.5423/PPJ.2009.25.4.333>
- Neonisa, D. (2011). Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Kepuasan Kerja Dalam Sebuah Organisasi: Studi Kasus PT XYZ. *HUMANIORA*, 2, (1), 779–789.
- Rakhmat, J. (2008). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Risdakarya.
- Rakhmat, J. (2018). *Psikologi Komunikasi (Revisi)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saefrudin. (2017). Pengorganisasian Dalam Manajemen. *Jurnal Al-Hikmah*, 5(2), 56–67.
- Setiawati, A.N, & B.R. (2018). Pengaruh Pelatihan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kohesivitas Kelompok pada Divisi Food and Beverage Product Hotel X Bintang 5 Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 06, (01), 41–53.
- Sukri. (2016). Keniscayaan konflik dalam masyarakat demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*, 04, (2), 153–170.
- Theaker, A. (2001). *Public Relations Handbook*. London: Routledge.
- West, Richard, dan L. H. T. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi*. 276.
- Widia Prastyanti, E. (2017). Pengaruh pembagian kerja terhadap peningkatan efisiensi kerja karyawan pastry di hotel santika premiere malang. *Pesona*, 2, (02), 1–6.
- Wijayanta, T. (2007). Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Dalam Putusan Kepailitan Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Mimbar Hukum*, 19, (3), 335–485. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

MODEL OF GAWAI DAYAK BASED-SOCIAL CAPITAL IN THE BORDER OF SAJINGAN BESAR OF WEST KALIMANTAN

Herlan and Elyta

Faculty of Social and Political Science, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

E-mail: herlan@fisip.untan.ac.id

ABSTRACT. The ceremony of gawai Dayak has its own uniqueness in each region. Particularly in the region of Sajingan Besar, the Indonesia-Malaysia border, Gawai Dayak forms a unique social capital and locality. Thus the purpose of this study is to design a social capital model based on Gawai Dayak at the border of Sajingan Besar, West Kalimantan. This research uses the action research method approach with the Fast and Participatory Assessment model. Participants came from informants local government, Non-Government (NGOs), community leaders in the form of in-depth interviews. The findings of this study are the existence of unique social capital in Gawai Dayak rituals in the people of Sajingan Besar. Based on the results of this study indicate that Gawai Dayak is a unique social capital that is reconstructed in Gawai rituals, namely the ba'aek and ba'komok traditions. The ba'aek and ba'komo" traditions are rituals in the ceremony of Gawai Dayak. Social capital is formed through local institutions such as mutual cooperation and mutual trust between communities, then the Gawai Dayak becomes a bond of friendship, cooperation, togetherness, mutual care between individuals and the community, and it can be converted into political capital that is political participation which then becomes political participation becomes unique local norms and values. Based on the results of the study, it can be concluded that the social capital contained in the Gawai Dayak is seen in the Ba'aek and Ba'komo rituals. In both of these rituals, a unique locality is found and is only found in the Dayak community in Sajingan Besar.

Keywords: Dayak; Gawai; Social Capital; Border

MODEL MODAL SOSIAL BERBASIS GAWAI DAYAK DI PERBATASAN SAJINGAN BESAR KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK. Pada upacara gawai Dayak ini memiliki keunikan tersendiri pada tiap-tiap wilayah. Terkhusus di wilayah Sajingan Besar perbatasan Indonesia-Malaysia, gawai Dayak membentuk modal sosial yang khas dan lokalitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain model moda sosial pada Gawai Dayak di perbatasan Sajingan Besar, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *action research* dengan model Asesmen Cepat dan Partisipatif yang berasal dari para informan Pemda, Non Pemerintah (NGO), Pemuka Masyarakat dalam bentuk wawancara mendalam. Temuan penelitian ini yaitu adanya modal sosial yang unik dalam ritual-ritual gawai Dayak pada masyarakat di Sajingan Besar. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gawai Dayak menjadi modal sosial yang unik yang terekonstruksi pada ritual-ritual Gawai yaitu tradisi *ba'aek* dan *ba'komo*". Tradisi *ba'aek* dan *ba'komo* merupakan ritual dalam upacara Gawai Dayak. Modal sosial yang terbentuk melalui kelembagaan lokal seperti gotong royong dan adanya rasa saling percaya antar masyarakat, kemudian gawai Dayak menjadi tali perekat silaturahmi, kerjasama, kebersamaan, sikap saling peduli antar individu dan masyarakat, dan menkonversi menjadi modal politik yaitu partisipasi politik yang kemudian menjadi norma dan nilai lokal yang unik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang terkandung pada gawai Dayak yaitu terlihat pada ritual Ba'aek dan Ba'komo. Pada kedua ritual ini memunculkan lokalitas yang unik dan hanya terdapat pada komunitas Dayak di Sajingan Besar.

Kata kunci: Dayak; Gawai; Modal Sosial; Perbatasan

INTRODUCTION

A border region is a dividing line that distinguishes one country's territory from another. Based on nawacita from Jokowi and JK (2014-2019) that the border region is one of the programs of the nawacita. There have been changes in policies that prioritize border areas even though there have been changes in border area policies that are still underdeveloped areas and the community's economy is still experiencing poverty.

Broadly speaking, the border region is an area that is synonymous with disadvantaged areas. In reality, border areas are very vulnerable to foreign influences. This is evidenced through the condition of cross-border areas which is believed to be a general picture for other

countries to pay attention to the condition of a country. The border region cannot be ignored because it is an important element related to development and construction matters, especially in the context of nationalism (Elyta & Razak, 2019:40).

West Kalimantan is an area that is classified as a border region of Indonesia, which directly borders with Malaysia and is bound together through cross-border trade agreements (Elyta, 2017:60). Furthermore, the agreement in question is strived to strengthen cooperation between countries, bearing in mind that the neighboring country is incorporated in ASEAN and implements AEC as a single product market in the Southeast Asian region (Razak & Elyta, 2017:214). One of Indonesia's border regions that were involved in the implementation of the MEA is

Sajingan Besar in West Kalimantan. However, this border region is included in the category of disadvantaged areas.

The problem of backwardness or decline in welfare refers to economic problems that are alleged to be able to influence the nationalism of each individual from border civilization. Allegedly, the intended nationalism reflects the attitude of people's dependence on the Indonesian border region towards the Malaysian side (Elyta, Sofyan, Rahman, & Nuzulian, 2018:311). Based on the foregoing, there is a need for applied research to anticipate the conditions of poverty and also massive dependence on the state of Malaysia occurring in the border region of Sambas Regency by developing a model of social capital.

The purpose of this research is to find out the contribution of Gawai Dayak in fostering the values of solidarity in the young generation in Sekendal Village, Air Besar District, Landak Regency. The results showed that Gawai Dayak in the village of Sekendal is still well preserved by the implementation of Dayak Gawai routinely every year. Gawai Dayak contributes to growing the values of moral feelings to the younger generation in Desa Sekendal. Gawai Dayak contributed to fostering mutual trust in the young generation in the village of Sekendal (Hatta, Bahari & Rivaie, 2016: 1).

This study's purpose is to determine the contribution of local culture gawai in growing the value of Generation Z Solidarity in the Mualang Dayak Tribe. The results showed that the Local Culture of Gawai in the Dayak Mualang Tribe is still well preserved with the implementation of Gawai routinely every year. Dayak Gawai contributes to growing social awareness and the value of generation Z solidarity in the Dayak Mualang Tribe (Fusnika & Dua. 2019: 150)

Gawai Dayak is part of the Dayak ritual culture in West Kalimantan. This ritual conducted after the rice harvest as an expression of thanks to God for the abundance of agriculture produces (Herlina, Andayani, Waluyo, & Setiawan, 2016:512). Based on various previous studies relating to Dayak Gawai, shows that there are differences with the author's research. The author's research has a novelty because it wants to design Dayak Gawai as social capital. Social capital is so important, this can be seen from the explanation of previous studies relating to social modal.

Based on studies in several countries, it shows that solid social capital will drive the economy due to the trust and network of economic actors (Fathy, 2019:16). Thus, social capital in which contains trust and network, including determining the stability of a country's economy. The better the social capital owned by a country, the better the existence of the country. This includes the level of poverty, international political power, and of course the guarantee of the welfare of the country's people.

Based on political studies in developing countries shows that social capital is a key element in realizing civil society (Singh & Koiri, 2016:279). Civil society is a macroeconomic study that focuses on economic issues that affect the growth of a society. Furthermore, political policies on civil society can provide a favorable space for a sustainable economy. Civil society does not close themselves to imaginary boundaries, such as ethnic and religious differences so that the possibility of cooperation is increasingly wide open.

This was also experienced by countries in East Asia including in China. The Chinese government realizes that it is very important to identify the poor in the social aspects of development. One important approach for them is to unravel and analyze some social capital (Zhang, Zhou, & Lei, 2017:350). The development of the world economy, especially in East Asia, has experienced very high development. The economic process carried out through trade has a positive impact on the level of interconnection with other countries being very tight, it is due to the strong political-economic power developed by China namely on the network through kinship and mutual trust.

Bugis society has a social bond that is a value and norm that they adhere to. In addition, people from China, Java, and Bali have a desire to improve the status of harmonious ties between fellow humans by forming the mind into a major support center behind social capital between them (Faisal, 2017:75). Based on the results of the previous research, it can be used as a reference for the concepts of developing the social capital model of the border community. Furthermore, a new concept is developed using different studies and methods to produce a more targeted social capital model. The author's observation shows that there is potential for social capital in Sajingan Besar, West Kalimantan, which is called Gawai Dayak, Gawai Dayak is a typical Dayak tradition, where Dayak gawai shows gratitude, is grateful for the blessings given by "JUBATA". The abundance of blessings in the form of satisfying yields was pointed out by the Gawai Dayak to be able to increase friendship, kinship, and love. Thus the purpose of this study is to design a social capital model based on Gawai Dayak at the border of Sajingan Besar, West Kalimantan.

METHOD

The method that has been used is the action research method with the Fast and Participatory Assessment model. By using participatory methods that come from informants are Sajingat Besar Sub-District, NGOs, Community Leaders and Youth Leaders in the form of in-depth interviews. The location in this study is in the border area of Sambas Regency, namely in the District of Sajingan

Besar. This research was conducted in 2016 because for the enrichment of the data the research was updated in 2019 by adding articles in the latest journals and additional interviews. This location was chosen as the research target with some consideration that the Sajingan Border Area is a backward border. The technique of determining informants is purposively by means of people who have settled in the research location for at least five years with the reason to gain deeper knowledge about the ins and outs of implementing Gawai Dayak at the border, including knowledge of socio-economic institutions that still exist or have been weakened and destroyed (dead) which are part of the potential for social capital they have. Informants in this study are youth leaders, border village officials, NGO leaders who care about border issues. Collection tools are using in-depth interviews, observation, and documentation. Further data were analyzed using qualitative.

RESULTS AND DISCUSSION

Chronology occurs Gawai Dayak

Social capital can be defined as a trust; norms arise behind those inherent in a social network (Ferris, Javakadze, & Rajkovic, 2017:69). In the past, gawai activities in the Sambas and other areas were related to farming activities. When farming the community will do some rituals. One of the rituals in farming is “bapadah” which means that before opening a field, one must bapadah (inform) the other community in advance. Rituals in farming do not only end there, but there are still other rituals ranging from planting rice until harvest time. It was during this harvest that gawai activities appeared. Gawai means an expression of gratitude to Jubata (God) for the success of the field. The word success is not only a connotation of success, but an unsuccessful field is also required to express gratitude to Jubata (God).

At first, the Gawai Dayak used to be just a gawai. Each region has a different name, for example, in disambas, it is called gawai gabayat, while in Landak the name is dango, while in Bengkayang it is called Gawai upiraris. The mention is different in each region because the Dayak sub-tribe has its own name. At this time the Gawais are grouped into Gawai Dayak Week. The first Gawai Dayak Week was held on 30 June 1986 in the city of Pontianak. Usually, Gawai Dayak Week is carried out after the Gawais in the area are finished.

The history of the Dayak Gawai begins with the formation of the SEKBERKESDA (Joint Secretariat of the Dayak Arts) of West Kalimantan on March 12, 1986, inspired by Drs. SM. Kapha, Mosem Nyawath Elmoshwat SH, Yoseph O. Oedoen, S.Sn. After SEKBERKESDA was formed, a Dayak cultural art performance was held at the youth arena building on May 20, This is the Gawai

Dayak which was first implemented. Until 1992 the Gawai Dayak was only held for 1 day, but from 1993 until now the Gawai Dayak was carried out for four days or more and was renamed the Gawai Dayak Week.

The Dayak device week is held every May 20, where the date coincides with the National Awakening Day. In addition, on that date, it was used as a reminder of the 1976 Kadarusno Governor's Decree on the regulation of community Gawai (rice festivals) in West Kalimantan. But in fact, the implementation of Gawai Dayak Week in a number of years was not carried out on May 20 this is due to circumstances and conditions that are not possible.

Gawai Dayak Week activities are always carried out lively and use public facilities. This certainly invited the attention of many people. It also did not escape the support of the provincial and local governments both materially and formally. The implementation of Gawai Dayak Week activities is now under the auspices of the education and culture service of West Kalimantan Province in the hope that it will become a moment of unity of the Dayak people and also the people of West Kalimantan.

Some natural potential is also presented in this Gawai Dayak, for example such attributes are used such as feather of hornbills, bark, bamboo, leaves, pineapple fiber, rattan and others. As for the activities in Gawai Dayak, among others: traditional ceremonies, dayak songs, dayak art and fashion competitions, traditional games, long march, painting, weaving, chopsticks, pounding rice, tattoos, and several other competitions.

Gawai Dayak: The *Ba'aek* and *Ba'komo* Patterns in Dayak Communities

Social capital is a social facility that is the basis of the institution (Qi, 2017:2125). Explanation of the concept of social capital is focused on a network (Wardyaningrum, 2016:39). In the Gawai Dayak a network is formed, the Dayak Gawai is an event where all Dayak ethnic groups gather to celebrate the ‘naik Dango or Gawai Dayak’ meaning a realization in the form of a thanksgiving event for the success of abundant harvests. This is usually done at a radangk/longhouse that is the house of a Dayak traditional person to gather or hold an event.

To this day, Gawai Dayak is held once a year. Before the Gawai Dayak was carried out there was the name ‘ngampar bide’ which meant putting up mats, this ceremony was held before starting the Gawai (party). Before the Gawai event begins with “Nyangahant (do a prayer)” nyangahant has done for “bapadah ka Jubata (god)” means to tell “Jubata (God)” so that the Gawai performed and can run well and in addition can increase agricultural yields in the future even more successful. The origins of the implementation of Gawai Dayak can be seen more clearly in the following table.

Table 1. The origins of The Implementation of Gawai Dayak

Position / Agency	The Origins of The Implementation of Gawai Dayak
Head District of Sajingan Besar (H. Supardi, S. Pd., MM)	The Gawai Dayak was held long ago. But now the custom of Gawai Dayak is formatted into other events, for example, showing a typical Dayak dance.
Youth figure (Eva Palentina)	Dayak Gawai is gratitude to JUBATA, the joy of abundant harvests, the origins of ancient farmers had failed to harvest and the results were very unsatisfactory. Since the harvest failed the farmers began to rise from replanting and as a result, all the crops were successfully harvested and from then on the farmers held an event for their success and from there also finally not only the farmers but all their communities made the event.
The Chairman of the Border Forum (Abelnus, S.Sos., M.Sos.)	The origin of Gawai Dayak: Gawai Dayak comes from the awareness of people who get a lot of blessings for the success of the fields/paddy fields and the rice harvest went smoothly, and that's where thankful for making the Gawai Dayak.
The Community Figure in Sajingan (Jamel)	The Gawai is a routine Dayak ethnic activity, to give thanks to God for the harvest they have obtained in the planting period that year, so within the Dayak ethnic group, it is still well-maintained condition that after every harvest they carry out the ritual danggo.

Source: Processed by researchers, 2019

Norm is one form of written and unwritten rules which tends to be used as a reference that is carried out by every individual in each of his behavior (Putri, 2017:167). Gawai Dayak is one example of unwritten norms and customs. Gawai Dayak is an unwritten norm that introduces the Dayaks themselves and the wider community about Dayak culture, how the culture they practiced in ancient times, to reunite the Dayaks. Gawai Dayak is generally known for partying, for example drinking wine. But actually there are also Gawai Dayak that is done without drinking wine, who only perform worship in church and having meals. The time of the Gawai Dayak is not bound, but usually between May, June, July and according to the agreement of the local Dayak council.

Social capital is very important because it has formed a mutual trust in terms of joint work (Kurniawan, 2018:50). The Gawai Dayak process is carried out with a ba'aek system. Ba'aek in the language of Subak Dayak Salako is to collaborate in helping the community with one another. Ba'aek in the border region has been found throughout the border villages, where when the rice harvest period in the fields and the fields arrives, it is easier to find ba'aek activities for the border communities.

The cause of ba'aek is easier to find during the rice harvest season for border communities because rice requires so many people to work on the rice harvest. So that with the large number of people harvesting rice, the paddy field does not experience decay. In terms of ba'aek, it is not looking to lose in doing so, because ba'aek prefers sincerity in carrying out its activities. In the process of implementing the method ba'aek is more adjusted to the number of days. When it arrives in turn, the assistance is also more adjusted to the number of days, as with the assistance provided to others.

Furthermore, social harmonization in border communities is an asset and capital in sustainable development in the border areas of the State (Suwatriningsih & Purnomo, 2018:2-3). At the Sajingan Besar border there has been a social harmonization known as the term as ba'komo',

ba'komo 'is done if the community will give good news or there are problems that will be solved by involving traditional leaders. In ba'komo if there is good news that if one of the residents in the community will carry out a large Gawai, so that in the large Gawai, it is predicted that they will need help from others. So it is necessary to make a ba'komo to deliberate and at the same time ask for help from other communities voluntarily without payment.

The implementation of Dayak Gawai is also full of values that can be seen in the following table.

Table 2. Values of Gawai Dayak

Position / Agency	Values of Gawai Dayak
Head District of Sajingan Besar (H. Supardi, S. Pd., MM)	I see the benefits in terms of the period in the field of friendship together because traditionally they must be grateful that each house must enjoy the results of the pane. Every house organizes it, there is no making up rituals for just playing, but in certain communities in the Dayak ethnicity in the format, the event in sajingan is formulated with other rituals, but that is the event if what usually happens is not an event but an annual routine.
Youth figure (Eva Palentina)	Ba'aek in the Gawai Dayak gives more enthusiasm for farmers and the wider community to always be excited and not give up in working or doing activities.
The Chairman of the Border Forum (Abelnus, S.Sos., M.Sos.)	Ba'komo' is useful to strengthen the sense of brotherhood because in bakomo there have been efforts to solve problems that occur in society.

Source: Processed by researchers, 2019

Thus the ba'komo that occurred at the time of the Gawai Dayak had the benefit of making friends in an effort to solve the problem in their village with the help of all residents in the area, the burden of the people who would carry out the Gawai. This does not require a large fee. Doing something that will become the needs of citizens

who will carry out the Gawai. Just say the sunshine ‘for example “Tunja” which means chief.

Residents who will carry out the Gawai such as the bride, for example, do not have to pay the chef, because it has been done by other communities with no pay even by the residents who will carry out the device. Then, the existence of the ba’komo tradition in the Gawai Dayak is interpreted as a media in terms of solving problems for border communities, where when other residents get family problems, for example, then they must implement the ba’komo ‘in order to gather other citizens. Ba’komo is more prioritizing solutions from other citizens. In this case, helping with these difficulties is like the difficulty of building a decent place to live.

With the existence of ba’komo, this difficulty will be known by other residents. So the community will help in accordance with their abilities from preparing building materials to helping to erect their buildings. Because basically ba’komo ‘is a place or place for border communities to gather with one another in delivering and empowering, related to the development of their village during this time and for the long term.

As known by the sub-tribes of the Dayak Salako community, ba’komo means providing assistance voluntarily and will be alternating with others at any time. This pattern has been in effect since the border communities existed because this pattern was used on a happy day which is when there is one community that will carry out the marriage or gawai and the like, then other residents flock to provide assistance Ba’komo sympathy towards other residents when there are citizens which will carry out the Gawai and so at a very large cost.

Model of Gawai Dayak Based-Social Capital in The Border of Sajingan Besar of West Kalimantan

Social capital is one of the concepts best known as social science theory (Singh & Koiri, 2016:1). One of these social sciences includes the customs, traditions, and culture that exist in a society, such as the Gawai Dayak tradition. The approach of social capital as a “community resource” highlights the benefits generated in the community compared to previous understandings that only as good individuals (Membiela-Pollán & Pena-López, 2017:156). One example of what society produces is culture. The culture or traditions of Gawai Dayak is a form of culture produced by humans on the basis of social capital. Based on field findings, it can be explained that there is local social capital that was formed during the implementation of the Gawai Dayak, namely the ritual belief of ba’aek and ba’komo ‘. Following is the author of the reconstruction of the social value model formed in the Dayak community in Sajingan Besar in the Gawai Dayak ritual:

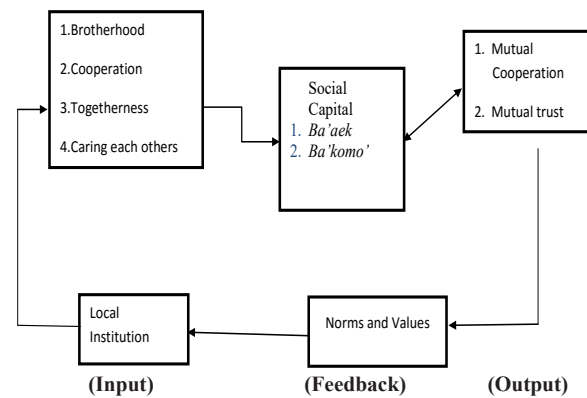


Figure 1. Model of Gawai Dayak Based-Social Capital In The Border of Sajingan Besar of West Kalimantan

Source: Processed by Researchers, 2019

The presence of norms and the general belief in community groups is the most important aspect in the scope of social capital because they have a set of shared values (Putri, 2017:168). Thus social capital is strengthened by several things including religion/belief. Based on the results of the interviews, it has been found that social capital is based on religion/ritual beliefs. The rituals of Gawai Dayak are the main source of social capital because they have great potential to form a strong social capital. This was implemented through movements accommodated by the Dayak Indigenous Council. Gawai Dayak is a tradition handed down from the Dayak tribe in the Betang House Association. Its origin is a village that is often disturbed by evil spirits and decreased yields so that the Dayak tribe performs a ritual as a blessing to the spirits of their ancestors. The benefits are to make a characteristic and show the customs of an area, the implementation process is gathering in the Dayak betang house, eating specialties, Dayak traditional dances, as well as displaying crafts/clothes typical of Dayak.

In addition, Gawai Dayak is a harvest party to give thanks to God for the abundant harvest. The origin of Gawai Dayak is an inheritance from ancestors or ancestors who have traditionally been carried out by the Dayak community up to now, as a thanksgiving from the Dayak people to God for the fortune they have received. In the Gawai Dayak, there were many interesting events such as: selling traditional Dayak instruments, Dayak dance performances, Dayak games, Dayak food, and many more. Gawai Dayak is a traditional party held by ethnic Dayaks, usually done after the rice harvest is finished. For the West Kalimantan region, there is Gawai Dayak at the village, sub-district, district, and provincial levels. Today’s Gawai Dayak is held in many competitions, such as rice mash competition using mortar, weaving competition, weaving competition, dancing competition, and others. Usually, this is done by every tribe contained in the Dayak ethnicity or village.

Improving the quality of life of border communities is urgently needed (Elyta & Zulkarnaen, 2016:39). Improvement of the quality of life of border communities is carried out by mutual assistance in the field of agriculture has been carried out by the farming community in the border of sajingan besar. Border communities know mutual cooperation with the term "ba'aek". Ba'aek that applies when the Gawai Dayak is a form or pattern of cooperation in carrying out rice planting, so they feel light because of the assistance. This Ba'aek tradition continues to live in the midst of people who are familiar with modernization.

Basically social capital is carried out with cooperation based on mutual benefit, which means there is a reciprocal relationship (Membiela-Pollán & Pena-López, 2017:150). This collaboration occurs because of mutual trust. These two things support the strength of economic progress. Mutual trust is the first and foremost foundation that strengthens social capital so as to achieve solid cooperation. Fellow citizens unless there is an activity held by the village community. Because part of the works of border of sajingan besar communities is farming.

In the aspect of social capital, networks in farm women are more likely to be blocked in government bodies. Beliefs in managing plants tend to be left to family members (Sulaiman, Wahyuni, & Adiwibowo, 2019:251). For fathers and young people, especially in Sajingan Besar, prefer to work outside the village and rarely return to the village if there are no interests.

The Ba'aek tradition in the border community of Sajingan Besar can be used as an example that with the development of the current era the community can still maintain the ba'aek culture so that it does not fade with time. Ba'aek in this border community of Sajingan besar has become a culture or tradition practiced by its citizens. Mutual cooperation in carrying out public interests. This ba'aek must exist in every community because everyone is in a social environment that is inseparable from others and neighbors.

Furthermore, social capital that has been found at the time of the Gawai Dayak is ba'komo'. In the tradition of 'ba'komo' generally do not give in the form of money, to citizens who will carry out the device. But more oriented to the completeness or needs that will be needed in the implementation of the device later. Like the need for rice, oil, sugar, coffee, chicken, livestock that will be needed in the celebration of the Gawai. Then residents will provide assistance as needed, as explained above.

Then, the form of community assistance is quite unique, because the assistance is not in the form of currency, but rather the needs that will be used in the celebration of the Gawai and others. Arriving in time, the same thing will be done again to other residents who will carry out a large Gawai. By doing ba'komo' to residents

who are going to a Gawai, this process does not involve an agreement. Only prioritizing trust and sincerity helps, according to their respective abilities.

Social capital is a comprehensive concept, which refers to the benefits derived from interactions between people (Hador, 2016:348). As is the tradition of the ba'komo in the community, which certainly stimulates interaction between the village community itself. In this ba'komo' ritual, there is a reconstruction of social capital in the form of a positive tradition, which has always existed up to now, because it provides lessons about trust that are mutual capital. Without being forced and lured in any form, but this community, it is feared that the leaves will fade slowly, along with the influx of social influences in border areas which may be as heterogenic / pluralism as various cultures enter their regions.

These local institutions can take the form of political institutions, economic institutions and local institutions (Singh & Koiri, 2016:275). Then in the local institutional context found in the Dayak community in Sajingan Besar there is a local institution, the "Dewan Adat Dayak" (DAD) as a forum for social control. This DAD is a Ba'komo 'or gathering which is a place or place for the community to carry out village meetings. The existence of village deliberations led to political participation

Political participation is the voluntary activity of citizens in which they take part in the process of electing authority, and directly or indirectly, in the process of forming general policies. This indicates that political participation is the activity of one citizen or several citizens in determining the choice to choose a leader, this can be done both directly and indirectly (Semuel & Pratiwi, 2019:17). Political participation of border residents in the Province of West Kalimantan, it can be said that the interest is very high. However, the lack of media dissemination carried out by the relevant state institutions makes the border residents as if low participation. Because this is not much exposed by the media both print and visual media. Even the enthusiasm of border communities is better when compared to urban communities, because they are more active in checking whether they are registered or not, as voter participants in the village implementing offices, where they live.

Political awareness of voters who feel obliged in launching the election of members of the DPRD of Sambas Regency because it involves the survival of the future (Elyta & Zulkarnaen, 2016:35).

Based on the writer's observations in the field, there has been a political awareness of the border communities due to the ba'komo'. Border residents long before the end of the hour or time determined by the election organizing committee in the villages, border residents finish voting first, and some residents even want to vote before the

implementation time begins, because they are worried that they will not be able to distribute their voting rights, which is caused they will soon be active in their fields and gardens.

The candidates they champion are also a major factor in the high political participation of border residents in West Kalimantan because they believe the candidates they rely on in the political battle are expected to bring significant changes to the development of their territories. This was proven in the election of governors from 2007 to 2013.

Personal political capital is based on a fundamental idea of existence "Known and recognized", based on having fame and popularity because it has certain specific qualities (Alcántara, 2017:14). The social capital of 'como' has become a conversion into political capital. The figure of Drs. Cornelis, MH, who previously started his career from the bottom of the sub-district staff to the Regent of the Landak District two consecutive periods, succeeded in convincing border residents to participate in politics, even though emotionally Cornelis did not exist with border residents because Cornelis were not bordered residents, it's just that Cornelis' figure displayed an excellent charisma so that it became a special attraction for border residents at that time.

Cornelis who is believed to be a brave figure, without strings attached and firmly believes that the figure of Cornelis is the one who deserves to lead the Province of West Kalimantan and at the same time fight for border residents whose population is pluralism. Meanwhile, if it is said that the ethnic factor that made Cornelis came out as the winner of the Governor of West Kalimantan at that time, but that appeared not only Cornelis who came forward as Governor and Governor of West Kalimantan, because there were some of the best candidates who appeared, namely Drs. AR. Mecer is known as the pioneer father of the Asian Credit Union which is recognized by the United Nations. Dr. Akil Mochtar, SH, MH, who is also a candidate of Dayak of Kapuas Hulu district, Usman Ja'far, a candidate of Dayak from Sekadau district, as well as an incumbent, Drs. Ignasius Liong, M.Si, who is also a candidate from Dayak from Kapuas Hulu Regency, graduated from IPDN, and Drs. LH. Kadir, M.Si, a Dayak candidate from Kapuas Hulu Regency who was also the incumbent of vice governor of West Kalimantan. So it is very clear, that the Cornelis won as governor is not caused by ethnic, religious or other factors.

In the next period of Drs Cornelis, MH in 2013, the enthusiasm of border residents was higher in their participation, because they were considered successful in the development, such as opening access to road infrastructure, purchasing electricity for border residents, opening PPLB, education, and health. So that border

residents are of the opinion that the Governor's program needs to be continued for the next period. For the election of legislative members, it also experienced the same thing, the high and low political participation of border residents due to candidate factors, such as dr. Karolin Margret Natasa Mutlat won throughout the West Kalimantan border sub-district, thus making Dr. Karolin Margret Natasa came out as the most votes in Indonesia DPR-RI members were able to defeat the President's son at the time, SBY and Megawati's daughter. While the Presidential election experienced the same happened. The background factor of the president's profile is also a major factor, where the 2014 presidential elections and 2019, Ir. Joko Widodo, known by residents close to the community, hypnotized border residents to vote for him.

Further analysis found that the activities of ba'aek and ba'komo' contained very positive values. First, the presence of a sense of togetherness also tightened the relationship between large border communities. From here it will be seen the value of harmony, brotherhood and social solidarity between citizens. Being a separate assessment for other citizens of the good cooperation activities has been carried out by these large-scale border communities. Second cooperation with the existence of this cooperation, it is very visible the value of togetherness in the borderline society of the great large slaughterhouse. When people need each other, the other people are not reluctant to help because the people in the village are known for their hospitality and politeness with others.

The work will be easily completed if done together. Third, the establishment of togetherness, communities at the border of the sajingan besar is very upholding the value of togetherness in all activities carried out in various ways because with this togetherness can be more intimate with each other. Fourth, the growth of a caring attitude, aside from fostering the value of togetherness, this ba'aek activity also creates a sense of mutual care among its citizens. Each individual will feel concerned with other individuals and the feeling arises by itself, seeing us live in a social environment. For example, there is a resident who died, and then other residents also helped in the funeral business, some young men or adult men voluntarily to dig graves. Fifth Political participation of border communities

CONCLUSION

Based on the results of the study's Values and norms that have been reconstructed through local institutions, namely the existence of friendly relations between Gawai Dayak, then the community cooperates with one another in the success of the Gawai Dayak which is an annual ritual of the local community. The togetherness that is created through the Ba'aek and Ba'komo rituals, the community gets closer

and works together in each ritual, and fosters a sense of caring between one another. Ba'komo 'itself is a tradition of deliberation carried out by the local community before the besa (Gawai Dayak) event is held so that consensus is reached by deliberation. Meanwhile, in the ba'aek ritual which is a form or pattern of cooperation in carrying out a procession of rice planting, so it feels light because mutual cooperation and the community help each other.

The existence of Gawai Dayak in Sajingan Besar is the social capital of the local community that must be optimized by including the empowerment dimension as a part of it. The importance of community empowerment nasari in the utilization of social capital of Gawai Dayak in Sajingan Besar is by involving the cultural dimension that grows in the community. This is in order to accelerate and optimize the results and also the process of empowerment itself.

Then, social capital basically contains trust, reciprocity of social norms and ethical values into a unity that forms an important foundation for each other. Therefore, it can be suggested that the existence of well-built social capital in the community needs to be a means of local economic empowerment, which means that local governments have the responsibility of maintaining and empowering this local potential.

REFERENCES

- Alcántara, M. (2017). Political career and political capital. *Convergencia Revista de ciencias sociales* (73), 1-17. <https://doi.org/10.29101/crcs.v0i73.4243>
- Elyta, (2017). Perdagangan Gula Ilegal di Wilayah Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 59-63. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.10747>
- Elyta, & Razak, A. (2019). The Role of Weavers Woman in Strengthening Nationalism Case Study in Sajingan Besar Frontier, Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21, (1), 40-45. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13403>
- Elyta, & Zulkarnaen. (2016). Political Participation of Border Communities at Sajingan Besar. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Borneo Akcaya*, 3, (2), 39-45. <http://jurnal-litbang.kalbarprov.go.id:8088/index.php/litbang/article/view/73>
- Elyta, Sofyan, A., Rahman, I., & Nuzulian, U. (2018). Nasionalisme Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Barat Indonesia. *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, 1, (2), 311-322. <http://dx.doi.org/10.33822/jm.v1i2.495>
- Faisal, M. (2017). Modal Sosial Usahawan Pendatang di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 19, (1), 70-76. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.10331>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6, (1), 1-17. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/47463>
- Ferris, S. P., Javakadze, D., & Rajkovic, T. (2017). The International Effect of Managerial Social Capital On The Cost of Equity. *Journal of Banking & Finance*, 74, 69-84. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.10.001>
- Fusnika, F. & Dua, F. L. (2019). Kontribusi Budaya Lokal Gawai dalam Menumbuhkan Nilai Solidaritas Generasi Z pada Suku Dayak Mualang. *Jurnal PEKAN*, 4, (2), 149-158. <http://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/554>
- Hador, B. B. (2016). Three levels Of Organizational Social Capital and Their Connection To Performance. *Department of Economics and Business Administration, Ariel University*, 36, (3), 348-360. <https://doi.org/10.1108/JMD-01-2016-0014>
- Hatta, S., Bahari, Y., & Rivaie, W. (2016). Kontribusi Gawai Dayak dalam Menumbuhkan Nilai-nilai Solidaritas Generasi Muda Desa Sekendal. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan*, 5, (4), 1-9. <https://www.neliti.com/id/publications/213692/kontribusi-gawai-dayak-dalam-menumbuhkan-nilai-nilai-solidaritas-generasi-muda-d#cite>
- Herlina, H., Andayani, A., Waluyo, H. J. & Setiawan, B. (2016). Perspective Literature In Ritual Gawai Dayak Literature Teaching Materials As Regional College. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2, (1), 512-516. <https://jurnal.uns.ac.id/ictte/article/view/8140>
- Kurniawan, I. D. (2018). Bekerjanya Demokrasi Melalui Modal Sosial. *Integralistik* (1), 40-51. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/14600>
- Membuela-Pollán, M., & Pena-López, J.-A. (2017). Clarifying the concept of social capital through its three perspectives: individualistic, communitarian and macro-social. *European Journal of Government and Economics*, 6, (2), 146-170. <https://www.researchgate.net/publication/322919968>
- Putri, I. A. (2017). Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial*

- Budaya*, 167-178. <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/79>
- Qi, X. (2017). Social Capital. *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory*, 2125-2127. <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0347>
- Razak, A., & Elyta. (2017). Faktor Penghambat Kerajinan Anyaman Tangan di Perbatasan Sajingan Besar dalam Menghadapi Ekonomi ASEAN. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19, (3), 213-217. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13403>
- Semuel, R., & Pratiwi, E. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan Negara dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrasi Publik*, 17, (2), 11-31. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/view/%233010/pdf>
- Singh, N., & Koiri, P. (2016). Understanding Social Capital. *Social Science Spectrum*, 2, (4), 275-280. <http://www.socalspectrum.in/index.php/sp/article/view/88/79>
- Sulaiman, A. H., Wahyuni, E. S., & Adiwibowo, S. (2019). Strategi Penguatan Modal Sosial Perempuan Tani dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terbatas di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan*, 15, (2), 239-253. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/27737>
- Suwatriningsih, S. S., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 1-10. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3631>
- Wardyaningrum, D. (2016, Juli). Modal Sosial Inklusif dalam Jaringan Komunikasi Bencana. *Jurnal ASPIKOM*, 3, (1), 33-55. <http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/97>
- Zhang, Y., Zhou, X., & Lei, W. (2017). Social Capital and Its Contingent Value in Poverty Reduction: Evidence from Western China. *World Development*, 93, 350-361. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.034>

PENENTUAN WILAYAH-WILAYAH SENTRA PENGEMBANGAN TERNAK KECIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Achmad Firman¹ dan Obed Haba Nono²

¹Departemen Sosial dan Ekonomi Pembangunan Peternakan, Fakultas Peternakan,
Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21, Jatinangor Sumedang

²Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto, Penfui-Kupang, Nusa Tenggara Barat
Email: ahmadpedum@yahoo.com ; obedhaba@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur yang bertujuan untuk menentukan wilayah-wilayah yang dapat dijadikan sentra bagi pengembangan ternak kambing, domba, dan babi. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan wilayah pengembangan ternak kecil tersebut. Analisis kuantitatif menjadi metode yang digunakan pada kajian ini. Hasilnya memperlihatkan bahwa (1) sentra pengembangan ternak kambing adalah di Kabupaten Sumba Timur, Kab. Timur Tengah Utara (TTU), Kab. Alor, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur, dan Kab. Sabu Raijua; (2) pengembangan ternak domba terdapat di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua; dan (3) pengembangan ternak babi terdapat di Kab. Sumba Barat, Kab. Kupang, Kab. Timur Tengah Selatan (TTS), Kab. Ngada, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kota Kupang.

Kata kunci: Sentra Pengembangan; Ternak Kecil; Kambing; Domba; Babi

DETERMINATION OF SMALL LIVESTOCK DEVELOPMENT CENTRE IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

ABSTRACT. The study has been held in East Nusa Tenggara Province that intended to determine the central regions for the development of goat, sheep, and pig. The secondary data was used in this research to determine the regional development for small livestock. The quantitative method was used in this research. The results reveal that (1) the centre of development of goat livestock is found in East Sumba Regency, Timur Tengah Utara (TTU), Alor, East Flores, Sikka, Nagekeo, East Manggarai, and Sabu Raijua; (2) development of sheep is found in Rote Ndao regency and Sabu Raijua regency; and (3) the development of pigs is placed in West Sumba regency, Kupang, East Middle South (TTS), Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, and Kupang city.

Key Words: Central development; Small Livestock; Goat; Sheep; Pig

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi di bagian Timur Indonesia yang memiliki banyak pulau. Tiap pulau memiliki keunikan geografisnya tersendiri. Akan tetapi secara umum, sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian wilayah dan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan bagi Provinsi NTT karena kontribusi sektor ini bisa mencapai 28% terhadap PDRB Provinsi NTT pada tahun 2018 dan 55% penduduknya terserap bekerja di sektor pertanian (BPS Provinsi NTT, 2019). Hal ini semakin mempertegas bahwa sektor pertanian merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat NTT.

Salah satu subsektor Pertanian yang juga berkembang di Provinsi NTT adalah sub sektor peternakan. Berdasarkan misi pembangunan dari provinsi ini, ada 6 (enam) tekad yang hendak dicapai, yaitu menjadi provinsi jagung, provinsi ternak, provinsi cendana, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan provinsi koperasi. Ternak menjadi sasaran utama pembangunan di Provinsi NTT karena ternak menjadi komoditas yang penting bagi kehidupan masyarakat pertanian di NTT. Fungsi ternak

di masyarakat NTT adalah berfungsi sebagai tabungan, sebagai mahar perkawinan, sebagai sumbangan untuk adat, dan sebagai persembahan untuk religi.

Berbagai ragam jenis ternak terdapat di NTT seperti sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, dan babi. Semua jenis ternak besar dan kecil tersebut sebagai ternak yang paling dominan dipelihara oleh masyarakat pertanian di NTT. Ternak kambing dan domba adalah ternak ruminansia kecil yang sudah dikenal baik oleh masyarakat pertanian (Budiarsana, dkk., 2016). Kambing digemari untuk dipelihara karena termasuk ke dalam ruminansia kecil, pemeliharaannya mudah, berkembang biak dengan baik dan *prolific*, pertumbuhan anaknya cepat, dan daya adaptasi terhadap kondisi agroekosistem suatu tempat baik (Sarwono, 2007 dalam Budiarsana, dkk., 2016;). Domba adalah ternak yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik serta mampu memakan hijauan yang nilai nutrisinya rendah, tahan terhadap penyakit dan parasit tertentu, bersifat *prolific* (beranak lebih dari satu ekor), capaian periode dewasa kelamin relatif cepat, serta dapat kawin setiap saat (FAO, 2002; Jarmuji, 2010). Di samping itu, ternak domba memiliki peranan penting di dalam kehidupan petani (Suryadi, dkk., 2016). Adapun ternak babi memiliki potensi yang baik

dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja (Ariana, dkk., 2014).

Pada masyarakat NTT, domba, kambing, dan babi merupakan ternak peliharaan yang menjadi bagian dari kehidupan petani di NTT. Kambing merupakan ternak unggulan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahkan memberikan sumbangan protein hewani bagi masyarakat lokal maupun di luar Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ternak kambing menjadi ternak kecil yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2019). Keberadaan ternak domba di Nusa Tenggara Timur tidak menyebar merata, hanya ada di beberapa pulau tertentu saja, seperti Pulau Sabu dan Pulau Raijua. Ternak domba yang terkenal di kedua pulau tersebut adalah domba ekor gemuk (DEG) (Riwu, 2016). Ciri fenotipik domba adalah memiliki bulu putih dan hitam atau campuran keduanya, domba jantan berekor gemuk sedangkan domba betina sebaliknya, dan dalam satu kelahiran menghasilkan 1 sampai 2 ekor (Deny, 2016). Khususnya di Pulau Sabu, asal mula keberadaan domba ekor gemuk dibawa oleh Belanda pada awal abad ke 20. Domba ekor gemuk telah berkembang dan beradaptasi dengan baik di Pulau Sabu. Oleh karena keterisolasian Pulau Sabu mengakibatkan tingkat inbreeding domba tersebut tinggi (Riwu, 2016). Domba ekor gemuk telah menjadi bagian adat di pulau tersebut dan memiliki nama daerah "Ki'i Jawa" atau domba Jawa. Pengembangan ternak domba ekor gemuk di pulau ini terdapat di Kabupaten Sabu Raijua. Pengembangan ternak di domba di kabupaten tersebut kurang mendapat perhatian yang dikarenakan terisolasinya pulau tersebut. Pulau Sabu dan Pulau Raijua (Kabupaten Sabu Raijua) merupakan pulau terpisah yang hanya dapat ditempuh dengan kapal laut dan pesawat terbang. Kondisi ini menyebabkan pengembangan ternak domba ekor gemuk menjadi terhambat akibat permasalahan geografis. Dampak turunannya adalah jumlah populasi domba terus semakin berkurang.

Ada 8 species babi di dunia dan Indonesia mempunyai 5 species dari ke 8 species tersebut (Rothschild et al. 2011), salah satunya berada di NTT (Suwardi dan Thalib, 2015). Oleh karena kultur sosial masyarakat yang didominasi oleh beragama non muslim, ternak babi memiliki tempat tersendiri di sebagian masyarakat sehingga pasarannya cukup baik, serta dukungan kultur sosial yang menggunakan ternak babi di dalam setiap moment perayaan adat atau keagamaan, maka sangat wajar apabila ternak babi tersebar di NTT (Wea, 2016). Akan tetapi, ternak babi bisa saja terjadi kepunahan di NTT jika masyarakat NTT lebih mementingkan ternak babi impor dibandingkan dengan ternak babi lokal (Suwardi dan Thalib, 2015). Oleh karena itu, peternak babi memiliki peranan penting di dalam mempertahankan

dan meningkatkan pengembangan peternakan babi. Keberlanjutan usaha peternakan babi di NTT masih dapat dipertahankan karena memiliki peranan penting bagi keluarga dan keagamaan.

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, perkembangan jumlah ternak kecil, yaitu kambing, domba, dan babi masing-masing sebanyak 674.227; 67.579, dan 2.073.446 ekor pada tahun 2017 (BPS NTT, 2018). Ternak babi menjadi ternak yang mendominasi ternak kecil di NTT. Ternak babi tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di NTT. Urutan ke dua populasi ternak kecil terbanyak adalah ternak kambing. Ternak ini mulai menjadi primadoma masyarakat NTT karena mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat pertanian. Sistem pemeliharaan ternak ini tidak begitu sulit bagi masyarakat NTT dan penyebarannya cukup merata atau di seluruh kabupaten/kota terdapat ternak ini. Akan tetapi, publikasi penelitian ternak kambing sangat jarang sekali di NTT sehingga sitasi literaturnya untuk kajian ini sangat sedikit tentang ternak kambing.

Adapun ternak domba merupakan ternak ruminasia kecil yang mulai digemari untuk dipelihara. Ternak ini belum merata tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua merupakan kabupaten dengan pemeliharaan kambing terbesar di Provinsi NTT. Pembahasan pengembangan domba sangat jarang sekali dilakukan di wilayah NTT karena wilayah ini lebih cenderung mengembangkan ternak babi. Oleh karena itu, ternak domba penyebarannya tidak merata di provinsi ini.

Berdasarkan informasi potensi ternak yang diuraikan di atas, perencanaan pengembangan sentra peternakan ternak kecil di suatu wilayah harus didekati dengan konsep-konsep wilayah. Pengembangan sentra ternak kecil di NTT dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah. Pengembangan ekonomi di wilayah adalah proses pembangunan di daerah yang melibatkan pemerintah setempat, swasta, masyarakat, dan pelaku lainnya yang terlibat didalamnya mengelola berbagai sumberdaya dan menjalin kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha serta masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha dan mengkatalisator penumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005 yang dikutip oleh Susanto, 2014).

Pendekatan konsep wilayah ini sering digunakan oleh para perencana untuk meningkatkan potensi wilayah. Hal yang sering muncul di dalam permasalahan perencanaan pembangunan adalah penentuan prioritas pembangunan, yaitu sektor atau wilayah. Perencanaan pembangunan terbaik adalah dengan menggabungkan kedua prioritas tersebut, yaitu pembangunan sektoral/komoditas dan wilayah, namun hal ini sangat sulit terjadi karena keterbatasan data dan informasi di masing-masing wilayah. Rencana pembangunan yang dilakukan dalam rangka

pengembangan wilayah yang ditumpu oleh pengembangan sektor-sektor unggulan menjadi arah pembangunan yang hendak dicapai oleh pengampu kebijakan di wilayah. Dengan demikian pendekatan pembangunan wilayah selalu mengkaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial (Firman, 2003). Keseimbangan pembangunan regional di dalam perencanaan pembangunan harus menitikberatkan pada kemampuan sumber daya yang dimiliki dan harus dimanfaatkan secara efisien, tertib, aman dan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya (Riadi, 2000).

Pada pendekatan sektoral, pertanyaan yang muncul adalah sektor mana yang harus dibangun agar tujuan pembangunan bisa dicapai (Eliza, 2017). Adapun pendekatan regional bertumpu pada wilayah mana yang akan dijadikan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan, setelah itu sektor apa yang dapat dibangun di wilayah tersebut. Akan tetapi, pendekatan wilayah sering digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, seperti pengembangan wilayah tertinggal, terisolasi, atau terpencil. Oleh karena itu, pendekatan sektoral dan wilayah menjadi dua pendekatan yang terbaik dalam kerangka totalitas. Namun demikian dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penentuan wilayah/sektor/komoditas unggulan, diperlukan berbagai pendekatan analisis untuk mereduksi permasalahan-permasalahan tersebut. Di sisi lain, ketersediaan data untuk kebutuhan analisis menjadi kendala utama di daerah karena tidak adanya data yang *up to date*.

Pendekatan analisis regional menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan wilayah dan sektor. Analisis regional digunakan untuk memudahkan pengambil keputusan dalam merencanakan pembangunan wilayah. Hasil-hasil analisis wilayah diintegrasikan untuk menentukan wilayah dan atau sektor apa yang akan dikembangkan di kawasan tersebut. Pendekatan analisis wilayah dapat diimplementasikan ditingkat komoditas, khususnya pengembangan ternak kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ada beberapa pendekatan analisis dalam penentuan sektor atau komoditas unggulan di suatu wilayah, yaitu (1) Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah didekati dengan pendekatan *Location Quotient* (LQ), yaitu analisis yang umum yang biasa digunakan dalam penentuan model ekonomi basis (Sapriadi dan Hasbullah, 2015; Widjaya, 2012). Ekonomi basis memiliki peran yang cukup penting sebagai katalisator utama pertumbuhan regional karena langsung berkaitan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Adisasmita, 2005; Arsyad, 2005); (2) Keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) didekati dengan pendekatan *Shift Share* (SS). Analisis ini dipakai untuk mengetahui dinamika perubahan/pergeseran sektor di suatu wilayah.

Analisis ini mengasumsikan bahwa adanya perubahan aktivitas produksi di suatu wilayah dibagi ke dalam tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengaruh pergeseran proporsional, dan pergeseran diferensial atau *competitive advantage* yang semuanya dibandingkan antara wilayah satu perekonomian kecil dengan wilayah dengan perekonomian yang besar (Adisasmita, 2005; Arsyad, 2005); dan (3) Analisis Tipologi Klassen merupakan metode analisis ekonomi wilayah yang menggabungkan dua analisis sebelumnya, yaitu LQ dan SS. Dengan dua pendekatan tersebut, Klassen membaginya menjadi 4 kuadran, yaitu jika sektor itu maju dan tumbuh cepat (Kuadran I); sektor itu maju namun tertekan (Kuadran II); sektor potensial (Kuadran III); dan sektor relatif tertinggal (Kuadran IV) (Syafri, 2008 dalam Widjaya, 2012).

Kelebihan dari penggunaan metode LQ adalah rumusnya yang sederhana dan mudah mengaplikasikannya (Hendayana, 2003). Selanjutnya dijelaskan juga bahwa kelemahan dari penggunaan metode LQ adalah (1) dituntut akurasi data, jika data tidak tersedia dan tidak akurat maka akan menghasilkan analisis yang bias sehingga diperlukan validasi data terlebih dahulu untuk menghindari bias; (2) delinasi wilayah kajian, yaitu kriteria wilayah dan ruang lingkungannya sering tidak jelas, hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam penentuan wilayah; (3) analisis ini bersifat kaku dan hanya mengilustrasikan satu periode saja, sehingga di tahun yang akan datang belum tentu sektor tersebut menjadi unggulan atau sebaliknya (Hendayana, 2003; Sambodo, 2002). Menurut Bappeda Kutai Kartanegara (2008) menyebutkan bahwa kelebihan dari analisis *shift share* adalah (1) mampu memberikan ilustrasi perubahan terhadap struktur ekonomi; (2) mudah dalam mengaplikasikan model analisis ini; (3) memberikan gambaran perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhannya. Adapun kelemahan analisis ini, adalah: 1). Pemanfaatannya terbatas hanya untuk analisis *ex-post*. 2). Permasalahan acuan yang berkaitan dengan *homothetic change*, jika t atau $(t+1)$ tidak dapat diuraikan dengan jelas. 3) Kesulitan mendapatkan data. 4). Kelemahan berikutnya adalah tidak cocok sebagai alat pendugaan di masa depan karena tidak konstan antar periodenya. 5). Tidak ada keterkaitan antar daerah ataupun antar sektor.

Kebijakan pembangunan NTT yang mengarah pada provinsi ternak, diarahkan pada pengembangan ternak kecil menjadi salah satu prioritas pengembangannya. Pengembangan sentra ternak kecil lebih ditekankan pada wilayah-wilayah yang akan dijadikan sumber-sumber pengembangan bagi ternak-ternak kecil tersebut, di mana penentuannya didasarkan pada pendekatan analisis wilayah atau regional. Penentuan ternak kecil unggulan dan wilayah-wilayah mana yang akan dijadikan sumber pengembangan didasarkan pada keuntungan komparatif dan kemampuan kompetitif dari ternak-ternak kecil

tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan ternak kecil yang memiliki potensi, dan wilayah-wilayah mana yang menjadi sentra-sentra pengembangan ternak kecil di Provinsi NTT. Analisis yang digunakan dalam riset ini menggunakan tiga pendekatan untuk menentukan pengembangan wilayah, yaitu analisis *Location Quotien*, *Shift Share*, dan Tipologi *Klasen*. Dengan ketiga analisis tersebut dapat dipetakan wilayah-wilayah mana yang menjadi unggulan bagi ternak kecil di Provinsi NTT. Hasil studi ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan perencanaan pembangunan ternak domba, kambing, dan babi di NTT.

METODE

Objek penelitian yang digunakan adalah data dan informasi yang relevan dengan penentuan komoditas unggulan ternak kambing, domba, dan babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini mendeskripsikan berbagai hasil analisis data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan penelitian, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Teknik pengumpulan data studi ini dilakukan melalui situs Badan Pusat Statistik (2018) dan laporan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur (2018) dan data lainnya yang relevan dengan penelitian.

Ada tiga analisis untuk menentukan komoditas unggulan ternak kecil, yaitu:

- Analisis *Location Quotient* (LQ) diformulasikan sebagai berikut (Silaban, dkk., 2015):

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

Di mana:

V_i : populasi ternak kecil i pada tingkat kabupaten/kota

V_t : total populasi ternak kecil di tingkat provinsi

Y_i : populasi ternak kecil i di tingkat nasional

Y_t : total populasi ternak kecil di tingkat nasional

Keterangan:

- Nilai $LQ = 0$; ternak kecil i sama dengan wilayah lainnya
- Nilai $LQ > 1$; ternak kecil i adalah ternak unggulan wilayah
- Nilai $LQ < 1$; ternak kecil i bukan ternak basis/unggulan wilayah.

- Formulasi *Shift Share* (SS) sebagai berikut:

$$Dij = Nij + Mij + Cij$$

$$Nij = Eij \cdot rn$$

$$Mij = Eij (rin - rn)$$

$$Cij = Eij (rij - rin)$$

dimana: i = komoditas ternak kecil yang diteliti; j = variabel (peubah) regional yang diteliti; Dij = perubahan (delta) ternak kecil i di wilayah j ; Nij = pertumbuhan ternak kecil i di wilayah j ; Mij = Bauran ternak kecil i di wilayah j ; Cij = Keunggulan kompetitif ternak kecil i di wilayah j ; Eij = total populasi ternak kecil i di wilayah j ; rij = laju pertumbuhan ternak kecil i di wilayah j ; rin = laju pertumbuhan ternak kecil i di wilayah n ; rn = laju pertumbuhan populasi ternak kecil di wilayah n . Hasil dari analisis SS terbagi atas dua, yaitu SS (+) berarti ternak potensial di suatu wilayah, sedangkan SS (-) berarti ternak tidak potensial di suatu wilayah.

- Tipologi *Klassen* sebagai alat analisis regional yang merupakan gabungan dari LQ dan SS yang disusun dalam suatu kuadran sebagai berikut:

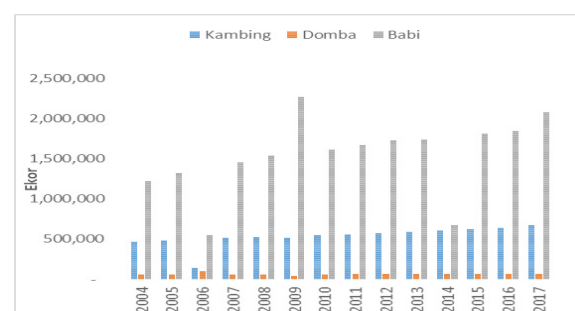
- Kuadran I adalah Ternak Kecil (i) maju dan tumbuh pesat yang ditandai dengan $LQ > 1$ dan SS (+)
- Kuadran II adalah Ternak Kecil (i) maju tapi tertekan yang ditandai dengan $LQ < 1$ dan SS (+)
- Kuadran III adalah Ternak Kecil (i) potensial untuk dikembangkan yang ditandai dengan $LQ > 1$ dan SS (-)
- Kuadran IV adalah Ternak Kecil (i) tertinggal dari wilayah lainnya yang ditandai dengan $LQ < 1$ dan SS (-).

Semua analisis di atas harus terlebih dahulu menyeragamkan satuan dari ternak. Data yang tersedia untuk populasi ternak adalah dengan satuan ekor. Oleh karena itu, untuk penyeragaman ukuran ternak digunakan *animal unit* (satuan ternak) dengan ukuran sebagai berikut:

- Satuan ternak (ST) untuk domba, kambing dan babi di mana 1 ekor ternak kecil tersebut setara dengan 0,065 ST (Thahar dkk, 2003 dalam Juarini dkk, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan populasi ternak kambing, domba, dan babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Populasi Ternak Kecil di Provinsi NTT

Gambar 1 di atas mengilustrasikan seluruh populasi ternak kecil mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada ternak babi dan domba. Pada tahun 2004, populasi ternak babi sebanyak 1,2 juta ekor sedangkan pada tahun 2017 menjadi sebanyak lebih dari 2 juta ekor. Adapun ternak kambing sebanyak lebih dari 460 ribu ekor di tahun 2004 meningkat menjadi lebih dari 674 ribu ekor di tahun 2017. Ternak domba menjadi ternak yang belum dominan dipelihara oleh masyarakat petani di provinsi ini karena ternak domba belum membudaya di Provinsi NTT.

Penentuan Unggulan Ternak Kambing di Provinsi NTT

Hasil analisis LQ dan SS untuk ternak kambing dapat dilihat Tabel 1. Jumlah kabupaten yang memiliki nilai LQ > 1, terdapat 11 kabupaten. Kabupaten Lembata merupakan kabupaten dengan nilai LQ tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, disusul oleh Kabupaten Sabu Raijua, Flores Timur, dan Timor Tengah Utara. Adapun nilai LQ terendah terdapat pada Kabupaten Sikka dan Nagekeo. Nilai LQ di atas satu artinya wilayah tersebut memiliki kekuatan komparatif, yaitu ternak kambing telah menjadi komoditas yang telah membudaya di masyarakat.

Hasil analisis SS untuk ternak kambing di beberapa wilayah di Provinsi NTT dapat dilihat di Tabel 1. Pada tabel tersebut wilayah-wilayah yang memiliki SS (+) untuk ternak kambing terdapat 17 wilayah. Nilai SS yang terbaik untuk ternak kambing adalah di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nilai SS sebesar 0,63, yang selanjutnya disusul oleh Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua. Ternak kambing di kabupaten-kabupaten tersebut lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTT yang bernilai SS (-).

Tabel 1. Hasil Analisis LQ dan SS Ternak Kambing

Kabupaten/Kota	Nilai	
	SS (+)	LQ (>1)
Sumba Barat	0,03	
Sumba Timur	0,07	1,32
Kupang	0,57	
Timor Tengah Selatan	0,03	
Timor Tengah Utara	0,63	1,47
Belu	0,31	
Alor	0,03	1,26
Lembata		1,96
Flores Timur	0,03	1,61
Sikka	0,03	1,24
Ende		1,27
Ngada	0,03	
Rote Ndao	0,03	1,25
Sumba Tengah	0,03	
Sumba Barat Daya	0,39	
Nagekeo	0,03	1,24
Manggarai Timur	0,03	1,39
Sabu Raijua	0,19	1,77
Kota Kupang	0,03	

Keterangan: SS bernilai positif dan LQ lebih dari satu.

Berdasarkan hasil kedua analisis sebelumnya dapat dipetakan wilayah-wilayah mana yang menjadi wilayah unggulan untuk ternak kambing di Provinsi NTT. Analisis Tipologi Klasen menjadi salah satu analisis yang memadukan hasil dari LQ dan SS. Hasil analisis dari Tipologi Klasen ini dapat menentukan wilayah yang memiliki daya komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Hasil analisis Tipologi Klasen adalah sebagai berikut:

Kuadran I (SS (+) dan LQ > 1) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Sumba Timur, Manggarai Timur, Alor, Sikka, Nagekeo, Timor Tengah Utara, Flores Timur, Sabu Raijua.

1. Kuadran II (LQ < 1 dan SS (+)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Kupang, Belu, Ngada, Sumba Tengah, Sumba barat daya, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat, Kota Kupang.
2. Kuadran III (LQ > 1 dan SS (-)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Lembata, Ende
3. Kuadran IV (LQ < 1 dan SS (-)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat

Berdasarkan hasil analisis tersebut, wilayah-wilayah unggulan untuk ternak kambing adalah Kab. Sumba Timur, Kab. Timor Tengah Utara (TTU), Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur, Kab. Alor, dan Kab. Sabu Raijua atau wilayah-wilayah yang berada di Kuadran I dengan nilai LQ > 1 dan SS (+). Ke delapan kabupaten tersebut merupakan wilayah yang terpilih yang dapat menjadi wilayah pengembangan ternak kambing karena memiliki *comparative* dan *competitive advantage*. Dengan demikian. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi NTT yang menangani peternakan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan ke delapan kabupaten tersebut sebagai wilayah pengembangan ternak kambing di NTT. Hasil pemetaan ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT. Berdasarkan Perda Provinsi NTT No. 1 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi NTT Tahun 2010-2030, pada pasal 30 hanya dijelaskan bahwa tentang kawasan peternakan. Penjelasan kawasan peternakan dan wilayahnya tidak dijelaskan di dalam RTRW tersebut. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penetapan kawasan peternakan khususnya ternak kecil, yaitu komoditas kambing di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penentuan Unggulan Ternak Domba di Provinsi NTT

Hasil analisis SS dan LQ untuk ternak domba diuraikan pada Tabel 2. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 wilayah yang merupakan basis ternak domba, yaitu Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten

Sabu Raijua. Ternak domba bukan merupakan ternak unggulan di wilayah NTT namun keberadaannya menjadi salah satu komoditas yang menjadi sumber kehidupan bagi peternak di ke dua kabupaten tersebut. Nilai LQ lebih dari 1 pada kedua kabupaten tersebut didasarkan pada pengembangan ternak domba telah dimulai sejak awal tahun 2000 yang dikembangkan oleh Belanda, khususnya di Pulau Sabu dan Raijua. Oleh karena itu, populasi ternak domba lebih dominan berada di kedua pulau tersebut. Domba yang banyak dikembangkan adalah domba ekor gemuk.

Adapun hasil analisis SS dapat dilihat pada Tabel 2. Berbeda dengan hasil perhitungan LQ, hasil analisis SS memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah yang memiliki SS (+) untuk ternak domba ada 10 wilayah. Nilai SS yang terbaik untuk ternak domba adalah di Kabupaten Kupang dengan nilai SS sebesar 0,17. Ternak domba di Kabupaten Kupang lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya karena memiliki nilai SS lebih besar. Perhitungan ini memastikan bahwa ternak domba memiliki nilai yang kompetitif dan dapat dijadikan sebagai ternak ekspor ke wilayah lainnya.

Tabel 2. Hasil Analisis SS dan LQ pada Ternak Domba

Kabupaten/Kota	Nilai	
	SS (+)	LQ (>1)
Sumba Timur	0.01	
Kupang	0.17	
Lembata	0.01	
Flores Timur	0.01	
Sika	0.01	
Ngada	0.01	
Rote Ndao	0.01	8,79
Nagekeo	0.01	
Sabu Raijua	0.01	7,72
Kota Kupang	0.02	

Keterangan: SS bernilai positif dan LQ lebih dari satu.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen yang memudahkan analisis LQ dan SS dalam menentukan wilayah mana yang menjadi unggulan pengembangan ternak domba adalah sebagai berikut:

1. Kuadran I (SS (+) dan LQ > 1) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Sabu Raijua dan Rote Ndao.
2. Kuadran II (LQ < 1 dan SS (+)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Sikka, Ngada, Flores Timur, Sumba Timur, Kupang, Lembata, Kota Kupang.
3. Kuadran III (LQ > 1 dan SS (-)) tidak ada wilayahnya
4. Kuadran IV (LQ < 1 dan SS (-)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klasen tersebut, ada dua kabupaten yang menjadi wilayah unggulan ternak domba, yaitu Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua. Kedua

kabupaten ini, selain memiliki *comparative* dan *competitive advantage*, juga memiliki iklim yang cocok usaha ternak domba. Kedua kabupaten ini merupakan kabupaten paling selatan di provinsi ini. Masing-masing merupakan pulau tersendiri. Secara historis, kedua kabupaten tersebut merupakan pulau bagi pengembangan ternak domba pada zaman penjajahan Belanda, sehingga masyarakatnya sudah terbiasa memelihara domba dan telah menjadi bagian dari budaya pertanian di kedua pulau tersebut.

Hasil analisis ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Perda RTRW, belum ada penjelasan kawasan peternakan dan wilayahnya, khususnya tentang ternak domba, sehingga hasil dari kajian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan kawasan peternakan domba di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penentuan Unggulan Ternak Babi di Provinsi NTT

Ternak babi telah lama menjadi bagian budaya bagi petani di Nusa Tenggara Timur karena ternak ini memiliki nilai ekonomis dan sekaligus nilai religi. Daging babi sudah menjadi daging yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di provinsi ini. Oleh karena itu, daging babi memiliki nilai ekonomis dan juga NTT merupakan provinsi pemasok kebutuhan daging babi bagi daerah lainnya.

Analisis dilakukan untuk menentukan wilayah mana yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk membangun peternakan babi di NTT. Keunggulan *comparative* ternak babi dianalisis dengan LQ. Perhitungan analisis untuk penentuan daya kompetisi ternak di suatu wilayah, dianalisis dengan analisis SS.

Tabel 3. Hasil Analisis LQ dan SS Ternak Babi

Kabupaten/Kota	Nilai	
	SS (+)	LQ (>1)
Sumba Barat	0.03	1,29
Sumba Timur	1.41	
Kupang	0.90	1,24
Timor Tengah Selatan	0.03	1.19
Belu		1.06
Alor	0.03	
Flores Timur	0.03	
Sikka	0.03	
Ngada	0.03	1.13
Rote Ndao	0.03	
Sumba Tengah	0.03	1,09
Sumba Barat Daya	0.55	1,11
Nagekeo	0.03	
Manggarai		1.05
Manggarai Barat		1.16
Manggarai Timur	0.03	
Malaka		1,12
Sabu Raijua	1.56	
Kota Kupang	0.03	1,13

Keterangan: SS bernilai positif dan LQ lebih dari satu..

Berdasarkan Tabel 3, hasil analisis LQ untuk ternak babi menunjukkan bahwa hanya terdapat 11 wilayah yang merupakan basis ternak babi. Wilayah dengan nilai LQ terbesar adalah Kabupaten Sumba Barat, sedangkan LQ yang terkecil namun masih di atas satu adalah Kabupaten Manggarai. Hasil LQ ini membuktikan bahwa ternak babi menjadi komoditas basis dan merupakan bagian dari usaha peternakan di 11 wilayah tersebut. Babi merupakan komoditas ternak yang telah membudaya di Provinsi NTT. Akan tetapi, tidak semua wilayah dapat dikategorikan sebagai wilayah unggulan untuk ternak babi.

Hasil analisis SS diperlihatkan pada Tabel 3. Pada tabel tersebut wilayah-wilayah yang memiliki SS (+) untuk ternak babi ada 15 wilayah. Berdasarkan perhitungan SS, jumlah wilayah yang mempunyai keuntungan kompetitif lebih banyak dibandingkan dengan hasil LQ. Artinya, ke 15 wilayah tersebut secara relatif memiliki kemampuan untuk mengeksplor ternak babinya ke luar wilayah lain. Adapun nilai SS yang terbaik untuk ternak babi adalah di Kabupaten Sabu Raijua dengan nilai SS sebesar 1,56 yang diikuti oleh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Kupang. Ternak babi di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Timur lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTT karena memiliki nilai SS positif lebih dari satu. Hal ini dapat membuktikan bahwa ternak babi untuk Kabupaten Sumba Teimur dan Sabu Raijua memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

Hasil Tipologi Klassen untuk wilayah pengembangan ternak babi adalah sebagai berikut:

1. Kuadran I (SS (+) dan $LQ > 1$) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Ngada, Kupang, Kota Kupang.
2. Kuadran II ($LQ < 1$ dan SS (+)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Sumba Timur, Alor, Flores Timur, Sikka, Rote, Nagekeo, manggarai Timur, Sabua Raijua
3. Kuadran III ($LQ > 1$ dan SS (-)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Belu, Manggarai, Manggarai Barat
4. Kuadran IV ($LQ < 1$ dan SS (-)) terdiri dari wilayah-wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Lembata, Ende.

Ada 10 wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang digambarkan di Kuadran I, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Ngada, dan Kota Kupang. Kota Kupang merupakan satu-satunya wilayah kota yang dapat dijadikan sebagai sentra pengembangan ternak babi di Provinsi NTT.

Hasil Tipologi Klasen ini dapat dijadikan rujukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak ada penjelasan berkenaan dengan kawasan peternakan babi dan wilayahnya, padahal ternak babi merupakan ternak unggulan di wilayah ini. Oleh karena itu, hasil kajian ini bisa digunakan sebagai salah satu acuan bagi revisi RTRW ke depan untuk penetapan kawasan peternakan babi komoditas babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

SIMPULAN

Berdasar hasil penjelasan pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa daerah-daerah yang dapat dijadikan sentra pengembangan ternak kecil adalah sebagai berikut: Pengembangan ternak kambing terdapat di Kabupaten Sumba Timur, Timur Tengah Utara (TTU), Alor, Nagekeo, Manggarai Timur, Flores Timur, Sikka, dan Sabu Raijua; Pengembangan ternak domba terdapat di Kabupaten Rote Ndao dan Sabu Raijua; Pengembangan ternak babi terdapat di Kabupaten Sumba Barat, Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005) Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ariana I.N.T., Puger A.W., Oka A.A., & Sriyani N.L.P. (2014) Analisis Ekonomi Usaha Ternak Babi Dengan Pemberian Sekam Padi Dalam Ransum yang Mengandung Limbah Hotel. *Majalah Ilmiah Peternakan*, 17, (2), 71-74.
- Arsyad, L. (2005) Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE.
- Bappeda Kutai Kartanegara. (2008) *Shift Share*. <http://www.bappedakutaitartanegara.go.id/simreda/shiftshare.html>.
- Budiarsana, I.G.M, Wibowo, B, & Priyanto, D. (2016) Produktivitas dan Rantai Pasok Ternak Kambing dan Domba (KADO) Studi Kasus di Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmu Ternak*, 16, (2), 35-42.
- Deny (2016). Sumber Daya Genetik Domba Lokal Potensial Indonesia dari Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT). <https://www.bankselgamet.com/2016/10/31/sumber-daya-genetik-domba-lokal-potensial-indonesia-dari-pulau-sabu-nusa-tenggara-timur-ntt/> diakses tanggal 12 Agustus 2019
- Eliza. (2017) Kontribusi Sektor Transportasi Terhadap Perekonomian Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Plano Madani*, 6, (2), 177 – 184.

- Firman, A. (2003). Peranan Perkebunan Rakyat dalam Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan. Tesis Pascasarjana Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2002) *Conserving and Developing Farm Animal Diversity*. Rome: Secretariat of The Report on The State of The World's Animal Genetic Resources. FAO. Roma.
- Hendayana, R. (2003). Aplikasi Metode Location Quotient dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Informatika Pertanian*, 2, 1-21.
- Jarmuji. (2010). Produksi Susu Induk Terhadap Pengaruh Pertambahan Bobot Badan, Bobot Sapih Dan Daya Hidup Anak Domba Ekor Tipis Jawa Periode Prasapih. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia*, 5, (1), 1-8.
- Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan (2019). Peternakan. <http://tskab.go.id/potensi-daerah/peternakan/>. Diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- Riadi, D.M.M. (2000). Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah. Disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah, Bogor, 15-16 Mei 2000.
- Riwu, A.R (2017). Kajian Keragaman Fenotipik Domba Ekor Gemuk (Deg) Di Nusa Tenggara Timur. *Proceeding Book: Seminar Nasional Ke 2, Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya Malang, 23-41.
- Rothschild, M.F., Ruvinsky, A., Larson, G., Gongora, J., Cucchi, T., Dobney, K., Andersson, L., Plastow, G., Nicholas, F.W. & Moran, C. (2011) *The genetics of the pig*. 2nd ed. Rothschild MF, Ruvinsky A, editors. London: CAB International.
- Sambodo, M.T., (2002). Analisis Sektor Unggulan Propinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10 (2). Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta
- Sapriadi & Hasbullah. (2015) Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, 1, (1), 71-86.
- Silaban, L.H., Edwina, S. & Eliza. (2015). Analisis Sektor Basis Dan Perkembangan Sektor Pertanian Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2008-2012. *Jurnal Faperta Riau*. 2, (1), 1-9.
- Suryadi, D., Rahayu, S., Firmansyah, C. & Kuswaryan, S. (2016) Preferensi Konsumen Terhadap Daging Domba Di Jawa Barat. *Sosiohumaniora*, 18, (1), 27-33. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9353>
- Susanto, H. (2014). Kajian Komoditas Unggulan, Andalan dan Potensial di Kabupaten Grobogan. *Journal of Rural and Development*, 5, (1), 65-80.
- Suwardi, B.D.P. & Thalib, C. (2015) Pengembangan Ternak Babi Lokal di Indonesia. *WARTAZOA*, 25, (1), 39-46. <http://dx.doi.org/10.14334/wartazoa.v25i1.1127>
- Juarini, E., Sumanto., Wibowo, B., & Suratman. (2011) Daya Dukung Hijauan Pakan untuk Pengembangan Ternak Sapi Potong dan Kerbau dalam Mendukung PSDS/K Tahun 2014 di Kabupaten Lebak. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Kementerian Pertanian.
- Widjaya, D.S.M. (2012) Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Ngawi. Tesis Program Pascasarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Wea, R. (2016) Performans Produksi dan Reproduksi Ternak Babi Lokal di Kodya Kupang. *Jurnal Partner*, 16, (1), 21-28.

OPEN MUSEUM AS A TOOL FOR CULTURE SUSTAINABILITY: PRAMBANAN TEMPLE STUDY CASE

Munadjat Wardoyo dan Rilla Oktoviami Zef

School of Architecture, Planning, and Policy Development

Institute Technology of Bandung, Jawa Barat

E-mail: munadjat.wardoyo@gmail.com

ABSTRACT. The rapid city developments are certainly through planning which will affect the development directly or indirectly. So it is very important to take care of historical buildings or other cultural heritage. A cultural heritage is certainly a major attraction of heritage tourism in a city that has historical heritage. In this discussion it was also stated that the open museum is an effective tool for maintaining urban heritage, preserving history and culture, and encouraging sustainable tourism in an area that relies on heritage tourism in urban areas. Prambanan Temple is one of the cultural heritage areas included in the UNESCO world heritage site list, located in urban areas and vulnerable to changes both in terms of rapid urban development. This study uses a non-interactive qualitative method, namely by analyzing through existing documents. In addition, this research was also supported by literature review related to the open museum in the city of Mecca which could be used as a guide for application to further strengthen the sustainability of Prambanan Temple from the impact of urban development and the development of heritage tourism. Literature on urban heritage tourism, cultural heritage sites, and sustainable development is a support in understanding the urgency of research issues and drawing conclusions to plan the Prambanan Temple as an Open Museum. Open museums do not just become a label but also apply certain conditions so that the building of cultural heritage can continue to be maintained its authenticity in line with urban development and heritage tourism.

Key words: Open Museum; Sustainable Tourism; Culture Sustainability

OPEN MUSEUM SEBAGAI ALAT UNTUK CULTURE SUSTAINABILITY

ABSTRAK. Sebuah kota ataupun daerah yang di dalamnya terdapat warisan budaya atau *cultural heritage* tidak akan terhindar dari pesatnya perkembangan. Perkembangan tersebut tentunya melalui perencanaan yang akan mempengaruhi perkembangan langsung ataupun tidak langsung. Sehingga sangat penting untuk melakukan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan bersejarah ataupun warisan budaya lainnya. Suatu warisan budaya tentu merupakan ketertarikan utama dari *heritage tourism* sebuah kota yang memiliki peninggalan bersejarah. Pada pembahasan ini juga dikemukakan bahwa *open museum* merupakan alat yang efektif untuk memelihara *urban heritage*, mempertahankan sejarah dan budaya, serta mendorong *sustainable tourism* pada suatu wilayah yang mengandalkan *heritage tourism* di perkotaan. Candi Prambanan merupakan salah satu kawasan cagar budaya yang termasuk dalam daftar *world heritage site* UNESCO, berada di wilayah perkotaan dan rentan terhadap perubahan baik dari segi perkembangan perkotaan yang semakin pesat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non-interaktif, yaitu dengan menganalisis melalui dokumen-dokumen yang ada. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan literatur review yang terkait *open museum* di Kota Mekah yang bisa dijadikan panduan untuk penerapan untuk semakin memperkuat keberlangsungan Candi Prambanan dari dampak perkembangan perkotaan dan berkembangnya *heritage tourism*. Literatur mengenai *urban heritage tourism*, *cultural heritage site*, dan *sustainable development* menjadi penunjang dalam pemahaman urgensi permasalahan penelitian dan pengambilan kesimpulan untuk merencanakan Candi Prambanan sebagai *Open Museum* Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa *open museum* pada kawasan dan bangunan cagar budaya sangat diperlukan, terutama Candi Prambanan. *Open museum* tidak hanya menjadi sekedar label tetapi juga menerapkan kondisi-kondisi tertentu sehingga bangunan cagar budaya dapat terus terjaga keasliannya seiring dengan perkembangan perkotaan dan *heritage tourism*.

Kata kunci: Museum Terbuka; Pariwisata Berkelanjutan; Keberlanjutan Budaya

INTRODUCTION

The UNESCO cultural committee in Paris publishes a list of publications about world cultural heritage sites and lists of intangible world cultural heritages (intangible cultural heritage). With this, displayed sites that are listed have extraordinary value for human civilization. In addition, everyone in the world is responsible for protecting and preserving these sites (Santa-Cruz & López-Guzmán, 2017 pg.113) and (Canale, Simone, Maio, & Parenti, 2019 pg.115). The publication of UNESCO's list of world heritage is a way to support, preserve, and transmit to the

next generation through historical and artistic perspectives (Saipradist & Staiff, 2008, pg.216). In some studies began to suggest sites listed in the UNESCO world heritage list have benefits for tourist attractions (Yang & Lin, 2014, pg.803) (Patuelli, Mussoni, & Candela, 2014, pg. 99) and (Su & Lin, 2014, pg 50), while other studies has no positive influence or impact in relation to world cultural heritage (Cellini, 2011 pg.452) and (Cuccia, Guccio, & Rizzo, 2016 pg.496). On tourist destination issues the number of tourists that can be given damage to cultural or natural sites (Canale, Simone, Maio, & Parenti, 2019 pg 117).

Indonesia has regulations regarding which cultural heritage, cultural heritage itself is defined as artifacts made by humans, both those that can be moved or cannot be moved, individually or in groups, or the remaining parts, which are at least 50 years old. In addition, natural objects that are considered to have significant value in history, culture, and science (Presidential Regulation of the Republic of Indonesia number 5/1992 related to cultural heritage) in (Darmawan & Enis, 2016, pg 714). The concept of open air museum as a tool for conservation of heritage buildings and cultural values is also planned to be applied to The Historical Peninsula in Istanbul (Durhan & Özgüven, 2013, pg.184) and has been implemented in Kizhi as an open air museum in Russia (Kisternaya & Kozlov, 2012, pg.576). Indonesia which has a heritage building registered with UNESCO is Prambanan Temple which is also one of the popular tourist destinations on the island of Java besides Borobudur Temple. Prambanan Temple, which is located geographically not far from urban or urban civilization, is one of the other vulnerability factors besides its appeal as a tourist destination. The impact of tourism which continues to grow, of course, is directly related to the preservation of cultural heritage buildings of the temple itself. Besides that overlapping stakeholders also become a problem in planning the protection of Prambanan Temple as a world heritage residing in Indonesia. Therefore, this study describes the importance of planning the conservation and protection of the originality of Prambanan Temple through the concept of the open air museum. This research uses a non-interactive qualitative method and literature review. So with this research it is expected that every stakeholder responsible for the Prambanan Temple can provide the best and most sustainable protection to Prambanan Temple which is also a cultural heritage building recognized throughout the world and one of Indonesia's famous tourist attractions abroad.

According to the International Council of Museums in (Shehata & Mostafa, 2017pg 364) the museum is an educational, cultural and entertainment institution that is unprofitable that serves the community through the preservation, exhibition, and maintenance of human heritage and its environment to the purpose of education, study, and pleasure (pleasure). Gurian in (Shehata & Mostafa, 2017pg 364) defines 5 types of museums that are classified according to their use and function which are described as follows:

- Object-Centered: treasure based or museum art that presents objects without context
- Narrative: only displays objects that match the story/story. Usually widely used by all types of multimedia
- Client-Centered: concentrated in individuals and small social groups such as children and families.

This depends on interactive exhibition techniques and role playing

- Community focused: it looks like a museum but often becomes the center or center of a multi-agency community
- National: usually the physical appearance of a country's national aspirations

Recently, it can be said that the existing museum is a mixture of several types of museums above. Apart from the types of museums identified by Gurian in (Shehata & Mostafa, 2017 pg.364), museums in general can also be distinguished in several other categories, as can be explained in the table below:

Table 1. Type and Classification of Museums

Museum Type	Museum Classification
Museum based on ownership	Public, non-profitable organizations, or charity / charity ownership
Museums based on their size	Small, medium, large
The museum is based on its collection	Artistic, scientific, historic, public and special
Museums based on other physical types	Closed, open, and virtual
Sumber: (Shehata & Mostafa, 2017)	

On these days, there are thousands of open museums of various types and statuses. The Association of European Open Air Museums in (Shehata & Mostafa, 2017, pg.364) defines the Open Air Museum as an open-air scientific collection of various types of structures, which are constructional and functional entities, describing residential, residential, economic and technological patterns. Open museums can be built in the first two ways, namely by making mockups from real sites by referring to the old buildings. The second and most common method is to use old buildings and urban areas as a frame to load the presentation function of the building itself.

The role of cities in making the Open Museum is closely related to urban heritage tourism. Urban heritage tourism itself is a concept of tourism which has been expressed in recent years in major cities throughout the world, which utilize the built and natural environment of a city that also has its own historical value (Widyastuty, 2011, pg 65). Culture is one of the main tourist objects that are relied on by each nation, which is about three decades ago where tourists began to be interested in the legacies of the past that could be in the form of historic city buildings in each region (Setiawan, 2010, pg.700). According to (Demas, 2009) deep cultural or cultural resources (Shehata & Mostafa, 2017 pg. 364) can be classified through five types which can be described in the following table:

Table 2. Cultural Resources and Classifications

Cultural Resources	Classification
Building	Houses, hotels or similar constructions that have been built to protect human activities. This term also applies to any construction that accommodates supporting functions such as courts and prisons or even homes.
Structure	Built to serve a different purpose as opposed to building / building. The structure does not accommodate activities, its functions include bridges.
Object	This term is usually used for historic or man-made objects that are small, simple, and natural objects.
Sites	The location of the occurrence of specific and major historical events. It can also be a single building, ruins, or even just the location of a historic event, no matter the value of the surrounding buildings.
District	The center or liaison between locations or historic activities that are spread through the area above the master plan.

Source: (Shehata & Mostafa, 2017 pg.364)

In the context of urban heritage tourism, These cultural resources will bring tourists to appreciate and interpret the objects observed or presented in an area visited by the tourists. So that, in addition to functioning as a means of education and recreation for the community, these activities also serve as a means of preservation of the city's cultural wealth (Widyastuty, 2011,pg.66). The preservation then leads to the next concept of sustainable development which can be interpreted as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Robinson & Picard, 2006, pg.1). Another concept that is also related to is sustainable urban regeneration is a process that helps reconstruct or rehabilitate urban structures / structures, revitalize the community based economy and build social capital (Demas, 2009, pg 1). Sustainable development is supported by the existence of heritage conservation which is a key factor of sustainable urban regeneration, both of which require comprehensive policies for the implementation of heritage conservation itself (especially community / community involvement) (Shehata & Mostafa, 2017).

The discussion in the journal chosen in this paper took the case of Mecca as one of the Open Museums that was trying to be planned for its cultural sustainability. The city of Mecca is the center of the Islamic world which is the origin of the Islamic civilization that once ruled the world. The city of Mecca has all the cultural and social diversity needed to become one of the best cities in the world to live in. The city of Mecca receives around ten million visitors every year from the Islamic world and the city of Mecca also has many religious and historic locations that need to

be preserved and represented (Shehata & Mostafa, 2017) pg 369.

The city of Mecca itself has two types of locations, first one is religious location; the second one is historic and heritage location. Besides these two locations, the city of Mecca has many old and modern museums that receive thousands of visitors every year from all over the Islamic world. Some of the museums are the Mecca Heritage Museum, Umm Al-Qura Museum, Islamic Dinar Museum, and Peace Upon You Muhammad Museum. Regarding the capacity of visitors or tourists received through Hajj and Umrah reached ten million visitors in one year with varied socio-economic backgrounds, interests and backgrounds (Shehata & Mostafa, 2017) pg367.

Through several precedents from the sustainable cultural sites development presented in this journal, such as Darb Al-Ahmar, Luxor City, and Historic Old Rome, there are some similarities with the City of Mecca which among them is an urban part of the old city, archaeological sites integrated with other urban structures , and areas containing buildings are valuable / valuable or have value, where most are historic. So then there are some lessons that can be taken from the three examples, namely as follows:

1. Partnerships between government and non-government bodies are the basis for the success of the project.
2. Capacity building of local communities helps identify needs, problems, and priorities.
3. Involve various categories of local community assistance in the success of the project
4. Training and workshops that are often combined with practical experience of increasing the capacity of local professionals in monitoring
5. Integration between historic buildings and local urban structures can benefit both
6. Economic benefits of local communities from restoration projects for historic buildings in the vicinity
7. Integrating local communities in restoration activities helps in maintaining sustainable activities related to restored buildings
8. Combining improved agriculture with the restoration of historic buildings creating a sustainable built environment
9. Choosing a local body is important for the success of the project
10. From some of these points, then the writer in the journal suggested a number of points at the strategic level with the approach below to make some of the heritage areas in Mecca an Open Museum:
11. Government plans to define protected historical areas, make regulations to define and protect these areas within the city of Mecca and its surroundings in accordance with Al-Mashaer protected area.
12. Involve local communities and the private sector

through government initiatives to create a point of termination (POT) project to improve the historic area by developing both the environment and services.

13. Building a foundation for the real tourism industry through the provision of quality personnel and multimedia facilities with descriptive narratives for each location.
14. Include different locations in the Mecca City land use master plan and public transportation plans.

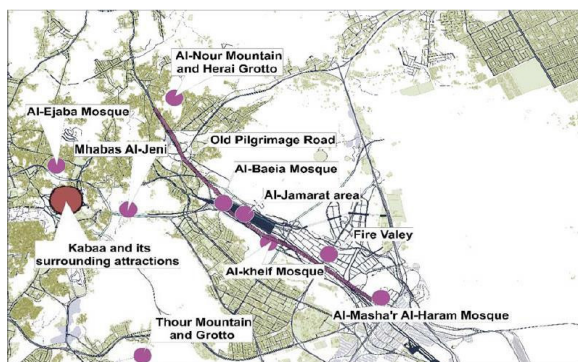


Figure 1 Track and Historical Location in the City of Mecca

Source: Shehata & Mostafa, 2017 pg 372

At the level of action or action, the authors propose several points including the Open museum in historical locations below: Ka'aba and its surrounding (Old Makkah City); Al-Mashaer area (Arafat, Muzdalifa and Mina); Makkah Historic Mosques; Makkah Historic Mosque; Makkah Museums and palaces; Al-Nour Mountain; Thour Mountain area. The second point is that proposals for pathways that connect different historical locations will help encourage visitors to spend more time at this location. The map above illustrates suggested locations and pathways and the surrounding urban features. The fourth point is improving services in this location to match the number of visitors expected. The last point is related to cultural and folklore events around the year to extend the stay of pilgrims in Mecca, especially during the off season (Shehata & Mostafa, 2017 pg 372).

METHOD

The research method according to (Arikunto, 1986 pg77) in (Hamdi & Bahrudin, 2015, pg86) is a way of thinking and acting that is best prepared to conduct research in hopes of achieving the intended research objectives. This research journal that we publish uses, method: qualitative. According to (Sugiyono, 2016 pg 24) and (Creswell, 2010 pg 87) qualitative research are methods to explore and understand the meaning that some individuals or groups of people ascribe to social or human problems. This journal is a social research in which the

process of finding knowledge is expected to have benefits in solving problems related to the research conducted (Chariri, 2009 pg 66).

The qualitative method outlines two methods, namely the interactive qualitative method and the non-interactive qualitative method. This journal then uses a qualitative non-interactive method (non-interactive inquiry), also known as analytical research. This research does not collect data interactively or through interaction with sources or human data sources, but the source of the data is more on existing documents (Hamdi & Bahrudin, 2015 pg. 92). This study also uses the literature review method in published journals where the main journal that serves as a benchmark for this research is a journal entitled Open Museum as A Tool for Culture Sustainability (2016) written by Ahmed M. Abd Abd-Rahman Shehata and Mohsen Mohamed Ibrahim Mostafa.

Literature review is a form of exposure to previous research which then becomes the basis for research conducted on certain topics or fields that support. The review literature can also assist the writer in developing other related and appropriate arguments (Libraries, 2019 pg 1) (The Writing Center, 2019 pg 1). In this study an argument was developed to suggest the preservation of Prambanan Temple as one of Indonesia's recognized cultural heritage through UNESCO, by making it an 'Open Museum'.

RESULTS AND DISCUSSION

Prambanan Temple as Heritage Site

Indonesia is known as one of the countries that have a diversity of cultures, ranging from a variety of tribes, languages, traditional houses and regional dances. The diversity was formed partly because of the geographical conditions of Indonesia which is an archipelagic country consisting of various provinces. Before independence, Indonesia in several regions had kingdoms that left historic buildings, some of which can still be seen today, one of which is famous is the temple. Two temples in Indonesia have been designated as world heritage sites by UNESCO, namely Brobudur Temple and Prambanan Temple. Prambanan Temple is the largest Hindu temple in Indonesia which is located at coordinates 7 ° 45'8 " South Latitude and 110 ° 29'30 " East Longitude (Wicaksono, 2014 pg38).

Besides being known as a world heritage site by UNESCO, Prambanan Temple is also one of the famous tourist attractions in the land of Java. Prambanan Temple stands on the border of two provinces, namely Central Java Province and Yogyakarta Province, which is precisely located in Prambanan Village, whose territory is divided between Sleman and Klaten Regencies (Nieamah, 2014

pg 52). Prambanan Temple poses a threat to earthquake natural disasters, which had previously occurred in 2006. The earthquake caused fairly severe damage to several parts of the Prambanan Temple complex, especially at the Siwa Temple (Wicaksono, 2014 pg43). As a tourist destination whose attraction is in the form of historical buildings, Prambanan Temple also enters into heritage tourism. The focus of heritage tourism is the motivation to have a diverse experience of objects or things that represent the past and present of a destination (Andago, Choe, & Han, 2017 pg 90); (Bryce, Curran, O'Gorman, & Taheri, 2015 pg 582); (Leong, 2016 pg191). The most important attribute of a heritage tourism is the authenticity or at least the perception of a destination itself. Authenticity can be understood as an authenticity or originality, universal values, and a crucial motivation that encourages tourists to travel to distant destinations to experience a different time (Park, Choi, & Lee, 2019 pg 103).

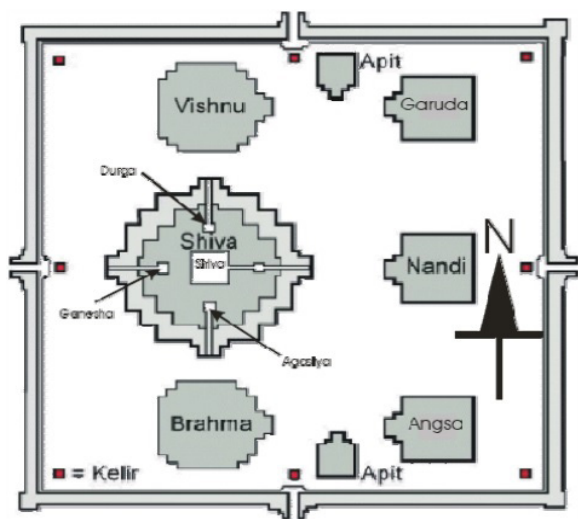


Figure 2. Prambanan Temple Complex Layout (UNESCO, 2004)

The temple complex was built during the 9th century Sanjaya Dynasty, where the layout is generally shown as shown above. The central area has three main temples based on the Hindu trinity namely Vishnu (Vishnu) facing north, Shiva (Shiva) in the middle, and Brahma in the south. The smaller temples refer to each temple as a symbol of the vehicle. The Shiva (God of Destruction) vehicle is Nandi 'the Bull'; the vehicle of Vishnu (the Creator God), namely the Eagle Garuda; and Brahma (Guardian Deity) owns a swan vehicle. Apart from temples, each temple also has a smaller courtyard. The main temple of Vishnu is located on the inner court surrounded by small temples called Pewara. These temples are historically built and presented as gifts to the King in recognition of his reign. Walls with varying heights can be seen around the complex, although some of them are in fragmentation. There are at least more than 250 small temples in the complex that is spread in the Prambanan plain (Elnashai, et al., 2007 pg.8).

Reflection on the Indonesian Context

The formation of a city in many ways can be seen as a form of cultural development in which there is an embodiment of ideology, social and technological developments that help construct a region into the city as it is today. So that it can be said that the formation of small cities is based on the knowledge, norms, beliefs, and cultural values of the people in the past (Mundardjito, 2002 pg77). Indonesia has several cultural sites which are included in the UNESCO World Heritage List including the Borobudur Temple Complex, Prambanan Temple Complex, Sangiran Ancient Human Site, and the Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy. In this paper, the discussion will focus on the cultural site of the Prambanan Temple Complex (Unesco, 2018 pg1).

The Prambanan Temple complex consists of Prambanan Temple (also called Loro Jonggrang), Sewu Temple, Bubrah Temple, and Lumbung Temple. Prambanan Temple itself is a complex consisting of 240 temples. All of the mentioned temples form Prambanan Archaeological Park and were built during the greatness of the Sailendra dynasty in Java in the 8th century. The Prambanan Temple complex is located on the border between two provinces namely Yogyakarta Province and Central Java Province on Java Island (Unesco, 2018 pg 1). On the historical side, old buildings owned by a city are able to provide an overview of past conditions. Building is a partial reality of a holistic reality that has ever existed. Therefore, building is an important element in the process of historical analysis that has information for the following generations (Martana, 2002 pg 6).

The Prambanan Temple complex has been designated as a National Cultural Property in 1998 and the National Law issued in 2010 also supports the protection and conservation of property. Management of the Prambanan Temple Complex is accommodated in a 1992 Presidential Decree which stipulated 77 hectares which included property under the ownership of the central government. This area is divided into two zones. Management of Zone 1 is carried out by the Ministry of Culture and Tourism under two different regional offices, namely the Yogyakarta and Central Java Archaeological Preservation Office. Borobudur, Prambanan and Ratu Boko Tourism Park Ltd. responsible for Zone 2 (Unesco, 2018 pg 1).

The government's efforts to improve property management are by issuing a Law in 2007 and a 2008 Government Regulation on National Spatial Planning which means that spatial planning in the World Cultural Heritage area will be prioritized. The Prambanan site has been designated as one of the national strategic areas consisting of Prambanan Temple and other related temples. Integrated management and regulations that support

conservation are needed to ensure long-term protection of property. Some regulations in Indonesia that support conservation are Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and KEPMENPAR No. 7 of 2016 concerning Determination of National Vital Objects (Unesco, 2018 pg 1).

The Prambanan Temple complex is one of the right examples in the development of Open Museum as a tool for culture sustainability in Indonesia, presented along with the concept of urban heritage, sustainable development and sustainable urban regeneration. The Prambanan Temple complex that contrasts with the background of the city of Yogyakarta has shaped this historical building into the formation of the Open Museum in accordance with the concepts described in the journal discussed earlier. Determination of the Prambanan Temple Complex as a Cultural Heritage and the World Cultural Heritage Site area is a form of the application of sustainable development to the heritage site.

The existence of arrangements such as the establishment of buildings as national vital objects and management of building complexes with the provisions of the Law on Cultural Heritage, make planning the development of buildings or cultural sites to be directed so that sustainability can continue to be maintained both physically and in other aspects. So that tourism activities can also continue to run with the proper conditions. This then encourages the formation of sustainable urban regeneration which will have a positive impact on the people in the region both in economic, cultural, social progress and so on.

In addition to government regulations that governing the Prambanan temple complex, other cooperation is also needed such as assistance from the local community itself. The community also needs to be included in any tourism development activities that become tourist destinations in this case the Prambanan Temple. The public needs to be informed about the tourist destinations in their area, not only unique tourist destinations, but also historical tourist destinations that are included in the list of world heritage by UNESCO. This is necessary, and another factor is added that tourists who are a world heritage are not only from domestic but also international. Insight development training needs to be supplemented with international language training, namely English. This then supports to improve the ability of the surrounding community to support and support existing programs.

CONCLUSION

Integrating local communities with historical buildings will help sustain ongoing activities around the historic buildings. Prambanan Temple, aside from being used as a protected historical building, it should be planned to

establish it as an open air museum, because the background characteristics are almost similar to cases in previous review studies. Prambanan Temple, which currently stands in the area of human settlements which is currently in the progress of the technological era is a form of civilization comparison that becomes a contrast if Prambanan Temple is used as an open air museum. The concept of the open air museum can provide more support to Prambanan Temple to be able to synergize with the developments around it. The main purpose of applying the open air museum to Prambanan Temple itself is to give more emphasis to conservation so that sustainability can be realized in line with the development of the surrounding community as well as to Prambanan Temple itself.

REFERENCES

- Andago, R., Choe, J., & Han, H. (2017). Tourism in Hoi An, Vietnam: Impacts, Perceived Benefits, Community Attachment and Support for Tourism Development. *International Journal of Tourism Sciences*, 17, (2), 86-106.
- Bryce, D., Curran, R., O’Gorman, K., & Taheri, B. (2015). Visitors Engagement and Authenticity: *Japanese Heritage Consumption*. *Tourism Management*, 46, 571-581.
- Canale, R. R., Simone, E. D., Maio, A. D., & Parenti, B. (2019). UNESCO World Heritage Sites and Tourism Attractiveness: *The Case of Italian Provinces*. *Land Use Policy*, 85, 114-120.
- Cellini, R. (2011). Is UNESCO Recognition Effective in Fostering Tourism? A Comment on Yang, Lin and Han. *Tourism Management*, 32, (2), 452-454.
- Chariri, A. (2009). Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif.
- Cuccia, T., Guccio, C., & Rizzo, I. (2016). The Effects of UNESCO World Heritage List Inscription on Tourism Destinations Performance in Italian Regions. *Economic Model*, 53, 494-508.
- Darmawan, E., & Enis, S. A. (2016). The Changing Function of Heritage Building for Roling Tourism Planning Progress. *Social and Behavioral Sciences*, 227, 712-719.
- Demas, M. (2009). Conservation and Management of Archaeological Sites. Los Angeles: The Getti Conservation Institute.
- Durhan, S., & Özgüven, Y. (2013). Breaking The Duality: The Historical Peninsula of Istanbul as an Open-Air Museum. *Journal of Cultural Heritage*, 14, (3), 183-188.

- Elnashai, A. S., Kim, S. J., Yun, G. J., & Sidarta, D. (2007). The Yogyakarta Earthquake of May 27, 2006. MAE Center CD Release 07-02.
- Gurian, E. H. (2008). *Civilizing the Museum: The Collected Writings of Elaine Heumann Gurian*. Routledge.
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Deepublish.
- Kisternaya, M., & Kozlov, V. (2012). Preservation of Historic Monuments in The "Kizhi" Open-Air Museum (Russian Federation). *Journal of Cultural Heritage*, 13, (3), 574-578.
- Lee, T., Riley, M., & Hampton, M. (2010). Conflict and Progress: Tourism Development in Korea. *Annals of Tourism Research*, 37, (2), 355-376.
- Leong, D. (2016). Heritage or Hesitate? Preserving Authenticity in Hong Kong Tourism. *International Journal of Tourism Sciences*, 16, (4), 191-202.
- Libraries, U. (2019, September 27). USC Libraries: Research Guides. Retrieved September 28, 2019, from USC University of Southern California: <http://libguides.usc.edu/writingguide/literaturereview>
- Martana, S. (2002). Preservasi Benda Bersejarah di Kota-Kota Indonesia Dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Warta Pariwisata*, 5, (3), 1-12.
- Mundardjito. (2002). *Research Method for Historical Urban Heritage Area. Three Days Practical Course on Planning and Design Methods for Urban Heritage*.
- Nieamah, K. F. (2014). Persepsi Wisatawan Mancanegara Terhadap Fasilitas Dan Pelayanan Di Candi Prambanan. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 6, (1), 39-45.
- Park, E., Choi, B.-K., & Lee, T. (2019). The Role and Dimensions of Authenticity in Heritage Tourism. *Tourism Management*, 74, 99-109.
- Patuelli, R., Mussoni, M., & Candela, G. (2014). Cultural Offer and Distance in a Spatial Interaction Model of Tourism. *Econ. Bus. Lett*, 3, (2), 96-108.
- Prambanan Temple Cultural Site, <http://whc.unesco.org/en/list/642>, retrieved on 8 April 2018.
- Robinson, M., & Picard, D. (2006). *Tourism, Culture and Sustainable Development*. Division of Cultural Policies and Intercultural Dialogue.
- Saipradist, A., & Staiff, R. (2008). Crossing The Cultural Divide: Western Visitors and Interpretation at Ayutthaya World Heritage Site, Thailand. *Journal of Heritage Tourism*, 2, (3), 211-224.
- Santa-Cruz, F. G., & López-Guzmán, T. (2017). Culture, Tourism and World Heritage Sites. *Tourism Management Perspectives*, 24, 111-116.
- Setiawan, B. (2010). Preservasi, Konservasi dan Renovasi Kawasan Kota Tua Jakarta. *Humaniora*, 1, (2), 699-704.
- Shehata, A. M.-R., & Mostafa, M. M. (2017). Open Museums as a Tool for Culture Sustainability.
- Su, Y., & Lin, H. (2014). Analysis of International Tourist Arrivals Worldwide: The Role of World Heritage Sites. *Tourism Management*, 40, 46-58.
- The Writing Center, U. o. (2019, September 27). The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill. Retrieved September 28, 2019, from The University of North Carolina at Chapel Hill: <https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/literature-reviews/>
- Wicaksono, A. (2014). *Penentuan Pergeseran Horizontal Candi Prambanan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Widyastuty, A. S. (2011). Urban Heritage Tourism Kawasan Jalan Thamrin Denpasar Bali. *Jurnal Teknik WAKTU*, 9, (1), 61-71.
- Yang, C., & Lin, H. (2014). Revisiting The Relationship Between World Heritage Sites and Tourism. *Tourism Economic*, 20, (1), 73-86.

MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN KREATIF MELALUI PRAKTEK USAHA DALAM MENUMBUHKAN KREATIFITAS DAN INOVATIF MAHASISWA

Nining Harnani, Dodi Tisna Amijaya, dan Luthfi Setiadiwibawa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Jl. Turangga No. 25 Bandung

E-mail: niningharnani@gmail.com,

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pembelajaran kewirausahaan kreatif yang didalamnya menggunakan *metode learning by doing* yaitu melalui praktek usaha dalam menumbuhkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa. Dimana diharapkan mahasiswa memiliki kreatifitas dan inovasi dalam berwirausaha kedepannya serta mengetahui bagaimana kreatifitas dan keinovatifan mahasiswa dalam membuat usaha yang dipraktekkan dalam pembelajaran kewirausahaan. Sehingga diharapkan menumbuhkan jiwa kewirausahaan para mahasiswa dan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha dan dapat mengurangi jumlah pengangguran terdidik di Indonesia yang jumlahnya masih sangat tinggi saat ini. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti khususnya alumni mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dimana data yang diperoleh akan diangka dan diprosentasekan lalu dideskripsikan. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* yaitu hanya alumni dan mahasiswa manajemen yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan 5 tahun terakhir. Dalam Penelitian ini sampel yang dipergunakan adalah sebanyak 75 orang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SEM dengan program Lisrel 8.0. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan analisis SEM di peroleh nilai t hitung variable kreatifitas mahasiswa sebesar 7,70 dan nilai t hitung variable inovasi mahasiswa sebesar 8,46 lebih besar dari t kritis 1,96 dengan tingkat kekeliruan 5 % diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% disimpulkan bahwa pembelajaran kewirausahaan kreatif berpengaruh terhadap kreatifitas dan inovasi mahasiswa Universitas Winaya Mukti Bandung.

Kata kunci: Metode Pembelajaran; Pembelajaran Kreatif; Kreativitas; Inovatif

CREATIVE ENTREPRENEURSHIP LEARNING MODEL THROUGH BUSINESS PRACTICES TO FOSTER STUDENTS' CREATIVITIES AND INNOVATIONS

ABSTRACT. This research aims to find a learning model of creative entrepreneurship that uses the method of learning by doing i.e. through business practices to foster students' creativities and innovations. Students are supposed to have entrepreneurial creativities and innovations, and apply them in entrepreneurship learning. It is expected that this learning model can grow entrepreneurial spirits of the students, stimulate them to become entrepreneurs and hopefully reduce the large numbers of educated unemployed in Indonesia. This research was conducted at the Faculty of Business & Economics, Winaya Mukti University. The methods used in this research are descriptive and verification, in which the obtained data are abstracted, preprocessed and then described. Whereas the sampling technique used in this study is purposive sampling, namely only alumni and active management students who took entrepreneurship course in the last 5 years are purposively sampled (75 samples to be exact). The analysis tool used in this research is the SEM analysis with the Lisrel 8.0 software. Based on the results of the analysis carried out by using SEM analysis, the students' creativity variable t value is 7.70, and the students' innovation variable t value is 8.46; greater than the critical t 1.96 with 5% error rate. It is decided that H_0 is rejected, and H_a is accepted. Based on the test results with a confidence level of 95%, it is concluded that the learning model of creative entrepreneurship affects the creativities and innovations of the management students of Winaya Mukti University, Bandung.

Key words: Learning Methods; Creative Learning; Creativity; Innovation

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa revolusi industri sudah mulai memasuki era 5.0, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia untuk dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing serta kompeten bukan hanya dalam menguasai atau menambah ilmu semata, namun juga dalam menguasai secara kepraktikan. Kepandaian dapat di indikasikan dengan indeks prestasi yang tinggi, sedangkan

menciptakan mahasiswa yang mandiri bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras pendidik dan semua stakeholder yang terkait dalam merangsang kemandirian mahasiswa, sehingga diharapkan kedepannya mahasiswa dapat langsung berpartisipasi dalam masyarakat dalam rangka perbaikan berbagai aspek dalam masyarakat. Namun saat ini, data menunjukkan bahwa mahasiswa dalam hal ini lulusan perguruan tinggi sebagian besar belum terserap baik di masyarakat sehingga masih tingginya tingkat pengangguran terdidik, hal ini

menunjukkan bahwa lulusan belum dapat mandiri dan berkarya. Data menunjukkan pada tahun 2004 lulusan perguruan tinggi menyumbangkan sekitar 2000 orang atau 17% dari jumlah pengangguran nasional (Setiawan, 2005), dimana pada tahun berikutnya jumlah tersebut tidak mengalami penurunan. Permasalahan pengangguran terdidik ini, sebaiknya menjadi perhatian khusus para pendidik dan yang terkait, yang perlu dipikirkan secara mendalam sehingga kedepannya dapat mencetak lulusan yang berkualitas baik dari segi kecerdasannya maupun kemandiriannya.

Masalah pengangguran terdidik yang terjadi saat ini di Indonesia memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang tepat guna, dimana bukan hanya mendidik mahasiswa hanya sampai diwisuda saja, namun bagaimana dapat mencetak lulusan yang mandiri dan mampu berkarya setelah selesai mendapat pembelajaran di perguruan tinggi itu sendiri. Kemandirian dapat diperoleh melalui jiwa kewirausahaan mahasiswa, dimana diharapkan setelah lulus tidak hanya memiliki keinginan menjadi pegawai saja, namun justru memiliki motivasi untuk menciptakan lapangan kerja atau mandiri dalam bekerja. Pengembangan kurikulum dalam memperkaya aspek kewirausahaan mungkin dapat menjadi sebuah solusi dalam mengurai masalah pengangguran terdidik yang saat ini dihadapi di Indonesia. Diharapkan melalui pengembangan dan pengayaan aspek kewirausahaan dalam kurikulum baik secara teoritis maupun praktek dalam proses perkuliahan, diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk dapat berfikir secara kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Dan dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi serta kemampuan berpikir kreatif dan inovatif diharapkan setelah lulus, para mahasiswa dapat lebih mandiri dalam memperoleh pendapatan atau lebih baiknya lagi mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar mereka.

Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, dan pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaruan, kemajuan, dan tantangan (Suryana 2017 : 10). Mahasiswa harus terus dirangsang cara berfikir kreatif dan inovasinya sehingga dapat melahirkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian. Sehingga ketergantungan dan sikap kurang tanggap terhadap lingkungannya dapat diminimalisir, saat ini jiwa kewirausahaan belum terintegrasi dengan muatan kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Integrasi budaya *entrepreneurship* ke dalam mata kuliah dirasa cukup penting dan rasional untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang profesional, kreatif, bertanggung jawab, dan mandiri (Kokom Komariah, 2006:1). Ketika mahasiswa memiliki cara berfikir kreatif dan inovasi sehingga dapat terintegrasi dengan jiwa kewirausahaan

maka akan dapat menciptakan peluang-peluang kerja dan lebih mudah beradaptasi dilingkungan yang baru, sehingga mereka akan diharapkan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat dan dapat menopang berkembangnya budaya *entrepreneurship* di perguruan tinggi.

Seseorang yang dapat mampu mencari ide baru serta mendapatkan cara yang baru dalam memecahkan masalahnya serta membaca peluang disekitarnya adalah ciri dari kreativitas. Lulusan perguruan tinggi akan semakin sulit bersaing dalam masyarakat saat ini jika tidak memiliki nilai jual, kreativitas yang tinggi dan jiwa kewirausahaan. Perguruan tinggi adalah wadah dari orang-orang akademisi yang profesional memiliki peluang besar dalam proses pengintegrasian wawasan *entrepreneurship* dalam pembelajaran sebagai salah satu solusi yang diharapkan dapat memecahkan masalah pengangguran terdidik saat ini.

Seorang pendidik yang inspiratif harus memiliki potensi dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan serta kemandirian sehingga mereka mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah yang kompleks melalui berfikir kreatif dan inovatif sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi sukses dalam masyarakat industri global saat ini. Oleh karena itu, kurikulum pembelajaran kewirausahaan jangan sebatas teori saja, namun harus memberikan praktik usaha secara nyata, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman langsung berwirausaha walau dalam waktu yang terbatas. Mahasiswa harus diberikan materi-materi yang memotivasi mereka untuk berwirausaha, memberikan keterampilan mencari ide usaha dengan menuangkannya ke dalam rencana usaha atau *business plan* yang baik, cara memasarkan produknya baik secara *online* maupun *offline* sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam membangun jiwa kewirausahaan dan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, mahasiswa diharapkan dapat memperolehnya dari proses belajar yang merangsang kemampuan analisis dan psikomotiknya sehingga mereka dapat lebih memiliki pengalaman melalui praktek yang dilakukan dalam pembelajaran yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam dunia nyata atau setelah lulus nantinya. Strategi dalam pembelajaran kewirausahaan sebaiknya lebih menekankan pada motivasi berwirausaha dan meningkatkan kemampuan dalam membuka usaha sehingga mencetak mahasiswa atau lulusan yang berjiwa *entrepreneur* kedepannya, untuk itu strategi pembelajarannya harus lebih kreatif dan inovatif.

Tujuan atau target pembelajaran kewirausahaan haruslah lebih jelas dan menghasilkan output yang mengarah kepada kesiapan mengimplementasikan kompetensi berwirausaha sehingga kedepannya mahasiswa diharapkan siap terjun berwirausaha dalam dunia nyata.

Hal ini harus dimulai dari membangun motivasi wirausaha mahasiswa, sehingga mindset mereka terhadap wirausaha terbangun dalam diri mereka. Selain itu, dalam proses pembelajaran mahasiswa harus dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam penyelesaian tugas. Dalam hal ini tugas-tugas yang berkenaan dengan menyiapkan praktek usaha yang akan mereka presentasikan di depan kelas nantinya, dimana hal ini dimulai dengan menyusun rencana usaha atau business plan, membuat design bisnis yang akan dibuat, dimana mereka akan menuangkan ide-ide mereka dalam memasarkan serta membuat produk yang akan dipresentasikan.

Penyelesaian tugas-tugas ini akan menjadi inti dalam pembelajaran kewirausahaan yang menggunakan strategi pembelajaran *learning by doing* dalam hal ini adalah praktek usaha. Dalam hal ini, mahasiswa mencoba merumuskan dan membuat proyek praktek usaha.

Universitas Winaya Mukti dalam hal ini Fakultas Ekonomi Bisnis memiliki cita-cita membentuk generasi muda yang mempunyai jiwa kewirausahaan melalui Visi dan Misi Fakultas Menjadi Kampus Kewirausahaan Di Universitas Winaya Mukti. Sebagai perwujudan Visi dan Misinya Fakultas Ekonomi Bisnis mengharuskan kepada semua mahasiswa untuk menempuh mata kuliah kewirausahaan, yang diharapkan kedepannya dapat menjadi solusi merubah image bahwa bekerja tidak perlu harus sebagai pegawai tetapi berwirausaha lebih menjanjikan. Untuk itulah perlu dikaji bagaimana model mata kuliah kewirausahaan kreatif yang dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa, Hal inilah yang mendasari dilakukan penelitian dengan judul “Model pembelajaran kewirausahaan kreatif dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa yang dijadikan responden memiliki kreatifitas dan inovasi dalam berwirausaha yang diharapkan berguna setelah lulus nantinya, serta mengetahui apakah mahasiswa setelah lulus kuliah berkeinginan berwirausaha atau tidak.

Pada dasarnya *core* atau inti dari kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk dapat membuat sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) dengan proses berfikir kreatif dan inovatif yang akan menjadi peluang (Drucker, 2002). Sehingga kami berharap melalui mata kuliah kewirausahaan ini dapat menumbuhkan kekreatifitasan dan inovasi mahasiswa terutama dalam berwirausaha. Kewirausahaan kreatif dipandang sebagai pengusaha kreatif yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat.

Kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan untuk dapat membuat dan menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis, serta mengelola materi maupun SDM

yang dibutuhkan guna mengambil manfaatnya dan mengambil keputusan yang tepat sehingga kesuksesan didapatkan (Daryanto, 2012: 4). Menanamkan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa dapat menjadi salah satu solusi untuk dijadikan upaya mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia saat ini, karena dengan melakukan kegiatan berwirausaha maka diharapkan lulusan kedepannya mampu membuat peluang-peluang baru dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk berfikir kreatif dan inovatif yang dijadikan landasan dan sumber daya untuk mencari peluang membuat perubahan menuju kesuksesan. Melalui penelitian ini kami ingin mencari model kewirausahaan kreatif khususnya pada mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti sehingga diharapkan mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan mereka, serta menambah kreatifitas dan inovasi mahasiswa dalam berwirausaha.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti khususnya sehubungan dengan adanya Mata Kuliah Kewirausahaan Sebagai Mata Kuliah yang akan menjadi visi dan misi Prodi Manajemen dan Negara Indonesia pada umumnya yang berusaha membentuk mahasiswa yang diharapkan setelah mereka lulus dapat berkiprah dalam dunia wirausaha sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran terdidik kedepannya.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi awalan untuk menemukan model yang tepat dalam pembelajaran kewirausahaan serta menjadi masukan bagi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti khususnya dan perguruan tinggi lainnya umumnya berkenaan dengan mata kuliah kewirausahaan. Dan besar harapan kami kedepannya dapat meneliti tentang model pembelajaran kewirausahaan dengan skope yang lebih luas lagi. sehingga besar harapan kami model pembelajaran kewirausahaan kreatif tersebut dapat menjadi salah satu jalan dalam menyelesaikan masalah pengangguran berpendidikan di Indonesia.

Model Pembelajaran Kewirausahaan Kreatif

Joyce dan Weil (1980:1) dalam Rusman (2016:133) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah rencana atau suatu pola yang dapat digunakan untuk membentuk rencana jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.

Ciri-ciri Model Pembelajaran menurut Rusman 2016 : 136 adalah diantaranya memiliki dasar dari ahli atau teori tertentu, memiliki tujuan dan misi, memiliki pedoman yang dapat memperbaiki proses pembelajaran, terdapat

langkah-langkah, prinsip-prinsip reaksi, dan beberapa system yang dapat mendukung proses belajar mengajar, dan yang terakhir harus memiliki sebuah dampak atas proses pembelajaran yang sudah dilakukan.

Seorang wirausahawan mempunyai kemampuan berfikir secara kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah yang terjadi agar dapat menciptakan peluang agar dapat meraih kesuksesan dimana mereka selalu berprinsip apapun yang dilakukan harus dilakukan dengan usaha yang optimal agar memperoleh hasil yang maksimal, karena kesuksesan merupakan sebuah proses.

Menurut ahli ekonomi, wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan mengolah serta mengkombinasikan faktor-faktor produksi, diantaranya SDM yang dimilikinya, serta sarana prasarana yang dimilikinya. Objek pembelajaran kewirausahaan lebih ditekankan kepada kompetensi atau kemampuan membuat sebuah rumusan dalam hidup ini sehingga memiliki tujuan yang jelas, kemampuan menyemangati diri atau memotivasi diri dikarenakan seorang wirausahawan akan banyak menghadapi berbagai resiko ketidakpastian maka kemampuan memotivasi diri ini sangat diperlukan oleh seorang wirausahawan, kemampuan berinisiatif adalah kemampuan berikutnya yang harus dimiliki seorang wirausahawan karena kreatifitas dan inovasi adalah ciri utama seorang wirausahawan untuk dapat menemukan ide-ide baru dalam setiap hal agar dapat menciptakan peluang yang baru dalam dunia usaha khususnya, kemampuan membentuk modal adalah kemampuan berikutnya dimana seorang wirausahawan diharapkan mampu secara cerdas mendapatkan modal dari berbagai sisi yang ada baik yang dimilikinya maupun yang dimiliki oleh lingkungannya, kemampuan mengatur waktu atau memanage waktunya adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang wirausahawan karena dalam berwirausaha seseorang harus dapat membuat skala prioritas dalam melakukan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya sehingga hal yang dikerjakannya tidak sia-sia namun menjadikan segala tindakan yang dilakukannya menjadi manfaat yang besar baik bagi dirinya, usahanya maupun masyarakat disekitarnya.

Kemampuan lain yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah kemampuan membiasakan diri untuk belajar dari pengalaman, seorang wirausahawan haruslah pandai belajar dalam mengambil hikmah dari setiap yang dia temui ataupun lakukan, sebab hal tersebut akan menjadi proses kesuksesannya. Jika seorang wirausahawan tidak memiliki kemampuan belajar meng-ambil hikmah dari pengalaman maka dia akan mengalami hal yang statis dalam usahanya.

Menurut Suyana (2009:2) bahwa "*Entrepreneurship are not only born but also made*" artinya kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir tetapi juga

dapat dipelajari dan diajarkan. Dalam pembelajaran kewirausahaan diperlukan model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan suatu pengalaman belajar dimana mahasiswa mendapatkan berbagai kemampuan dasar kewirausahaan melalui prosedur yang sistematis sehingga tujuan belajar dapat tercapai yaitu membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa. Model pembelajaran yang akan digunakan sebagai pendekatan pembelajaran kewirausahaan kreatif melalui praktek usaha disini adalah menggunakan model pembelajaran Personal (*Personal Models*) dimana model ini lebih menekankan atau didasari dari teori *humanistic*, yaitu suatu teori yang berorientasi pada pengembangan individu dan perkembangan yang bersifat perorangan, dimana setiap individu atau mahasiswa di beri tugas membuat produk usaha yang akan dipresentasikan di akhir kegiatan pembelajaran.

Tokoh *humanistic* adalah Abraham Maslow (1962), R Rogers, C. Buhler, dan Arthur Comb. Menurut teori ini, pendidik harus dapat mencari dan berupaya untuk dapat membuat kondisi kelas yang nyaman, sehingga siswa memiliki kebebasan dalam proses belajar dalam rangka membentuk peserta didik lebih baik, baik secara emosional maupun secara intelektual. Teori *humanistic* hadir sebagai sebuah gerakan memanusiakan manusia, pada teori *humanistic* ini pendidik memiliki berperan dalam proses pembelajaran sebagai pihak yang menghadirkan motivasi belajar atau pendorong dalam pembelajaran.

Seorang wirausahawan memiliki katakteristik umum, diantaranya adalah memiliki keberanian dalam menghadapi resiko hal ini dikarenakan seorang wirausahawan akan banyak menghadapi berbagai hal diluar dugaan sehingga seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan arah pandangan jauh ke depan. Sehingga kreatifitas dan inovasi menjadi hal yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang dapat digunakan salah satunya untuk memecahkan masalah yang dihadapi atas usahanya. Kemampuan-kemampuan tersebut harus dimiliki lulusan perguruan tinggi dengan memberikan proses pembelajaran yang dapat merangsang mahasiswa mendapatkan modal utama seorang wirausahawan. Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam mata kuliah kewirausahaan maka akan dapat membentuk seorang mahasiswa yang memiliki kreatifitas tinggi dalam hidupnya serta memiliki inovasi-inovasi terbaik yang berfungsi dalam membuka peluang dalam bidang usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya, keluarga maupun masyarakat secara luas.

Menurut Halimah (2017: 340) Hakikat kreatifitas adalah adanya kebaruan dan orisinalitas dimana individu yang kreatif pada umumnya mampu menghasilkan ide atau gagasan-gagasan dan atau produk baru. Piirto (2011) mengemukakan bahwa peran pendidik sangat kompleks.

Pendidik yang telah mampu fokus pada kreativitas memiliki keyakinan bahwa semua peserta didik bisa kreatif. Berdasarkan pernyataan tersebut adalah bahwa dalam mengasah kreatifitas peserta didik dapat dirangsang oleh pendidik yang kompeten, peserta didik diijinkan dan didorong untuk semangat dalam pembelajaran dan maupun dalam penyelesaian tugas dan produk.

Petty (2009) dalam Halimah (2017:342) menyebutkan bahwa menciptakan pembelajaran kreatif adalah penting bagi pendidik dalam mata pelajaran apapun, karena empat alasan utama, yaitu:

- a. Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah.
- b. Untuk memungkinkan peserta didik menggunakan pengetahuan secara produktif dan bermakna.
- c. Meningkatkan motivasi. Kreatifitas memenuhi kebutuhan manusia yang mendalam untuk membuat sesuatu untuk memperoleh pengakuan. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow menekankan pada harga diri dan aktualisasi diri, yang keduanya dapat menjadi menyenangkan sebagai karya kreatif. Menjadi kreatif adalah menyenangkan.
- d. Peserta didik di beri kesempatan dalam mengeksplorasi perasaan dan mengembangkan keterampilan mengekspresikan kemampuannya.

Pembelajaran yang kreatif tidak terjadi dengan sendirinya, seperti dikemukakan Jhonston, dkk (2007) bahwa pembelajaran yang kreatif harus direncanakan, dalam perencanaan untuk pembelajaran kreatif, seorang pendidik haruslah memiliki wawasan yang luas dan pemahaman tentang pembelajaran itu sendiri terutama secara pedagogis. Dalam hal ini Pembelajaran kewirausahaan kreatif pada dasarnya untuk peserta didik belajar kreatif baik dalam pengetahuan, pemahaman, serta pengembangan keterampilan dan sikap.

Seorang wirausahawan memiliki beberapa cirri, karakter, sifat dan watak yang berbeda dengan orang kebiasaan. Beberapa ahli menyebutkan beberapa hal tersebut diantaranya beberapa ciri seorang wirausaha yang dikemukakan oleh Vernon A musselman, Wasty Sumanto dan Geoffrey Meredith (dalam Suryana, 2009:10) yaitu diantaranya adalah memiliki keinginan yang kuat untuk mandiri, berani dalam menghadapi resiko, memiliki pengalaman yang banyak, selalu mampu memotivasi diri sendiri, memiliki kemauan keras untuk maju dan bersaing, memiliki semangat yang tinggi, suka bekerja keras, punya tujuan berkarya atau berprestasi, tegas, tidak tergantung orang lain, memiliki jiwa *leadership* yang tinggi, punya ke khas an diri, berfikiran jauh kedepan, memiliki banyak ide cemerlang,dan percaya diri.

Steinhoff dan John F Burgess (Suryana, 2017:27) menyebutkan beberapa karakteristik wirausahawan

unggul,diantaranya adalah visioner, memiliki tujuan atau target yang jelas, berani dalam mengambil resiko baik dalam keuangan maupun waktu, punya perencanaan yang baik, mau bekerja keras demi tujuannya, mampu membina hubungan baik dengan berbagai *steakholder* yang terkait, dan penuh dengan tanggung jawab.

Menurut Suharyadi (2007:10) bahwa sikap seorang wirausaha dalam kegiatan sehari-hari diantaranya adalah memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, memiliki komitmen yang baik, tingkat kejujuran yang tinggi, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, serta memiliki kemandirian yang kuat.

Sementara itu, dalam Munadjat dan Harnani (2016:75) seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan harus memiliki ketekunan dan keuletan.

Menurut Dusselman (dalam Suryana, 2001:25), seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan ditandai dengan adanya jiwa keinovasian yang tinggi,dalam penciptaan produk atau ide yang baru, memiliki kemampuan dalam perencanaan dan pengorganisasian yang baik, memiliki jiwa *leadership* yang tinggi dan mampu memotivasi dirinya sendiri ataupun orang lain dalam mencapai tujuannya, serta memiliki keberanian mengambil resiko.

Model pembelajaran kewirausahaan sangat memerlukan pendekatan kreatif produktif, karena salah satu karakteristik wirausahawan itu adalah kreatif. Menurut Suryosubroto (2009:124) Karakteristik pembelajaran kreatif produktif antara lain adalah adanya keterlibatan peserta didik baik secara intelektual maupun secara emosional dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat menemukan konsep pembelajaran sendiri melalui berbagai metode, memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi.

Inovasi

Menurut Zimmerer dalam Suryana (2017:74) Keinovasian adalah kemampuan kreatif dalam menciptakan peluang dalam memecahkan persoalan yang dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia (*inovation is the ability to apply creative solutions to those problems and opportunities to enhance or to enrich peoples live*). Berinovasi bagi seorang wirausahawan merupakan kunci sukses. Inovasi merupakan tindakan kewirausahaan untuk meraih sukses dalam persaingan.

Untuk menghasilkan nilai tambah, menurut Kotler dan Keller dalam Suryana (2017:75) menyebutkan ada empat jenis cara berinovasi yang dapat dilakukan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut, diantaranya dengan mengkreasi atau membuat penemuan baru dengan cara atau proses baru dimana cara ini belum pernah dilakukan

sebelumnya, dengan mengembangkan sebuah produk atau jasa model lama, duplikasi atau proses peniruan namun diberikan penambahan-penambahan kreatif agar lebih baik lagi, dan menggunakan cara sintetis yaitu memadukan konsep ataupun model lama dengan model yang baru menjadi hal baru menggunakan metode yang baru.

Sementara itu, hasil berinovasi menurut Suryana (2017:76) adalah berupa produk barang, jasa, metode, proses, dan cara-cara memecahkan masalah yang siatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model pembelajaran kewirausahaan kreatif di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti.
2. Untuk mengetahui kreatifitas dan inovasi mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti.
3. Untuk mengetahui model pembelajaran kewirausahaan kreatif mempengaruhi kreatifitas dan inovasi mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ciri-ciri variabel, dimana dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang model pembelajaran kewirausahaan kreatif, kreatifitas mahasiswa, dan jiwa inovasi mahasiswa. Sedangkan penelitian verifikatif adalah untuk menguji hipotesis melalui pengumpulan data lapangan, yang didalam penelitian ini akan diuji apakah model pembelajaran kewirausahaan kreatif berpengaruh terhadap kreatifitas dan jiwa inovasi mahasiswa.

Pada penelitian ini, responden penelitian diberi tugas agar mereka melakukan kegiatan dengan membuat praktek usaha (*Project Based Learning*). Tugas yang diberikan kepada responden melalui lisan maupun secara tertulis. Adapun observasi dilakukan terhadap mahasiswa yang telah mengikuti matakuliah kewirausahaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung untuk program studi Manajemen.

Dalam melakukan penelitian terlebih dahulu perlu ditentukan populasi yang akan diteliti. Menurut Bailey dalam M.I qbal Hasan (2002:60) menyatakan bahwa penelitian yang akan menggunakan metode analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30". Menentukan banyaknya populasi dalam penelitian ini

menggunakan *Purposive Sampling*. Dalam penelitian ini Subjek penelitiannya adalah mahasiswa atau alumni mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan jumlah sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai subjek penelitian berjumlah 75 orang mahasiswa.

Untuk menguji hubungan antara variabel model pembelajaran kewirausahaan kreatif terhadap kreatifitas dan inovasi mahasiswa digunakan analisis data menggunakan model persamaan struktural (*Struktural Equation Modeling*). Menurut Hair et al (2006:426) bahwa SEM didefinisikan sebagai teknik *multivariate* yang menganalisis hubungan yang melibatkan variabel *intervening*, dan merupakan suatu perluasan (*extension*) dari beberapa teknik multivariat, khususnya path analisis dan analisis faktor. Adapun pengujian dimulai dengan penentuan hipotesis sebagai berikut :

Ho= Tidak terdapat pengaruh pembelajaran kewirausahaan kreatif terhadap kreativitas dan inovasi mahasiswa .

Ha = terdapat pengaruh pembelajaran kewirausahaan kreatif terhadap kreatifitas dan inovasi mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembelajaran Kewirausahaan Kreatif

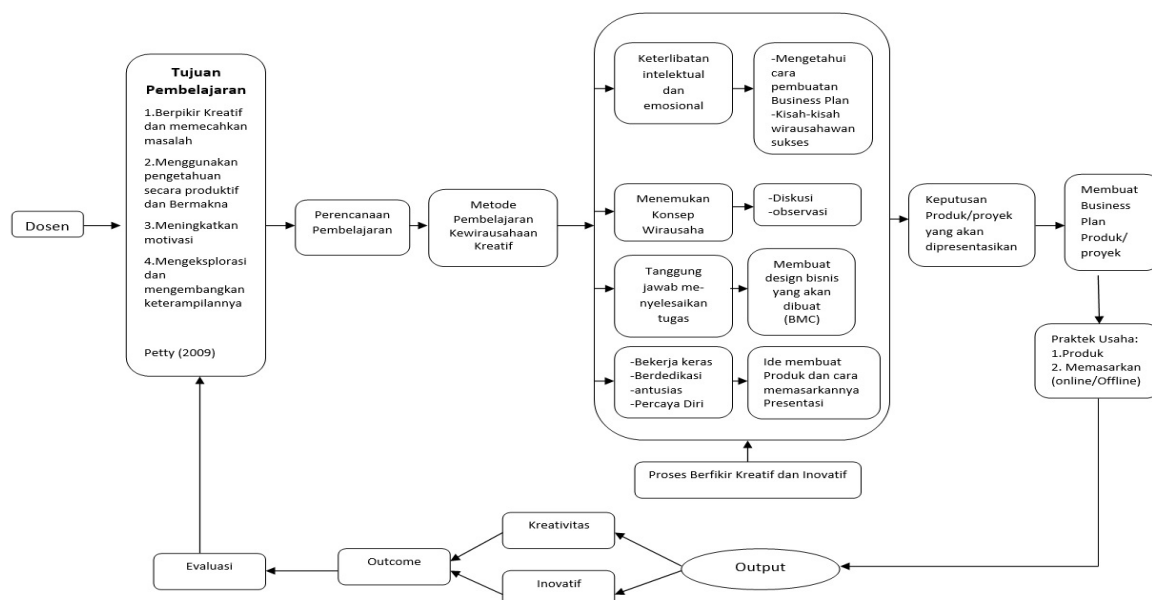
Melalui pendekatan teori humanistik dengan menggunakan model personal pembelajaran kewirausahaan kreatif melalui praktek usaha yang dilakukan meliputi perencanaan, pemberian materi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan seperti kisah pengusaha-pengusaha yang inspiratif guna meningkatkan motivasi berwirausaha mahasiswa, membedah beberapa metode membuat bisnis plan, presentasi dan praktek usaha, penilaian tugas dan dampak pembelajaran baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun model pembelajaran kewirausahaan kreatif dapat digambarkan pada gambar 1.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, secara umum gambaran model pembelajaran kewirausahaan kreatif dituangkan pada tabel 1.

Dari penilaian 75 responden dalam Metode pembelajaran, dengan jumlah 9 item pertanyaan didapat nilai-nilai seperti pada tabel di atas dengan jumlah total sebesar 2892. Untuk mengetahui jawaban tanggapan tersebut maka dikategorikan dalam bentuk pembobotan, sebagai berikut:

SGTTDKBAIK	TDKBAIK	CUKUP BAIK	BAIK	SANGAT BAIK
675	1215	1715	2215	2715
				2892
				3375

Berdasarkan pembobotan diatas, menunjukkan metode Pembelajaran kewirausahaan kreatif dinilai sangat baik, yang berarti mahasiswa merasakan ada dorongan yang positif dari dosen untuk belajar sehingga mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran.



Gambar 1. Model Pembelajaran Kewirausahaan kreatif

Sumber: olahan peneliti

Tabel 1. Model Pembelajaran Kreatif

No	Pertanyaan	Score	ideal	Penilaian
1	Apakah dengan membuat Business Plan dapat memudahkan anda dalam menyelesaikan tugas praktek usaha?	320	375	Sangat Setuju
2	Apakah dengan mengetahui kisah-kisah pengusaha sukses memotivasi anda untuk berwirausaha?	337	375	Sangat Setuju
3	Apakah anda dapat mengambil inti dari materi yang diberikan saat menggunakan metode observasi dalam pembelajaran kewirausahaan?	308	375	Setuju
4	Apakah dengan menggunakan pembelajaran diskusi dan observasi dapat meningkatkan perhatian anda dalam proses pembelajaran Kewirausahaan?	318	375	Setuju
5	Apakah anda menyelesaikan tugas praktek usaha dalam pembelajaran kewirausahaan?	331	375	Sangat setuju
6	Apakah anda mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran kewirausahaan?	319	375	Selalu
7	Apakah anda bekerja keras dalam penyelesaian tugas praktek usaha yang ditugaskan?	299	375	Cukup
8	Apakah anda Antusias dalam menyelesaikan proyek matakuliah kewirausahaan?	315	375	Setuju
9	Apakah anda merasa percaya diri dengan praktek usaha yang anda buat?	345	375	Sangat setuju
Jumlah		2892	3375	Sangat Baik

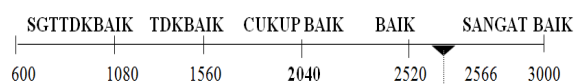
Table 2. Kreatifitas Mahasiswa

No	Pertanyaan	Score	ideal	Penilaian
1	Saya mencari informasi yang baru yang bermanfaat dalam membuat produk yang akan dibuat?	340	375	Sangat Baik
2	Saya yakin dengan kemampuan saya dalam menyelesaikan tugas praktek mata kuliah kewirausahaan?	330	375	Sangat Baik
3	Saya berusaha mengikuti dan menerima perubahan dalam kehidupan saya?	319	375	Baik
4	Saya menerima kritikan dan masukan dari luar terhadap diri saya?	334	375	Sangat Baik
5	Saya mencoba mencari solusi terhadap masalah yang saya temui ?	330	375	Sangat Baik
6	Saya mencoba mencari informasi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi?	317	375	Baik
7	Saya menggunakan imajinasi saya dalam membuat produk yang akan saya presentasikan pada mata kuliah kewirausahaan?	324	375	Sangat Baik
8	Produk yang saya buat dalam tugas praktek kewirausahaan adalah asli ide saya sendiri?	272	375	Baik
Jumlah		2566	3000	Sangat Baik

Kreatifitas Mahasiswa

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, secara umum gambaran kreatifitas mahasiswa dituangkan pada tabel 2. Dari penilaian 75 responden dalam Kreativitas, dengan jumlah 8 item pertanyaan didapat nilai-nilai seperti pada tabel di atas dengan jumlah total sebesar

2566. Untuk mengetahui jawaban tanggapan tersebut maka dikategorikan dalam bentuk pembobotan, sebagai berikut :



Model Pembelajaran Kewirausahaan Kreatif melalui Praktek Usaha dalam Menumbuhkan Kreatifitas dan Inovatif Mahasiswa
(Nining Harnani, Dodi Tisna Amijaya, dan Luthfi Setiadiwibawa)

Table 3. Inovasi Mahasiswa

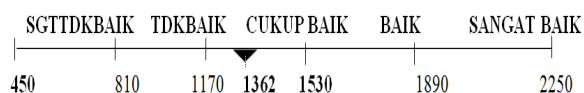
No	Pertanyaan	Score	ideal	Penilaian
1	Apakah anda pernah mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kebaruan?	296	375	Sangat Baik
2	Saya mencoba membuat produk baru dalam memenuhi tugas Praktek kewirausahaan?	204	375	Cukup
3	Apakah Anda pernah mencoba mengembangkan suatu produk dengan menambahkan beberapa ide kreatif dalam memperbaiki produk yang ada?	230	375	Baik
4	Saya mencoba membuat produk dengan cara yang baru?	215	375	cukup
5	Saya mencoba membuat suatu produk yang memiliki manfaat baru?	197	375	cukup
6	Apakah anda pernah mencoba mengembangkan produk yang sudah ada agar lebih baik?	220	375	Cukup
Jumlah		1362	2250	Baik

Berdasarkan pembobotan diatas, menunjukkan Kreativitas mahasiswa dinilai sangat baik, yang berarti mahasiswa memiliki daya kreatifitas yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan dalam hal ini adalah dalam rangka menyelesaikan tugas praktek usaha.

Inovasi Mahasiswa

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, secara umum gambaran jiwa inovatif mahasiswa adalah dijelaskan pada tabel 3.

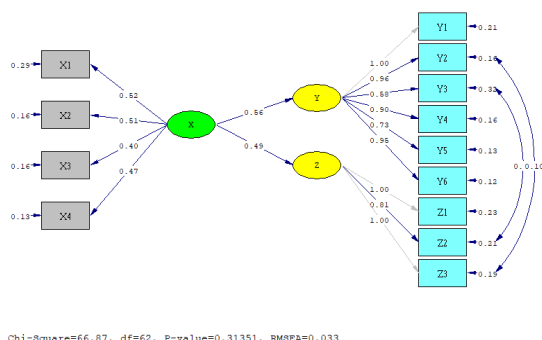
Dari penilaian 75 responden dalam Inovatif mahasiswa, dengan jumlah 6 item pertanyaan didapat nilai-nilai seperti pada tabel di atas dengan jumlah total sebesar 1362. Untuk mengetahui jawaban tanggapan tersebut maka dikategorikan dalam bentuk pembobotan, sebagai berikut:



Berdasarkan pembobotan diatas, menunjukkan bahwa jiwa inovatif mahasiswa dinilai baik, yang berarti mahasiswa memiliki daya inovatif yang cukup baik dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi jiwa inovatif mahasiswa agar lebih baik lagi kedepannya.

Pengaruh Model pembelajaran Kewirausahaan kreatif terhadap kreatifitas mahasiswa dan inovasi mahasiswa.

Pengaruh model pembelajaran kewirausahaan kreatif terhadap kreatifitas dan inovasi mahasiswa secara visual diagram jalur dapat digambarkan pada gambar 1.



Gambar 2. Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Kreatifitas dan Inovasi Mahasiswa FEB UNWIM

Model Pembelajaran Kewirausahaan Kreatif melalui Praktek Usaha dalam Menumbuhkan Kreatifitas dan Inovatif Mahasiswa
(Nining Harnani, Dodi Tisna Amijaya, dan Luthfi Setiadiwibawa)

Berdasarkan pengujian di dapat bahwa nilai t hitung variabel kreatifitas mahasiswa adalah sebesar 7,70 sedangkan t hitung variabel inovasi mahasiswa adalah sebesar 8,46 yang nilai keduanya adalah lebih besar dari nilai t kritis yaitu 1,96. Karena nilai t hitung lebih besar dibandingkan t kritis, maka dengan tingkat kekeliruan 5% berarti H_0 ditolak sehingga H_a diterima. Sehingga berdasarkan hasil pengujian dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kewirausahaan kreatif berpengaruh terhadap kreatifitas dan inovasi mahasiswa.

SIMPULAN

Model pembelajaran kewirausahaan kreatif yang di gunakan melalui pelaksanaan praktek usaha di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti adalah dengan menggunakan pendekatan model humanistik secara personal sehingga setiap mahasiswa bebas berkreasi dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing dimana pendidik mendorong setiap mahasiswa agar semangat dalam melakukan pembelajaran. Berdasarkan data penelitian menunjukkan Pembelajaran kewirausahaan kreatif dinilai sangat baik, yang berarti mahasiswa merasakan ada dorongan yang positif dari dosen untuk belajar sehingga mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dimana nilai terbesar diperoleh pada besarnya rasa percaya diri dengan praktek usaha yang di buat. Namun mahasiswa kurang bekerja keras dalam menyelesaikan tugas praktek usaha yang ditugaskan. Sehingga perlu penekanan agar mahasiswa mengerjakan praktek usaha dengan kerja keras.

Berdasarkan hasil penelitian kreatifitas mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti dinilai sangat baik, yang berarti mahasiswa memiliki daya kreatifitas yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan dalam hal ini adalah dalam rangka menyelesaikan tugas praktek usaha. Dimana score tertinggi diperoleh pada pernyataan aktifnya mahasiswa mencari informasi yang baru yang bermanfaat dalam membuat produk yang akan mereka buat. Sedangkan hasil penelitian inovasi mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti dinilai baik, yang berarti mahasiswa memiliki daya inovatif yang

cukup baik dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang berarti perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik. Dimana score tertinggi diperoleh pada pernyataan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kebaruan sedangkan pernyataan dengan score terkecil adalah pada pernyataan mencoba membuat produk yang memiliki manfaat baru. Hal ini mungkin dipengaruhi waktu yang sangat singkat dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga mahasiswa tidak banyak memiliki waktu yang cukup untuk bereksperimen.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SEM (*Structural Equation Model*) model pembelajaran kewirausahaan kreatif berpengaruh secara signifikan terhadap kreatifitas dan inovasi mahasiswa jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada

1. Rektor Universitas Winaya Mukti beserta jajaran nya
2. Ketua LPPM beserta jajaran nya yang telah memberikan bimbingan moril dan teknis sehingga karya tulis ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajaran nya yang telah memberikan dukungan penuh selama kami mengerjakan karya ilmiah ini.
4. Rekan-rekan dosen atas teman diskusi dan masukan-masukannya
5. Mahasiswa dan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto. (2014). Pembelajaran Tematik, Terpadu, Terintegrasi (kurikulum 2013). Yogyakarta: Gava Media
- Drucker, F.P. (2002). The Disciplin of innovation in HRB on The Innovative Enterprise. Boston: Harvard Business School Press.
- Halimah, Leli (2017). Keterampilan Mengajar: Sebagai Inspirasi Untuk Menjadi Guru yang Excellent di Abad ke 21. Bandung : Refika Aditama
- Iqbal, H.M.(2002) Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia
- Munadjat & Harnani, N (2016). Entreneurship Development: 6 Kunci Sukses Menjadi Wirausaha. Bandung: Manggu Makmur Tanjung.
- Piirto, J.(2011). Creativity for 21 st Century Skills: How to Embed Creativity into the Curriculum. Boston: Sense Publishers.
- Rusman (2016). Edisi Kedua Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharyadi.(2007). Kewirausahaan edisi 1 Membangun Usaha Sukses Sejak Muda. Jakarta: Salemba Empat
- Suryana.(2009). Kewirausahaan. Jakarta: Salemba Empat
- Suryana. (2017). Kewirausahaan: Kiat dan Proses menuju sukses. Jakarta : Salemba Empat
- Suryosubroto. (2009). Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Trianto.(2009). Mendesign Model Pembelajaran Inovatif Progresif. Jakarta: Kencana Prenada Group.

HAPPINESS AND WORKING HOURS IN INDONESIA

Bayu Kharisma, Sutyaastie Soemitro Remi, Ferry Hadiyanto, dan Ghefiran Abdurrahimdzan

Faculty of Economics and Business, Department of Economics, Jalan Dipati Ukur No. 35, Indonesia

E-mail: bayu.kharisma@unpad.ac.id;

ABSTRACT. Humans strive to achieve happiness throughout their lives; thus, every activity has the goal of attaining happiness in mind. Happiness is an essential indicator of good livelihood for humans; if people are not happy, then the quality of life will be reduced. This paper aims to analyze the effect of working hours on happiness in Indonesia by using cross-section data sourced from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) wave 5 of 2014. The model is divided into quadratic models and grouped working hours; the methods used in this paper were the ordered logit for the primary model and the ordinary least square for comparison. The results showed that a quadratic pattern of working hours, where initially working hours would increase happiness, but after reaching a certain peak point, the addition of working hours would cause a decrease in happiness. This shows the existence of the Inversed U-Shaped pattern between working hours and happiness.

Key words: happiness; workhours; ordered logit; IFLS

KEBAHAGIAAN DAN JAM KERJA DI INDONESIA

ABSTRAK. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh manusia ialah kebahagiaan. Dengan demikian, setiap kegiatan dilakukan oleh manusia didasari oleh perwujudan dari keinginan untuk memperoleh suatu kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi satu indikator penting bagi kesejahteraan manusia, jika manusia tidak bahagia maka kualitas hidupnya pun akan berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh jam kerja terhadap kebahagiaan di Indonesia dengan menggunakan data *cross-section* yang bersumber dari *Indonesia Family Life Survey* gelombang 5 tahun 2014. Adapun model yang digunakan dibagi menjadi model kuadratik serta model kelompok jam kerja, dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *ordered logit* untuk model utama dan *ordinary least square* untuk pembandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola kuadratik dari jam kerja, dimana pada awalnya jam kerja akan menambah kebahagiaan, tetapi setelah mencapai titik puncak tertentu penambahan jam kerja akan menyebabkan penurunan kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan adanya pola *Inversed U-Shaped* antara jam kerja dan kebahagiaan.

Kata Kunci: kebahagiaan; jam kerja; ordered logit; IFLS

INTRODUCTION

Happiness is subjective to each individual. Happiness is a positive feeling felt by an individual from an activity without any element of coercion and a condition and ability to feel emotions (Seligman, 2002). This viewpoint deems that the feelings of each individual are subjective. Supporting views also argue that the definition of happiness is difficult to describe and will differ from each individual, where people will agree with their own goals, but not necessarily agree with the happiness of others (Frey & Stutzer, 2002a). Furthermore, Frey & Stutzer (2002a) explained that because happiness is difficult to explain, happiness can be viewed from another side, namely by a direct explanation from individuals about their happiness. This assumes that everyone has full power in assessing his/her situation.

Individual behavior will not be free from the influence of feelings, including whether the individual is happy or not. Thus, happiness in the economy becomes essential as it enables individuals to understand the behavior of specific individuals or groups, for example, the differences in happiness between people of low-income and high-income, between senior citizens and young people, or between men and women. All these differences

will affect the behavior of each group, which makes for a rather interesting point of discussion for economics.

The approach used to analyze happiness is commonly called Subjective Well-being (Graham, 2014). The analysis of happiness from the economic side combines approaches from economics and psychology. The theory is based on economic theory, where the individual will maximize utility.

Over the last decades, alternative economic measurements have begun to emerge, such as the Measure of Economic Welfare (MEW), Physical Quality of Life Index (PQLI), Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Human Development Index (HDI) and others. Some of the indexes include indicators of happiness, with the Happiness Index being the primary concern.

The United Nations (UN) started the use of the Happiness Index in 2011 and spread to various countries in Europe and other continents. The happiness Index formed by the United Nations can be seen from the World Happiness Report. The World Happiness Report is an annual publication from the United Nations through the United Nations Sustainable Development Solutions Network containing happiness ratings from all countries with the data corroborated with the life factors in each country. Several leading indicators become a reference

for the happiness index in the World Happiness Report, namely Income (GDP per Capita), Life Expectancy, Social Support, Freedom, Generosity, and Trust.

The World Happiness Report (2019) shows that globally, countries experience an increase in happiness. Finland became the happiest country in the world, followed by Denmark, Norway, Iceland, and the Netherlands. Meanwhile, the country with the most significant increase in happiness was obtained by Togo, which from 2008 to 2015, had managed to move up 17 places, while Venezuela experienced the biggest decline in happiness. Even though the average country in the world has experienced an increase in the leading indicators of happiness, Indonesia has always experienced a decline in the happiness indicator. The Indonesian happiness index from 2013-2015 to the 2018 publication, on average, always dropped, from 5,314 to 5,192 with continuously declining ranking. Indonesia is only superior in the generosity factor that is ranked second, while in other factors such as perceptions of corruption, life expectancy, social support, freedom of life choices, Indonesia still has a low value.

Several studies mentioned that factors of happiness include demographic and economic factors. Demographic factors that influence happiness include age, education, marital status, and sex of household heads (Frey & Stutzer, 2002b). Meanwhile, the economic factor often used is income. The paradox of income and happiness is highlighted, as previous studies revealed that an increase in income does not always make people happier (Easterlin, 1974). This indicates that income has a deficiency in describing happiness. In addition to income, another variable of economic factors is working hours.

Economics states that the labor supply market will determine the choice of working hours, where individuals are faced with the choice of using the time to work or enjoy their free time. Time used to work is illustrated as the sacrificed time to obtain incentives in the form of wages. Now, work is not always viewed as a burden. Conversely, excessive free time does not always add happiness. Previous studies explained that free time is not always a substitute for working hours; many factors are also at play such as the productivity of the workforce (Cui et al., 2018). In its publication, the Central Statistics Agency in 2019 explained that working hours could have an impact on the health and welfare of the working population, as well as the level of productivity and labor costs of the company.

Figure 1 shows that the majority of the Indonesian population works over 35 hours per week, reaching 67.7%. The highest percentage of the working population in February 2019 is in the group of 40-48 hours per week. In addition, there are still many residents who work more than 49 hours a week reaching 29.49%, categorized as unfit work. (Badan Pusat Statistik 2019a). Pouwels et al.

(2008) also explained that income has a positive effect on happiness, in contrast to working hours, which will cause a decrease in happiness. The number of workers working outside the proper limits and Indonesia's inability to compete in the happiness ranking shows there is an influence of working hours on happiness.

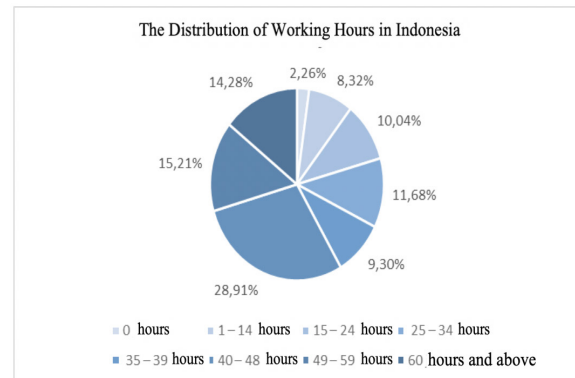


Figure 1. Distribution of Indonesian Working Hours According to Sakernas February 2019

Source : BPS, 2019

Albeit not a primary concern, several studies have discussed the relationship between the variables of happiness and working hours. Existing research in the field of economics aims to analyze the pattern of working hours to happiness. The classical theory views that working hours can cause disutility in work, but recent research has a different view. Pouwels et al. (2008) explained that an increase in income has a positive effect on happiness. Meanwhile, working hours showed a negative effect on happiness but are only significant on men. Knabe & Rätzl (2010) concludes that there is a bias in the relationship of working hours with happiness previously studied by Pouwels et al. (2008), with the addition of dynamic variables resulting in new findings on the relationship of working hours and happiness, showing an inverse U-shape on working hours. Steffen (2012) found that the relationship between working hours and happiness had a positive effect on negative quadratic functions. This shows the existence of a U-shaped inverse relationship, where the addition of working hours will increase happiness to the peak point and then subsequently will reduce happiness. Apart from working hours, happiness is also associated with many other variables, such as age. Therefore, many studies have used measurement tools and references from these studies. Other studies also stated that many economic works of literature had seen a U-shaped relationship between age and happiness (Frijters & Beaton 2012). Blanchflower & Oswald (2009) show that happiness form patterns in a life cycle.

Other empirical results indicate contradictory findings between happiness and working hours; on the one hand, it has a negative effect, but in some cases, it

has a positive effect. Thus, this study aims to investigate the effect of working hours on happiness with cases in Indonesia. This research makes a significant empirical contribution regarding working hours and happiness that has never been done before in Indonesia. This research will prove random data about U-shaped patterns of age and happiness, where age increases, happiness will decrease, and positive quadratic function explains that there is a U-shaped pattern in Indonesia (Blanchflower & Oswald 2009).

METHOD

The data was sourced from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) Wave five. The Indonesian Family Life Survey is an ongoing organization by RAND Corporation since 1993. Strauss et al. (2016) explained that there are not many large scale population-based longitudinal surveys in developing countries, and the IFLS is one of the longitudinal surveys available for Indonesia. IFLS data can be used to understand the behavior of individual households to the community-level.

Until now, IFLS has 5 had (five) survey waves. The first wave had a sample of more than 22,000 individuals and more than 7,000 households held in 1993 (IFLS1).

The second wave was held in 1997 to early 1998 (IFLS2) as well as additional surveys on sub-samples conducted in 1998 to see the impact of the economic crisis (IFLS2+). The next wave was held in 2000 (IFLS3) with a sample of 10,574 households. The fourth wave was carried out in 2007 (IFLS4) with a sample of 13,535 households and 44,103 individuals from 15 provinces. The fifth wave (IFLS5) was conducted at the end of 2014 to early 2015 with a sample of 16,204 households and 50,148 individuals.

This study only used the most recent data wave, IFLS5, which took samples from IFLS1, IFLS2, IFLS2+, IFLS3, and IFLS4. IFLS5 was used as it was the most updated IFLS survey, where the household survey from IFLS5 is a repeat survey of the same previously structured questionnaire. The samples were individuals in the workforce age groups; aged 15 to 65 years.

The dependent variable used in this study was the ordinal happiness variable in book 3A of the SW section. The primary independent variable used the working hours variable obtained in book 3A of section TK, as well as the income derived from book 3A of section TK from main and side jobs. In addition, other variables were used as control variables. Table 1 below is an explanation of the required variable and data source.

Table 1. Description and Explanation of Variables

Variables	Description and Explanation
Happiness	The happiness variable is obtained from section SW in book 3A with the question in sw12: "Considering the current situation, do you/Mr/Br. feel that you/Mr/Br. very happy, happy, not happy, or very unhappy?" With responses from respondents: Very Happy (1); Happy (2); Unhappy (3); Very Unhappy (4). Then the variable is recoded so that the appropriate level becomes: • Category (0) Very unhappy • Category (1) Unhappy • Category (2) Happy • Category (3) Very Happy
Working hours	Work hours variable is obtained from kindergarten section in book 3A with questions on tk21a and tk21b: "How many hours of work for work [...] during the past week (the last week worked)". Working Hours is the allocation of someone to do work. The Central Statistics Agency (2019b) classifies workers into sections. Where people are categorized as working if they carry out economic activities aimed at gaining or making a profit, at least 1 hour (uninterrupted) in the past week.
Income	Income variable is a variable taken from the kindergarten section in book 3A with questions on tk25a and tk25b: "What is the amount of income earned from working during the past month?"
Income of other household members	Income variable is a combined variable of individual income taken from the kindergarten section in book 3A with questions on tk25a and tk25b of all household members, minus the individual income itself.
Age	This variable is a control variable, obtained from K book AR section with ar09 column questions, namely: "age of household member now"
Years of schooling	This variable is a control variable, obtained from the K section AR section namely ar16 and ar17 which were recoded to get the duration of education.
Marital status (Head of household)	This variable is a control variable, obtained from section AR in book K with questions in ar13: "Marital status". With answers from respondents: Not yet married (1); Mating (2); Split (3); Divorced Life (4); Divorced Dead (5); Living with these variables is recoded to become dummy variables, namely: • Category 0 is not married • Category 1 Married
Number of family members	This variable is a control variable, obtained from the sum of family members in the household in Book K.
Home ownership	This variable is a control variable, obtained from book 2 of the KR section with questions on kr 03 namely: "What is the status of this house?" With answers from respondents: Self-owned (1), Occupy (2), Renting / contracting (5), others (95). The variable is recoded to: • Category (0) does not have a house • Category (1) has a house
Gender (Head of household)	This variable is a control variable obtained from the book section K AR which is ar07
Area of residence	This variable is a control variable obtained from K section SC section, namely the sampling information sc05

Source : IFLS 5, 2014

The econometric model used in this study was an ordered logit to estimate the relationship between working hours and happiness. The model is a modification from the previous model (Steffen, 2012) with the following equation.

$$LS_i = \beta_0 + \beta_1 L_i + \beta_2 L_i^2 + \beta_3 W_i + \beta_4 Y_i + \sum \chi_m \gamma_{m,i} + \varepsilon_i \quad (1)$$

where LS is life satisfaction, L is working hours, w is individual income, y is the income of other household members, χ is an individual characteristic, γ is a household characteristic, and ε_i is the error term.

In this research, a Likelihood Ratio (LR) Test was performed to see whether the entire independent variable directly influenced the dependent variable, by analyzing the value of $\text{prob} > \chi^2_{22}$ obtained from the estimation results in the Stata software. Testing was done to determine whether the information from the sample data supports the hypothesized proportion. The Likelihood Ratio test has the same concept as the F test in the linear model. (Wooldridge, 2002). Furthermore, a goodness of fit in the regression may show how the model explains the effect compared to the explanation outside the model. Generally, in regression, Goodness of fit is seen in R^2 and also adjusted R^2 , but in the regression model of Ordered Probit and Ordered Logit, the results of Goodness of Fit can be seen from pseudo R^2 . (Wooldridge, 2002). Finally, z-statistical tests can be done to observe the significance of each independent variable on the dependent variable. The test can be done with the two-parties test, namely:

$H_0: \beta_\chi = 0$ (independent variable χ has no significant effect on the dependent variable)

$H_0: \beta_\chi \neq 0$ (independent variable χ has a significant effect on the dependent variable)

RESULTS AND DISCUSSION

Table 2 shows that the average monthly income is Rp 1,790,000; corroborating that it is below the minimum monthly wage (UMR) of most regions in Indonesia. The average age of respondents is 35 years old, categorized in the productive age. Meanwhile, the length of schooling is ten years, which means that the average observation of households has a junior high school (SMP) education. The average number of family members is 6 (six), which indicates, on average, the observed household has four other family members besides a spouse, such as a child or other family member. Homeownership of the observed sample shows that 70 percent of households have sole ownership. The marital status of observed household heads is mostly married. The average sex of the observed

head of the household is male. The observation data also showed that the primary residential areas are urban areas. Meanwhile, the dependent variable used in this research is ordinal happiness with a very unhappy, unhappy, happy, and very happy level.

Table 2. Summary of statistics

Variable	Obs	Mean
Happiness	12360	2,049
Working hours	12360	42,344
Income	12360	1.790.000
Income of other household members	12360	1.160.000
Age	12360	35,244
Years of schooling (years)	12360	10,012
Number of household members	12360	6,011
House ownership (1 = owning a home)	12360	0,700
Status head of household (1 = married)	12360	0,853
Gender head of household (1 = female)	12360	0,117
Area of residence (1 = rural)	12360	0,341

Source : IFLS 5

Table 3. Distribution of Happiness Variables

Kategori	Obs	Percentage
Very unhappy	127	1.03
Unhappy	850	6.88
Happy	9678	78.30
Very happy	1705	13.79

Source : Own Calculation

Table 3 shows that the majority of the respondents were happy with 78.30%, with the least number in the very unhappy category with 1.03%. This explains that the majority of respondents still feel happy, and respondents who feel unhappy and very unhappy are still below 10%.

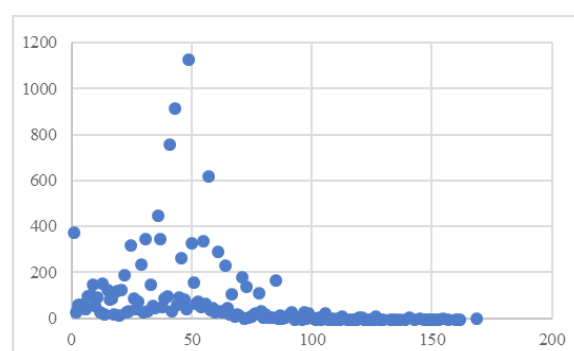


Figure 1 Variable Distribution of Working Hours

Source: Own Calculation

Figure 1 explains the distribution of working hours per week. The distribution shows the normal distribution leaning to the left with a peak where 9.18% of respondents have 48 hours of work week. This shows that the majority of respondents have working hours above the normal working hours limit. Meanwhile, Figure 2 shows the distribution of income.

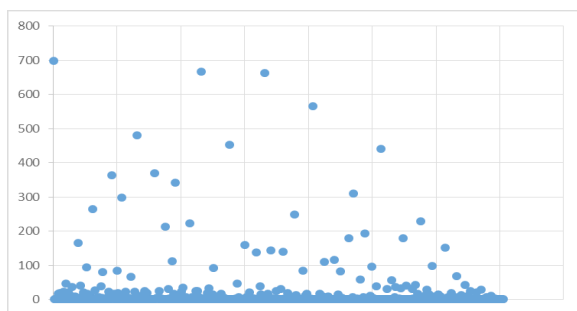


Figure 2 Distribution of Income Variables

Source: Own Calculation

In addition to the results of ordered logit coefficients, marginal effects were used to predict the effect of change. The dependent variable used is happiness. The main independent variables of regression are working hours and income. In the initial model, the working hours variable also adds the quadratic variable. In addition to the initial model, a comparative model was used wherein the working hours are divided into 5 (five) groups. Income variable uses individual income and income of other household members; both variables were converted into logarithmic form.

Table 4. Regression Results

Dependent Variables	Dependent Variabel: Happiness					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	OLS	Ordered Logit	OLS	Ordered Logit	OLS	OLS
Working hours	0.0018*** (0.0005)	0.0075*** (0.0025)	0.0019** (0.0005)	0.0046* (0.0026)		
Working hours ²	-0.00002*** (0.0000)	-0.0001*** (0.0000)	-0.00001 (0.0000)	-0.00003 (0.0000)		
Working hours (28-48 hours per week)					0.0293*** (0.0111)	0.0102 (0.0109)
Working hours (48-70 hours per week)					0.0320*** (0.0119)	0.0317*** (0.0117)
Working hours (70-91 hours per week)					-0.0009 (0.0167)	0.0110 (0.0166)
Working hours (>91 hours per week)					0.0078 (0.0278)	0.0199 (0.0271)
Income (log)	0.0097*** (0.0015)	0.0460*** (0.0073)	0.0057*** (0.0015)	0.0273*** (0.0074)	0.0099*** (0.0015)	0.006*** (0.0015)
Income of other household members (log)	0.0027*** (0.0006)	0.0135*** (0.0031)	0.0019*** (0.0006)	0.0088*** (0.0032)	0.0027*** (0.0006)	0.0018*** (0.0006)
Age			-0.0038*** (0.0004)	-0.0196*** (0.0021)		-0.0038*** (0.0004)
Years of schooling (years)			0.0169*** (0.0012)	0.0836*** (0.0059)		0.0172*** (0.0012)
Number of household members			-0.0017 (0.0015)	-0.0051 (0.0077)		-0.0017 (0.0015)
House ownership (1 = owning a home)			0.0272*** (0.0103)	0.125** (0.0519)		0.0270*** (0.0103)
Status head of household (1 = married)			0.119*** (0.0172)	0.617*** (0.0882)		0.118*** (0.0171)
Gender head of household (1 = Female)			0.0079 (0.0190)	0.0414 (0.0962)		0.0072 (0.0189)
Area of residence (1 = Rural)			-0.0160* (0.0097)	-0.0952* (0.0488)		-0.0163* (0.0097)
Constant cut1		-3.715*** (0.140)		-3.473*** (0.192)		
Constant cut2		-1.597*** (0.110)		-1.319*** (0.172)		
Constant cut3		2.725*** (0.114)		3.189*** (0.176)		
Constant	1.859*** (0.0230)		1.790*** (0.0342)		1.877*** (0.0215)	1.799*** (0.0332)
Observations	12,360	12,360	12,360	12,360	12,360	12,360
R-squared	0.008		0.0471		0.0079	0.0472
Prob>F	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000
Pseudo R ²		0.0052		0.0332		
Wald Chi ²		77.58		486.71		
Prob>Chi ²		0.0000		0.0000		

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

The estimation results were divided into several models where the regression was divided into two groups. The first group analyzes the influence of the main variables namely working hours and income. The second group adds control variables. The regression results were divided into 6 (six) models shown in Table 4 below.

Table 4 above shows the positive effect of increased weekly working hours with happiness. Furthermore, in the quadratic model, the square variable of working hours has a negative coefficient. This indicates that an increase in working hours will initially increase happiness with a defined peak point; however, after reaching the peak point, the addition of working hours will negatively affect happiness. This is in accordance with previous studies like Steffen (2012) and also Knabe & Rätzel (2010) which mentions the Inversed U-Shaped pattern between working hours and happiness.

All models illustrate the significance of the income variable; there is a positive influence of income with happiness. Previous studies from Pouwels et al. (2008) stated that individual income and the income of both partners would have a positive influence on happiness. Knabe & Rätzel (2010) also showed that income has a positive effect on happiness. Models (3), (4), and (6) adds the control variables to identify the pattern of creating happiness apart from the main variable. All models with control variables show a significance level of

99%. This shows that the effect of age on happiness is positive with negative squares; happiness will initially increase with age and have a peak point, but after reaching the peak point, happiness will decrease. This finding is supported by previous studies (Blanchflower & Oswald, 2009; Frijters & Beaton, 2012; Bonsang & Klein, 2012). Length of schooling showed a positive effect on happiness with a significance level of 99%. The results of this finding are consistent with previous research (Clark & Oswald, 2006; Indrasari, 2019; Amanah et al, 2015). Clark & Oswald (2006) explained that a person's likelihood of being unhappy would decrease when a person has a higher level of education. In addition, the variable of homeownership and marital status of household heads has a positive effect as the leading reference research of the model. The area of the residential area, the rural area, cause a decrease in happiness. Some control variables such as the number of children, number of household members, and sex of the head of the household are not significant in some models.

In the ordered probit and ordered logit models, the coefficient on the variable needs to calculate its marginal effect to predict the magnitude of the effect of changes in the dependent variable based on a specific scale of the independent variable. Furthermore, the interpretation of the ordered logit model can be seen from the marginal effect described in Table 5 as follows.

Table 5. Marginal Effects of the Ordered Logit Model

Dependent Variables	Dependent Variable: Happiness				
	Coefficient	Marginal Effect			
		Very Unhappy	Unhappy	Happy	Very Happy
Working hours	0.0046* (0.0026)	-0.00004* (0.00002)	-0.0003* (0.0002)	-0.0002* (0.0001)	0.0005* (0.0003)
Working hours ²	-0.00003 (0.0000)	0.0000003 (0.0000)	0.000002 (0.0000)	0.000001 (0.0000)	- 0.000003 (0.0000)
Income (log)	0.0273*** (0.0074)	-0.0002*** (0.0000)	-0.0016*** (0.0004)	-0.0012*** (0.0003)	0.0030*** (0.0008)
Income of other household members (log)	0.0088*** (0.0032)	-0.0001*** (0.0000)	-0.0005*** (0.0002)	-0.0004*** (0.0001)	0.001*** (0.0004)
Age	-0.0196*** (0.0021)	0.0002*** (0.0000)	0.0011*** (0.0001)	0.0009*** (0.0001)	-0.0022*** (0.0002)
Years of schooling (years)	0.0836*** (0.0059)	-0.0007*** (0.0001)	-0.0048*** (0.0004)	-0.0037*** (0.0003)	0.0092*** (0.0006)
Number of household members	-0.0051 (0.0077)	0.0001 (0.0001)	0.0003 (0.0004)	0.0002 (0.0003)	-0.0006 (0.0008)
House ownership (1 = owning a home)	0.125** (0.0519)	-0.0011** (0.0005)	-0.0073** (0.0031)	-0.0051*** (0.0019)	0.0135** (0.0055)
Status head of household (1 = married)	0.617*** (0.0882)	-0.0068*** (0.0013)	-0.0426*** (0.0073)	-0.0084*** (0.0024)	0.0578*** (0.0069)
Gender head of household (1 = Female)	0.0414 (0.0962)	-0.0004 (0.0008)	-0.0023 (0.0054)	-0.0019 (0.0047)	0.0046 (0.0108)
Area of residence (1 = Rural)	-0.0952* (0.0488)	0.0008* (0.0004)	0.0055* (0.0029)	0.004** (0.002)	-0.0104** (0.0053)
Constant cut1	-3.473*** (0.192)				
Constant cut2	-1.319*** (0.172)				
Constant cut3	3.189*** (0.176)				

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

A Likelihood Ratio (LR) testing was done to determine whether the hypothesized proportion is supported by information from the sample data. Likelihood Ratio testing has the same concept as the F test in the linear model. The regression results above show that $\text{prob} > \chi^2$ is worth 0,000 which is less than 1%. Therefore, there is at least one independent variable that is statistically significant in influencing the dependent variable. The goodness of fit explains the effects compared to explanations outside the model. The goodness of fit in the logit model can be seen from Pseudo R^2 . In the primary model, the regression results obtained a Pseudo R^2 value of 0.0332. Thus, the independent variable in the model can explain the varying results of the independent variable by 3.32%, and other variables outside the model explain the rest.

Estimation results show that the primary variable, namely working hours, has a positive influence on happiness with a significance level of 90%. The marginal effect explains that if the individual's weekly working hours increase by one hour, then the likelihood of feeling "very unhappy" will decrease by 0.004 percentage point, then the likelihood of feeling "unhappy" will decrease by 0.03 percentage point, whereas the likelihood of individuals feeling "happy" will decrease by 0.02 percentage points, while the likelihood of feeling "very happy" will increase by 0.05 percentage points. According to the main model, the breaking point can be obtained, with manual calculations determining that the peak point of working hours that can increase happiness is 77 weekly working hours or about 11 hours per day. After that, the addition of working hours will cause happiness to decrease.

Income has a positive influence, with a significance level of 99%. The findings are the same as the income of other household members which is a logarithmic income from the total income of other household members in Rupiah. The estimation results show that the income of other household members has a positive influence with a significance level of 99%. In addition to the main variables, several variables have a statistically significant effect on happiness. Age has a positive coefficient with a negative square value. This explains that increasing age will initially increase happiness, but after going through a peak point, it will decrease. The marginal effect also explained that AN 1-year increase in age would cause the likelihood to be "very unhappy," "unhappy," "happy" with the economic effect being "unhappy" of 0.11 percentage points, while the likelihood of "very happy" decreasing by 0.22 percentage points. Length of school is different from age, the effect of school length has a positive effect, where the addition of one year of school will cause the likelihood of "very unhappy," unhappy, "and "happiness" in a negative way with the greatest effect being the likelihood of "unhappiness" which decreases by 0.48 percentage

points, while the likelihood of "very happy" increasing by 0.92 percentage points.

The number of family members explained that the addition of one family member has a likelihood of making "very unhappy," unhappy, "and "happy" in a negative way, with the greatest effect being the likelihood of "unhappy" increasing by 0.03 percentage points, while the likelihood of "very happy" will decrease by 0.06 percentage points. Homeownership status in households causes the likelihood of "very unhappy," "unhappy," and "happy" in a negative way, with the greatest effect being the likelihood of "unhappy" increasing by 0.73 percentage points, while the likelihood of "very happy" increasing by 1.35 percentage points compared to families who do not have a home.

The marital status between married and non-married head of the household shows that married head of households may have a likelihood of "very unhappy," "unhappy," and "happy" in a negative way, with the greatest effect being the likelihood of "unhappy" decreasing by 4.26 percentage points, while the likelihood of "very happy" increasing by 5.78 percentage points. Meanwhile, the residential area explained that individuals who have lived in rural areas compared to urban areas will have a likelihood of being "very unhappy," "unhappy," and "happy" in a positive way, with the greatest effect being the likelihood of "unhappy" increasing by 0.55 percentage point, while the likelihood of "very happy" will decrease by 1.04 percentage points.

CONCLUSION

The study concludes several things regarding working hours and happiness. The findings are consistent with previous studies, which confirmed that the number of working hours has an inverse U-shaped effect. In this case, working hours will initially increase happiness as long as it does not pass the peak point; once it passes the peak point, happiness will decrease. Other factors influencing happiness include several economic variables and individual and household criteria. Research regarding happiness correlates happiness and income; this study shows the relationship between individual income and income of other household members to happiness. In addition, individual characteristics such as age, length of schooling have a statistically significant effect on happiness. Finally, household characteristics such as the number of household members, homeownership, marital status of the head of the household, residential area of the household have a statistically significant effect on happiness.

REFERENCES

- Amanah. (2015), Kemampuan Perempuan Tani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Sosiohumaniora*, 17, (3), 229-235. DOI: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8340>
- Badan Pusat Statistik, (2019a). Indikator data tenaga kerja februari 2019. Diakses pada: <http://www.bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik, (2019b). Tenaga Kerja. Diakses pada: <http://www.bps.go.id/> ; Diakses 30 juni 2019
- Blanchflower, D.G. & Oswald, A.J., (2009). The U-shape without controls: A response to Glenn. *Social Science and Medicine*, 69, (4), 486–488. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.05.022>.
- Bonsang, E. & Klein, T.J. (2012). Retirement and subjective well-being. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 83, (3), pp.311–329. Diakses pada: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2012.06.002>.
- Clark, A.E. & Oswald, A.J. (2006). Unhappiness and Unemployment. *The Economic Journal*, 104, (424), 648.
- Cui, D. (2018). Leisure time and labor productivity : a new economic view rooted from sociological perspective.
- Easterlin, R.A. (1974). *Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence*, ACADEMIC PRESS, INC. Diakses pada: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-205050-3.50008-7>.
- Frey, B.S. & Stutzer, A. (2002a). *Happiness and Economics*, Oxford: Princeton University Press.
- Frey, B.S. & Stutzer, A., (2002). The Economics of Happiness. , 3(1), pp.1–17.
- Frijters, P. & Beaton, T. (2012). The mystery of the U-shaped relationship between happiness and age. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 82, (2-3), 525–542. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2012.03.008>.
- Graham, C.L., (2014). *Subjective Well-Being in Economics*, Oxford: Oxford University Press. Diakses pada: https://www.researchgate.net/publication/305637130_Subjective_Well-Being_in_Economics.
- Indrasari, D.P.R. (2019). Anak Bekerja di Indonesia: Bukti Empiris Terhadap Wealth Paradox. *Sosiohumaniora*, 21, (2), 122-129. Doi : <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.12101>
- Knabe, A. & Rätzel, S. (2010). Income , happiness , and the disutility of labour. *Economics Letters*, 107, (1), 77–79. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2009.12.032>.
- Pouwels, B., Siegers, J. & Dirk, J. (2008). Income , working hours , and happiness. *Economics Letters*, 99, 72–74.
- Seligman, M., (2002). *Authentic happiness : using the new positive psychology to realize your potential for lasting*, New York: The Free Press.
- Steffen, R. (2012). Labour Supply , Life Satisfaction , and the (Dis) Utility of Work. *Scandinavian Journals of Economics*, 114, (4), 1160–1181.
- Strauss, J., Witoelar, F. & Sikoki, B. (2016). The Fifth Wave of the Indonesia Family Life Survey: Overview and Field Report: Volume 1. *The Fifth Wave of the Indonesia Family Life Survey: Overview and Field Report: Volume 1*, 1 (March).
- World Happiness Report, (2019). World Happiness Report 2019.
- Wooldridge, J. (2002). *Introductory Econometrics A Modern Approach*, South-Western College Pub.

KEBIJAKAN KEAMANAN PANGAN INDONESIA: ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR SAPI DAN DAGING SAPI DARI AUSTRALIA PERIODE 2013-2017

Abdal¹, Dan Ismail²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: abdal@uinsgd.ac.id ; ismailnurdin@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Terjaminnya kebutuhan pangan dalam negeri merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, jika pasokan pangan domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, maka langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan kebijakan impor pangan, salah satunya impor sapi dan daging sapi dari Australia. Riset ini diarahkan untuk melakukan kajian terhadap kebijakan keamanan pangan Indonesia. Kebijakan ini khususnya terkait dengan impor sapi dan daging sapi dari Australia pada periode 2013-2017. Pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dipilih untuk riset ini. Kebijakan impor sapi dan daging sapi dari Australia bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tiga variabel keamanan pangan di Indonesia, yaitu ketersediaan pangan; keterjangkauan akses pangan; keterjangkauan harga; dan juga aspek politik.

Kata kunci: analisis kebijakan; keamanan pangan; kebijakan impor; sapi; daging sapi.

INDONESIAN FOOD SECURITY POLICY: ANALYSIS OF CATTLE AND BEEF IMPORT POLICY FROM AUSTRALIA 2013-2017 PERIOD

ABSTRACT. *Guaranteed domestic food needs is a government obligation mandated by the constitution. Therefore, if the domestic food supply is not able to meet national food needs, then the steps that can be taken by the government is to conduct a policy of food imports, one of which is the import of cattle and beef from Australia. This research is directed to conduct a study of Indonesia's food security policy. This policy is specifically related to cattle and beef imports from Australia in the 2013-2017 period. A qualitative approach and data collection using documentation studies were selected for this research. The policy to import cattle and beef from Australia aims to ensure the fulfillment of three food safety variables in Indonesia, namely food availability; affordability of food access; affordability of prices; and also the political aspect.*

Key words: *policy analysis; food security; import policy; cattle; beef.*

PENDAHULUAN

Kebijakan ketahanan pangan mencakup dua hal penting, yaitu implementasi program pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas serta kenyamanan bagi masyarakat dalam memperolehnya dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan telah lama menjadi instrumen kebijakan publik dan bagian yang tidak terpisahkan dari diplomasi luar negeri suatu negara (Petranto 2011). Mubyarto (2002), menyatakan bahwa sektor pertanian, termasuk beras di Indonesia, bukan semata-mata masalah ilmiah. Ini berarti produksi beras tidak hanya melibatkan masalah reproduksi dan ekonomi, tetapi juga masalah politik dan sosial.

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) (2002) *food security* adalah situasi yang ada ketika semua orang, setiap saat, mempunyai jangkauan fisik, sosial dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan makanan mereka dan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat untuk hidup yang aktif dan sehat. Menurut Maxwell (1996), ketahanan pangan melibatkan akses, kecukupan, kerentanan, dan keberlanjutan. Ketahanan pangan sebagai masalah internasional membutuhkan indikator global. Indikator yang sesuai untuk ketahanan pangan global

harus dapat diandalkan, dapat diulang, dan tersedia untuk sebagian besar negara di dunia. Namun, tidak ada kesepakatan tentang apa yang optimal untuk ketahanan pangan (Berry, dkk., 2015). KTT Pangan Dunia tahun 2002 mendeklarasikan ketahanan pangan dengan empat bagian penting yaitu, 1) Ketersediaan Pangan. 2) Keterjangkauan Pangan. 3) Penggunaan pangan dan 4) Stabilitas pangan.

Meskipun pendekatan ketahanan pangan yang ideal harus mengkompromikan empat bagian penting, prioritas dan bagian utama dari pendekatan ini adalah ketersediaan pangan. Kriteria ketersediaan pangan harus dapat diakses dan diberikan oleh konsumen bahkan jika harus diimpor dari negara lain lebih penting daripada pertimbangan lain seperti upaya memenuhi pasar nasional dengan produk nasional (Soesilowati 2016).

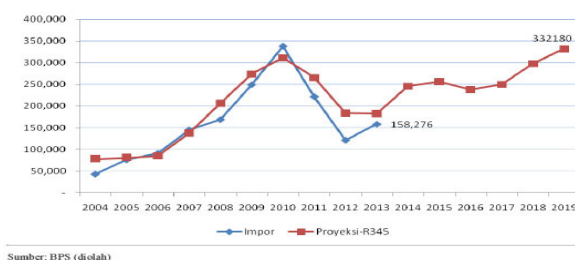
Daging sapi masih dianggap sebagai jenis makanan mewah bagi sebagian orang di Indonesia. Seiring meningkatnya kelas sosial ekonomi, permintaan akan daging sapi juga meningkat. Di Indonesia, tingginya permintaan daging sapi tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas ternak dengan menggunakan teknologi mutakhir dan manajemen pemeliharaan sapi yang baik (Yusdja, dkk. 2004), serta tidak ada kebijakan pelarangan penyembelihan sapi produktif dan tidak meningkatkan angka kelahiran melalui pencegahan penyakit reproduksi

(Sudardjat 2003). Hal ini mengakibatkan, menurunnya populasi sapi, sehingga harganya terus meningkat. Selain itu, peternak sapi di negara berkembang harus mampu mencegah sapi mereka terhadap penyakit mulut dan kaki atau PMK (Lubroth 2013).

Ketersediaan daging sapi, baik lokal maupun impor, terkait erat dengan ketahanan pangan suatu Negara. Ketersediaan daging sapi di Indonesia sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai, dan lain-lain yang sulit dipisahkan dari politik (Pambagio 2011). Daging sapi merupakan pilihan favorit bagi masyarakat Indonesia karena dianggap membuat kecukupan gizi protein tinggi karena setiap daging memiliki kandungan gizi yang berbeda (Ana, 2011).

Kebijakan pemerintah mengenai impor daging atau ternak adalah implementasi dari salah satu kebijakan dalam paket ekonomi jilid IX, yaitu kebijakan pasokan ternak dan atau produk hewan tertentu (Bapennas 2017). Implementasi impor daging sapi dari pedagang pengeksport dalam bentuk sapi hidup dan daging beku dilakukan dengan persyaratan wajib bebas penyakit tertentu, pertimbangan jarak antara negara pengeksport dan importir relatif dekat sehingga daging segar dengan masa hidup lebih lama dan Kebijakan ekonomi negara pengeksport yang bersedia membantu bisnis peternak sapi di Indonesia adalah dalam bentuk alih teknologi dan manajemen sehingga ada nilai tambah bagi peternak sapi di Indonesia.

Negara produsen, khususnya Australia, telah memenuhi tawaran ini. Impor daging sapi mewakili 46% dari konsumsi daging. Perkiraan impor adalah sektor-sektor dengan partisipasi tertinggi, 53 persen daging beku, 43 persen janggut dan total 100 persen. Gambar 1 menunjukkan bahwa impor daging beku terus meningkat hingga 2019. Jika upaya meningkatkan produksi dalam negeri seperti 10 tahun terakhir diprediksi, pada 2019, impor daging beku akan meningkat menjadi 332 ributton dari 2013, yaitu hanya 158 ribu ton atau 110 persen lebih banyak. Pada 2010, impor daging dalam jumlah besar mencapai 338 ribu ton.



Gambar 1. Perkembangan dan Proyeksi Impor Daging Sapi Beku periode 2014-2019

Indonesia adalah importir bersih produk ternak dan ternak. Sapi impor terutama sapi untuk penggemukan

dalam negeri oleh tempat pemberian pakan yang telah dirintis sejak 1990-an. Selain itu, impor sapi potong untuk pengembangbiakan induk sapi. Berdasarkan aspek kesehatan hewan, sapi dari Australia terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dibandingkan dengan sapi dari negara lainnya. Indonesia adalah pasar potensial bagi Australia untuk mengeksport sapi indukan, yaitu 63% selama 9 tahun terakhir. Volume impor rata-rata mencapai 433,7 ribu per tahun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8,3% per tahun (Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan Volume Impor Daging Sapi Indonesia dari Australia periode 2005-2013

Tahun	Impor Indonesia (ekor)	Impor Australia (ekor)	Pangsa Impor Indonesia (%)
2005	347697	572799	61
2006	386566	634314	61
2007	516992	719462	72
2008	644849	868510	74
2009	772868	954143	81
2010	521002	874916	60
2011	413726	694796	60
2012	278767	619418	45
2013	454152	850923	53
R (% Year)	8.3	6.5	-
Mean	433690	678929	63

Sumber: MLA (2010 dan 2013)

Volume impor daging sapi Indonesia pada periode 2005-2009 terus mengalami peningkatan. Indonesia pernah menghentikan impor sapi dan daging sapi dari Australia pada Juni 2010 karena masalah kesehatan hewan. Selain itu, adanya program PSDSK pada tahun 2014 menyebabkan volume impor sapi dan daging sapi terus menurun hingga 2012. Sebaliknya, kenaikan harga daging sapi pada Lebaran 2013, menyebabkan volume impor meningkat lagi pada tahun 2013. Jelas bahwa peningkatan volume impor Indonesia berkorelasi dengan peningkatan ekspor sapi dan daging sapi Australia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan impor memengaruhi ketahanan pangan di suatu negara (Rusastra et al. 2008).

Kegiatan impor besar tentu membuka peluang bagi importir untuk mendapatkan keuntungan. Namun, praktik mengimpor sapi diatur secara ketat dalam bentuk pengawasan setiap kegiatan impor sapi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 14 tahun 2014. Praktik bermain harga daging sapi yang cenderung mahal pada pasar oleh importir dan spekulasi dengan mengambil keuntungan maksimal masih sering terjadi. Perjanjian curang antara sejumlah politisi Senayan dan bisnis impor ternak menafsirkan hubungan antara impor daging sapi dan isu-isu politik mungkin.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dalam bentuk kebijakan terkait dengan ketahanan pangan Indonesia dalam hal impor daging sapi dan sapi, data statistik yang berkaitan dengan kebutuhan sapi dan daging sapi di Indonesia dan volume impor daging sapi dan sapi Australia pada tahun 2013-2017. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan kategori atau pengkodean dan menggunakan kuasi-statistik untuk menganalisis tabel statistik yang diperoleh peneliti, serta uji validitas data yang dilakukan dengan triangulasi.

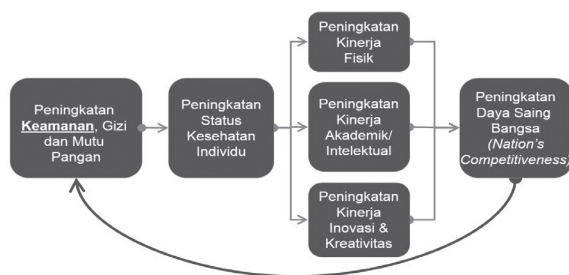
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Indonesia tentang keamanan pangan

Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemenuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat yang berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan adalah tantangan serius bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah geografis dan regional yang sangat besar. Secara umum, potensi sumber pangan yang dimiliki oleh Indonesia cukup banyak, yaitu ada 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayur-sayuran, 110 jenis rempah-rempah dan rempah-rempah, 40 jenis bahan minuman, serta 1.260 jenis tanaman obat. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut dengan keanekaragaman hayati yang meliputi gen, spesies tanaman, hewan dan mikroorganisme, serta ekosistem dengan proses ekologis dari bentuk-bentuk kehidupan yang menjadi bagian darinya (Nugrayasa 2015).

Penting dan strategis untuk dapat direalisasikan oleh semua elemen masyarakat Indonesia, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, bergizi, beragam, dan merata di seluruh Indonesia dan terjangkau oleh masyarakat beli listrik. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Keamanan dan kualitas pangan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan jaminan kualitas terkait erat dengan peningkatan daya saing bangsa. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang



Gambar 2. Peningkatan keamanan pangan dan jaminan kualitas akan mengarah pada peningkatan daya saing bangsa (Hariyadi 2015).

tinggi, sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapat prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Sebuah pernyataan dari informan direktur makanan Departemen Pertanian menyatakan: “Ketahanan pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan dengan empat dimensi, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Makanan yang aman, berkualitas, bergizi, berkontribusi signifikan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat”.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional Indonesia harus mengandalkan sumber daya pangan lokal yang memiliki keragaman antar daerah dan harus dihindari ketergantungan pada produksi dan cadangan pangan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri, maka makanan tambahan diperlukan dalam bentuk impor pangan atau bantuan makanan dari luar negeri. Kondisi obyektif ketahanan pangan nasional belum mencapai tingkat yang diinginkan. Pengelolaan hasil komoditas pangan belum dimaksimalkan sehingga kondisi ketahanan pangan nasional tetap rapuh (Nunzio 2013). Mengacu pada penilaian para pakar ekonomi yang menjadi anggota forum Economic Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2014, bahwa indeks ketahanan pangan global (IKP) Indonesia berada di peringkat ke-64, urutannya masih di belakang Malaysia (33), kemudian China (38), Thailand (45), Vietnam (55) dan Filipina (63).

Ketahanan pangan juga dapat diimplementasikan melalui kerja sama internasional dalam membina persahabatan antar negara melalui bantuan pangan dan transfer teknologi pemrosesan makanan dari negara-negara yang swasembada pangan ke negara-negara yang defisit atau bahkan tidak aman pangan. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama internasional untuk menjalin hubungan dengan negara lain untuk mengatasi masalah pangan secara global. Oleh karena itu, bentuk kerja sama internasional mengenai kebijakan ketahanan pangan ini juga harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dimana salah satu bentuk kerjasama disebutkan dalam bidang perdagangan internasional yang tentunya berkaitan dengan impor dan ekspor pangan.

Keberadaan pernyataan ini dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 2002 menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengimpor sapi dan sapi dari Australia dalam upaya memenuhi ketahanan pangan Indonesia.

Indikator penting dari kebijakan keamanan pangan adalah bahwa keamanan pangan dan pengendalian kualitas telah menjadi perhatian global, mengingat bahwa makanan, terutama makanan segar, adalah produk yang memiliki karakteristik tahan lama karena kontaminasi oleh kontaminasi kimia, fisik, dan mikrobiologis. Keamanan pangan tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari makanan itu sendiri.

Keamanan pangan telah menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam perdagangan nasional dan internasional karena dukungan lembaga pengawas keamanan pangan memiliki peran penting dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang aman untuk konsumsi publik. Di Indonesia, kebijakan keamanan pangan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. UU tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi ketahanan pangan di setiap rantai makanan. Menumbuhkan keamanan pangan di setiap rantai makanan adalah tanggung jawab lembaga pengembangan untuk bisnis makanan, misalnya, ketahanan pangan di tingkat budidaya adalah tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengawasan keamanan pangan dilakukan oleh berbagai lembaga berdasarkan jenis makanan. Untuk makanan olahan, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, sedangkan untuk makanan segar, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang melakukan urusan pemerintahan di Sektor Makanan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang salah satunya mengatur keamanan pangan segar adalah salah satu tugas Badan Keamanan Pangan (BKP). BKP dalam menjalankan fungsi mengawasi keamanan makanan segar.

Aspek Ketersediaan Pangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan cenderung mengalami peningkatan tidak hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya tetapi hampir merata di berbagai daerah. Perkembangan positif dalam bisnis perkebunan dan pertambangan telah terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Industri pariwisata yang telah berpusat di Bali telah berkembang menjadi NTB dan beberapa daerah lain sebagai tujuan baru. Kondisi ini membutuhkan pasokan bahan makanan berkualitas seperti daging sapi.

Tingginya permintaan daging sapi tampaknya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pasokan

produksi lokal. Ini ditunjukkan oleh kenaikan harga daging sapi dan menipisnya populasi sapi. Oleh karena itu, sebagian dari pasokan dipasok oleh produk impor. Kondisi seperti itu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi daging sapi lokal. Potensi pasar sebenarnya telah direspon oleh masyarakat yang didukung oleh program pemerintah, seperti program PSDSK 2014. Program-program yang berasal dari Pemerintah Pusat direspon oleh beberapa Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sapi potong yang didukung oleh dana APBD, seperti Aceh, Riau, dan NTB. Dampak pusat produksi sapi potong tidak hanya terkonsentrasi di daerah konvensional di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan NTB, dan NTT. Tetapi sudah mulai berkembang menjadi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, dan daerah lain dengan mengintegrasikannya ke dalam bisnis perkebunan kelapa sawit dalam bentuk bisnis ternak kelapa sawit terintegrasi. Pola integrasi ini dianggap sangat prospektif karena potensi bahan baku pakan cukup besar yang dapat mengurangi biaya pakan sehingga daya saing bisnis meningkat dan mendorong munculnya bisnis baru oleh peternak, peternak individual, perusahaan peternak, perusahaan perkebunan dan perkebunan kelapa sawit PTPN.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian populasi sapi dan kerbau sebagian berada di Pulau Jawa. Data dari kerangka dua kali (2011 dan 2013) menunjukkan bahwa populasi sapi dan kerbau tetap terkonsentrasi di Jawa, tetapi ada sedikit perubahan arah. Bagian populasi sapi di Jawa dan Bali menurun sebesar 4,8% dan 0,4%. Sementara di daerah lain meningkat. Indikasi ini menunjukkan bahwa di masa depan pengembangan pusat produksi ternak dapat diarahkan ke luar Jawa, terutama dengan mengembangkan pola integrasi antara kelapa sawit dan ternak.

Tabel 2. Distribusi Populasi Sapi dan Kerbau Menurut Survei 2011 dan Hasil Sensus 2013

No	Daerah	2011	2013	Ekor	(%)
1	Sumatera	3,239.7 (19.4)	2,893.7 (20.4)	-346.0	-10.7
2	Java	8,467.9 (50.6)	6,493.7 (45.8)	-1,974.2	-23.3
3	Bali	639.8 (3.8)	478.7 (3.4)	-161.1	-25.2
4	NTB	791.2 (4.7)	726.9 (5.1)	-64.3	-8.1
5	NTT	928.7 (5.6)	929.3 (6.6)	0.6	0.1
6	Kalimantan	479.2 (2.8)	439.1 (3.1)	-40.1	-8.4
7	Sulawesi	1,902.4 (11.4)	1,921.6 (13.6)	19.2	1.0
8	Maluku & Papua	277.7 (1.7)	285.3 (2.0)	7.6	2.7
	Nasional	16,726.6 (100.0)	14,16.3 (100.0)	-2,55.3	-15.3

Sumber: BPS (2011 dan 2013)

Aspek infrastruktur pasar ternak telah didukung oleh jaringan pasar mulai dari pusat produksi hingga pusat konsumsi. Jaringan pasar dimulai dari perdagangan sapi di tingkat peternak, pedagang desa atau kecamatan, pedagang antar kabupaten, dan pedagang antar provinsi atau pedagang antar pulau. Beberapa infrastruktur yang tersedia adalah tanah penahan, pasar hewan, rumah jagal, cold storage, karantina, pelabuhan, moda transportasi darat dan laut. Bahkan di Jawa Tengah dan Riau tersedia fasilitas istirahat selama kegiatan transportasi dari pusat produksi ke pusat konsumsi. Proses istirahat sapi dianggap perlu karena, selain memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, itu juga dapat mencegah penurunan berat badan sapi selama proses distribusi.

Sebagai importir bersih daging sapi, pasokan utama daging sapi Indonesia berasal dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Berdasarkan perkembangan produksi dunia, selain memaksimalkan potensi produksi dalam negeri, potensi impor dari ketiga negara tersebut cukup baik. Namun, sejauh ini produksi daging sapi Cina telah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan populasi yang sangat besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dua negara potensial lainnya adalah Brasil dan India. Masalahnya sampai sekarang adalah bahwa kedua negara menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) adalah negara-negara yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku sementara Indonesia adalah negara yang bebas dari penyakit PMK dan menganut sistem berbasis negara yang hanya dapat memasukkan sapi hidup dan produk ternak dari negara-negara yang bebas dari penyakit PMK (Tseuo, dkk., 2012)

Tabel 3. Negara Pengekspor Besar untuk Sapi Hidup di Dunia, 2014

No	Negara	Ekspor (100 Ekor)
1	Mexiko	1,050
2	Canada	915
3	Australia	620
4	Brazil	550
5	EU-27	500
6	Colombia	325
7	USA	180
8	Uruguay	90
9	New Zealand	42
10	China	23

Sumber: World Bank, 2014

Menurut OIE, setidaknya ada 66 negara (termasuk Indonesia, Australia dan Selandia Baru) yang memberlakukan aturan berbasis negara atau bebas dari PMK, termasuk Albania, Austria, Belarus, Belgia, Belize, Bosnia dan Herzegovina, Brunei, Bulgaria, Kanada, Chili, Kosta Rika, Kroasia, Kuba, Siprus, Republik Ceko, Denmark,

Republik Dominika, El Salvador, Estonia, Finlandia, Makedonia, Prancis, Jerman, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongaria, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lesotho, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Meksiko, Montenegro, Belanda, Kaledonia Baru, Nikaragua, Norwegia, Panama, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swiss, Swedia, Ukraina, Inggris, Amerika Serikat dan Venezuela. Namun, semua negara ini relatif jauh dari Indonesia dan kapasitas pasokan ternak dan sapi di negara lain juga terbatas (Nurhayati 2013). OIE mengklasifikasikan status bebas PMK menjadi lima: negara bebas tanpa vaksinasi, negara bebas dengan vaksinasi, zona bebas tanpa vaksinasi, zona bebas dengan vaksinasi, dan kompartemen gratis tanpa vaksinasi. Undang-Undang No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengizinkan impor dari zona bebas penyakit dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2012. Sepuluh negara yang memiliki zona bebas tanpa vaksinasi adalah Argentina, Bolivia, Botswana, Brasil, Kolombia, Malaysia, Moldova, Namibia, Peru dan Filipina. Enam negara memiliki zona bebas dengan vaksinasi: Argentina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Peru, dan Turki. Sisanya, 95 negara, di Asia termasuk India, Timur Tengah dan Afrika masih dinyatakan terinfeksi PMK (Naipospos 2014). Pada dasarnya, sistem zona bebas tidak melanggar aturan teknis dan sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Jika impor dari zona bebas akan dilakukan, upaya mitigasi risiko harus dilakukan ke tingkat perdagangan yang aman. Zona bebas bukanlah konsep yang tidak dikenal di dunia kesehatan hewan di Indonesia. Kami secara resmi mengenali area bebas rabies atau area bebas brucellosis yang merupakan perwujudan dari konsep tersebut. Namun, dampak dari keberadaan zona bebas membutuhkan anggaran untuk mempertahankan status bebas, terutama pengawasan dan tindakan karantina. Dengan status bebas PMK, Indonesia dapat mengimpor daging beku dari zona bebas dengan persyaratan teknis sesuai dengan standar OIE. Virus PMK sulit bertahan hidup dalam daging, biasanya mengalami inaktivasi 24-72 jam setelah disembelih.

Payung hukum dalam pasokan sapi dan sapi impor diatur dalam urutan kronologis sebagai berikut; Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Sapi Domestik, Sapi, dan Sapi Siap ke Daging Sapi ke dalam Wilayah Republik Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pada periode 2010-2013. Pada periode itu, Peraturan Menteri Pertanian, terutama sapi, adalah sebagai berikut: 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 07 / Permentan / OT.140 / 1/2008 tentang persyaratan dan prosedur untuk masuk dan keluarnya benih, benih, ternak dan sapi potong. 2) Menteri Pertanian No. 52 / Permentan / OT.140 / 9/2011 tentang rekomendasi untuk persetujuan

impor dan ekspor ternak ke dan di luar wilayah Republik Indonesia, bersama dengan amandemen pertama terhadap Peraturan No. 62/Permentan/OT.140/5/2013; dan perubahan kedua dalam Permentan No. 74/Permentan/OT.140/7/2013. 3) Peraturan Menteri Pertanian No. 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang impor sapi bakalan, sapi induk, dan sapi siap saji ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; seiring dengan perubahan pertama dalam Permentan No. 87/Permentan/PD.410/9/2013; dan perubahan kedua dalam Permentan No. 97/Permentan/PD.410/9/2013.

Sebelum ketentuan mengenai impor sapi bakalan, induk dan sapi siap untuk disembelih diberlakukan, Kementerian Pertanian mengatur ini menjadi peraturan mengenai persyaratan dan prosedur untuk mengimpor dan mengeksportir benih, bibit ternak, dan sapi potong pada tahun 2008. Permentan No 07/2008 digunakan untuk memelihara kelestarian sumber daya genetik dan keamanan biologis dan untuk meningkatkan keragaman genetik ternak; mencegah kemungkinan masuk dan menyebarnya HPHK dan PHMU dan penyakit hewan eksotik ke wilayah Indonesia; menjamin ketersediaan benih, bibit, ternak yang berkelanjutan; melindungi konsumen dari benih, bibit ternak, dan sapi potong yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan; dan meningkatkan pendapatan devisa negara.

Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai impor daging sapi terdapat dalam Kementerian Pertanian tentang Impor Karkas, Daging, Jeroan, dan atau Produk Olahan ke dalam Wilayah Republik Indonesia yang kemudian menjadi salah satu pedoman penting dalam hal daging sapi. impor dari luar negeri ke Indonesia. Pada dasarnya, tujuan peraturan impor daging sapi adalah untuk mempertahankan status Indonesia yang telah bebas dari penyakit hewan, seperti PMK. Karena itu, kualitas dan gizi daging sapi impor juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat yang mengonsumsi daging sapi. Untuk periode 2010-2013, berikut ini adalah Menteri Pertanian tentang impor daging sapi: 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 20/Permentan/OT.140 / 4/2009 tentang Impor dan Pengawasan Distribusi Karkas, Daging, dan atau Jeroan dari Luar Negeri. 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi untuk Persetujuan Impor Karkas, Daging, Jeroan, dan atau Produk Olahan ke dalam Wilayah Republik Indonesia; bersama dengan perubahan mereka dalam Permentan No. 63/Permentan/OT.140/6/2013. 3) Peraturan Menteri Pertanian No. 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Impor Karkas, Daging, Jeroan, dan / atau Produk Olahan ke dalam Wilayah Republik Indonesia; bersama dengan perubahan mereka dalam Permentan No. 96/Permentan/PD.410/9/2013.

Permentan No. 20/2009 mengatur impor produk

hewani dengan persyaratan, seperti bangkai ruminantia, daging, daging variasi, daging olahan, jeroan, dan persyaratan lainnya. Untuk Permentan ini, tidak hanya membahas daging ruminantia, tetapi juga daging ternak lainnya, seperti unggas dan babi. Kemudian, dalam Permentan No. 50/2011 juga mengatur bangkai sapi, kambing / domba, daging, daging sapi industri, dan jeroan. Sementara itu, Permentan No. 84/2013 juga mengatur produk hewani di atas, dengan ketentuan tambahan seperti pemotongan primer dan pemotongan sekunder.

Implementasi sapi potong dan impor daging sapi dari Australia sebenarnya masih belum ideal dari tujuan yang dimaksudkan, resistensi terhadap sejumlah konten peraturan oleh negara-negara pengekspor menunjukkan upaya pengkondisian sehingga Indonesia akan tetap menjadi negara pengimpor selamanya. Misalnya, pembatasan konkret pada impor sapi bakalan dengan berat maksimum 350 kg perekor yang diinginkan eksportir tanpa batasan berat tentu menguntungkan bagi eksportir karena harganya akan mahal. Dalam hal kebijakan, selain dari masalah sapi yang tidak dianggap sebagai aset, fakta bahwa kebijakan impor daging sapi di Departemen Perdagangan bukan Kementerian Pertanian CQ, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dianggap membingungkan. Kementerian Pertanian hanya merekomendasikan berapa volume daging yang harus diimpor, operasi impor Kementerian Perdagangan.

Jadi konsekuensinya adalah sapi menjadi komoditas perdagangan, bukan sebagai komoditas ketahanan pangan. Kebijakan mengimpor sapi betina unggul juga sangat sulit untuk peta ketahanan pangan dan peternak lokal. Ini diduga sebagai manuver politik bagi pelobi Australia yang dapat memengaruhi pejabat pembuat keputusan di Jakarta dengan tujuan agar Indonesia terus mengimpor sapi dari Australia. Jika ada sapi unggul yang hanya diimpor sedikit dari total pesanan, sisanya sebagian besar tidak unggul dari dugaan indung telur telah rusak atau disembelih. Sehingga setiap sapi betina hanya bisa memberi maksimal 1 anak sapi atau anak sapi. Masalah krusial lainnya adalah ketidakseimbangan dalam basis data impor dan permintaan daging sapi. Data BPS seringkali tidak sinkron dengan data Kementerian Perdagangan dan juga berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Aspek Aksesibilitas dan Distribusi

Distribusi kebutuhan pangan yang merata membutuhkan distribusi makanan di seluruh Indonesia dari tingkat rumah tangga ke tingkat individu. Oleh karena itu untuk mewujudkan distribusi makanan, perlu untuk mengembangkan transportasi darat, laut dan udara dan melalui pengelolaan sistem distribusi makanan yang dapat menjaga kualitas dan keamanan dan jaminan nutrisi, yang meliputi produksi, perdagangan dan distribusi makanan;

cadangan makanan; pencegahan dan pengendalian masalah makanan; dan penelitian tentang keamanan distribusi makanan.

Aksesibilitas dan distribusi makanan dalam konteks komoditas daging sapi, rantai distribusi daging sapi adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan kenyamanan bagi masyarakat untuk mendapatkan pasokan dan layanan penjualan daging sapi dengan harga yang wajar. Hasil penelitian dari para peneliti Pusat Studi Kebijakan Indonesia (CIPS) menilai bahwa rantai distribusi daging sapi di Indonesia terlalu panjang. Hal ini menyebabkan harga di pasar menjadi tinggi secara konsisten, dalam kisaran di atas Rp. 100.000 per kilogram. Lamanya distribusi daging sapi lokal mempengaruhi harga daging sapi di pasaran karena munculnya biaya tambahan seperti biaya transportasi. Sejauh ini, daging sapi lokal melewati tujuh hingga sembilan tahap sebelum mencapai konsumen. Proses distribusi dimulai dengan petani yang menjual sapi mereka ke pedagang lokal skala kecil atau melalui sapi penggemukan.

Kemudian tempat pemberian pakan memberi makan daging sapi intensif untuk meningkatkan berat sapi dan nilai jual. Tahap berikutnya, ternak dijual lagi ke pedagang lokal berskala besar menggunakan jasa informan untuk mendapatkan harga pasar yang paling aktual, kemudian dijual ke pedagang daerah yang wilayah perdagangannya mencakup beberapa kabupaten, provinsi, dan sejumlah pulau. Setelah itu, dijual ke grosir di rumah jagal, kemudian ke grosir di pasar, ke pengecer dan konsumen. Rantai pasokan yang begitu lama pada akhirnya menghasilkan inefisiensi biaya yang harus ditanggung oleh konsumen.

Berbeda dengan sistem distribusi daging sapi impor, hanya membutuhkan dua titik distribusi untuk menjangkau konsumen. Rantai pasokan ini dibuat karena daging sapi impor siap untuk memasak produk-produk yang tidak membutuhkan hewan penggemukan, rumah pemotongan hewan, dan pedagang di tempat penampungan sapi sebelum dapat dikonsumsi. Informan direktur peternakan mengatakan: “Selain itu, pengembangan ternak di Indonesia juga sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya kapasitas petani dan kurangnya penguasaan teknik ternak dan teknologi yang efisien”.

Berdasarkan ilustrasi pola rantai pasokan daging, pola rantai pasokan sapi di Indonesia umumnya dimulai dengan peternak besar (tempat penggemukan) hingga penggemukan petani atau dijual langsung ke pedagang besar. Sebanyak 75 persen pedagang besar mendapatkan pasokan ternak dari petani penggemukan dan 25 persen lainnya diambil langsung dari peternak besar (tempat pemberian pakan). Feedlot hanya berkonsentrasi pada pembibitan sehingga untuk mendapatkan ternak siap untuk disembelih, pedagang besar lebih suka membeli petani penggemukan. Pedagang besar kemudian mengirim atau

menjual ternak ke rumah jagal. Beberapa pedagang juga memotong sendiri dengan menyewa pemotong dari RPH.

Ketahanan pangan diwujudkan ketika semua orang di tingkat individu, rumah tangga, negara, regional dan global setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan preferensi makanan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Ini konsisten dengan pernyataan FAO tentang tiga aspek keamanan pangan yang terinspirasi oleh Amartya Sen tentang hak makanan. Tiga aspek makanan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia dari ketersediaan, akses ke keterjangkauan, dan keterjangkauan dalam konteks ini adalah daging sapi dan sapi impor Australia.

Aspek Keterjangkauan Pangan

Tujuan memenuhi keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dilakukan Pemerintah Indonesia dengan strategi untuk mengimpor sapi dan sapi dari Australia. Harga daging sapi impor dari Australia cenderung lebih murah daripada harga eceran daging sapi lokal sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga daging sapi nasional. Konsumen daging sapi impor terbesar adalah masyarakat kota besar atau kota besar. Harga daging sapi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Jika penawaran daging sapi lebih rendah dari permintaan, maka harga daging sapi akan naik, dan jika penawaran lebih tinggi dari pada permintaan, maka harga akan turun. Untuk menjaga stabilitas harga, jika produksi lokal masih kurang dari permintaan, maka pemerintah melakukan impor untuk mencukupi pasokan dalam negeri.

Kelangkaan pasokan daging sapi, dapat dihitung dengan menggunakan perbedaan dalam pendekatan permintaan dan penawaran. Namun, ini tidak mudah dilakukan, karena perkiraan pasokan sapi yang siap untuk disembelih di petani tidak identik dengan ketersediaan daging sapi di pasar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak dari bisnis peternak sapi belum berorientasi komersial. Pertanian rakyat bermotif untuk ditabung dan cenderung tidak merespon kebutuhan pasar. Demikian juga dalam hal konsumsi, tingkat konsumsi dalam agregat nasional masih merupakan angka yang sangat kasar. Maka, pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menentukan kelangkaan pasokan adalah dinamika harga. Harga dapat digunakan sebagai indikator dalam melihat kelangkaan.

Industri sapi potong di Indonesia saat ini masih bersumber pada peternakan rakyat. Bisnis penggemukan sapi skala besar mulai muncul pada tahun 1991, yang kemudian mampu memasok 30 persen dari permintaan daging sapi nasional. Bisnis-bisnis ini umumnya mengandalkan bibit sapi yang diimpor dari Australia. Namun, keberadaan bisnis ini belum mampu menyeimbangkan permintaan

dan penawaran akan daging sapi, sehingga kenaikan harga daging sapi tidak bisa dihindari.

Sentra produsen daging sapi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia lebih banyak terkonsentrasi di Jakarta dan Jabar membentuk pola distribusi tertentu sehingga harga eceran daging sapi di beberapa daerah di pasar domestik bergerak selaras dengan perbedaan margin tertentu. Namun, sebagai negara pengimpor daging sapi dan sapi dari Australia dan Selandia Baru, pergerakan harga produsen daging sapi di Indonesia dengan harga daging sapi di kedua negara cenderung tidak harmonis (Departemen Perdagangan 2006). Harga parietas eceran sapi impor cenderung turun, sementara harga eceran dalam negeri cenderung mengalami kenaikan. Divergensi ini biasanya terjadi dari Juli-November (Badan Litbang Kementerian Perdagangan 2008).

Berbagai faktor dalam biaya sistem perdagangan, seperti tarif, biaya ilegal, penurunan berat badan ternak selama transportasi dan biaya transportasi yang tinggi, meningkatkan biaya pemasaran dan meningkatkan harga daging sapi domestik. Ironisnya, harga daging sapi impor dari daging sapi dan sapi impor akan naik seiring dengan harga daging sapi domestik, sehingga total harga daging sapi akan selalu naik. Faktor lain yang mendorong kenaikan harga daging sapi adalah ketersediaan program distribusi untuk ternak dari berbagai institusi yang dipasok dari pasar hewan domestik. Pedagang dapat memenuhi permintaan ternak dengan meningkatkan harga jual ternak. Kenaikan harga ini meningkatkan harga sapi potong dan meningkatkan harga daging sapi di pasaran. Dalam hal konsumsi berbasis budaya (jenis persiapan dan ketenaran) dan rasa, posisi daging sapi tidak dapat digantikan oleh daging lainnya. Kehadiran daging sapi selalu diperlukan baik dalam kelompok tinggi dan sedang dan rendah. Perilaku konsumen ini meningkatkan harga daging sapi. Kenaikan harga terutama terjadi sebelum hari libur keagamaan, seperti bulan-bulan lapar dan hari libur. Jika tidak dikendalikan, fenomena ini dapat menyebabkan penipuan pasar. Setidaknya lima operator: peternak, pedagang ternak antar regional, importir ternak dan ternak, konsumen dan pemerintah. Kebijakan pemerintah ditujukan untuk mengelola harga dengan benar dan mencapai stabilitas harga dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

SIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan impor sapi dan daging sapi dari Australia adalah praktek ekonomi liberal, di mana pengusaha memiliki peran utama, sementara pemerintah Indonesia juga memegang kendali utama untuk mengatur dan menentukan kebijakan impor daging sapi dan sapi. Faktor-faktor politik dalam impor daging sapi lebih banyak tentang kepentingan yang

saling bertentangan dari para pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan mendorong harga daging sapi menjadi lebih mahal di pasar dan upaya lobi politik untuk mengamankan kuota impor importir. Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mematuhi kebijakan keamanan pangan dalam hal impor daging sapi dan sapi Australia dengan: 1) Menyediakan sapi dan sapi impor dari Australia sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Australia dipilih sebagai negara pengekspor untuk hewan dan produk hewan karena Australia telah bebas dari status PMK dan BSE.

Indonesia juga ingin melindungi kepentingan nasionalnya karena ternak Indonesia juga telah dibebaskan dari PMK dan BSE sejak tahun 1990 karena itu, Indonesia menggunakan kebijakan berbasis negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. memerintahkan untuk melindungi orang Indonesia dari bahaya PMK dan BSE; 2) Mencapai akses fisik ke makanan masyarakat dengan daging sapi dan sapi yang diimpor dari Australia. Tingginya permintaan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi daging sapi sementara ketersediaan daging sapi di dalam negeri masih sangat terbatas, membuat para importir daging sapi dan sapi Indonesia memilih Australia untuk menjadi negara pengekspor sapi dan sapi ke Indonesia. Konsumen daging sapi yang diimpor dari Australia biasanya adalah orang-orang yang bergerak dalam industri, perhotelan, katering, restoran, dan pasar modern; 3) Memenuhi keterjangkauan harga pangan dengan mengimpor sapi dan daging sapi yang diimpor dari Australia. Mengimpor sapi dan sapi dari Australia telah mencapai masyarakat Indonesia dengan kecenderungan harga yang lebih rendah dibandingkan sapi dan sapi lokal. Keberadaan daging sapi dan sapi impor yang diimpor dari Australia diharapkan dapat menstabilkan harga daging sapi nasional. Sementara itu, konsumen daging sapi impor terbesar adalah masyarakat kota-kota besar di Indonesia atau masyarakat kelas menengah ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, L.K. (2011). *Daging, beda jenis beda gizinya*. [Accessed 15 September 2019]. https://lifestyle.kompas.com/read/2011/08/12/1135036/daging_beda.jenis.beda.gizinya?page=all.
- Bapennas. (2017). *Paket Ekonomi IX: Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Stabilisasi Harga Daging Hingga ke Desa*. [Accessed 10 July 2019]. <https://bapenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/paket-ekonomi-ix-pemerataan-infrastruktur-ketenagalistrikan-dan-stabilisasi-harga-daging-hingga-ke-des/>

- Berry, E. M., Dermeni, S, Burlingame, B, Meybeck, A, & Conforti, P. (2015). Food security and sustainability: can one exist without the other?. *Public Health Nutrition* 18, (13), 2293-2302.
- BPS. (2013). *Hasil sensus Pertanian 2013 (Angka Sementara)*. Berita Resmi Statistik No. 62/09/Th XVI, 2 September 2013, Jakarta.
- BPS. (2011). *Rilis Hasil Awal PSPK 2011*. Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Depdag. (2008). *Rapat pembahasan Harga daging Sapi*. Makalah. Departemen Perdagangan, Jakarta.
- Depdag. (2006). *Kajian Sistem Distribusi Produk Pertanian, Studi kasus: daging dan Jagung. Kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan*, Departemen Perdagangan, Jakarta.
- FAO. (2002). *The State of Food Insecurity in the World 2001*. FAO, Rome.
- Hariyadi. P. (2015). *Tantangan Ganda Keamanan pangan di Indonesia: Peranan Rekayasa Proses Pangan*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Lubroth, J. (2013). "Australian Agriculture's Biggest Third needs a global Approach", the conversation, Accessed September 28, 2019.
- Maxwell, D. (1996). Measuring Food Insecurity: The Frequency and Severity of Coping Strategies. *Food Policy*, 21, (3), 291-303
- Mubyarto. (2002). *Masalah Beras di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Economic Studies Faculty of Economics UGM.
- Naipospos, T. S. P. (2014). *Impor Ternak dan Risiko PMK*. Bogor: Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies.
- Nugrayasa, O. (2015). *Tantangan Ketahanan Pangan Indonesia*. [Accessed 10 August 2019]. <https://stkab.go.id/tantangan-ketahan-pangan-indonesia>.
- Nunzio, J. D. (2013). *Hungry Neighbours? Indonesia's Food Strategy and Water Security*. Australia: Future Directions International Pty Ltd.
- Nurhayati, W. (2013). *Selain Australia dan Selandia Baru, RI Bisa Impor Sapi dari 63 Negara Ini*. [Accessed 10 August 2019]. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2439337/selain-australia-dan-selandia-baru-ri-bisa-impor-sapi-dari-63-negara-ini>.
- Pambagio, A. (2011). *Politik Ketahanan Pangan VS Sapi Australia*. [Accessed 10 July 2019]. <https://news.detik.com/kolom/d-1660476/politik-ketahan-pangan-vs-sapi-australia>.
- Petranto, A. (2011.) Peran Diplomasi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Diplomasi*, 3, (3), 23-35
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pertahanan Pangan.
- Rusastra, I. W., Napitupulu, T. A., & Bourgeois, R. (2008). *The Impact of Support for Imports on Food Security in Indonesia*. Bogor: UNESCAP-CAPSA.
- Soesilowati, S. (2016). *Assessing non Traditional Security Issues between Indonesia and Australia Case study: Food Security. Paper presented in ISA Asia-Pacific Conference 2016*. Hongkong: The City University of Hongkong.
- Sudardjat, S. (2003). Operasional Program Terobosan Menuju Kecukupan Daging Sapi Tahun 2005. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1, (1), 9-13.
- Tseuo, T., Syaukat, Y., & Hakim, D. B. (2012). The impact of the Australia and New Zealand free trade agreement on the beef industry in Indonesia. *Journal of ISSAAS (International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences)*, 18, (2), 70-82.
- Yusdja, Y. R., Sayuti, B., Winarso, I., Sadikin, & Muslim, C. (2004). *Pemanfaatan Program dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.

KATA MAJEMUK PADA JARGON *SNEAKERS* BERBAHASA INGGRIS DALAM KOMUNITAS *SNEAKERHEAD* IST (*INDONESIA SNEAKERS TEAM*) BANDUNG

Syifa Wasilatul Fauziyah, Sugeng Riyanto, dan Agus Nero Sofyan

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

Email: Syifawasilatulfauziyah_unpad@yahoo.com;

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan kategori *compounding* pada jargon *sneakers* berbahasa Inggris dalam komunitas *sneakerhead* IST (*Indonesia Sneaker Team*) Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mewawancarai ketua dan anggota komunitas *sneakerhead* IST (*Indonesia Sneaker Team*) Bandung. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses *compounding* dalam jargon *sneakers* berbahasa Inggris dalam komunitas *sneakerhead* IST (*Indonesia Sneaker Team*) Bandung, dapat diklasifikasikan pada dua bentuk yang terdiri dari bentuk tulisan dan bentuk kata majemuk. Berdasarkan bentuk tulisan didapati dua bentuk tulisan yaitu *close form* (bentuk tertutup) dan *open form* (bentuk terbuka), kemudian berdasarkan bentuk kata mejemuknya didapati dua bentuk, yaitu berbentuk *endocentric compound* dan *exocentric compound*. Kategori kata dalam jargon *sneakers* berbahasa Inggris dalam komunitas *sneakerhead* IST Bandung didapati kategori *compound* nomina yang dapat diklasifikasikan pada tiga bentuk *compound* nomina, yaitu *compound* nomina (nomina+nomina), *compound* nomina (nomina+verba), dan *compound* nomina (adjectiva + nomina/nomina + adjectiva).

Kata kunci: morfologi; *compounding*; jargon.

COMPOUNDING ON ENGLISH SNEAKERS JARGON IN IST SNEAKERHEAD COMMUNITY (INDONESIA SNEAKERS TEAM) BANDUNG

ABSTRACT. This research aims to describe the compounding form and category of English sneakers jargon in the IST (Indonesian Sneaker Team) sneakerhead community in Bandung. The method in this research is used qualitative descriptive research method. The data in this research were obtained by interviewing the head and the members of IST (Indonesia Sneaker Team) Bandung. The result of this research shows that the compounding process in the English sneakers jargon in IST (Indonesian Sneaker Team) Bandung can be classified into two forms they are writing forms and compounding forms. In writing forms they are open form and close forms and the form of compounding they are endocentric compound and exocentric compound. The category of the data they are compound noun which can be divided into three categories of compound nouns, they are compound nouns (noun + noun), compound noun (noun+verb), and compound noun (adjective + noun / noun + adjective).

Key words: morfologi; *compounding*; jargon.

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa sebagai sarana dalam berkomunikasi berfungsi untuk menyampaikan pesan, pikiran, ide, gagasan, dan perasaan. Bahasa merupakan alat identifikasi bagi masyarakat pemakainya. Satu di antara wujud bahasa sebagai alat identifikasi adalah adanya istilah-istilah khusus yang digunakan dalam kelompok-kelompok tertentu. Setiap disiplin ilmu, profesi, bidang atau komunitas tertentu memiliki istilah-istilah khusus yang menjadi ciri khas bidang tersebut. Istilah-istilah itu disebut sebagai *jargon*, yaitu sejumlah kata atau istilah khusus yang diciptakan oleh kelompok tertentu dan merujuk pada suatu bidang atau keahlian kelompok itu. Satu di antara contohnya adalah jargon-jargon yang ada dalam komunitas pecinta *sneakers*. Jargon-jargon *sneakers* digunakan untuk menjelaskan tipe, kondisi, bentuk, bagian, atau sejarah sebuah *sneakers*. Menurut Longman (2000: 405) “*Sneakers* adalah *light shoe worn for sport*”. Sepatu ringan yang digunakan untuk berolah raga. *Sneakers* merupakan sepatu ringan yang

terbuat dari sol karet. Sejarahnya, *sneakers* berasal dari kata *sneak* yang berarti *mengendap-endap*, sehingga saat digunakan sepatu *sneakers* itu tidak akan mengeluarkan suara, berbeda halnya dengan sepatu *boots* atau *heels*.

Sneakers tidak hanya menjadi pelindung alas kaki, kini *sneakers* menjadi sebuah *trend fashion* yang kerap digemari oleh masyarakat dan merambah berbagai kalangan sehingga dari tahun ke tahun pecinta *sneakers* atau yang disebut para *sneakerhead* kian bertambah dan melonjak. Menurut Smith (2018: 233–235), *sneakerhead* merupakan individu yang memiliki berbagai *sneakers* dengan berbagai merek/*brand* dan berbasis memiliki pengetahuan seputar *sneakers*. Mereka merupakan pengikut kebudayaan atau *trend* terutama dalam penggunaan dan pemakaian sepatu *sneakers*. Sebagai komunitas pecinta sepatu *sneakers*, para *sneakerhead* memiliki istilah-istilah khusus, yaitu jargon-jargon yang ada dalam komunitas itu. Banyaknya jargon *sneakers* berbahasa Inggris dengan pembentukan kata-kata dan memiliki makna yang unik menarik untuk diteliti. Satu di antara contohnya adalah jargon-

jargon *sneakers* yang berbentuk *compounding* (kata majemuk). Jargon *sneakers* yang berbentuk *compounding* menarik untuk diteliti karena proses *compounding* merupakan proses yang menyatukan dua morfem bebas menjadi satu istilah baru dan memiliki makna baru.

Penelitian ini terinspirasi oleh penelitian terdahulu, yaitu “*Blending: Sebuah Alternatif dalam Penamaan Makanan dan Minuman Ringan*” yang ditulis oleh Giyatmi Giyatmi, dkk. pada tahun 2018 yang meneliti tentang jenis serta bentuk *blending* dalam penamaan makanan dan minuman ringan, “Penggunaan Jargon oleh Narapidana di Lapas Wanita Kelas IIA Medan” yang ditulis oleh Dini Wahyuni pada tahun 2015 yang meneliti tentang proses pembentukan kata pada jargon-jargon narapidana di Lapas Medan. Selanjutnya, “Penggunaan Jargon oleh Komunitas Waria di Jejaring Sosial *Facebook*” yang ditulis oleh Jusmiati Garing tahun 2017 yang meneliti tentang bentuk-bentuk jargon yang digunakan oleh komunitas waria di jejaring sosial dan jenis semantik serta perubahan yang ada pada jargon tersebut. Dalam penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan proses pembentukan *compounding* dalam jargon *sneakers* berbahasa Inggris dalam komunitas *sneakerhead* IST Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kajian bidang morfologi.

Morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari tentang morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian dari kata-kata itu yaitu morfem (Kridalaksana, 2008: 159). Senada dengan hal itu, Booij (2005: 24) berpendapat bahwa morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari struktur internal kata-kata, berhubungan dengan bentuk-bentuk kata, dan proses pembentukan kata. Lebih lanjut, O’Grady dan Archibald (2009: 100) mengemukakan bahwa morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang mengkaji tentang kata dan pembentukan kata dalam sebuah kalimat. Dari ketiga definisi itu, dapat disimpulkan bahwa morfologi merupakan bidang linguistik yang mengkaji tentang kata yaitu struktur internal kata, bentuk kata, dan proses bagaimana kata itu terbentuk (proses pembentukan kata). Adapun proses pembentukan kata yang akan dikaji dalam penelitian ini satu di antaranya adalah proses *compounding* pada jargon *sneakers* berbahasa Inggris dalam komunitas *sneakerhead* IST Bandung. Yule (2016: 55) berpendapat bahwa *compounding* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata majemuk, merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda untuk membentuk kata baru. Senada dengan hal itu, Lieber (2007: 43) menyatakan bahwa kata majemuk merupakan kata yang dibentuk dari dua (atau lebih) bentuk morfem dasar. *Compounding* atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata majemuk merupakan proses penggabungan dua morfem

atau lebih untuk membentuk sebuah kata baru. Ciri-ciri kata majemuk dalam bahasa Inggris dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Kata majemuk dalam bahasa Inggris terdiri dari tiga bentuk tulisan, yaitu *close form* (bentuk tertutup), *open form* (bentuk terbuka), dan *hyphenated form* (bentuk penghubung). Katamba, dkk. dalam Cahyanti (2016: 61) berpendapat bahwa kata majemuk memiliki tiga bentuk yang pertama adalah kata majemuk bentuk tertutup (*close form*) yaitu kata majemuk yang ditulis sebagai kata tunggal (*newspaper, highway, goldfish*), yang kedua kata majemuk *hyphenated form*, yaitu kata majemuk yang ditulis dengan tanda penghubung (*mother-in-law, second-rate*), dan yang terakhir adalah kata majemuk yang berbentuk terbuka (*open form*) yaitu kata majemuk yang ditulis sebagai kata-kata terpisah (*high school, health care*).
- Kata majemuk dalam bahasa Inggris terdiri dari kombinasi kategori leksikal (nomina, verba, adjektiva, dan adverbial). O’Grady dan Dobrovolsky dalam Cahyanti (2016: 66) berpendapat bahwa dalam bahasa Inggris kata majemuk merupakan kombinasi dari kategori leksikal (nomina, verba, adjektiva, dan preposisi) dan morfem yang paling kanan disebut sebagai inti kata (*head*) karena morfem tersebut akan menentukan kategori dari kata majemuk itu. Misalnya, *bookstore* (nomina), *break dance* (verba), *red hot* (adjektiva).
- Kata majemuk dalam bahasa Inggris dapat dikenali pada pola pengucapan morfem pertama. Jackson dalam Napitupulu (2016: 7) mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris beberapa kata majemuk dikenali oleh pola pengucapan pada morfem pertama, contohnya ‘*blackbird*’ (kata majemuk) ‘*blackbird*’ (frasa), ‘*black board*’ (kata majemuk), ‘*blackboard*’ (frasa).
- Kata majemuk dalam bahasa Inggris dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu *endocentric compound*, *exocentric compound* dan *copulative compound*. Plag (2002: 186–188) menjelaskan bahwa dalam bahasa Inggris terdapat *endocentric compound*, *exocentric compound*, dan *copulative compounds*. *Endocentric compound* merupakan kata majemuk yang maknanya ditentukan oleh *the head of compound words* inti kata dari sebuah kata majemuk, contohnya *laser printer* merupakan sebuah printer dan *book cover* merupakan sebuah *cover*. Kemudian, *exocentric compound* merupakan makna kata majemuk yang tidak dapat diprediksi dari inti kata majemuk yang ada, artinya makna *exocentric compounds* merupakan makna yang benar-benar baru. Misalnya, kata *redneck* bukan merupakan sebuah leher tapi mengacu pada orang-orang yang berkulit putih yang tinggal di pedesaan yaitu di wilayah selatan Amerika Serikat,

biasanya *redneck* digunakan sebagai kata penghinaan, *loudmouth* bukan merupakan sejenis mulut tetapi mengacu kepada seorang pembual besar, dengan demikian makna *exocentric* merupakan sebuah makna yang baru yang tidak mempertahankan makna aslinya (Plag, 2002: 186). *Copulative compound* merupakan makna kata majemuk yang maknanya diambil dari dua inti kata majemuk itu. Misalnya, kata *poet-translator* merupakan seorang penyair dan seorang penerjemah, kata *singer-songwriter* merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu (Plag, 2002: 188).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Surakahmad dalam Firdaus (2011: 225) “Metode deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pengumpulan data saja, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data”. Metode itu bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk *compounding* pada jargon *sneakers* dalam komunitas *sneakerhead* IST Bandung. Selanjutnya, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik simak libat cakap dan teknik catat. Metode simak libat cakap menurut Sudaryanto (2015: 203) merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti menyimak dan terlibat dalam wawancara ketika pengambilan data. Adapun nama ketua dan anggota komunitas *sneakerhead* IST Bandung yakni:

- a. Rinaldy Muharram
- b. Firman Yousaf
- c. Handiva Putra
- d. Raka Pawita
- e. Rizky Ariansyah

Wawancara dengan ketua dan anggota komunitas ini dilakukan pada tanggal 2 Februari 2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode agih dengan teknik dasar teknik BUL dan metode padan referensial. Metode agih merupakan cara menganalisis data yang alat penelitiannya berada dalam bahasa yang bersangkutan itu sendiri (Sudaryanto, 2015: 18). Teknik yang dipilih adalah teknik dasar yaitu teknik BUL. Menurut Sudaryanto (2015: 37) teknik bagi unsur langsung atau teknik BUL merupakan teknik analisis yang digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian yaitu untuk membentuk satuan lingual yang dimaksud. Berdasarkan tujuan penelitian, untuk memberikan data yang relevan, penulis menggunakan teknik bagi unsur langsung (BUL) untuk menganalisis bentuk *compounding* pada jargon-jargon *sneakers* berbahasa Inggris yang ada dalam komunitas *sneakerhead* IST Bandung. Untuk tujuan selanjutnya adalah mendeskripsikan makna jargon

sneakers, penulis menggunakan metode padan referensial dengan menggunakan teknik dasar teknik pilah unsur penentu. Sudaryanto (2015: 15) berpendapat bahwa metode padan merupakan metode analisis yang alat penelitiannya berada diluar bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode padan referensial dengan menggunakan alat penentu referen untuk menganalisis makna pada jargon *sneakers* berbahasa Inggris. Sudaryanto (2015: 15) berpendapat bahwa metode padan referensial merupakan metode yang alat penentunya merupakan kenyataannya/referen yang ditunjuk oleh bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan dalam penelitian ini disusun berdasarkan bentuk dan kategori kata majemuk. Secara bentuk dapat dibedakan dari bentuk penulisan dan bentuk kata majemuk. Bentuk penulisan kata majemuk terdiri dari *open form*, yaitu kata majemuk yang ditulis sebagai kata tunggal dan *close form*, yaitu kata majemuk yang ditulis sebagai kata terpisah, kemudian bentuk kata majemuk pada jargon *sneakers* berbahasa Inggris, dapat dibedakan menjadi bentuk *endocentric compound* dan *exocentric compound*. Berikut ini adalah paparan analisis bentuk tulisan, bentuk kata majemuk, dan kategori kata pada jargon *sneakers* berbahasa Inggris dalam komunitas *sneakerhead* IST Bandung.

Compound nomina (nomina + nomina)

Data 1: *Shelltoe*

Pengkajian secara morfologis pada jargon *shelltoe* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *shelltoe* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *shell* dan morfem *toe*. Jargon *shelltoe* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *close form* (bentuk tertutup) karena jargon *shelltoe* ditulis sebagai kata tunggal. Jargon *shelltoe* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata pada jargon itu, terletak pada kata *toe*, karena *shelltoe* merupakan bagian depan dari *sneakers* Adidas yang menyerupai bentuk kerang dan menutupi jari kaki. Berdasarkan kategorinya, jargon *shelltoe* merupakan sebuah *compound nomina* karena terbentuk dari morfem *shell* berkategori nomina dan morfem *toe* yang juga berkategori nomina.

Data 2: *Eye Stay*

Pengkajian secara morfologis pada jargon *eye stay* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut

compounding atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *eye stay* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *eye* dan morfem *stay*. Jargon *eye stay* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *eye stay* ditulis secara terpisah. Jargon *eye stay* merupakan bentuk dari *exocentric compound*, karena tidak memiliki inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada, *eye stay* merupakan lubang tali *sneakers* yang berbentuk bulat yang menjadi bagian dari sepatu *sneakers*. Berdasarkan kategorinya, jargon *eye stay* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *eye* yang berkategori nomina dan morfem *stay* yang juga berkategori nomina.

Data 3: Colorway

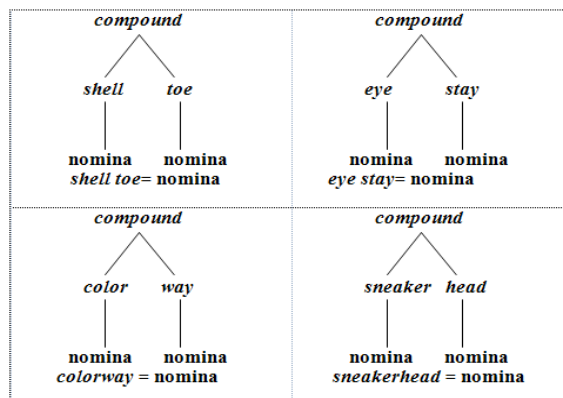
Pengkajian secara morfologis pada jargon *colorway* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *colorway* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *color* dan morfem *way*. Jargon *colorway* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *close form* (bentuk tertutup) karena jargon *colorway* ditulis sebagai kata tunggal. Jargon *colorway* merupakan bentuk kata majemuk *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *color*, karena *colorway* merupakan kombinasi warna yang ada dalam *sneakers*, misalnya *sneakers* dengan *colorway bred* yaitu kombinasi *black and red*.

Berdasarkan kategorinya, jargon *colorway* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *color* yang berkategori nomina dan morfem *way* yang juga berkategori nomina.

Data 4: Sneakerhead

Pengkajian secara morfologis pada jargon *sneaker head* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *sneakerhead* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *sneaker* dan morfem *head*. Jargon *sneakerhead* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *close form* (bentuk tertutup) karena jargon *sneakerhead* ditulis sebagai kata tunggal. Jargon *sneakerhead* merupakan bentuk kata majemuk *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *sneaker*, karena *sneakerhead* merupakan orang-orang yang mencintai sepatu *sneakers*, memiliki berbagai merek atau jenis *sneakers*, dan berbasis memiliki pengetahuan seputar *sneakers*, biasanya orang-

orang itu membentuk sebuah komunitas pecinta sepatu *sneakers*, yang kemudian terbentuk komunitas *sneakerhead* yang ada. Berdasarkan kategorinya, jargon *sneakerhead* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *sneaker* yang berkategori nomina dan morfem *head* yang juga berkategori nomina.



Gambar 1. proses pembentukan jargon *compounding shelltoe, eye stay, colorway, dan sneakerhead*

Data 5: Gum Sole

Pengkajian secara morfologis pada jargon *gum sole* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *gum sole* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *gum* dan morfem *sole*. Jargon *gum sole* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *gum sole* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *gum sole* merupakan bentuk kata majemuk *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *sole*, karena *gum sole* merupakan *sole* sepatu *sneakers* yang berwarna kuning kecoklatan mirip dengan permen karet. Berdasarkan kategorinya, jargon *gum sole* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *gum* yang berkategori nomina dan morfem *sole* yang juga berkategori nomina.

Data 6: Player Edition

Pengkajian secara morfologis pada jargon *player edition* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *player edition* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *player* dan morfem *edition*. Jargon *player edition* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *player edition* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *player edition* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak

pada kata *player*; karena *player edition* merupakan sejenis *sneakers* yang di rancang sesuai keinginan atlet tertentu yang kemudian *sneakers* itu akan di rilis secara umum, contohnya seperti sneakers Adidas stan smith dan sneakers Nike Jordan. Berdasarkan kategorinya, jargon *player edition* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *player* berkategori nomina dan morfem *edition* yang berkategori nomina.

Data 7: Salmon Sole

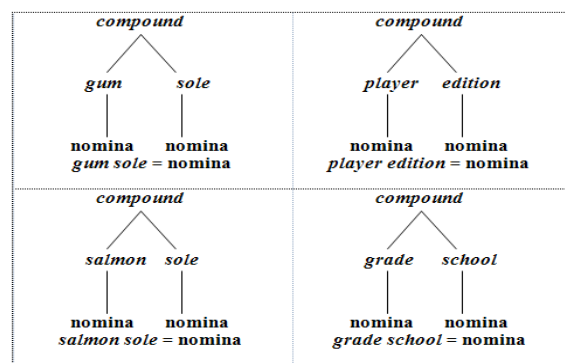
Pengkajian secara morfologis pada jargon *salmon sole* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata mejemuk. Proses *compounding* pada jargon *salmon sole* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *salmon* dan morfem *sole*. Jargon *salmon sole* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *salmon sole* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *salmon sole* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *sole*, karena *salmon sole* merupakan sol yang ada pada sneakers New Balance, yaitu warna sol yang berwarna pink agak kekuningan, mirip warna daging ikan salmon. Berdasarkan kategorinya, jargon *salmon sole* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *salmon* berkategori nomina dan morfem *sole* yang berkategori nomina.

Data 8: Grade School

Pengkajian secara morfologis pada jargon *grade school* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata mejemuk. Proses *compounding* pada jargon *grade school* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *grade* dan morfem *school*. Jargon *grade school* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *grade school* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *grade school* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *school*, karena *grade school* merupakan *sneakers* yang ukurannya dikhususkan untuk anak sekolah biasanya dari ukuran 36 sampai 40. Berdasarkan kategorinya, jargon *grade school* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *grade* berkategori nomina dan morfem *school* yang juga berkategori nomina. dapat dijelaskan pada gambar 2.

Data 9: City Series

Pengkajian secara morfologis pada jargon *city series* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut



Gambar 2. proses pembentukan jargon *compounding* *gum sole*, *player edition*, *salmon sole*, dan *grade school*

compounding atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *city series* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *city* dan morfem *series*. Jargon *city series* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *city series* ditulis secara terpisah. Jargon *city series* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *series*, karena *city series* merupakan seri dari *sneakers* Adidas yang nama serinya diambil dari nama-nama kota di negara Eropa, contohnya seperti Adidas Brimingham dan Adidas Berlin. Berdasarkan kategorinya, jargon *city series* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *city* yang berkategori nomina dan morfem *series* yang berkategori nomina.

Data 10: Island Series

Pengkajian secara morfologis pada jargon *island series* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *island series* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu *island* dan *series*. Jargon *island series* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *island series* ditulis secara terpisah. Jargon *island series* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *series*, karena *island series* merupakan seri dari *sneakers* Adidas yang nama serinya diambil dari nama-nama pulau, contohnya seperti Adidas Java dan Adidas Borneo. Berdasarkan kategorinya, jargon *island series* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *island* yang berkategori nomina dan morfem *series* yang berkategori nomina.

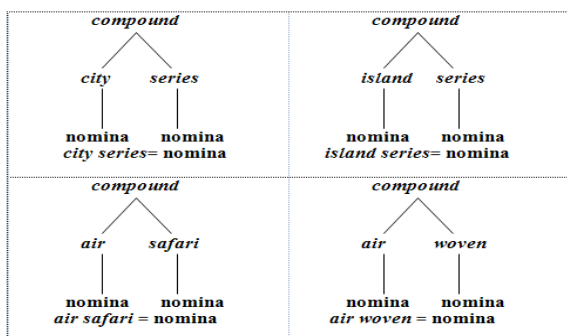
Data 11: Air Safari

Pengkajian secara morfologis pada jargon *air safari* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut

compounding atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *air safari* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *air* dan morfem *safari*. Jargon *air safari* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *air safari* ditulis secara terpisah. Jargon *air safari* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *safari*, karena *air safari* merupakan *sneakers* dari Nike yaitu *sneakers* yang memiliki sol dari bantalan udara, dirilis pada tahun 1986, beberapa bagian dari *sneakers* itu terbuat dari kulit ular, dirancang dengan pola macan tutul dan *sneaker* itu berfungsi sebagai sepatu lari. *Air safari* yang merupakan *endocentric compound* memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Berdasarkan kategorinya, jargon *air safari* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *air* yang berkategori nomina dan morfem *safari* yang berkategori nomina.

Data 12: Air Woven

Pengkajian secara morfologis pada jargon *air woven* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *air woven* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *air* dan morfem *woven*. Jargon *air woven* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *air woven* ditulis secara terpisah. Jargon *air woven* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *woven*, karena *air woven* merupakan jenis *sneakers* Nike yang dibuatnya dengan cara di tenun mirip bentuk tenun yang ada pada sebuah keranjang. Kemudian, sol *sneakers* itu terbuat dari bantalan udara. *Sneakers* dengan jenis *air woven* ini dirilis pada tahun 2000 pada awal revolusi, *sneakers* itu dibuat dengan menyusun tema kehidupan di pedesaan yang mata pencaharian desa itu adalah menenun. Berdasarkan kategorinya, jargon *air woven* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *air* yang berkategori nomina dan morfem *woven* yang berkategori nomina.



Gambar 3. proses pembentukan jargon *compounding city series, island series, air safari, dan air woven*:

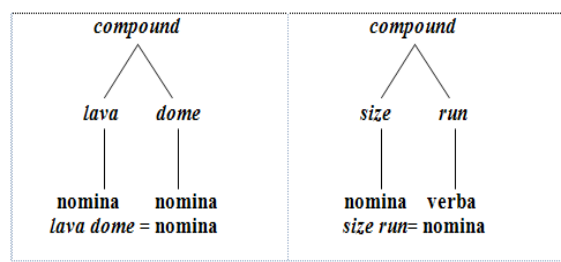
Data 13: Lava Dome

Pengkajian secara morfologis pada jargon *lava dome* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *lava dome* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *lava* dan morfem *dome*. Jargon *lava dome* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *lava dome* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *lava dome* merupakan bentuk dari *exocentric compound*, karena tidak memiliki memiliki inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada, *lava dome* merupakan *sneakers* Nike yang dirilis pada tahun 1989, yaitu *sneakers* yang dirancang khusus untuk *climbing mountains* yaitu untuk mendaki gunung. Bahan *sneakers* itu disesuaikan dengan kebutuhan dari pendaki gunung, *sneakers* itu merupakan *sneakers* yang dapat digunakan dengan fleksibel namun tetap kuat. Berdasarkan kategorinya, jargon *lava dome* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *lava* berkategori nomina dan morfem *dome* yang berkategori nomina.

Compound nomina (nomina + verba)

Data 14: Size Run

Pengkajian secara morfologis pada jargon *size run* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *size run* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *size* dan morfem *run*. Jargon *size run* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *size run* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *size run* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *size*, karena *size run* merupakan ukuran *sneakers* yang dimiliki oleh toko tertentu, yang biasanya toko itu memiliki ukuran yang lengkap dari ukuran 6-12. Berdasarkan kategorinya, jargon *size run* merupakan sebuah *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *size* berkategori nomina dan morfem *run* yang berkategori verba.



Gambar 4. proses pembentukan jargon *compounding lava dome dan size run*.

Compound nomina (adjektiva+ nomina/ nomina + adjektiva)

Data 15 : Broken Size

Pengkajian secara morfologis pada jargon *broken size* menunjukkan bagian proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon itu dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *broken* dan morfem *size*. Jargon *broken size* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *broken size* ditulis secara terpisah. Jargon *broken size* merupakan bentuk kata majemuk *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *size*, karena *broken size* merupakan ukuran *sneakers* yang tidak lengkap dalam sebuah toko. Berdasarkan kategorinya, jargon *broken size* merupakan sebuah *compound nomina* karena terbentuk dari morfem *broken* yang berkategori adjektiva dan morfem *size* yang berkategori nomina.

Data 16: Player Exclusive

Pengkajian secara morfologis pada jargon *player exclusive* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *player exclusive* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *player* dan morfem *exclusive*. Jargon *player exclusive* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *player exclusive* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *player exclusive* merupakan bentuk dari *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *player*, karena *player exclusive* merupakan *sneakers* yang di buat khusus untuk seorang atlet tertentu dan tidak dirilis secara umum. Berdasarkan kategorinya, jargon *player exclusive* merupakan sebuah *compound nomina* karena terbentuk dari morfem *player* berkategori nomina dan morfem *exclusive* yang berkategori adjektiva.

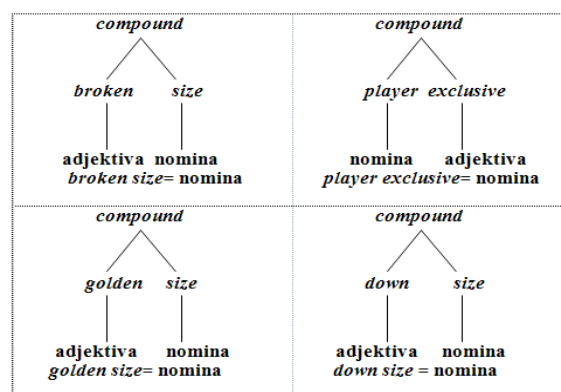
Data 17: Golden Size

Pengkajian secara morfologis pada jargon *golden size* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *golden size* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *golden* dan morfem *size*. Jargon *golden size* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *golden size* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *golden size* merupakan bentuk dari kata majemuk *endocentric*

compound, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *size*, karena *golden size* merupakan ukuran *sneakers* yang paling banyak diminati, contohnya jika di indoneasia rata-rata ukuran yang diminati itu ukuran 42 cm dan 43cm. Berdasarkan kategorinya, jargon *golden size* merupakan sebuah *compound nomina* karena terbentuk dari morfem *golden* yang berkategori adjektiva dan morfem *size* yang berkategori nomina.

Data 18: Down Size

Pengkajian secara morfologis pada jargon *down size* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *down size* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *down* dan morfem *size*. Jargon *down size* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *down size* ditulis sebagai kata yang terpisah. Jargon *down size* merupakan bentuk dari kata majemuk *endocentric compound*, karena memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *size*, karena *down size* merupakan ukuran pada kaki seseorang yang biasanya menggunakan *sneaker* dengan ukuran 38 menjadi 37, jadi ukurannya turun 1 cm. Berdasarkan kategorinya, jargon *down size* merupakan sebuah *compound nomina* karena terbentuk dari morfem *down* yang berkategori adjektiva dan morfem *size* yang berkategori nomina.



Gambar 5. proses pembentukan jargon *compounding broken size, player exclusive, golden size, dan down size*.

Data 19: Hyperstrike

Pengkajian secara morfologis pada jargon *hyperstrike* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *hyperstrike* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *hyper* dan morfem *strike*. Jargon *hyperstrike* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *close form* (bentuk tertutup)

karena jargon *hyperstrike* ditulis sebagai kata tunggal. Jargon *hyperstrike* merupakan bentuk dari kata majemuk *exocentric compound*, karena jargon itu tidak memiliki inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. *Hyperstrike* merupakan sebuah sneakers rilisan limited yang biasanya dirilis tanpa pemberitahuan yang tiba-tiba habis. Berdasarkan kategorinya, jargon *hyperstrike* merupakan *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *hyper* yang berkategori adjektiva dan morfem *strike* yang berkategori nomina.

Data 20: Super Shell

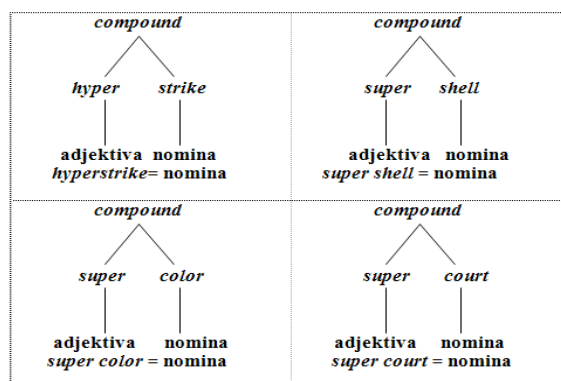
Pengkajian secara morfologis pada jargon *super shell* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *super shell* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *super* dan morfem *shell*. Jargon *super shell* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *super shell* ditulis sebagai kata terpisah. Jargon *super shell* merupakan bentuk dari kata majemuk *exocentric compound*, karena jargon itu tidak memiliki inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. *Super shell* merupakan sneakers Adidas hasil kerja sama (*collaboration*) dengan Pharell Wiliam yaitu jenis sneakers dengan gambar yang ada pada bagian *shelltoe*, yaitu bagian sneakers Adidas yang menyerupai kerang dan menutupi jari kaki. Berdasarkan kategorinya, jargon *super shell* merupakan *compound* nomina karena terbentuk dari kata *super* yang berkategori adjektiva dan kata *shell* yang berkategori nomina.

Data 21: Super Color

Pengkajian secara morfologis pada jargon *super color* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *super color* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *super* dan morfem *color*. Jargon *super color* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *super color* ditulis sebagai kata terpisah. Jargon *super color* merupakan bentuk dari kata majemuk *endocentric compound*, karena jargon itu memiliki satu inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. Adapun inti kata itu terletak pada kata *color*, karena *super color* merupakan sneakers Adidas hasil *collaboration* dengan Pharell Wiliam yaitu jenis sneakers dengan model yang sama namun dirilis dengan lima puluh warna yang berbeda. Berdasarkan kategorinya, jargon *super color* merupakan *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *super* yang berkategori adjektiva dan morfem *color* yang berkategori nomina.

Data 22: Super Court

Pengkajian secara morfologis pada jargon *super court* menunjukkan bagian dari proses morfologis yang disebut *compounding* atau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk. Proses *compounding* pada jargon *super court* dibentuk dengan cara menggabungkan dua morfem bebas, yaitu morfem *super* dan morfem *court*. Jargon *super court* merupakan kata majemuk yang ditulis dengan bentuk *open form* (bentuk terbuka) karena jargon *super court* ditulis sebagai kata terpisah. Jargon *super court* merupakan bentuk dari kata majemuk *exocentric compound*, karena jargon itu tidak memiliki inti kata (*head*) untuk mengetahui makna yang ada. *Super court* merupakan jenis sneakers Reebok yang digunakan untuk olah raga tennis di dalam ruangan. Berdasarkan kategorinya, jargon *super court* merupakan *compound* nomina karena terbentuk dari morfem *super* yang berkategori adjektiva dan morfem *court* yang berkategori nomina.



Gambar 6. proses pembentukan jargon *compounding* *hyperstrike*, *super shell*, *super color*, dan *super court*

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *compounding* dalam jargon *sneakers* berbahasa Inggris dalam komunitas *sneakerhead* di Bandung berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi bentuk tulisan dan bentuk kata majemuk didapati bentuk tulisan *close form* (bentuk tertutup) yang ditulis sebagai kata tunggal dan *open form* (bentuk terbuka) yang ditulis sebagai kata terpisah, kemudian, bentuk kata majemuk dalam penelitian ini didapati dua yaitu *endocentric compound*, yaitu *compounding* yang maknanya dapat di tentukan dari salah satu inti kata *compounding* itu, dan *exocentric compound*, yaitu *compounding* yang benar-benar memiliki makna baru dan tidak mempertahankan makna asal atau tidak memiliki inti kata untuk menentukan makna itu. Berdasarkan kategorinya didapati kategori *compound* nomina yang dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *compound* nomina (nomina+nomina), *compound* nomina (nomina+ verba), dan *compound* nomina (nomina+adjektiva / adjektiva + nomina).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra bersari yang telah melakukan *peer reviewer* terhadap artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Archibald, W.O. (2016). *Contemporary Linguistic Analysis An Intoduction*. Toronto: Library and Archives Canada Cataloguing in Publication.
- Booij, G. (2005). *The Grammar of Word*. United States: Oxford University Press..
- Cahyanti, R.D. (2016). Compound Words Used in Stephanie Meyer's Twilight. *Journal on English as Foreign Language* , 6, (2), 61-66.
- Firdaus, W. (2011). Kata-kata Serapan Aceh dari Bahasa Arab: Analisis Morfosemantis. *Sosiohumaniora*, 13, (2), 223-224.
- Garing, J. (2017). Penggunaan Jargon oleh Komunitas Waria di Jejaring Sosial Facebook. *Ranah Jurnal Kajian Bahasa*, 6, (1), 1-29.
- Giyatmi, R. W. (2018). Blending Sebuah Alternatif dalam Penamaan Makanan dan Minuman Ringan. *Addabiyat*, 2, (2), 156-180.
- Lieber, R. (2007). *Introducing to Morphology*. United States: Cambridge University Press.
- Longman. (2000). *Longman Dictionary of American English*. England: Longman Group UK Ltd.
- Napitupulu, F. (2016). Comparative Study of Compound Words in English and Indonesian. *The Episteme Journal of Linguistic and Literature*, 3, (1), 1-7.
- Plag, I. (2002). *Word Formation In English* . New York: Cambridge University Press .
- Pratiwi, D. W. (2015). Penggunaan Jargon oleh Narapidana di Lapas Wanita Kelas IIA Medan. *Jurnal Sasindo*, 6, (2), 1-12.
- Smith, N. (2018). *Kicks The Great American Story of Sneakers*. New York : Crown Publishing.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Yule, G. (2016). *The Study of Language*. United States: Cambridge University Press.

DISKURSUS PERIZINAN EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT: STUDI KASUS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Faris Rahmadian, Arya Hadi Dharmawan, dan Rilus A. Kinseng

Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga

Email: farisrahmadian@gmail.com

ABSTRAK. Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama minyak kelapa sawit dunia, hal tersebut berkonsekuensi pada ekspansi perkebunan kelapa sawit Indonesia yang terus menerus terjadi. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan di Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, wilayah ini merupakan salah satu wilayah dengan laju perkembangan industri kelapa sawit yang masif di Indonesia. Alih fungsi lahan untuk perkebunan bahkan sudah dilakukan sejak masa transisi dari industri kayu pada Tahun 1990-an. Sehingga, penelitian ini diharapkan mampu untuk: (1) Mengetahui diskursus kemunculan kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit; (2) Menganalisis dinamika proses perizinan dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam terhadap berbagai informan di tingkat kabupaten sampai dengan desa, observasi serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna perizinan selalu melekat dengan kepentingan ekspansif dan korporasi yang berasal dari konsekuensi pembangunan dan konsep “modernisasi” pada rezim Orde Baru. Hal tersebut juga berdampak pada pemaknaan sumber daya alam sebagai sebatas komoditas, yang ditunjukkan dengan kemunculan “retakan” extralegal dan ilegal dalam perizinan perkebunan kelapa sawit khususnya pasca Orde Baru. “Retakan” dalam proses perizinan tersebut tidak hanya memunculkan celah dalam peraturan perundangan, melainkan juga mereproduksi (dan mereplikasi) kultur eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi pada saat ini merupakan konsekuensi dari dinamika politik yang terbangun sejak era sebelumnya, dan menunjukkan bagaimana diskursus pembangunan orde baru masih terpelihara dalam konteks kebijakan dan politik perizinan.

Kata kunci: perizinan kelapa sawit; ekologi politik; diskursus; proses kebijakan

LICENSING DISCOURSE OF OIL PALM EXPANSION: CASE STUDY OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY

ABSTRACT. Indonesia is one of the main suppliers of palm oil in the world. Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan is one of the regions with the rapid development of palm oil industry in Indonesia. The conversion of land for plantations has even been carried out since the transition from the wood industry in the 1990s. This research is expected to be able to: (1) Analyzing the discourse of oil palm plantations expansion policies; (2) Analyzing the dynamics of the licensing process in the expansion of oil palm plantations. This research was conducted with qualitative methods, with primary data sources from in-depth interviews with various informants at the district and village level, observation and document analysis. The results of the study shows that the meaning of “licensing” is always inherent with expansionary and corporate interests, which originates from the concept of “modernization” and development policies in the New Order regime. It also has an impact on how of natural resources seen as commodities, as indicated by the emergence of extralegal and illegal “breaks” in the licensing processes of oil palm plantations especially post New Order era. “Breaks” in the licensing process not only lead to the loopholes of policy, but also reproduce (and replicate) exploitative cultures in Indonesian natural resources utilization. This study wanted to show that the expansion of oil palm plantations that currently occurred was a consequence of the political dynamics that had been built since the previous era, and showed how the the New Order developmentalism discourse was still maintained in the context of policies and licensing.

Key words: oil palm licensing; political ecology; discourse; policy process

PENDAHULUAN

Permasalahan pembangunan global yang menjadi tren pada akhir dekade ini adalah krisis ekologi yang terus direproduksi dalam ruang dominasi industri kapitalistik dan aksis-aksis neoliberalisme (Corson, 2011; Parr, 2012). Peluso dan Lund (2011) menyatakan bahwa kehancuran alam kontemporer justru terjadi akibat revolusi teknologi dan kapitalisme dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Indonesia kerap kali dianggap sebagai gambaran bagaimana revolusi teknologi dan kapitalisme memporak-porandakan sumber daya alamnya. Perkembangan perkebunan kelapa sawit dan monokulturalisasi di Indonesia telah membawa perubahan sosial hingga eksosistem yang

begitu masif dan tidak hanya menyimpan dinamika konflik, melainkan hingga penanggalan sumber nafkah dan segala aspek sosiokulturalnya (Chamim *et al.* 2012). Pada era kontemporer, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga telah sukses menjadi akumulator kapital bagi segelintir pihak, sementara konsekuensi perubahan lanskap dan hilangnya biodiversitas hingga disharmoni relas sosial harus dihadapi oleh masyarakat dan ekosistem lokal (Koh dan Willcove, 2008; Wicke *et al.* 2011; Barral, 2014). Aspek lainnya yang mengalami transformasi secara besar-besaran adalah perubahan struktur nafkah masyarakat pedesaan, yang pada awalnya menggantungkan hidupnya pada hutan dan produk di dalamnya, menjadi harus mencari alternatif sumber nafkah pada ekosistem yang telah berubah.

Kehadiran aktor negara dalam proses ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki tendensi terhadap akumulasi kapital yang cukup besar, yang tidak jarang kebijakannya berdampak terhadap degradasi sosial hingga ekosistem secara juga masif (Arce, 2003; McCarthy dan Cramb, 2009; McCarthy *et.al.* 2012; Gatto *et al.* 2015). Negara seolah menjadi alat untuk ekstraksi sumber daya alam yang sah dan legal dengan penguasaannya terhadap sistem dan kebijakan, hingga “dominasi” mereka atas pengetahuan dan teknologi yang bersifat positivistik, yang berbanding terbalik pengetahuan masyarakat di pedesaan (Riggs *et al.* 2016; Asiyambi 2016). Ellis dan Biggs (2001) juga menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran makna “pembangunan” (khususnya di wilayah pedesaan) oleh pemerintah secara global pasca periode 1990-an. Seperti disebutkan oleh Li (2012), bahwa “kehendak untuk memperbaiki” masih dioperasikan di Indonesia sejak puluhan tahun lamanya, pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan dan perspektif yang sama dalam memandang manusia dalam suatu kontinum yang satu dan perlu diatur, dan mengarahkan perilaku individu ataupun masyarakat atas nama perbaikan penghidupannya.

Tahun 2016, Indonesia adalah penguasa sebagian besar suplai Crude Palm Oil (CPO) dunia, mem-produksi sedikitnya 31,49 juta ton minyak sawit, yang menghasilkan setidaknya 18 miliar USD dari pendapatan ekspor (BPS 2016). Melekatnya komoditas pertanian ekspansif dengan bisnis kapitalistik kerap dimaknai sebagai eksekusi yang destruktif dalam berbagai aspek, hingga degradasi sosial dan ekologi yang hampir tidak dapat dihindari. Marx (1994) menyatakan, tendensi negara pasca-revolusi industri terus didorong oleh kepentingan segmental, yang terus berkembang sesuai dengan kehendak terhadap penguasaan moda produksi. Kepentingan tersebut menjadikan negara cenderung sinonim dengan kepentingan kapitalistik. Dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, negara juga kerap lebih berpihak pada kepentingan investor, yang salah satunya ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mendorong investasi oleh korporasi.

Padahal, dalam konteks kebijakan, terlebih yang berkaitan dengan sumber daya alam, komponen masyarakat seharusnya diposisikan sebagai aktor paling utama. Karena masyarakat memiliki pola relasi yang jauh lebih kompleks dengan alamnya. Sehingga industri-industri modern justru dapat secara nyata menyebabkan degradasi lingkungan yang mengancam eksistensi masyarakat lokal. Jika dilihat pada konteks Indonesia, salah satunya dapat ditunjukkan adalah industri perkebunan kelapa sawit. Terlebih, industri tersebut seolah berada pada posisi primadona karena kemampuannya berkontribusi pada ekonomi regional hingga nasional.

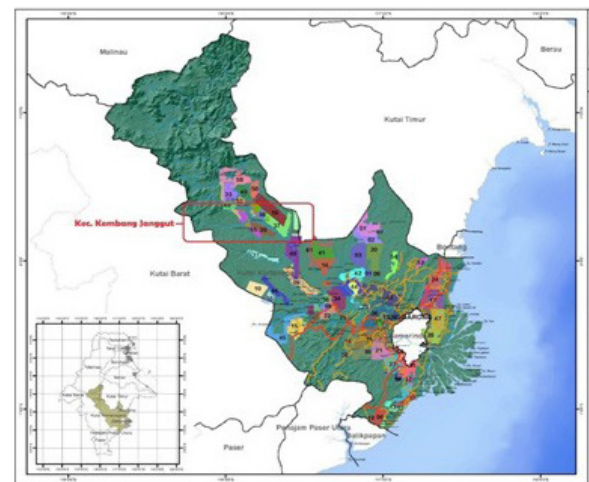
Kebijakan yang terus mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit dan “kemudahan” dalam perizinan

yang dilakukan oleh pemerintah, menjadikan industri ini terus berkembang dan bahkan menjustifikasi berbagai eksekusi-eksekusi negatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dinamika perizinan dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui diskursus kemunculan kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit
2. Menganalisis dinamika proses perizinan dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Lokasi tersebut dipilih karena dianggap menjadi salah satu kawasan dengan perkebunan kelapa sawit yang masif, tendensi pengembangan ekonomi regional yang berbasis ekonomi perkebunan dan terdapat dinamika masyarakat pasca kehadiran perkebunan kelapa sawit. Beberapa pertimbangan pemilihan lokasi penelitian tersebut juga adalah karena secara makro, perkembangan perkebunan kelapa di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara di klaim lebih dari 30% per tahun, demikian dengan produksinya yang meningkat rata-rata hampir mencapai 150% pertahun dengan produksi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 50.241 Ton CPO atau 193.233 Ton TBS (DISBUN 2015).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur (DISBUN2015)

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh langsung di lapangan melalui informan-informan kunci yang dipilih melalui *maximum variation* dan *snow balling*. Proses pemerolehan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan naratif (komunikasi secara lisan semi-terstruktur), observasi (pengamatan terhadap subjek atau objek yang dilakukan secara berjarak dan tidak terstruktur) dan diskusi kelompok terfokus. Data sekunder diperoleh dari

naskah akademis, data, dokumen serta literatur sejenis lainnya yang relevan dari badan atau instansi yang terkait. Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui dua tahap: (1) Reflektif; (2) Kategoris. Proses Reflektif dilakukan dengan metode analisis dekonstruktif, yakni memperdalam dan mengurai teks data yang secara khusus berisi pertentangan (logosentris) dalam hasil-hasil wawancara maupun observasi. Tahap selanjutnya adalah proses kategoris, dilakukan dengan memberi konten dekriptif, *setting*, hingga konteks berdasarkan tujuan penelitian pada teks data yang telah diperdalam pada tahap sebelumnya (Miles dan Huberman 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Kemunculan Perizinan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Perizinan dalam sektor perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara ekspansif di Indonesia haruslah dipahami sebagai bagian integral dari konstelasi politik dan ekonomi yang telah terbangun sebelumnya. sejak rezim Orde Baru (1966-1998). Situasi ekonomi politik Indonesia pasca reformasi (setelah 1998) memang berubah, kebijakan-kebijakan populis baru dimunculkan dan totalitas negara ditumbangkan. Namun, Orde Baru telah menciptakan “politik prakondisi” yang esensial, yang berperan dalam mengarahkan struktur hingga kultur birokrasi perizinan Indonesia pasca reformasi. Terlebih jika membahasa konteks sumber daya alam dan kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit. GAPKI, yang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesiamenyatakanbahwakelapasawit di Indonesia “baru memperoleh momentum percepatan perkembangan sejak tahun 2000 pasca reformasi 1998”.

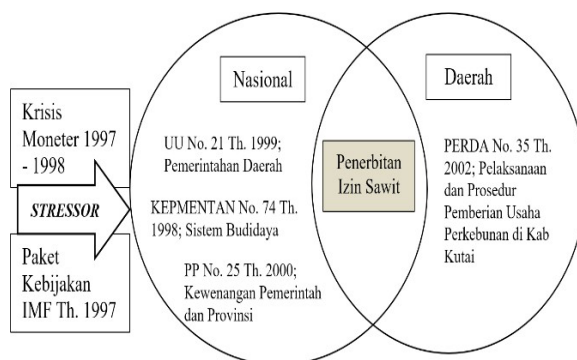
Berdasarkan data yang diperoleh dari informan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, “momentum” yang dimaksud tersebut (khususnya di Kab. Kutai Kartanegara) adalah: (1) Habisnya masa kejayaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sehingga banyak peralihan kepemilikan lahan. Lahan eks-HPH yang tidak dilakukan reforestasi, ditambah jaringan bisnis antar apengusaha HPH dan PBS yang telah terjalin sejak Orde Baru mempercepat dan mempermudah proses transisi tersebut; (2) Implementasi otonomi daerah pada Tahun 1999, langsung di respons oleh Pemerintah Daerah dengan program kerja pembangunan yang menekankan pada perkembangan sektor perkebunan dan pertambangan. Diantaranya dengan penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) Kutai Kartanegara No. 35 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan.

Pada tataran nasional, dorongan kebijakan yang secara spesifik terkait dengan ekstensifikasi kelapa sawit

di Indonesia telah dimulai sejak 1977, yang juga pada dasarnya merupakan “respons” terhadap dibukanya peluang investasi di sektor perkebunan melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Kemunculan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang diinisiasi oleh *World Bank* pada tahun 1980-an juga menjadi titik krusial perkembangan sawit di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, titik substantif ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit pasca reformasi seperti telah disebutkan sebelumnya salahsatunya didorong oleh paket kebijakan *International Monetary Fund* (IMF) untuk penanggulangan krisis moneter pada tahun 31 Oktober 1997, melalui *Leter of Intent* (LoI) yang memuat *Memorandum Of Economic and Financial Policies* antara pemerintah Indonesia dengan IMF, dalam dokumennya tertera pernyataan berikut:

“The list of activities open to foreign investors will be simplified and further expanded. The government will study the retail sector with a view to partially opening this sector up to foreign investors and the policy on palm oil which is now open to foreign investment will be applied evenly”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa paket kebijakan IMF untuk mengatasi krisis moneter tahun 1997/1998 di Indonesia harus direspons dengan kemudahan (simplifikasi) proses perizinan investor asing di sektor perkebunan kelapa sawit. Bahkan pada LoI selanjutnya kepada pemerintah Indonesia pada 22 Juli 1999, pihak IMF tegas menyatakan “*Next on the agenda is the privatization of a large palm plantation and gold/ nickel companies*”. Hal tersebut berkonsekuensi nyata pada restrukturisasi perbankan dan ekonomi Indonesia, dan menghasilkan gelombang masif lanjutan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia.



Gambar 2. Kebijakan Utama Pendorong Percepatan Izin Kelapa Sawit Pasca Reformasi di Kab. Kutai Kartanegara

Berdasarkan Gambar 2, dapat dipahami bahwa *stressor* berdampak pada kebijakan di level nasional dan daerah yang mendorong pada penerbitan izin perkebunan kelapa sawit secara lebih agresif. Namun, untuk kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan sebelum secara

“resmi” terbit PERDA No. 35 Th. 2002 yang mengatur secara teknis pelaksanaan dan prosedur pemberian usaha perkebunan, sudah terdapat beberapa perusahaan kelapa sawit yang melakukan aktivitasnya, khususnya berkaitan dengan proses pelepasan lahan (*land grabbing*). Seperti disebutkan oleh informan AW (70 Th), bahwa “*habis zaman HPH, tahun 1990-an masuk sawit dimana-mana*”. Pada dasarnya, wajah yang ingin ditampilkan oleh skema pembangunan adalah “pengentasan kemiskinan”, namun pada praktiknya marjinalisasi dan kehancuran lingkungan justru meningkat seiring tendensi negara terhadap investasi sektor swasta.

Proses transisi ini yang menjadi awal dimulainya periode ekspansi masif perkebunan kelapa sawit di Kab. Kutai Kartanegara, yang hingga pada Tahun 2015 setidaknya terdapat 86 perusahaan perkebunan dan setidaknya 16 pabrik perkebunan kelapa sawit. Proses pemberian izin perkebunan tidak selalu berjalan lancar, pihak Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara bahkan sempat mengakui bahwa proses perizinan pada era pasca reformasi “mudah” tetapi “rumit”. Diantaranya dikarenakan persoalan infrastruktur yang belum memadai hingga ke wilayah-wilayah utara atau ke arah hulu, sehingga proses pembebasan lahan dan pembangunan industrinya lebih menghadapi tantangan.

Namun, dapat diketahui bahwa pasca krisis moneter 1997/1998 terjadi peningkatan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit milik swasta (*private*). Meski, terdapat juga titik pelambatan yang diantaranya diakibatkan penerbitan UU No. 14 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan 2004). Peraturan tersebut memang membuka peluang-peluang baru untuk para pengusaha sawit, namun pada awal kemunculannya informan menyatakan banyak disibukkan dengan “proses adaptasi politik” (ditambah ada SK Gubernur yang dikeluarkan Tahun 2014 terkait dengan struktur lembaga Dinas Perkebunan). Dua komitmen utama pemerintah Indonesia pasca UU Perkebunan 2004 adalah sebagai berikut: (1) Komitmen pemulihan total ekonomi pasca reformasi melalui investasi dan pemenuhan *demand* CPO; (2) Komitmen terkait perlindungan lingkungan serta keseimbangan sosial dan ekologi.

Komitmen tersebut merefleksikan benturan klasik antara kepentingan ekonomi vs ekologi. Meski demikian, benturan tersebut menjadi tantangan baru pasca reformasi. Karena pada Orde Baru, aspek lingkungan sangat minor dan menjadikan alam sebagai komoditas justru dihalalkan. Penyesuaian tersebut khususnya terkait dengan aspek birokrasi dan kesesuaian lingkungan, karena dalam UU Perkebunan 2004 terdapat pembahasan khusus tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang menjelaskan bagaimana izin usaha perkebunan harus memiliki dokumen-dokumen persyaratan lingkungan serta secara

umum harus sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Meski demikian, dampak perlambatan ekspansi perkebunan kelapa sawit akibat “penyesuaian” UU ini tidak lama. Hal ini dikarenakan memang UU Perkebunan 2004 ini dirasa jauh lebih berpihak kepada investor. Dalam bagian Penjelasan Umum, logika dasar penerbitan UU tersebut dapat dilihat:

“Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi dan krisismoneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara”

UU tersebut dalam pembukanya sudah memposisikan perkebunan sebagai primadona dalam konteks ekonomi. UU tersebut juga menyatakan “*demi meningkatkan perekonomian rakyat*”, namun poin-poin di dalamnya ternyata justru banyak berpihak pada investasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak dirinci dengan jelas. UU Perkebunan 2004 akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2010, pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 21 dan 47, atau pasal tentang “perusakan lahan atau kebun”. Hal itu dikarenakan kedua pasal tersebut kerap dijadikan alat bagi perusahaan untuk mengkriminalisasi masyarakat. Tumpang tindih klaim tanah antara HGU dan masyarakat hampir selalu ditemui, dan pasal tersebut justru dianggap menjadi “tameng” untuk melindungi korporasi. Tidak lama setelahnya muncul revisi atas UU Perkebunan Tahun 2004, yakni UU No. 39 Tahun 2014. Secara substansi, terdapat perbedaan terkait dengan aspek penggunaan lahan, penanaman modal, serta peran serta masyarakat. Seperti disebutkan informan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, bahwa revisi UU Perkebunan Tahun 2004 menjadi UU Perkebunan Tahun 2014 (UU Perkebunan 2014) adalah terkait aspek “keberpihakan”.

Jika dikaji lebih lanjut pada UU Perkebunan, perbedaan utamanya memang muncul pada aspek peran serta masyarakat, yang lebih menekankan pada kolaborasi dan peran pengusaha perkebunan untuk melibatkan masyarakat dan mendorong ekonomi dan penghidupan mereka. Lalu juga terdapat penambahan Pasal 16, yang menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan yang dimilikinya setidaknya sebesar 30% dari luas total hak atas tanah dengan tenggat waktu minimal tiga tahun, dan dalam enam tahun sudah mengusahakan seluruh lahan yang dimilikinya. Pasal tersebut cukup substansial untuk mengantisipasi perusahaan melakukan ekspansi dan mengakumulasi lahan cadangan, meski bagi beberapa informan langkah tersebut ‘sudah terlambat’. Perbedaan utama lainnya

adalah terkait dengan aspek izin, UU Perkebunan Tahun 2014 memiliki bab terperinci terkait dengan syarat-syarat penerbitan izin usaha perkebunan, diantaranya dengan tegas menyebutkan bahwa untuk penerbitan izin usaha perkebunan setidaknya membutuhkan izin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan perkebunan di lokasi usaha, hingga sarana dan prasarana.

Meskipun secara normatif dan juga diakui oleh pemerintah bahwa UU Perkebunan mengalami revisi untuk perbaikan birokrasi hingga substansi di dalamnya, implementasi, tidak seluruhnya dapat berjalan dengan ideal. Arena perizinan untuk perkebunan kelapa sawit pun selanjutnya terbagi menjadi dua tipe, yakni: (1) Arena Perizinan Legal; (2) Arena Perizinan Ilegal.

Arena Perizinan Legal

Arena perizinan legal merupakan refleksi dari perizinan untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui prosedur dan mekanisme sah atau legal yang diatur oleh undang-undang serta komponen turunannya. Terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit, proses perizinan merujuk pada UU Perkebunan 2014 dan Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan Izin Perkebunan). Dalam UU Perkebunan 2014 pada Pasal 42 disebutkan bahwa kegiatan usaha budidaya perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan. Secara garis besar, UU Perkebunan dan Permentan Izin Perkebunan merincikan dokumen serta prasyarat lainnya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha perkebunan (IUP), yakni sebagai berikut:

- a. Izin Lingkungan. Izin ini merupakan izin pertama yang disebutkan dalam UU Perkebunan, yang dalam praktiknya merujuk pada PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (PP Izin Lingkungan) Proses ini berkenaan dengan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagai prasyarat kelayakan aktivitas usaha. Dalam penyiapan izin lingkungan, masyarakat harus diikutsertakan baik dalam konsultasi publik hingga penyusunan kerangka acuan. Secara teknis, izin ini diajukan ke pihak pemerintah di level kabupaten dan/atau level Provinsi dan dengan menyertakan: (1) Dokumen dan formulir Amdal atau UKL-UPL; (2) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; (3) Profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. Izin Lokasi. Izin lokasi merupakan izin paling dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh tanah dan memanfaatkan tanah tersebut untuk peruntukan usaha (HGU). Izin ini secara teknis merujuk Pada PermenATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi,

di dalamnya secara tegas (Pasal 12) bahwa pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan. Dalam hal ini adalah masyarakat lokal atau adat, proses dialog dan ganti rugi juga harus terselesaikan. Dalam formulir pengurusan izin lokasi di Kab. Kutai Kartanegara, disebutkan syarat utamanya adalah: (1) Rekomendasi kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten; (2) Peta atau sketsa lokasi dengan skala yang jelas; (3) Pernyataan kesanggupan ganti rugi; (4) Pertimbangan teknis pertanahan. Setelah izin lokasi diperoleh, pengajuan IUP harus melampirkan dilengkapi peta digital calon lokasi usaha dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Hal ini juga termasuk penyelesaian permasalahan dengan Dinas Kehutanan jika lahan yang diajukan untuk usaha perkebunan tumpang tindih atau beradadi kawasan hutan.

- c. Izin Prinsip. Dokumen ini pada dasarnya merupakan bagian integral dari proses pengajuan Izin Lokasi, karena Izin Prinsip adalah izin yang diberikan pemerintah (kewenangan Bupati dan/atau Gubernur) untuk menyatakan suatu kegiatan secara substansi telah sesuai dengan rencana pembangunan dan peruntukannya di daerah (termasuk juga Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Perkebunan). Izin ini juga berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam konteks investasi yang berkesesuaian dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
- d. Aspek Teknis Budidaya dan Perusahaan. Dokumen ini sifatnya sangat teknis karena berkenaan dengan rencana kerja perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan, sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), hingga rencana kerja kemitraan dengan masyarakat. Termasuk persyaratan dokumen berupa pernyataan perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (*Group*) belum menguasai lahan melebihi lahan batas paling luas yakni 100.000 ha.

Keempat izin dan dokumen tersebut merupakan syarat mutlak sebelum akhirnya dikeluarkan IUP perkebunan kelapa sawit. Untuk kasus di Kab. Kutai Kartanegara, seluruh proses perizinan berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

Pemusatan proses perizinan ini disebutkan oleh pihak BP2T Kab. Kutai Kartanegara bertujuan untuk memutus rantai birokrasi. Karena sebelum Tahun 2008, pengurusan proses perizinan dilakukan secara mandiri oleh pengusaha ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan, BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dsb. Hal tersebut juga sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, yang menekankan arah penguatan perekonomian daerah kepada sektor-sektor potensial

dan interkoneksi antar sektor-sektor ekonomi lainnya, dan sektor pertanian (termasuk kelapa sawit) dan industri pengolahan sebagai sektor pendorong. Makna “interkoneksi” antar sektor tidak hanya dipahami dalam konteks produksi, melainkan juga perizinan yang lebih efisien.

Pihak BP2T juga menyatakan bahwa selama ini selalu mendorong terciptanya “iklim” perizinan perkebunan kelapa sawit yang kondusif, bahkan mereka menyatakan telah mengusahakan sistem perizinan online sejak Tahun 2013, meski diakui belum mampu berjalan efektif. Namun, hal tersebut dianggap Pihak BP2T merupakan cerminan dari komitmen mereka dan pemerintah kabupaten dalam mengimplementasikan proses perizinan perkebunan kelapa sawit yang berdasarkan asas transparansi dan kemudahan dalam birokrasi. Demikian dengan pihak Dinas Perkebunan, mereka menyatakan bahwa terus mendorong proses perizinan yang “terbuka”, hal ini juga merupakan respons dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara, yang pada Tahun 2015 menyebutkan bahwa untuk mencapai capaian kerja dan target, maka salah satu strategi yang dilakukan adalah deregulasi dan debirokrasi perizinan, yang diwujudkan dalam bentuk kemudahan pelayanan dan proses perizinan. Informan AS, yang bekerja pada unit teknis Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara juga menyatakan hal sebagai berikut:

“Perizinan di Kukar itu salah satu yang paling bagus di Indonesia. Hampir selalu gak ada masalah antara perusahaan sama pemerintah, buktinya liat di peta sampai 2013 ada 80 lebih perkebunan di Kukar. Kita juga bagus untuk koordinasi sama SKPD lain, udah nggak ada lagi korupsi kaya gitu, apalagi ada aturannya sejak (kepemimpinan Presiden) Jokowi, ditambah sekarang diawasi ketat sama KPK.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana pihak Dinas Perkebunan mengakui bahwa proses perizinan yang transparan dan akuntabel adalah prioritas mereka pada saat ini. Meyakinkan juga pada investor dan publik bahwa korupsi dan sejenisnya hampir tidak mungkin lagi dilakukan. Peraturan yang dimaksud oleh informan AS di atas pada dasarnya merupakan yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Tahun 2014, yakni Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Terdapat sepuluh butir yang menyatakan bahwa semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri serta di dukung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memantau dan evaluasi program pembangunan daerah berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh

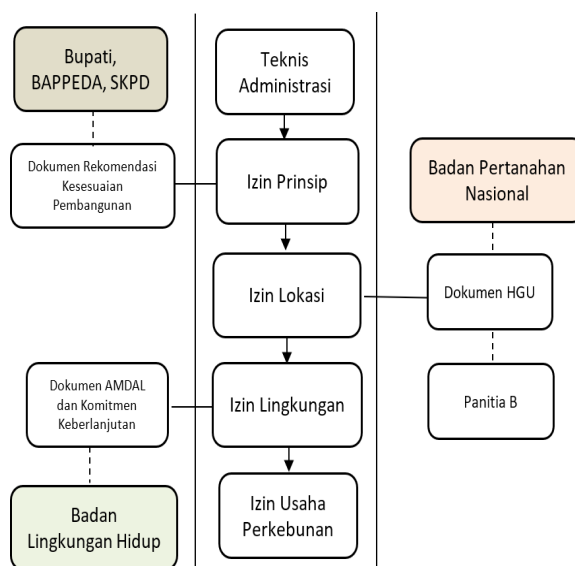
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga sejenis lainnya.

Ketatnya proses pengawasan semakin mengarahkan proses perizinan perkebunan kelapa sawit pada kondisi “ideal” yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, pihak perusahaan memiliki kritiknya tersendiri. Salah satunya adalah informan S, yang bekerja pada Divisi Keberlanjutan di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kec. Muara Kaman:

“Izin itu memang mudah, tapi prosesnya lama. Ada kroscek BPN, Disbun, Bappeda, segala macam”

Pernyataan informan S menunjukkan bagaimana dalam proses penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit masih terdapat rezim tata kelola yang berbeda khususnya, antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh izin lokasi (HGU) dan dinas-dinas di kabupaten untuk izin prinsip dan izin usaha. Sehingga memang proses perizinan di Indonesia masih menemui tantangan, khususnya terkait dengan keselarasan data antar instansi hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Secara garis besar, Gambar 4 menggambarkan bagaimana kedua rezim tata kelola tersebut sebetulnya sudah diatur untuk saling melengkapi dalam proses birokrasi, meskipun memang hal ini berkonsekuensi pada proses birokrasi yang sering kali dianggap oleh banyak pihak menjadi lebih panjang, tidak efisien dan rumit.



Gambar 4. Alur Inti Proses Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

Proses yang digambarkan pada Gambar 4 merupakan alur inti pada proses perizinan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut belum termasuk dengan proses izin pelepasan kawasan hutan (juga tentang SK Pencadangan) apabila lahan perkebunan berada di kawasan area hutan, yang harus diurus oleh pengusaha ke Dinas Kehutanan terkait.

Arena Perizinan Ilegal

Arena perizinan ilegal merupakan refleksi dari perizinan untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang tidak sah atau menggunakan jalur-jalur informal dan/atau ilegal yang tidak diatur oleh undang-undang serta komponen turunannya. Kemunculan proses perizinan ilegal seperti ini bahkan dapat ditelusuri sejak rezim Orde Baru (dari pola monopoli hingga praktik kolusi). Hal tersebut juga menjadi alasan terdapat rantai penghubung yang erat antara pengusaha HPH pada masa Orde Baru dengan pengusaha perkebunan sawit pada pasca reformasi.

Rantai penghubung tersebut berada dalam relasi kekuasaan, yang membentuk *habitus* baru dan selanjutnya diterima sebagai konsep “kebenaran”. *Habitus* tersebut melingkupi aspek pemahaman bahwa investor adalah prioritas pembangunan dan dekat dengan para elite penguasa, sehingga cara apapun yang mereka tempuh untuk mendapat izin dapat dibenarkan. Sehingga, dipahami bahwa salah satu faktor pendorong dasar dalam kemunculan proses perizinan ilegal adalah faktor birokrasi dan jejaring kuasa yang korup, yang mengkristal melalui persekutuan bisnis dan kroni Orde Baru (Robison, 1978; Barbier, et al. 1995; McLeod 2000). Situasi tersebut terus direproduksi hingga pasca reformasi, dikarenakan *habitus* tersebut mampu dikondisikan oleh dua prakondisi utama: (a) Prakondisi Internal, yakni adanya dorongan keinginan dan/atau hasrat dari dalam diri yang dibentuk oleh empirisasi atas budaya dan lingkungan; (b) Prakondisi Eksternal, yakni adanya dorongan akibat struktur birokrasi yang penuh celah dan menciptakan iklim yang suportif dalam aktivitas-aktivitas ilegal.

Jika merujuk pada alur proses perizinan, “retakan” dalam prosedur birokrasi terjadi karena adanya benturan dua rezim tata kelola dalam perizinan yang berbeda. Karena dalam relasi dua rezim, terdapat “titik tengah” yang kerap tidak terhubung dan menciptakan celah yang dapat menjadi jalan pintas dalam perizinan perkebunan kelapa sawit. Retakan juga dapat bermakna ganda, yakni *extralegal* dan *totalilegal*:

- Retakan dalam arti *extra legal* adalah celah yang muncul dikarenakan faktor tidak jelasnya dan/atau kerancuan dalam peraturan perundangan. Mereka dapat mengeksploitir dan bahkan memanipulasi penafsiran perundangan untuk mencapai kepentingan tertentu.
- Retakan dalam arti *total ilegal* adalah celah dalam perizinan yang disadari dan dimanfaatkan karena terdapat peluang dan/atau kesempatan untuk menyelewengkan atau mencurangi proses perizinan yang berlaku, meliputi penyuapan, pemalsuan atau penipuan, dan sebagainya.

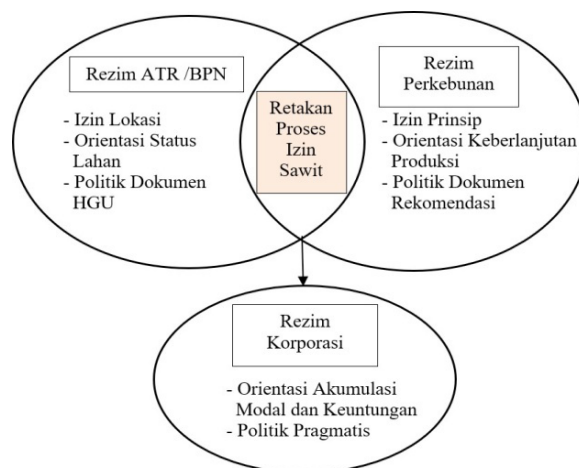
Retakan-retakan tersebut dieksploitasi ketika pihak yang mengajukan izin tidak memiliki (atau

bahkan, tidak mau) melengkapi dokumen perizinan, menghindari tanggung jawab (khususnya yang berkaitan dengan aspek lahan, lingkungan dan masyarakat), melakukan akumulasi lahan perkebunan, dan menghindari proses birokrasi yang dianggap terlalu rumit. Untuk kasus di Kab. Kutai Kartanegara, informan MI yang merupakan mantan pelaksana tugas Dinas Perkebunan menyatakan hal sebagai berikut:

“Mungkin memang proses perizinan di Kukar bisa dibilang bagus. Tetapi harus diakui juga kita banyak ‘kecolongan’, misalnya waktu pengajuan izin prinsip ternyata lahan yang diajukan tidak sama dengan yang nanti ditanami. Perusahaan nambah-nambah sendiri. Atau juga misalkan rencana kerja perkebunan yang tidak sesuai antara dokumen dengan kenyataan. Makanya beberapa tahun belakangan kita tekan terus perusahaan-perusahaan yang bohong dan wanprestasi, dan kita akui memang ada beberapa di Kukar yang seperti itu”

Dapat diketahui, bahwa salah satu pemicu utama dari kemunculan retakan-retakan tersebut adalah karena inefisiensi dan tidak sinkronnya rezim tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit. Semakin terbukanya celah ditambah dengan *habitus* yang berlandaskan logika “investor adalah prioritas” menjadikan praktik ini dapat terus terpelihara.

Benturan Rezim Tata Kelola kebijakan antara Agraria Tata Ruang dan BPN (ATR/BPN) dengan Rezim Perkebunan pada akhirnya menghasilkan penciptaan sebuah rezim baru, yakni “Rezim Korporasi” (Gambar 5).



Gambar 5. Pendorong Arena Perizinan Ilegal dalam Aspek Struktural Birokras

Retakan yang muncul akibat benturan Rezim ATR/BPN dan Rezim Perkebunan ada yang bersifat *extra legal* serta *ilegal*. Retakan dalam prosedur birokrasi yang bersifat *extra legal* untuk kasus di Kab. Kutai Kartanegara ditandai dengan upaya “penafsiran” yang berbeda terhadap Pasal 42 UU Perkebunan tentang perizinan, yang menyebutkan “kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan hanya

dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan". Penggunaan kata "dan/atau" dalam Pasal 42 kerap dimanfaatkan sebagai celah oleh banyak pengusaha perkebunan, dan aktivitas usaha perkebunan dan eksploitasi lahan sudah dilakukan bahkan ketika belum memiliki HGU. Proses penerbitan HGU merupakan salah satu proses yang paling kompleks dalam perizinan perkebunan kelapa sawit, seperti disebutkan oleh informan dari BPN kantor wilayah Kab. Kutai Kartanegara:

"Penerbitan HGU prosesnya panjang, dari pengukuran, analisis tata guna lahan, sampai nanti ada Panitia B yang melakukan penelitian, pertimbangan sampai sidang dan baru dibuat laporan pemeriksaan. Idealnya prosesnya tiga-empat bulan, tapi bisa juga sampai berbulan-bulan."

Penerbitan HGU membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang dari proses-proses perizinan lainnya, seperti izin prinsip maupun izin lingkungan. Oleh karenanya, IUP yang diterbitkan hampir kebanyakan hanya berdasarkan pada Izin Prinsip dan Izin Lingkungan, sedangkan lokasinya sendiri kerap masih belum jelas. "Izin lokasi" yang dilampirkan dalam proses pengajuan IUP sifatnya hanya proyeksi, sehingga tidak bermakna lahan tersebut telah dibebaskan dan mendapat "izin" dari masyarakat setempat. Seperti dalam dokumen "*Check List Permohonan IUP*" yang diperoleh dari BP2T, pada poin Izin Lokasi terdapat pernyataan "Izin Lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi". Atau dengan kata lain, sifat Izin Lokasi untuk memperoleh IUP hanya sebatas persetujuan dari Bupati, dan secara substantif sama dengan "Izin Prinsip" yang sifatnya hanya rekomendasi dan pertimbangan kesesuaian tata ruang dan pembangunan dengan rencana aktivitas perkebunan.

Dokumen Izin Prinsip (dan juga Izin Lingkungan) dalam konteks ini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah, karena ia dapat bermakna subjektif dan sangat politis. Sedangkan dokumen HGU berkaitan dengan aspek yang lebih objektif dan fisik (lahan) nyata. Hal tersebut merupakan gambaran dari banyak permasalahan yang muncul di Kab. Kutai Kartanegara, perusahaan sudah beroperasi dan melegitimasi aktivitas usahanya meski hanya berdasar Izin Prinsip dan Izin Lokasi (selanjutnya disebut IUP). Bahkan, pemahaman tersebut yang juga didistribusikan ke masyarakat lokal dan menyatakan mereka telah secara sah dan legal dapat beraktivitas. Setidaknya, muncul dua permasalahan utama oleh aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hanya memiliki IUP tanpa HGU:

1. Konflik dengan masyarakat lokal, hal ini dikarenakan perusahaan cenderung menganggap IUP sebagai "izin sah dan legal" untuk melakukan aktivitas usaha

perkebunan, padahal kejelasan dan pembebasan lahan merupakan salah satu aspek yang paling krusial. Karena lahan merupakan objek agraria yang kompleks yang berkaitan dengan aktor-aktor lainnya khususnya masyarakat lokal di dalamnya.

2. Hilangnya sumber pendapatan negara, karena kepemilikan HGU adalah basis utama pembayaran pajak oleh perusahaan terhadap negara. Luasnya kepemilikan lahan pihaknya swasta bahkan sempat menjadi pembahasan untuk penetapan pajak progresif di Kalimantan Timur, hal ini dikarenakan besarnya biaya *eksternalitas* dari aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Perizinan hanya berbasis IUP kerap menjadi alat "pembenaran" bagi perusahaan, mereka mereduksi fungsi perizinan dan memposisikannya secara pragmatis agar dapat selaras dengan tahapan bisnis. Hal tersebut pada dasarnya dapat diantisipasi, apabila Pasal 42 UU Perkebunan mensyaratkan aktivitas perkebunan baru dapat dilaksanakan apabila perusahaan memiliki HGU dan IUP, dan keduanya dipahami dalam kerangka yang integral dan berkaitan satu sama lainnya.

Terkait dengan retakan dalam prosedur birokrasi yang bersifat *total ilegal*, ternyata mayoritas juga masih berkaitan dengan aspek lahan, yakni HGU. Padahal, jika merujuk pada Pasal 12 UU Perkebunan, disebutkan bahwa apabila tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan adalah tanah hak ulayat masyarakat adat, maka pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat untuk memperoleh persetujuan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan musyawarah hampir tidak pernah dilakukan, meskipun dilakukan, umumnya hanya dilakukan secara terbatas.

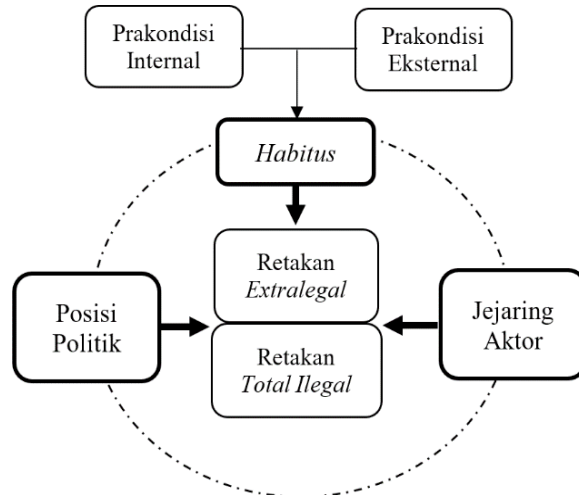
Persoalan selanjutnya muncul ketika "masyarakat" didefinisikan secara monolitik, seperti disebutkan oleh informan di BPN Kanwil Kab. Kutai Kartanegara, bahwa perusahaan selalu mengklaim telah menuntaskan persoalan tumpang tindih lahan dengan masyarakat. Namun, faktanya pihak swasta kerap mengambil jalan pintas dengan hanya memilih beberapa "perwakilan" dari masyarakat, dan masyarakat tersebut yang ditugaskan untuk mengumpulkan tanda tangan persetujuan. Sehingga, mereka tidak menemui langsung masyarakat, dan makna persetujuan direduksi menjadi sebatas komoditas tanda tangan. Seperti salah seorang informan AW (70 tahun), bahwa "*perusahaan hanya mendatangi orang (kantor) desa*". Pengabaian masyarakat, tidak adanya proses keterbukaan dan partisipatif (*Free, Prior and Informed Consent*) antara pihak perusahaan dengan masyarakat adalah ilegal dan berdampak fatal pada masyarakat secara politik, sosio-kultural hingga lingkungan. Masyarakat diposisikan kembali menjadi objek pembangunan yang terlepas dari simpul dan motor pembangunan itu sendiri.

Praktik *total ilegal* lainnya yang muncul adalah ketika perusahaan bahkan mengabaikan dampak-dampak lingkungan yang terjadi. Selain “Izin Lokasi” yang direduksi, *assesment* dalam “Izin Lingkungan” juga sifatnya menjadi sangat pragmatis. Informan K yang bekerja di Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kab. Kutai Kartanegara menyebutkan bahwa “*Izin lingkungan (Perkebunan) Sawit itu hanya formalitas*”. Setelah dielaborasi, hal tersebut ditunjukkan dengan:

1. Banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar (terlebih awal era pasca reformasi), ironinya proses pembakaran ini juga melibatkan masyarakat (mereka dipekerjakan, bahkan kerap kali berasal dari wilayah yang berbeda). Hal ini jelas ilegal dikarenakan UU Perkebunan dan Permentan Izin Perkebunan menuntut perusahaan untuk tidak melakukan pembukaan lahan hutan dengan cara dibakar (Pasal 21). Namun fakta di lapangan menunjukkan proses pembukaan dengan cara pembakaran memang terjadi, dan luasan lahan yang dibakar menurut informan bukanlah skala luasan lahan masyarakat, sehingga dapat dipastikan itu dilakukan oleh perusahaan. Pembukaan lahan dengan cara dibakar menurut informan menghemat biaya pembukaan lahan hampir lebih dari 50%.
2. Banyaknya perusahaan perkebunan sawit yang sama sekali tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses AMDAL. Hal ini juga berkaitan dengan yang disebut informan sebagai “*konsultan abal-abal*” (palsu) yang banyak bermunculan di Provinsi Kalimantan Timur. Konsultan tersebut semakin marak berkembang pada pasca reformasi, dan bahkan menurut informan banyak orang dari dalam pemerintahan yang menyadari “*konsultan abal-abal*” ini namun terus membiarkannya. Padahal, pada Pasal 9 dalam PP Izin Lingkungan, disebutkan dalam proses harus objektif dan juga mengikutsertakan masyarakat, khususnya mereka yang terkena dampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Hal ini kembali menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan masyarakat dalam proses perizinan, dan memposisikan mereka sebagai pihak yang terpisah dalam konteks pembangunan.

Berdasarkan poin-poin tersebut, diketahui bahwa Izin Lingkungan yang diabaikan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, melainkan juga sosial kompleks. Karena AMDAL merupakan sebuah kesatuan dokumen yang juga menimbang bagaimana masyarakat terdampak oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. UU Perkebunan (Pasal 12) seharusnya tidak sebatas menyebutkan perusahaan harus memperoleh “persetujuan”, namun diperlukan konsep yang lebih luas ketika berhadapan dengan masyarakat, yakni “penghormatan” dan “perlindungan”.

Berdasarkan dinamika dalam arena perizinan ilegal, dapat dipahami bahwa proses-proses tersebut dapat eksis karena melibatkan suatu jejaring aktor dengan kuasa yang berbeda-beda. Meski demikian, mereka berada dalam suatu sirkulasi yang saling berhubungan dan mengarah pada membenaran proses-proses izin yang ilegal.



Gambar 6. Sirkulasi Pembentukan dalam Praktik Perizinan Ilegal

Gambar 6 menunjukkan bahwa praktik perizinan ilegal berada dalam satu siklus yang saling berkaitan, dan *habitus* salah satu pendorong utamanya. Hal tersebut dikarenakan *habitus* adalah suatu “kontruksi sosial” sekaligus bentuk “pembelajaran sosial” (*social learning*) dari praktik perizinan ilegal yang terdahulu yang telah dijalankan selama rezim Orde Baru. *Habitus* selanjutnya berkaitan dengan posisi politik, berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian peluang terjadinya penyimpangan memang cukup sistematis, dan seolah negara melalui lembaga-lembaga di dalamnya menjadi suatu unit koheren yang mampu menciptakan iklim suportif untuk praktik perizinan ilegal perkebunan kelapa sawit. Meski terdapat cukup banyak semangat reformasi dari lembaga-lembaga dan individu di dalamnya (khususnya di Kab. Kutai Kartanegara), namun korupsi dan penyelewangan mengakar yang disokong oleh elite-elite negara dan korporasi dikhawatirkan terus mereduksi semangat tersebut. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan bagaimana Bupati Kab. Kutai Kartanegara yang memimpin lebih dari enam tahun dan masih menjabat pada saat proses penelitian ini dilaksanakan, pada akhir Tahun 2017 ditangkap karena kasus korupsi dan gratifikasi terkait perizinan kelapa sawit. Sehingga, secara tidak langsung menunjukkan bagaimana praktik perizinan ilegal adalah begitu sistemik dan seolah struktural dan *top-down*. Ditangkapnya pimpinan tertinggi di Kab. Kutai Kartanegara tersebut juga menunjukkan bagaimana praktik-praktik perizinan ilegal tersebut adalah nyata terjadi dan berada dalam sirkulasi kekuasaan yang kompleks.

Oleh karenanya, “Izin Prinsip” yang mandatnya ada di Bupati, pada dasarnya tidak “prinsipal” sama sekali, penyebutan “Izin Prinsip” harus didekonstruksi karena izin tersebut merupakan proses dalam perizinan yang justru paling sarat politik, dikarenakan dokumen rekomendasi sifatnya dapat ditentukan oleh subjektivitas dan aspek kepentingan lainnya. Izin yang sifatnya prinsipal harusnya memiliki dasar objektivitas dan aspek ilmiah, seperti halnya HGU. Meski pada tataran implementasi juga memiliki celah, namun jika dapat dijalankan secara ideal hal tersebut sifatnya akan lebih “prinsipal”.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi pasca reformasi tetap tidak terlepas dari diskursus ekonomi politik yang terbangun sejak rezim Orde Baru. Diskursus kebijakan Orde Baru terkait dengan kelapa sawit pada tahap ini dapat dimaknai sebagai pragmatis berbasis ekonomi, semangat pembangunan dan modernisasi yang digaungkan menjadi sebatas motor untuk mempercepat investasi serta ekspansi industri-industri kelapa sawit. PIR yang berkembang pada 1980-an juga menjadi awal proses jejaring kerjasama antara negara, perusahaan hingga donor global untuk merestrukturisasi ekonomi nasional yang bertendensi pada pelanggaran investasi dan alih fungsi lahan. Hal tersebut selanjutnya membentuk pola, corak hingga *habitus* yang determinan dalam menjustifikasi konsep “perizinan” dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam. *Habitus* tersebut melingkupi aspek pemahaman bahwa ‘investor’ merupakan prioritas utama dalam pembangunan dan segala tindakannya dapat dibenarkan. Hal tersebut juga menjadi alasan proses “suksesi” lahan antara eks-HPH dengan perkebunan kelapa sawit di Kab. Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan cepat. *Habitus* tersebut juga menciptakan prakondisi yang kelak melanggengkan cara-cara ilegal dalam memperoleh izin perkebunan kelapa sawit. Cara-cara yang baik bersifat *extralegal* maupun *total ilegal* tersebut, seluruhnya mengarah pada upaya reduksionis hingga manipulatif terhadap pemahaman peraturan/perundangan terkait perkebunan kelapa sawit. Situasi tersebut berdampak pada masyarakat yang semakin marjinal serta krisis ekologi yang berkepanjangan, karena aktivitasnya didasarkan pada suatu dokumen yang bahkan tidak faktual dan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arce, A. (2003). Re-approaching social development: a field of action between social life and policy processes. *International Development*, 15, (7), 845-861. doi: <https://doi.org/10.1002/jid.1039>
- Asiyanbi, AP. (2016). A political ecology of REDD+: Property rights, militarised protectionism, and carbonised exclusion in Cross River. *Geoforum*, 10, (77), 146-156. doi: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.10.016>
- Barbier, EB, Bockstael, N, Burgess, JC, Strand I. (1995). The linkages between the timber trade and tropical deforestation – Indonesia. *The World Economy*, 18, (3). 411-442. doi:10.1111/j.1467-9701.1995.tb00222.x
- Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik kelapa sawit Indonesia 2015. Jakarta: BPS
- Chamim, M, Irawanto, DS, Pareanom, YA, Hae, Z, Budiman, I. (2012). Raja limbung, seabad perjalanan sawit di Indonesia. Jakarta: INSIST Press
- Corson, C. (2011). Territorialization, enclosure and neoliberalism: non-state influence in struggles over Madagascar's forests. *Peasant Studies*, 38, (4), 703-726. doi: <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607696>
- Ellis, F & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s-2000s. *Dev Policy Review*. 19, (4), 437-448. doi: 10.1111/1467-7679.00143
- Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2015). Potensi Daerah Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur: Dinas Perkebunan (DISBUN)
- Gatto, M, Wollni, M, Qaim, M. (2015). Oil palm boom and land-use dynamics in Indonesia: The role of policies and socioeconomic factors. *Land Use Policy*, 5, (46), 292-303. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.03.001
- Koh, LP & Wilcove, DS. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity?. *Conservation Letters*, 1, (2), 60-64. doi:10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x
- Li, TM. (2012). The will to improve: Perencanaan, kekuasaan dan pembangunan. Jakarta: Marjin Kiri
- Marx, K. 1994. Contribution to the critique of political economy. New York: Intl. Publishers
- McCarthy, J & Cramb, RA. (2009). Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers. *Geographical Journal*, 175, (2), 112-123. doi:10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x
- McCarthy, JF, Gillespie, P, Zen, Z. (2012). Swimming upstream: local Indonesian production networks in “globalized” palm oil production. *World Development*, 40, (3), 555-569. doi: 10.1016/j.worlddev.2011.07.012

- McLeod, RH. (2000). Soeharto's Indonesia: A better class of corruption. *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform*, 7, (2), 99-112. www.jstor.org/stable/43199068
- Parr, A. (2012). The wrath of capital: neoliberalism and climate change politics. New York: Columbia University Press
- Peluso, NL & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Peasant Studies*, 38, (4), 667-681. doi:10.1080/03066150.2011.607692
- Riggs, RA, Sayer, J, Margules, C, Boedhihartono, AK, Langston, D, Sutanto, H. 2016. Forest tenure and conflict in Indonesia: Contested rights in Rempek Village, Lombok. *Land Use Policy*, 7, (57), 241-249. doi: <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.06.002>
- Robison, R. (1978). Toward a class analysis of the Indonesian military bureaucratic state. *Indonesia*, 2, (25), 17-39. doi:10.2307/3350965
- Wicke, B, Sikkema, R, Dornburg, V, Faaij, A. 2011. Exploring land use changes and the role of palm oil production in Indonesia and Malaysia. *Land Use Policy*, 28, (1), 193-206. doi: <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.06.001>

THE ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTIC IMPACTS ON CHILD EDUCATION IN RURAL HOUSEHOLDS

Herdiyanti, dan M. Faisal Akbar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Balunijuk, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Email: vhiie_dyan@yahoo.co.id

ABSTRACT. The study titled Impact Analysis Characteristics of domestic socio-economic and child education in households in South Bangka district, this refers to the prestigious University of Bangka Belitung with the theme empowerment and strengthening Local community modalities, especially on the topic of increasing public participation on education in Bangka Belitung. The main challenge of the labor market in Bangka Belitung is the fulfillment of a more competent workforce, especially in the formal sector. This research is expected to give a real picture of the main condition causing low participation of schools in several villages in South Bangka from the side of the household. This research uses an Ordinary method of Least Square research that explains the influence of the characteristics of socio-economic households towards child education is found that the rate of household income precisely does not affect the long School children. The results showed that the age of the household head and the ratio of household dependencies had a positive influence on child education. This is in connection with work that is usually managed informally on households living in rural areas. The number of dependent households (14 to 64 years) is not going to work when the number of households in the product family is quite a lot.

Key words: Children's education; household socio-economic.

ANALISIS DAMPAK KARAKTERISTIK SOSIAL-EKONOMI RUMAH TANGGA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK PADA RUMAH TANGGA PERDESAAN

ABSTRAK. Penelitian yang berjudul Analisis Dampak karakteristik Sosial-Ekonomi RumahTangga Terhadap Pendidikan Anak Pada RumahTangga Perdesaan Kabupaten Bangka Selatan ini mengacu terhadap restra Universitas Bangka Belitung dengan tema pemberdayaan dan penguatan modalitas masyarakat local khususnya pada topic peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di Bangka Belitung. Tantangan utama pasar tenaga kerja di Bangka Belitung adalah pemenuhan angkatan kerja yang lebih kompeten khususnya pada sektor formal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi utama penyebab rendahnya partisipasi sekolah di beberapa desa di Bangka Selatan dari sisi rumahTangga. Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* penelitian yang menjelaskan pengaruh Karakteristik social ekonomi rumahTangga terhadap Pendidikan anak ditemukan bahwa tingkat pendapatan rumahTangga justru tidak memberikan pengaruh terhadap lama anak bersekolah. Hasil penelitian menunjukan bahwa umur kepala rumahTangga serta rasio dependensi rumahTangga memiliki pengaruh positif terhadap Pendidikan anak. Hal ini sehubungan dengan pekerjaan yang biasanya diurusi secara informal pada rumahTangga yang tinggal di perdesaan. Jumlah anggota rumahTangga yang dependen (14 hingga 64 tahun) jelas tidak akan ikut bekerja apabila jumlah anggota rumahTangga berumur produktifnya cukup banyak.

Kata Kunci: Pendidikan Anak; Sosial-Ekonomi RumahTangga

INTRODUCTION

Today, education in Bangka Belitung Islands Province is experiencing socio-economic challenges especially in the era of post-mining sector transition to agriculture, fisheries and tourism sectors. Hence, Local government has developed new economic activities to improve people welfare to overcome the problem.

Therefore, the Government contribution is necessary to meet the future of the labor force of Bangka Belitung after the post-tin. Character development and education are crucial in building community skills in the 21st century especially in Innovation, creativity, problem-solving and communication skills.

There has been a very high gap, especially from the labor supply and the demand for labor in Bangka Belitung. Bangka Belitung Society is dominated by unconventional miners and farmers who certainly do not have skills in the

tourism sector whose value of entry investment is quite large in the last 5 years. Therefore, in answering the needs of the industry is needed some supporting factors so that the investment in the service sector is fulfilled so that the workforce can be absorbed properly. The development of technology and the very fast business world need to be anticipated by the curriculum and methods of education in Indonesia. The change should be adopted in the curriculum of SMK teaching and higher education.

Education is one of the areas that can be a medium and long term solution for the challenges that Bangka Belitung has experienced today. Where to develop the world of education, in the next few years is expected to present a skilled workforce and suitable to meet the needs of the developing industry in the Bangka Belitung region. But the next challenge is how the government increased school participation in areas where the school participation rate was very low due to social and economic factors in

its household. The research is about to see more about the impact of the condition of social-economic household characteristics of children's school participation.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2003 chapters, VI of article 6 of the national education system is that every citizen of the age of seven to fifteen years must follow the primary education. It is one form of business in the community that is with the compulsory program of learning nine years from Elementary School (SD) to Junior High School (SMP). Parents as actors who play an important role in the education of his son should give a good education to his son. This condition is stated in the CONSTITUTION of RI No. 20 the year 2003 about National education System Chapter IV of article 7 paragraph (2) "Parents of children learning is obliged to give elementary education to their children". According to (Ahmadi, 2009), Parents are the smallest units that are one small group in the community. Parents are social institutions in charge of embedding values and norms to their children, making them a good and excellent person in society and education. Note the following graph.

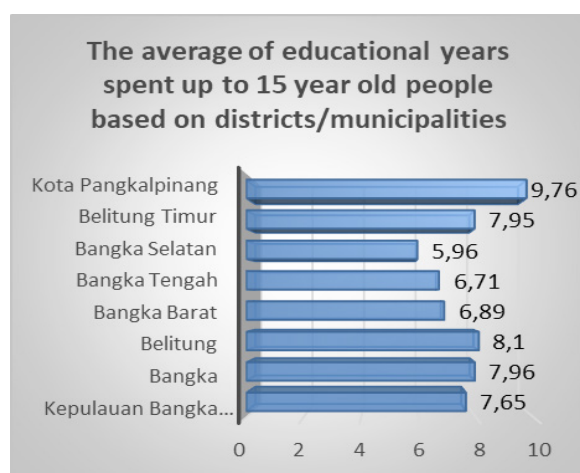


Figure 1. The average of educational years spent up to 15 year old people based on districts/municipalities

Source: Data Susenas BPS 2016

Data indicates that the region of South Bangka is the area with the average school population 15 years and above the least. This can be caused by various factors such as social factors in which the field of employment, especially in rural areas, is still very minimal, especially the formal sector so that people are not motivated to attend school. Furthermore, the high number of early marriage and other socio-economic factors.

This research uses primary data on a household level. 50 households will be surveyed in rural South Bangka Regency consisting of 5 villages namely Pangkalan Batu Village, Rias, Bikang, Simpang Rimba and Ranggung. The Data will be processed using a quantitative approach,

especially using the ordinary least square method. Quantitative research methods are one of the types of research whose specifics are systematic, well planned and structured From the beginning to the design of its research. (Gujarati, 2004) explains that quantitative research can be interpreted as a research method based on positivism philosophy, used to examine a specific population with random sampling and Able to describe more valid and objective research objectives based on the average sample data in a population.

Some previous studies have addressed the issue of the impact of household characteristics on child education. (Nguyen & Purnamasari, 2011; Parinduri, 2011). Discussed the issue of how migrant women and men and remittance in Indonesia are affecting children's educational conditions in their household and child labor offerings. The results of the study explained that remittance and female migrants caused a tendency to reduce the supply of child labor, but this did not make an increase in the quality of education that the abandoned child has traveled.

Unlike previous research, other factors may affect the level of education of children in a household such as social factors. As we know that other conditions can affect a child's education such as early marriage, the choice of working in the traditional sector (agriculture/mining), etc. This is expected to provide new information about the causes of low average education in rural South Bangka district.

This research refers to the Renstra of Bangka Belitung University on the theme of empowerment and strengthening of local community's modalities, especially on the topic of increasing public participation in education in Bangka Belitung. It is noted that the main challenge of the labor market in Bangka Belitung is to fulfill a more competent workforce, especially in the formal sector. Therefore, this research is expected to give a real picture of the main condition causing low participation of schools in South Bangka from the household side.

1. Socio-economic conditions

Economic factors usually relate to the ability of families in obtaining income (Wijayanti, 2013). The socio-economic state of every household varies and has its level, there is a high, moderate, low-economic social condition. Socio-economic According to (Abdulsyani, 1994) is the standing or position of a person in a human group determined by the type of economic activity, income, education level, type of residence, and Office in the organization, while according to (Soekanto, 2012) Social economics is the position of a person in society relating to others in the sense of the Environment of the association, its achievements, and its rights and obligations in its relationship with resources. Based on some of the above opinions, the understanding of

the social-economic situation in the research of In is the position or position of a person in the community relating to the level of education, the income level of wealth or Facilities and type of residence. While according to of Kornita and Yusbar (2011) hat the characteristics of poor households can be reviewed from economic aspects such as income levels and livelihoods while social aspects can be reviewed from age, level of education, Work, the number of family members working, health, ethnicity, facilities and home conditions. Work is everything that a person does in order to fulfill the needs of daily life (Fadila, 2013).

2. Factors that determine the state of socio-economic.

A. Level of education

According to LAW RI No. 20 the year 2003 article 1, basically education level is the stage of education that is set based on the level of student progression, objectives to be achieved, and skills developed. Education under LAW No. 20 of 2003 on the system. Education is the activity and effort to enhance personality with the path of building its potential, namely Rokhani (think, copyright, taste, and conscience) and physical (five senses and Skills). According to LAW RI No. 20 of 2003 Article 3 education aims to “educate the life of the nation and develop the human beings of Indonesia, namely human beings who have faith and fear of the Almighty God and the virtuous character, have knowledge and skills, physical and spiritual health, a steady personality and responsible society and nationality “. To achieve that goal, education is organized through school education Pathways (formal education) and the path of outside school education (non-formal education). Education is guidance in the lives of children. The meaning of education is to lead all the natural power that is in the children so that they as human beings and as members of the community can achieve the salvation and happiness that highest. In some sense above, it could be concluded that education is an effort that is done consciously and purposely to change human behavior, both individually and in groups to immature human beings through teaching efforts and training. Therefore, it is interesting to be researched by researchers regarding education that conceptually not too much different from the previous discussion but here researchers want to examine something different that the age level of one May affect a child's level of education.

B. Education level

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 20 the year 2003 on National Education system

Chapter VI article 14-19, education level in Indonesia is as follows:

1) Basic education

Primary education is the most basic level of education in Indonesia that underlies secondary education children aged 7 – 15 years are required to attend basic education. The basic education form is elementary school (SD/MI) and SMP/MTs.

2) Secondary Education

Secondary education is an advanced level of primary education. Secondary education is held for 3 years and consists of public and vocational High School (SMK)

3) Higher Education

Higher education is a level of education after secondary education that includes diploma, undergraduate, magister, specialist, and doctoral education programs organized by the College. Higher education is organized to prepare learners to be members of the community who have academic or professional skills that can apply, develop, or create science, technology or the arts. Iskandar's (2007) research results explained that the level of education affects the opportunity for a person to choose the type of work to meet his or her life needs.

C. Revenue

Income is the sum of all income of family heads and other family members embodied in the form of money and goods. Income is the most important thing in life, especially households to fulfill the necessities of life, especially food needs (Aminah, 2013). According to its type, the Central Bureau of Statistics distinguishes revenue into two:

1) income in the form of goods.

2) income in the form of money.

The needs and desires are not limited in number, only those needs and desires are limited to the amount of income received by a person. Income received by the community is certainly different from one another, this is due to the difference in the type of work it does. The difference in the work is motivated by the level of education, skill, and experience in working. The level of welfare indicators in society can be measured by the revenues it receives. The improvement of living standards of society can be described from the increase in real income per capita results, while the living standards are reflected in the levels and patterns of consumption that include food, settlement, health, and education to maintain degrees Man reasonably. Income is an outcome received by a person or household

from attempting or working. Types of people of various kinds, such as farming, fishermen, livestock, labor, and trade and also work on the government and private sectors.

Theoretical framework

Rational choice theory is a theory that explains where individuals can choose actions that can maximize their benefits or that can satisfy their desires and needs. Often the majority of other disciplines consider rational choice theories to be rooted in economic sciences, but in the development of this theory can be used to describe other social phenomena that occur in various disciplines. Coleman's Rational choice theory is evident in its fundamental notion that individual actions lead to a purpose and that purpose is an action determined by value or preference (optional). Coleman stated that it needed a precise concept of rational actors coming from economics that saw actors choose actions that could maximize their usability or wishes and needs. There are two main elements in Coleman's theory, actors as well as resources. Resources are any potential that exists or ever has. These resources can be natural resources, namely the resources that have been provided or the natural potential owned and also the human resources, that is the potential that exists in a person. While the actor is someone who acts. In this case, it is an individual who can utilize the good resource of actors. Actors are considered to be individuals who have the goal, actors also have a choice of basic value that actors use to determine the choice is to use a deep consideration based on consciousness, besides, actors also have Force as an effort to determine the choices and actions that he desires.

While the resource is where the actor has control and has a certain interest, the resource is also as something that can be controlled by the actor (Coleman & Coleman, 2010).

Coleman also explained about the interaction between actors with resources to level social systems. The base of the social system is the act of two actors, in which each actor controls a resource that draws attention to the other. Actors always have a goal, and each aims to maximize the appearance of its importance that characterizes each other with the actors' actions. The research seeks to use rational choice theory in analyzing this research. The theory chosen by the research is considered relevant to be used in analyzing the impact analysis of the characteristics of domestic socio-child Education in rural households in the South Bangka district. Coleman has a fundamental idea of the orientation of a person's rational choice that "people will act deliberately to make a goal, it is formed by values or choices". Individuals or actors will take measures to be achieved in order to maximize benefits and benefit for the fulfillment of their needs. Therefore, there

are two elements that must be understood in Coleman's theory of rational choice i.e. actor and resource. The resource will be determined by the actor as the driving change in determining rational choices. Given the focus on actors and resources, Coleman explains that he is as a methodological individualist. Coleman received the idea of the emergence that these ideas are from individual internal factors but he also focuses not only on the internal factor of the system, these factors are not necessarily individual actions and orientation. As a rational choice theorist, Coleman started with the individual and the idea that all rights and resources exist at this level. The interests and needs of an individual determines the way to reach the goals.

METHODS

This research is conducted in Batu village and village, Simpang Rimba, Ranggung, Bikang, and Rias Regency of South Bangka Belitung Province with the scope of research on the community of each village and device village. The variables measured in this study include:

1. Household head Income
2. Highest level of education completed by the child
3. Age of Household head
4. Last education of the head of the household
5. Dependency ratio.

1. Research draft

This research is done by quantitative methods by using cross-section data at the household level. Data processing using quantitative methods will result in a more accurate, valid and objective analysis. This research was conducted in several rural areas in the South Bangka district by conducting surveys to 50 households scattered in several villages considering the low level of child education in the South Bangka district.

2. Data Collection and analysis techniques

This research uses primary data at the household level. There are 50 households in the survey on the condition of Social-economic with the survey method. The main criteria of the household that will be used as the object of research is a family that lives in one roof and consists of 1 head of household and at least 1 child.

The analysis will be conducted using the Ordinary method of least square in testing the hypothesis that income in households positively affects the level of child education. After that, the study will conduct a special interview against the household that one of his children experienced dropouts to get a deeper outcome. Until now there are many children's school dropouts due to conditions other than the economy such as early marriage, prefer to work, no longer interested in school and others.

3. Operationalization variables

Here is the operational definition of variables in this study: children's education

1. Education is the learning of knowledge, skills, and habits of a group of people passed down from one generation to another through teaching, training, or research. Education often happens under the guidance of others, but it is also self-taught. In this study the level of education is measured systematically by the existing conditions in Indonesia so that the level of education measured is to use school level such as graduation, JUNIOR graduated, graduating HIGH school and so on.
2. Income, household income is measured based on revenue from work, income from the business owned (net profit income) and non-labor income obtained in the last month by all members of the household.
3. Long education head of household, long education of the head of the household shows the capabilities of the household head in education. The length of education was demonstrated by calculating the length of school based on the last class achieved in the schools. The last education can be defined as the length of education adjusted to the level of the school that is addressed so that the household members who finished elementary school can be defined as having a period of 6 years of education. The age of the household head, the age of the householder shows the ability of the head of household in work and investing. The age of the household head also affects the productivity ability of the head of the household in production so that the ability to accumulate assets becomes higher. For reasons that have been displayed, the age of household head should be controlled on the research model. The age of each household member can be asked directly with the parties concerned.

4. Dependency ratio

The ratio of dependency shows how many household members have not or are no longer able to perform production activities with how much it is still productive and not to increase household income. The ratio of dependencies is used as one of the factors that influence the household's ability to accumulate assets. The ratio of dependency is calculated by dividing the total of 0-14-year-old households, members of households aged > 65 years with a total of 15-65-year-old households.

5. Data Analysis Methods

OLS regression method.

The data structure of this cross-section will be addressed using the OLS method where this method will test the hypothesis of the relationship between domestic socio-

economic conditions to the level of child education in rural households. After testing the hypothesis using OLS then to overcome the possibility of bias on the feeding parameters will be conducted also test classic assumption to the resulting parameters are valid and consistent.

To test the hypothesis the empirical model to be tested is as follows:

$$Educ_i = \beta_0 + \beta_1 Inc_t + \beta_2 Age_{it} + \beta_3 HHeduc_t + \beta_4 DR_{it} + \beta_5 e_{it}$$

Ket : i = Household

Inc_i = Economic conditions (measured using revenue levels)

Age_i = Age of head of household

$HHeduc_i$ = Long School head household

DR_i = Dependency ratio

e_{it} = Error

RESULTS AND DISCUSSION

This research uses survey data on micro-level households in 5 villages, namely Pangkalan Batu, Rias, Ranggung, Bikang and Simpang Rimba in the South Bangka district. The research uses 50 of the following household survey data is an overview of the characteristics of the 50 respondents that have been surveyed:

Table 1. Respondents overview

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Pendapatan	50	2626000	1016358	1000000	5000000
UmurKK	50	41.48	9.017.534	27	67
Yearsoffsc-g	50	7.68	3.099.967	0	15

Data sources: processing of research data

Table 1 explains that the average of respondents has a medium category income of Rp 2,626,000.00. The maximum revenue of respondents is Rp. 1.000.000 and the highest is Rp. 5.000.000. The average age of household heads in the five villages is 41 years with the lowest value is 27 years and the highest 67 years. While the old level of school from rural children in Bangka Selatan is 7.68 years.

1. Discussion on the results of the influence of domestic socio-economic characteristics of children's education

The study uses 5-village survey data that has a Cross Section data structure. In measuring the social-economic characteristics of households to children's education research using regression methods. The regression method is done in seeing how much the responsibility of a variable data proxy is independent of the dependent variable. The oldest child school year is a dependent variable proxy

while the household characteristics used by the event are, income, age, parental education and dependency ratio. Below is the result of regression analysis as follows:

Table 2. Multiple regression analysis Results

Number of Obs	47
F (4,42)	4.96
Prob > F	0.0023
R-Square	0.3206
Adj R-Square	0.255
Root MSE	2.3691

Data sources: processing of research data

Source	Ss	df	Ms
Model	111.24	4	27.812
Residual	235.73	42	5.612
Total	346.97	46	7.543

Data sources: processing of research data

	coef	Std Err	t
Log Y	-0.763	1.106	-0.07
Dependency Ratio	-4.051	2.1122	0.062
Umur Kepala Rumah Tangga	0.118	0.53	0.03
Pendidikan Kepala Rumah tangga	0.462	0.4702	0.331
Cons	4.39145	15.649	0.78

Data sources: processing of research data

Results show that the overall model is a valid model with a significance level $\alpha < 0.05$ (Prob > F). The entire independent variable can describe the dependent variable by 32.06 percent. Model characteristics influence the characteristics of household socio-economic to child education is found that the rate of household income precisely does not affect the length of the child's school. This is because the revenue range of the rural community is not too wide. It is known that village communities have a lower income variation than the income level in the city community. In social conditions, it can also be influenced by various aspects such as facilities and infrastructure to support a low-income variation in the village community than the city community.

Further results show that the age of the household head has a positive influence on children's education. The increased lifespan of 1 year's head will increase children's education level for 0.11 years. This shows that the more mature a household will become increasingly mature in reviewing the interests of the education of children in the home. Based on the findings on the field 30 percent of household head as a farmer. It is known that older villagers have higher income and more time at home to take care of household problems so that they can better supervise education and child health problems.

Classical Asumption Test

Heterokedastis test

A heteroscedastic test is performed to see the consistency of the variance along the line of the relationship between independent and dependent variables. Variant values that are constant indicate the consistency of the relationship between the dependent and independent variables. Consider the following data:

Table 3. Heterokedastis Test

Breusch - Pagan/ Cook-weisberg Test For Heterokedasticity	
Ho : Constant	
Variables : Fitted Value of Years Of Schooling	
Chi2 (1)	1.51
Prob > Chi2	0.2198

Data sources: processing of research data

Prob value > 0.05 indicates that H0 is accepted so that it can be stated that the data does not experience Heterocedasticity because the variance is constant.

Multicollinearity Test

The multicollinearity test is one of the conditions for calculations using OLS which can be declared BLUE. Consider the following:

Table 4: Multicollinearity Test

Variable	VIF	1/VIF
Umur Kepala Rumah Tangga	1.84	0.543
Pendidikan Kepala Rumah Tangga	1.49	0.673
Dependency Ratio	1.48	0.675
Log Y	1.14	0.877
Mean VIF	1.49	

Data sources: processing of research data

The results show that each independent variable has no relationship with each other, so each independent variable gives a unique influence on the dependent variable. This is evidenced by the VIF value of each variable under the value of 5, with an average of 1.49.

Normality Test

Normality test's role is to see the distribution of data in a study. To ensure there are no data outliers so the regression results are fit. Consider the following:

Table 5: Normality Test

Skewness/Kurtosis Test For Normality			
Variable	Obs	Pr(Skew)	Pr(kurt)
Ay Residuals	50	0.8111	0.6287

Data sources: processing of research data

Not reject null Hypothesis of normality, we can conclude that the data has a normal distribution using the Skewness Kurtosis test. This is evidenced by the value of Prob > Chi2 which is greater than α (0.05).

The next result explains that the factors affecting child education are the ratio of household dependencies. It is noted that the growing number of non-productive household members will affect the child's education level. The rural issue of child labor is still quite high where the child is often involved to help work both in mining and plantation activities. Therefore, the ratio of dependencies significantly affects the level of child education in a household. This condition is in line with the opinion of Zega (2013) that age is not always used as a reference in obtaining income.

The findings above if the sociological review can be explained that rational choices become an indicator that encourages success in the level of child education. When the level of head of household age has a significant influence on the development of children's education level with the thought process is a rational choice done by the parent or head of the house. Stairs affecting the child's education level or even vice versa. Rational choice is an action taken by people to achieve a goal that is considered rational or "a person who commits deliberate action to achieve a purpose, with which purpose it forms values or Options" (Coleman, 2010).

Hence an option can be said rational when the choice is taken with the intent to maximize its needs. The rational choice will result in certain consequences of attitude and action. A simple example, from findings in the field of child involvement in performing job activities such as doing mine and gardening activities, is also not detached from the rational choice either of the child's individual or parent or head. So that the work activity will affect the level of education. The purpose of the child to do this activity certainly has the objective of one of them to earn economic income in fulfilling the needs of his life. Besides, it can be concluded that actors do play a central role to act as does the parent or household head and also the working child.

Rational choice theory is a tool for logical thinking, rational thinking, in making a decision. Similarly, the head of the household or parents who choose to think about their children's education when they are older (non-productive) than young (productive) in the South Bangka community. This condition is one of the considerations made by parents so that their children get a decent education in living a more prosperous life through education gained. The dynamics of this life shows the actions taken by every head of household or parent of every five villages in South Bangka district is considered a rational choice to consider in the development of child education. The head of the household or parent considers that the higher level of child education can help or facilitate them to make a living with the help of their children. This dynamic is what actually makes two elements that Coleman put forward that in conducting rational actions one should consider

two elements namely actors and resources. The actor in this regard is assumed as a human being who has the purpose and intent of every action he does to accomplish the goal that he wants to achieve. The goal is realized depending on the level of choice that it has and what it does. This level of choice has a beneficial value for her life. In addition, the theory of rational choice does not matter every option desired by the actor, which is important is the fact that the action is carried out to achieve the objectives corresponding to the choice of actors level. In this case, the actor is assumed as a head of household whose age is in non-productive category while its power is the children who supported the economic value of the family through education. The physically productive age group has greater potential to produce goods and services compared to non-productive age (Putri, 2013). Education becomes important to the head of the household who has entered the age of non-productive, because it can relieve their burden in the study of the living. Education is a very important need for the fifth community of the village. Therefore, rational choices arise when the head of the household enters a non-productive age regarding the child's level of education.

CONCLUSION

The purpose of this research is to know and test the impact of the family's social-economic characteristics on children's level of education. In providing a solution to the district government of South Bangka, this research can provide a key picture of the low level of education of the population that is formal schooling.

Results showed that several factors in the family significantly influenced the level of child education in a household. As for some factors that influence the level is the ratio of dependency and the age of household head. While factors such as income, and education head of the household do not give a significant influence. It is known that the higher the head age of the household will increase as well as the children's school. It is in connection with the maturity level of the household in educating the child. It is noted that there are many weddings in the South Bangka district that are too early so that preparations regarding assets and child management in households are still not well organized. Therefore, children's education will be more secure in mature parents.

The results of the study also found that the ratio of dependencies gave a positive influence on children's schooling. This is in connection with work that is usually managed informally on households living in rural areas. The number of dependent households (14 to 64 years) is not going to work when the number of households in the product family is quite a lot. Therefore, the ratio factor

affects the length of school in a household. Therefore, the advice of building that can be produced in this research is how the district government can regulate the aspect of the population, especially the insight on early marriage and family planning to make child education in Bangka District The south will be better in the future.

REFERENCES

- Abdulsyani. (2016). *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Umum*. Rieka Cipta : Jakarta.
- Aminah, L. N. 2013. Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Desa Buana Bakti Lampung Timur. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Pertanian. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 65 p. *Jurnal Sylva Lestari*, 1, (1), 47–54.
- Coleman, J. S. (2010). Social Capital In The Creation Of Human Capital. *AJS*, 94, (Supplement) S95-S120.
- Fadila, A. C. (2013). Pengaruh karakteristik rumah tangga terhadap tingkat kemiskinan masyarakat sekitar mangrove. *Jurnal Sociologie*, 4, (3), 262–269.
- Gujarati, D. N. (2004). *BASIC ECONOMETRICS*. Jakarta: Erlangga.
- <http://babelpos.co/tantangan-pendidikan-abad-21/> dibuka pada 4 februari 2019
- <https://analisis.kontan.co.id/news/antisipasi-gap-tenaga-kerjadibuka> pada 4 februari 2019
- Iskandar. 2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga. *Jurnal Ekologi*. 1, (1): 133-141.
- Nguyen, T. & Purnamasari, R. (2011). *Impacts Of International Migration And Remittances On Child Outcomes And Labor Supply In Indonesia: How Does Gender Matter?*
- Parinduri, R. A. (2011). *Impact Of Remittances On Human Capital Development Of Children In Indonesian Household*. *Jurnal Economics* (January), 1–21.
- Putri, A.D., & Setiawina. (2013). Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia , Khususnya Yang Berkembang Saat Ini Selalu Mengacu Pada Pertumbuhan Ekonomi Yang Setinggi-Tingginya. Walaupun Dampak Dari Pertumbuhan Ekonomi Ini Secara Teori Mampu Mengurangi Angka Kemiskinan, Akan T. *E-Jurnal EP Unud*, 2, (4), 173–180.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kornita, S. E., (2011). Strategi Bertahan Hidup (Life Survival Strategy) Penduduk Miskin Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan. *Jurnal Ekonomi*, 19, 57–72.
- Wijayanti, I.L. (2013). Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. *Jurnal Agriekonomika*, 2, (2), 139–152.
- Zega, S.B., Purwoko, A. & Martial, T. (2013). Analisis Pengelolaan Agroforestry dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Peronema Forestry Science*, 2, (2), 152–162.

PETUNJUK PENULISAN:

Berikut ini adalah petunjuk penulisan dan template artikel yang telah direvisi dan mulai diberlakukan pada edisi penerbitan tahun 2019. Artikel di tulis tidak kurang dari 5000 kata dan tidak lebih dari 7000 kata

This is the revised author guidelines and article template of the Jurnal Sosiohumaniora Unpad that applied for publication year 2016 onwards. Article begins with title followed by authors' name, affiliation, and address, then abstract.

PENYERAHAN ARTIKEL:

Lakukan pendaftaran atau registrasi online pada alamat **<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/user/register>**. di bagian akhir form, pilih Daftar sebagai: penulis. Pada tahap selanjutnya, lakukan unggah file artikel dalam bentuk .doc (Ms.Word di utamakan office 2003-2007) di link [Penyerahan Naskah Baru]. Berilah Checklist pada isian Checklist naskah untuk menunjukkan bahwa naskah yang akan diunggah sudah mengikuti templet jurnal dan panduan penulisan. Jika sudah, klik Simpan dan lanjutkan. Di tahap ini klik Browse dan pilih file artikel yang akan dikirimkan untuk Jurnal Sosiohumaniora. Klik Unggah. Klik Simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, isi form yang ada hingga Penyerahan Selesai.

PANDUAN PENULIS

JUDUL ARTIKEL (TNR,12pt Bold)

Asep Sumaryana¹, Rd. Ahmad Buchari¹, Agus Nero² Ini namaku di sini² (TNR,10pt Bold)

¹Fakultas, Universitas/instansi, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363 (TNR, 10pt Normal)

²Afiliasiku ditulis di sini, Ini alamat afiliasiku dituliskan lengkap di sini

E-mail: xxxxx@email.com ; penulis2@email.com ; penulis3@email.com ; penulis3@email.com

ABSTRAK (10pt Bold)

Abstrak ditulis dalam satu paragraf, spasi tunggal, berisi maksimal 250 kata, dengan menggunakan huruf Times New Roman 10pt. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik dan benar. Abstrak harus memuat tujuan penelitian, metode (karakteristik subjek penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, metode pengumpulan data, serta analisis data), hasil penelitian, serta kesimpulan singkat. Jika dianggap perlu, pada bagian akhir paragraph dapat diberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Di bawah abstrak, sertakan lima kata kunci yang masing-masing dipisahkan dengan tanda titik koma (;). Pilihlah kata kunci yang memudahkan artikel Anda ditemukan mesin penjelajah.

Kata kunci; petunjuk penulisan; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

ENGLISH TITLE ARTICLES (TNR,12pt Bold)

ABSTRACT (10pt Bold)

Abstract should be written in a one-space paragraph, containing max 250 words, and written in Times New Roman 10 pt. Abstract should be written in Bahasa Indonesia and English. Abstract should include study aims, methods (participant characteristics, population, sample, sampling methods, data collection, and data analysis), findings, and conclusions. If necessary, a recommendation can be given at the end of paragraph. Following the abstract, provide five keywords separated with semicolon (;). Choose keywords carefully that enable search engine to locate your article.

Key words; author guidelines; jurnal sosiohumaniora; Unpad; template

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, penulis harus menuliskan tujuan penelitian di bagian akhir pendahuluan. Sebelum menuliskan tujuan penelitian, penulis harus menuliskan (secara berurutan) latar belakang, kajian literatur terdahulu (state of the art) sebagai dasar “gap analysis” pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, permasalahan penelitian, dan hipotesis (bila ada). Di dalam pendahuluan tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka yang terpisah dalam sub judul tersendiri sebagaimana di laporan penelitian, tetapi dituliskan terintegrasi dengan penjelasan mengenai latar belakang penelitian sehingga kajian literatur tersebut dapat menunjukkan state of the art- atau kebaruan temuan ilmiah.

METODE

Bagian metode berisi penjelasan tentang jenis penelitian/ desain penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jumlah subjek dan karakteristik subjek disertai data demografi (Azwar, 2007). Pada penelitian kuantitatif, jika penelitian menggunakan alat ukur tertentu, perlu disampaikan nama alat ukur, jumlah aitem, koefisien reliabilitas, serta metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, dijelaskan perspektif kualitatif yang digunakan, hingga metode pengambilan data dan analisisnya (Willig, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya secara ilmiah. Tuliskan temuan-temuan ilmiah (scientific finding) yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tetapi harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Temuan ilmiah yang dimaksud di sini adalah bukan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Temuan-temuan ilmiah tersebut harus dijelaskan secara saintifik meliputi: Apakah temuan ilmiah yang diperoleh? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa trend variabel seperti itu? Semua pertanyaan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah, tidak hanya deskriptif, dan ditunjang oleh data empiris yang memadai. Selain itu, harus dijelaskan juga perbandingannya dengan hasil-hasil para peneliti lain yang hampir sama topiknya. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab hipotesis dan/atau pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan.

Tabel (maksimal 6 tabel) dan Gambar (maksimal 6 gambar) diletakkan di dalam kelompok teks sesudah tabel atau gambar tersebut dirujuk. Setiap gambar harus diberi judul gambar di sebelah bawah gambar tersebut dan bernomor urut angka diikuti dengan judul gambar. Setiap tabel harus diberi judul tabel dan bernomor urut angka di sebelah atas tabel tersebut diikuti dengan sumber tabel.

Gambar-gambar harus dijamin dapat tercetak dengan jelas (ukuran font, resolusi dan ukuran garis harus yakin tercetak jelas berupa jpeg). kelompok Gambar

terdiri dari diagram/skema, tabel dan sebaiknya diletakkan sesuai kolom diantara kelompok teks atau jika terlalu besar diletakkan di bagian tengah halaman. Tabel tidak boleh mengandung garis-garis vertikal, sedangkan garis-garis horisontal diperbolehkan tetapi hanya yang penting-penting saja.

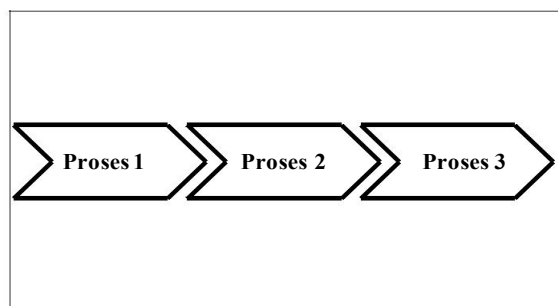
Tabel 1. Korelasi Antar Variabel

Aspek Dukungan Keluarga	Stres Kerja	
	<i>r</i>	<i>p</i>
Dukungan emosional	0,167	
Dukungan penghargaan	0,255	
Dukungan nasihat	0,285	
Dukungan instrument		

(Sumber:)

Keterangan: Tuliskan nilai *p* (bukan $p < 0,05$ atau $p < 0,001$) kecuali jika hasil analisisnya menunjukkan $p = 0,000$ maka harus dituliskan $p < 0,001$; atau jika hasilnya $p = 1,000$ maka harus dituliskan $p > 0,99$. Untuk memudahkan mengenali signifikansi, bisa ditambahkan tanda ** untuk nilai $p < 0,001$ dan * untuk nilai $p < 0,05$.

SIMPULAN



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Bagian Simpulan terdiri dari satu paragraf saja namun menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan penelitian. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH (bila ada)

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian atau donatur dan pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian yang kontribusinya tidak cukup signifikan untuk dimasukkan dalam kelompok penulis (authorship).

DAFTAR PUSTAKA

Semua referensi yang dikutip/disitasi dalam naskah artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal

dari sumber primer (jurnal ilmiah; minimum 80%) dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jumlah referensi yang disitasi minimal 15 (lima belas) sumber pustaka. Penulisan kutipan atau sitasi disarankan menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, grammarly, EndNote, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di Jurnal Sosiohumaniora Unpad adalah APA 6th Edition (American Psychological Association, 2010).

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Agustinus. W. (2016) Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Bitung di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. *Sosio-humaniora*, 18, 185-190.

Shintadewi, E.A & Sumartias S. (2017). Promosi Kesehatan Hiv-Aids dan Stigma Terhadap Penggunaan Narkoba Suntik (Penasun) di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 129-140.

Nugrahanto, W. & Adyawardhina, R. (2018). Demokrasi Dalam Sejarah Militer Indonesia; Kajian Histois Tentang Pemilihan Panglima Tentara Pertama Tahun 1945. *Sosiohumaniora*, 20, (2), 78-85.doi: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i1.14368>

Pustaka yang berupa judul buku:

Azwar, S. (2007). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lunsford, A., & Ede, L. (2009). Child education: Perspective on teaching activities. Carbondale: Illinois University Press.

Willig, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

Desiningrum, D. R. (2011). Future time perspective, goal orientation, and subjective well being in elderly. The Padjadjaran International Conference on Psychology (pp.17-23). Bandung, Indonesia: Faculty of Psychology, Padjadjaran University.

Pustaka yang berupa disertasi/tesis/skripsi:

Pratama, A. G. (2009). Kontribusi kesejahteraan-an subjektif pada religiusitas Islam, persepsi tentang penyakit, dan perilaku menjaga kesehatan diri dalam model perilaku memelihara kesehatan: Suatu upaya menemukan model perilaku meme-lihara kesehatan dengan taraf keccokan optimal pada penderita HIV+. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Pustaka yang berupa Handbook:

Albarracin, Johnson, & Zanna. (2005). The handbook of attitudes. New Jersey: Erlbaum.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington D.C.: American Psychological Association

INDEKS PENULIS

- | | |
|---|---|
| <p>A</p> <p>Aat Ruchiat Nugraha 46–54
 Agus Nero Sofyan 105–113
 Angelus Ewid 26–35
 Arya Hadi Dharmawan 114–124</p> <p>B</p> <p>Bayu Kharisma 88–95
 Benedhikta Kikky Vuspitasari 26–35
 Budiawati Supangkat Iskandar 8–16</p> <p>D</p> <p>Djatismika 36–45
 Dodi Tisna Amijaya 79–87</p> <p>E</p> <p>Elyta 55–63, 56–63, 60–63, 62–63, 63</p> <p>F</p> <p>Faris Rahmadian 114–124
 Ferry Hadiyanto 88–95</p> <p>G</p> <p>Ghefrin Abdurrahimdzan 88–95</p> <p>H</p> <p>Herdiyanti 125–132
 Herlan 55–63</p> | <p>I</p> <p>Iriana Bakti 46–54</p> <p>J</p> <p>Johan Iskandar 14–16</p> <p>L</p> <p>Luthfi Setiadiwibawa 79–87</p> <p>M</p> <p>M. Faisal Akbar 125–132
 Munadjat Wardoyo 72–78</p> <p>N</p> <p>Nining Harnani 79–87</p> <p>R</p> <p>Rahman Latif Alfian 8–16
 Rilla Oktoviami Zef 72–78
 Rilus A. Kinseng 114–124</p> <p>S</p> <p>Sugeng Riyanto 105–113
 Sutyaatie Soemitro Remi 88–95
 Suwandi Sumartias 46–54
 Syifa Wasilatul Fauziyah 105–113</p> <p>T</p> <p>Trie Damayanti 46–54</p> |
|---|---|

INDEKS SUBJEK

- | | |
|--|--|
| <p>A</p> <p>account officer 17–25, 18–25, 19–25, 20–25, 21–25, 22–25, 23–25
 analisis kebijakan 96–104
 autism 36–45, 37–45, 38–45, 39–45, 40–45, 41–45, 42–45, 43–45, 44–45</p> <p>B</p> <p>Babi 64–71, 69–71, 70–71, 71
 Banyadu 26–35, 27–35, 28–35, 29–35, 32–35, 33–35
 Border 55–63, 57–63, 58–63, 59–63, 60–63, 62–63</p> <p>C</p> <p>Children’s education 125–132
 coffee 8–16, 9–16, 10–16, 11–16, 12–16, 13–16, 14–16
 compounding 105–113, 106–113, 107–113, 108–113, 109–113, 110–113, 111–113, 112–113
 conversational maxim violation 36–45
 Culture Sustainability 72–78, 75–78, 78</p> <p>D</p> <p>daging sapi 96–104, 97–104, 98–104, 99–104, 100–104, 101–104, 102–104, 103–104
 Dayak 26–35, 29–35, 34–35
 Dayak 55–63, 56–63, 57–63, 58–63, 59–63, 60–63, 61–63, 62–63
 diskursus 114–124, 115–124, 120–124, 123–124
 diversity 8–16
 Domba 64–71, 65–71, 68–71, 69–71, 70–71, 71</p> <p>E</p> <p>ekologi politik 114–124
 Ekonomi 26–35, 34–35
 Entrepreneur Behavior 1–7
 Entrepreneur Technology 1–7</p> <p>F</p> <p>Fixed Mindset 1–7, 3–7, 4–7, 5–7, 6–7</p> <p>G</p> <p>Gawai 55–63, 56–63, 57–63, 58–63, 59–63, 60–63, 61–63, 62–63
 Grice’s cooperative principles 36–45, 37–45, 44–45</p> <p>H</p> <p>happiness 88–95, 89–95, 90–95, 91–95, 92–95, 93–95, 94–95, 95
 household socio-economic 125–132, 130–132</p> <p>I</p> <p>Identity construction 8–16
 IFLS 88–95, 90–95, 91–95
 Inovatif 79–87, 86–87, 87</p> <p>J</p> | <p>jargon 105–113, 106–113, 107–113, 108–113, 109–113, 110–113, 111–113, 112–113</p> <p>K</p> <p>Kambing 64–71, 65–71, 68–71, 70–71
 keamanan pangan 96–104, 98–104, 99–104, 102–104, 103–104
 Kearifan lokal 26–35, 27–35, 29–35
 kebijakan impor 96–104, 97–104, 101–104, 103–104
 kerjasama 46–54, 50–54, 53–54
 kohesivitas 46–54, 47–54, 48–54, 53–54
 kompepar 46–54, 47–54, 48–54, 50–54, 53–54
 komunikasi internal 46–54, 47–54, 48–54, 53–54
 Kreativitas 79–87, 85–87, 86–87</p> <p>L</p> <p>local knowledge 8–16, 9–16, 14–16</p> <p>M</p> <p>Metode Pembelajaran 79–87
 Mindset Growth 1–7
 morfologi 105–113, 106–113</p> <p>O</p> <p>Open Museum 72–78, 73–78, 74–78, 75–78, 77–78
 ordered logit 88–95, 91–95, 92–95, 93–95
 organizational commitment 17–25, 18–25, 19–25, 21–25, 22–25, 23–25</p> <p>P</p> <p>Palintang community 8–16, 9–16, 10–16, 12–16, 14–16
 pembagian tugas 46–54, 48–54, 52–54, 53–54
 Pembelajaran Kreatif 79–87, 85–87
 Perempuan 26–35, 33–35, 34–35
 perizinan kelapa sawit 114–124, 116–124
 proses kebijakan 114–124</p> <p>Q</p> <p>QWL 17–25, 18–25, 19–25, 21–25, 22–25, 23–25</p> <p>S</p> <p>sapi 96–104, 97–104, 98–104, 99–104, 100–104, 101–104, 102–104, 103–104, 104
 Sentra Pengembangan 64–71
 Social Capital 55–63, 59–63, 62–63, 63
 Sustainable Tourism 72–78</p> <p>T</p> <p>Ternak Kecil 64–71, 67–71
 turnover intention 17–25, 18–25, 19–25, 21–25, 22–25, 23–25</p> <p>W</p> <p>workhours 88–95</p> |
|--|--|

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Sosiohumaniora menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Kunto Sofianto, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
2. Prof. Dr. Ir. Yogi, MS. (Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB)
3. Dr. Ir. Marina Sulistyati, MS. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
4. Dr. Dra. R. Nunung Nurwati, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
5. Dr. Risna Resnawaty, MP. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
6. Dr. Rahman Mulyawan, Drs., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
7. Dr. Rudi Saprudin Darwis, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
8. Nur Syamsiyah, S.P., M.P. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
9. Dr. Ramadhan Pancasilawan, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)
10. Dr. Drs. Heru Nurasa, MA. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
11. Egi Arvian Firmansyah, SE., M.Si. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
12. Prof. Dr. Ir. Hj Yosini Deliana, MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
13. Prof. Dr. Ir. Nandan Limakrisna, MM., CQM., CMA. (Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta)
14. Endah Djuwendah, SP., MS. (Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran)
15. Dr. Dian Indira, M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
16. Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
17. Dr. Eva Tuckyta Sari Sujatna, S.S., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran)
18. Dr. Chandradewini, S.IP., M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran)
19. Dr. Ir. Hasan Hadiana, MS. (Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran)
20. Dr. Ekaning Krisnawati, SS., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
21. Dr. Ir. Suyanti Kasimin, M.Si. (Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala)
22. Miftahul Falah, S.S., M.Hum. (Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran)
23. Sunu Widiyanto, SE., M.Sc. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran)

Sebagai Mitra Bestari (*Peer Reviewer*) pada Jurnal Sosiohumaniora Volume 22, Nomor 1, Maret 2020. Atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Sosiohumaniora. Jurnal Sosiohumaniora Peringkat Akreditasi SINTA 2. Semoga kerjasama ini berjalan lebih baik untuk masa yang akan datang.

Pemimpin/Redaksi